BAGIAN PERTAMA

ESAI

1

Menjaga Komitmen

Akselerasi politik mulai menghangat bersamaan dengan penyelenggaraan sidang pleno DPR yang salah satu agendanya adalah perlu tidaknya Pansus Buloggate II dibentuk. Dari wacana yang berkembang terlihat nyata adanya dua kubu yang saling berhadapan yakni yang pro dan yang menolak pansus. Dikotomi kekuatan politik ini tidak hanya terjadi di dalam gedung DPR, akan tetapi juga mulai menguat di luar gedung dalam bentuk dukungan masa.

Adanya aksi masa rakyat terhadap fenomena ini menunjukkan betapa rakyat menaruh kepedulian yang tinggi terhadap masalah ini.

Tumbuhnya *public concern* seperti ini semestinya dapat disikapi sebagai upaya dukungan moral dan politik kepada anggota DPR, termasuk partai politik untuk menentukan sikap konsistensinya dalam menegakkan hukum dan pemberantasan KKN secara tuntas sebagaimana amanat reformasi. Akan tetapi, apabila gerakan massa yang terjadi lebih disebabkan oleh mobilisasi politik yang dilakukan untuk melakukan *show force*, maka yang terjadi justru sebaliknya, yakni mengebiri upaya penegakan hukum dan pemberantasan KKN.

Atas fenomena ini partai-partai politik dan fraksi-fraksi di DPR sudah semestinya dapat menangkap sinyal secara elegan,

sehingga dapat melahirkan keputusan yang benar-benar signifikan antara suara DPR dan konstituen yang diwakili.

Penyelesaian kasus Bulog II ini boleh dikatakan unik. Proses ini menggambarkan fenomena kehidupan sosial dan politik yang *sophisticated*. Sebagai simbolis-interaksionis berbagai persoalan yang tali-temali antara satu dengan yang lainnya. Melalui penyelesaian kasus ini akan dapat menjawab berbagai pertanyaan sekaligus dapat memberikan arah dan pemaknaan mengenai banyak hal.

Pertama, sejauh mana komitmen politik yang sekarang dimainkan oleh para politisi itu benar-benar telah menggunakan hati nurani dalam memperjuangkan tuntutan reformasi bagi tegaknya hukum dalam pembersihan aparat dari KKN. Dalam hal ini akan menyangkut komitmen bagi terwujudnya *law enforcement* dan *clean and good governance*.

Kedua, fenomena ini menggambarkan sejauh mana kekuatan pro-reformasi akan mampu memberikan warna terhadap usaha-usaha mengimplementasikan tuntutan reformasi bagi tegaknya hukum dan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Ketiga, fenomena ini merupakan indikator pentingnya dalam mengidentifikasi kekuatan lama yang masih tetap bercokol dalam lingkaran kekuasaan dan masih memberikan warna dalam menenukan keputusan-keputusan penting yang menyangkut pemberantasan KKN.

Keempat, fenomena ini menjadi alat pembuktian apakah supremasi hukum benar-benar dapat ditegakkan atas berbagai persoalan politik yang terjadi, atau justru sebaliknya hukum masih ter subordinasi oleh politik, sehingga persoalan-persoalan yang ada di wilayah hukum begitu mudahnya dapat diselesaikan melalui mekanisme politik.

Kelima, persoalan ini akan menjadi simbiolisme bagi komitmen partai politik dan pemerintah untuk menunjukkan kesungguhannya dalam menjalankan amanat rakyat. Kredibilitas mereka akan teruji dalam menentukan sikap terhadap persoalan ini.

Sebagaimana sudah kita pahami, hampir tiga tahun perjalanan pemerintah pascareformasi, komitmen penegakan hukum dan pemberantasan KKN belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Ada kecenderungan yang berkembang, karena sudah saking mengakarnya tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan, seolah-olah bukan menjadi beban lagi bagi pelakunya karena tindakan itu adalah hal yang biasa dilakukan bagi siapa pun yang memegang kekuasaan. Kecenderungan ini menjadikan mereka seakan-akan memiliki kekebalan baik mental, moral maupun hukum, karena siapa pun yang mencoba untuk menyentuh persoalan ini akan mendapatkan perlawanan kekuatan yang dimilikinya.

Kondisi ini sangat berbeda dengan upaya pemulihan ekonomi dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh beberapa negara tetangga seperti Filipina, Thailand dan Korea Selatan yang mengalami nasib hampir serupa dengan negara kita. Komitmen untuk melakukan reformasi total untuk mengatasi krisis yang terjadi, diawali dengan adanya pertobatan, pengakuan kesalahan dan adanya janji untuk tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari oleh para pelaku yang kebanyakan para elite penguasa pada masa itu.

Sikap bertobat sebagai pengakuan diri berbuat khilaf, telah memberikan ikhtiar kepada rakyat untuk menyadari kekhilafan itu bersamaan dengan itu diperlukan pembuktian hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua proses ini menggambarkan betapa akuntabilitas publik yang dilakukan telah memenuhi prasyarat etika, moralitas dan sekaligus penegakan hukum bagi semuanya.

Budaya penegakan etika dan hukum semacam ini tampaknya masih jauh dari harapan kita, bahkan baru memasuki stadium di angan-angan.

Terjadinya tarik-menarik kepentingan politik tentang perlu tidaknya Pansus *Buloggate II*, menunjukkan betapa para politisi kita masih melakukan kalkulasi politik terhadap dampak politik

yang ditimbulkan atas keputusan yang diambil ketimbang usaha memberikan suport bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui dukungan politik. Dukungan politik di tengah suasana *transitional justice* sangat penting artinya, sebagai bukti adanya *political will* dalam usaha mewujudkan negara hukum.

Pembentukan Pansus *Buloggate II* untuk mengusut dugaan keterlibatan Akbar dalam penggunaan dana Bulog, akan menjadi taruhan politik bagi partai-partai politik, sekaligus batu ujian bagi mereka dalam menentukan sikap dan komitmennya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai amanat GBHN. Di sinilah permainan politik mereka akan disorot oleh jutaan mata rakyat Indonesia sebagai konstituen politik yang patut dijadikan pertimbangan.

Ditahannya Rahardi Ramelan yang memiliki tali-temali terhadap kasus Bulog, tampaknya akan menjadi pertimbangan yang menyulitkan posisi Akbar untuk dapat berkelit dari persoalan hukum. Karena sebagaimana pernah dikatakan sebelumnya, Rahardi Ramelan merupakan saksi kunci yang memberatkan bagi keterlibatan Akbar.

Sebagaimana teori makan bubur panas, kita pun berharap strategi ini benar-benar dapat diterapkan secara tuntas. Jangan sampai strategi itu hanya dijadikan jastifikasi yang hanya memakan yang ada di pinggir, sehingga dengan alasan sudah kenyang, maka yang ada di tengah sebagai sumber proteinnya justru tidak tersentuh. Kalau ini terjadi dapatlah dibayangkan betapa kredibilitas penegakan hukum kita yang sudah disorot akan mengalami degradasi.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 8 Maret 2002

2

Gelagat di Balik Amandemen

Salah satu tugas MPR dalam mengemban amanat reformasi adalah mengamandemen UUD 1945. Tugas ini tidaklah ringan karena menyangkut nasib dan berkelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi 200 juta jiwa lebih rakyat Indonesia yang pluralistis.

Proses ini menyangkut sejauh mana hasil amandemen yang dilakukan dapat menghasilkan konstitusi yang benar-benar dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, kepastian dan pengayoman bagi anak bangsa.

Bagaimana pun, nilai-nilai ini merupakan dasar pertimbangan utama yang menjadi acuan bagi para *founding fathers* kita ketika merumuskan dasar konstitusi negara pada masa lalu yang kemudian menghasilkan UUD 1945. Karena sifatnya sangat singkat dan supel, maka sikap kenegarawan dalam mengintepretasikan semangat UUD 1945 dari pemimpin bangsa sangat dibutuhkan.

Belajar dari proses penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh empat presiden terdahulu dengan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, ternyata ada kesamaan problem makro kebangsaan yang

kerap muncul, yakni kuatnya dominasi eksekutif di semua level pemerintahan, terkebirinya kedaulatan rakyat, lemahnya supremasi hukum, merebaknya KKNK, belum terselesaikannya isu-isu HAM serta belum terejawantahkannya sistem ekonomi kerakyatan yang diyakini sebagai biang terjadinya disparitas sosial, politik dan ekonomi.

Kesadaran ini telah melahirkan komitmen untuk menyelesaikan akar persoalan pada dasar konstitusi negara dengan mengamandemen pasal-pasal yang dirasakan belum memberikan jaminan atas terpecahkannya problem makro tadi. Dasar komitmen yang menjadi *entry point* dalam proses amandemen bukanlah pada perubahan terhadap *preamble*, ataupun mengubah bentuk negara, akan tetapi mengurangi dan atau menambahkan serta melengkapi pasal-pasal yang dirasakan memberikan peluang bagi penyelewengan interpretasi pelaksanaan konstitusi yang kerap menimbulkan *abuse of power*.

Untuk menindaklanjuti komitmen itum MPR telah membentuk PAH MPR yang ditugasi untuk meramu postulat untuk mengatasi problem konstitusi ini. Saat ini mereka sedang gencar-gencarnya melakukan pembahasan. Diharapkan sebelum pemilu 2004 tugas-tugas yang dibebankan kepada panitia *ad hoc* sudah dapat dirampungkan, sehingga memasuki pemilu dan suksesi kepemimpinan nasional 2004, penataan kehidupan berbangsa dan bernegara sudah mengacu pada UUD hasil amandemen.

Menyimak proses dan hasil pembahasan tentang amandemen yang dilakukan dari tahap I sampai memasuki tahap IV, terasa sangat kental dengan kepentingan-kepentingan politik. Hal ini sangat wajar mengingat proses amandemen adalah proses politik yang dilakukan oleh instuasi politik yang terwadahi dalam lembaga MPR. Yang menjadi sangat janggal justru terletak pada adanya beberapa substansi dan hubungan antar pasal-pasal, pembahasan pasal-pasal hasil amandemen yang masih perlu dicermati. Begitupun dalam menempatkan agenda skala prioritas dalam membahas persoalan.

Hal ini penting untuk dilakukan agar keterbatasan waktu yang tersedia untuk mengamandemen konstitusi negara yang sedang mengalami problem kompleks ini dapat terumuskan secara tuntas satu demi satu. Apabila tidak, besar kemungkinan target waktu untuk menyelesaikan amandemen secara tuntas dan untuk menjawab berbagai persoalan yang terjadi justru terbengkalai. Begitupun kompleksitas persoalan dalam suasana kegamangan konstitusi, akan sangat mudah dimanfaatkan dan dibelokkan pada maksud-maksud lain dalam memenuhi kepentingan laten yang secara terus menerus diperjuangkan.

Tanda-tanda ke arah itu tidaklah sulit dinafikan. Munculnya Gerakan Nurani Parlemen, sikap hati-hati Fraksi PDI-P sebagai fraksi terbesar dalam menerima beberapa hal mengenai materi amandemen, seakan-akan mengendus adanya gelagat politik lain di balik amandemen itu. Paling tidak, sebagai *warning* jangan sampai amandemen yang dilakukan kebablasan.

Namun yang pasti, amandemen terhadap UUD 1945 utamanya berkenaan dengan batang tubuh atau pasal-pasal yang dianggap belum mencerminkan nilai kedaulatan rakyat, supremasi hukum, penegakan hak-hak asasi manusia serta tumbuhnya iklim *check and balances* dalam pengelolaan negara sudah seharusnya dilakukan.

Melalui upaya dekonstruksi atas kelemahan-kelemahan konstitusi dengan melakukan perubahan dan perbaikan diharapkan dapat menghasilkan sebuah konstitusi yang benar-benar dapat menerjemahkan semangat Pembukaan secara lebih komprehensif dan kompartabel di tengah dinamika sosial, politik dan ekonomi yang makin menajam.

Yang perlu diingatkan justru sikap pragmatis dari mereka yang ingin memanfaatkan kesempatan amandemen itu untuk menggolkan kepentingan-kepentingan politik, golongan dan atau pribadi dengan mengabaikan kepentingan bangsa. Semangat retrospektif untuk melakukan amandemen konstitusi ke arah yang lebih baik sudah sepatutnya didukung. Semangat kebangsaan dan persatuan sudah sepatutnya

menjadi dasar pijakan bersama. Di sinilah sikap kenegarawanan yang makin luntur itu akan teruji.

Amandemen mestinya dimaknai sebagai usaha memberikan rasa aman dan *demen*.

Aman yakni dengan memberikan kepastian hukum, terlindunginya hak-hak demokrasi dan kedaulatan rakyat, dijaminnya kebebasan serta penyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar dapat memberikan pengayoman, pelayanan kepada rakyat. *Demen* artinya dapat memberikan kebahagiaan, kesenangan dan kedamaian kepada seluruh rakyat Indonesia. Apabila terabaikan, sangatlah jelas kita tidak akan pernah memiliki konstitusi yang benar-benar komprehensif yang dapat menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945 atau bisa saja taruhannya adalah hilangnya semangat kebangsaan Indonesia yang sudah sekian lama terajut dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 28 April 2002

3

NKRI Harga Mati

Ada pergeseran pola konflik yang terjadi pasca perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Konflik yang awalnya bersifat diametral antara dua kekuatan adidaya, karena sudah tidak ada lawan, mulai bergeser ke arah simetris. Konflik yang terjadi bukan antarnegara, tetapi di dalam negara sendiri. *Singer*, seorang ahli konflik, mengemukakan bahwa secara makro telah terjadi pergeseran konflik internasional. Menurutnya, konflik yang terjadi sesungguhnya berkisar pada lima perangkat komposit, yakni: konflik teritorial, konflik ekonomi, konflik penciptaan negara bangsa, konflik ideologi dan konflik simpati kemanusiaan. Kecenderungan yang terjadi belakangan ini, dua konflik yang pertama mengalami penurunan, sedangkan tiga yang terakhir justru meningkat.

Fenomena ini tampaknya terjadi pula di negara kita. Konflik yang terjadi mulai bergerak ke arah sentrifugal. Gejala ini mulai tampak dengan terjadinya letupan-letupan yang bermuatan SARA di beberapa daerah. Perjuangan GAM di Aceh, keinginan untuk mendirikan Negara Papua merdeka serta yang paling kontemporer adalah pengibaran bendera Republik Maluku Selatan sebagai simbol pengingkaran terhadap NKRI.

Secara sosio-politis, gerakan separatisme ini lazim digambarkan sebagai usaha sekelompok orang berdasarkan *uniformitas* ras, suku berkeinginan untuk memisahkan diri dari

komunitas yang lebih besar yakni negara. Ada dua faktor utama sebagai pemicu. Pertama, lebih bersifat internal, yakni adanya sikap *neo-nasionalisme* yang sangat kental dari daerah, merasa sebagai ras yang unggul, sehingga tidak ada kerelaan, untuk diperintah oleh yang lainnya sebagai bangsa yang *uberman*.

Gejala ini bisa makin menguat apabila didukung oleh faktor yang kedua yakni terabaikannya rasa keadilan, pengayoman, serta hak aktualitas diri bagi masyarakat di daerah. Munculnya gejala ini merupakan fakta sosial yang mesti disikapi sebagai pertanda bahwa gerakan separatisme merupakan fungsi laten dan sekaligus manifes bagi bangsa majemuk seperti Indonesia ini.

Munculnya gejala separatisme di beberapa daerah di samping merupakan fenomena konflik yang bersifat historis, tampaknya lebih disebabkan oleh faktor struktural. Adanya pengingkaran terhadap komitmen berbangsa, baik yang dilakukan daerah terhadap pusat ataupun oleh pusat kepada daerah. Ada daerah karena merasa kaya, dengan kekayaan itu kalau dimanfaatkan untuk kepentingan daerah itu saja akan dengan cepat memakmurkan daerahnya, lalu memilih jalan pintas putus hubungan dengan pusat. Atau sebaliknya pusat, dengan bermodal kekuasaan melakukan eksploitasi terhadap daerah. Dengan alasan untuk berekspresi berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Problem struktural ini dimainkan melalui gaya sentralistik dikemas dalam politik SARA.

Kebijakan otonomi yang dilakukan pemerintah saat ini sesungguhnya dimaksudkan untuk mengakhiri drama politik sentralistik, dengan memberikan keleluasaan bagi daerah untuk membangun diri berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki secara lebih bertanggung jawab. Belajar dari kesalahan masa lalu, daerah diberikan ruang yang lebih luas untuk memahami karakteristik dan membangun dirinya secara lebih mandiri.

Namun, beberapa kasus dalam penerapan otonomi yang terjadi justru sebaliknya. Daerah memanfaatkan otonomi

sebagai peluang untuk memperkuat sifat *chauvinistic*-nya, dan lupa bahwa kita semua terikat pada komitmen NKRI. Maka tidak pelak lagi, kebijakan otonomi seolah-olah menjadi biang dari munculnya gejala separatisme, walaupun alasan itu tidak sepenuhnya salah.

Dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah jangan lagi bermain hanya di wilayah politis, dengan hanya mencari kambing hitam. Diperlukan sikap visioner dan tegas serta teguh memegang komitmen, misalnya NKRI adalah harga mati. Siapa pun dan dari mana pun datangnya keinginan untuk mengganggu keutuhan NKRI, maka alat negara hendaknya bertindak tegas tanpa kompromi. Dalam implementasinya, tentu dilakukan tidak dengan cara-cara membabibuta dan anti-kemanusiaan.

Pemerintah sudah semestinya sadar bahwa gejala ini merupakan antithesis dari ketertekanan dan ketidakadilan serta disharmoni hubungan pusat dan daerah yang terjadi bertahun-tahun. Ledakannya terjadi saat ini.

Sikap tegas dan teguh terhadap komitmen dimaksudkan sebagai usaha untuk merajut kembali integritas, solidaritas dan kebersamaan sebagai negara bangsa yang belakangan mulai rapuh. Bersamaan dengan itu, kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah mestinya ditempatkan sebagai *distribution of function* bukan *distribution of power*. Menempatkan otonomi sebagai usaha menghidupkan kembali pesona lokal yang justru memiliki nilai-nilai kebersamaan, integritas, persatuan di tengah-tengah kemajemukan.

Revisi terhadap penerapan otonomi bisa saja dilakukan, namun rekonstruksi dimaksud bukan untuk mengembalikan pada semnagt resentralisasi. Kalau gejala separatisme itu disikapi dengan represif dan anti-kemanusiaan, apalagi menghidupkan kembali semangat sentralisasi, akan menjadi konter-produktif bagi tumbuhnya *collective-concociusness*, bahwa kita pernah sepakat untuk bergabung dan bersatu dalam *nation state* Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 3 Mei 2002

4

Dinamika Politik Lokal

Jean Jaques Rousseau pernah mengatakan: suatu syarat untuk kemauan bersama yang sebenarnya, adalah ia mempunyai tujuan umum yang pada hakikatnya bersifat umum, ia harus bersumber dari semua orang. Ia kehilangan integritas alamiahnya apabila diarahkan kepada suatu tujuan khusus dan terbatas.

Pemikiran yang termuat dalam karyanya “*La Contract Social*” yang diterbitkan sekitar tahun 1762 tersebut, tampaknya masih sangat relevan untuk dijadikan acuan utama dalam mencermati dinamika sosial dan politik belakangan ini, yang cenderung makin terpolarisasi dengan berbagai kepentingan sempit dan pragmatis.

Politik yang sesungguhnya, bermakna sangat mulia, bagaimana mengatur negara, menjalankan roda pemerintahan secara berkelanjutan untuk memberikan pengayoman, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Begitu pun bermakna sebagai sarana mengatur, mengelola dan mengorganisasi berbagai kepentingan agar tidak terjadi konflik, dalam banyak hal yang terjadi justru sebaliknya.

Politik hanya ditempatkan semata-mata pada usaha merebut dan mempertahankan kekuasaan *an-sich*, sekalipun dengan menghalalkan segala cara. Kekuasaan seakan-akan menjadi tujuan, bukan proses untuk mencapai tujuan.

Performance perpolitikan semacam ini terlihat nyata baik dalam dinamika perpolitikan nasional maupun lokal. Di tingkat nasional, prahara yang muncul sangat transparan, seperti kekalahan Megawati saat perebutan kursi presiden, terjadinya baku hantam antara anggota Dewan terhormat, alotnya membentuk Pansus *Buloggate II*, yang ditengerai terjadi politik dagang sapi serta peristiwa-peristiwa menggelitik lainnya.

Sementara dinamika politik di tingkat lokal belakangan mulai makin menghangat. Interpretasi otonomi daerah yang cenderung bias, disharmonisasi hubungan antara daerah dan pusat, menguatnya *etno-nasionalisme* sebagai bibit dari separatisme, serta yang paling mutakhir adalah terjadinya ketegangan-ketegangan politik lokal dalam pelaksanaan suksesi kepemimpinan daerah.

Kalahnya paket unggulan dalam pemilihan bupati/wakil bupati di Buleleng, telah menorehkan dinamika baru dalam percaturan politik lokal, hal yang sama pernah terjadi di Jembrana. Yang menarik dalam fenomena tersebut bukanlah pada hasil kalah atau menang, akan tetapi bagaimana proses itu dihasilkan. Paling tidak dapat memperkuat dugaan betapa kehidupan politik itu sangat *absurd* dan sulit diprediksi.

Fenomena itu bukan pula berarti sebagai jastifikasi model politik Machiavelli, akan tetapi justru ingin menelusuri, ada apa dengan perpolitikan kita. Sejauh mana demokrasi sebagai sebuah proses telah ditempatkan pada posisi yang sebenarnya.

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena hasil pemilihan itu ternyata berbuntut kurang menyedapkan.

Dalam dimensi politik kepartaian dianggap sebagai simbol perlawanan atas komitmen dan garis partai, yang mengabaikan “intruksi” petinggi partai dan lebih memposisikan diri sebagai “wakil rakyat”

Sementara dalam dimensi proses, dianggap tidak sah lantaran ada salah satu kartu suara yang tidak diisi nama di bawah cap dan tanda tangan basah ketua. Dalam pandangan ketua pantia pemilihan, hasil dari proses itu tetap sah. Persoal-

annya sekarang adalah siapakah yang berhak untuk menilai atau mengatakan bahwa proses itu sah atau tidak sah? Apakah tindakan yang dilakukan oleh salah satu anggota yang tidak mencantumkan nama itu dianggap kecurangan atau kartu yang seperti itu dianggap cacat, sehingga dihitung sebagai suara yang rusak?

Sejauh mana aturan-aturan yang ada memberikan koridor yang jelas untuk menjembatani persoalan ini, dan bagaimana mekanisme yang mesti dilakukan apabila peristiwa seperti itu terjadi? Tampaknya inilah yang perlu dicarikan solusinya, sehingga persoalan tidak menjadi blunder.

Kalau kita sepakat bahwa sekaranglah saatnya untuk membangun demokrasi dengan cara-cara yang demokratis, sudah saatnya kearifan dan kesantunan berpolitik dengan mengembangkan cara-cara *hight politics* dikedepankan. Menghormati proses demokratisasi, partisipasi, keadilan serta pengakuan atas perbedaan justru akan lebih bermakna, ketimbang bersitegang untuk saling *mem-fait accompli*.

Concern kita, sejauh mana proses itu benar-benar telah berjalan sesuai dengan koridor demokrasi. Artinya, kalau proses yang terjadi sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta berjalan dengan demokratis, apa pun hasilnya sudah sepatutnya dihormati sebagai kemenangan demokrasi. Namun, apabila terbukti ada penyimpanan, penyelewengan, rekayasa apalagi *money politics*, sudah seyogianya diselesaikan secara hukum.

Apabila terbukti, ini merupakan pengingkaran terhadap demokrasi.

Bukankah otonomi daerah telah memberikan ruang yang lebih leluasa bagi pemerintahan di daerah untuk menjalankan kewenangan, termasuk melakukan pengawasan lebih intensif terhadap berbagai persoalan di daerah yang terjadi secara mandiri dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sudah saatnya kembali ke semangat reformasi yang sudah mulai terabaikan, ditelan oleh hiruk-pikuknya orientasi perebutan kekuasaan. Se-

mentara kepentingan rakyat yang mestinya diutamakan nyaris terabaikan.

Mari kita tempatkan suksesi kepemimpinan di daerah sebagai ajang penjarangan kader-kader anak bangsa yang terbaik, visioner, memiliki integritas dan komitmen yang jelas untuk membangun dan memajukan daerah melalui sistem penjarangan yang lebih terbuka, demokratis dan partisipatif dalam artian yang sebenarnya. Siapa pun mereka yang dipercaya untuk mengemban amanat itu, kita wajib ingatkan, awasi sejauh mana kekuasaan yang telah didapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat.

Realita politik ini mestinya ditempatkan sebagai wahana introspeksi, untuk membangun kembali komitmen menghentikan pola-pola lama yang serba seolah-olah, manipulasi terhadap kepentingan publik, apalagi dengan menyebarkan kebohongan publik, hanya untuk sesuatu yang sifatnya sementara dan pragmatis.

Ranumnya bibit demokrasi yang mesti dipelihara, bisa saja akan terkontaminasi oleh trauma dan dendam politik yang menjadikan pembangunan politik teramputasi. Apabila ini terjadi, tidaklah salah apabila suatu saat rakyat menilai kalau demokrasi yang dimaksud seperti ini, untuk apa berdemokrasi. Itu artinya kekalahan kita semua.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 10 Mei 2002

5

Polarisasi Politik

Setelah kasus Bullogate II dapat diselesaikan dengan tanpa penyelesaian, belakangan ini kalangan DPR mulai mengemas problem politik baru, dengan mempersoalkan asal-muasal dana bantuan presiden sebesar Rp 30 milyar yang digunakan untuk merenovasi asrama TNI/Polri. Konon, dana sebesar itu tidak ada dalam mata anggaran Banpres, oleh karenanya Presiden diharapkan dapat memberikan keterangan resmi kepada DPR seputar sumber dana yang digunakan untuk bantuan tersebut.

Tidak kurang dari 48 anggota DPR dari berbagai fraksi seperti dari Fraksi Reformasi, Persatuan Pembangunan, Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, bersepakat mengusulkan kepada Wakil ketua DPR. Mereka sepakat untuk menelusuri dari mana sumber pembiayaan yang diambil untuk pemberian bantuan itu. Menurut mereka, pihak legislatif dan eksekutif sudah sepakat untuk membangun iklim keterbukaan dan penggunaan anggaran secara proporsional dan bertanggung jawab, dengan sumber-sumber yang jelas, artinya memaksimalkan dana-dana yang ada dalam APBN.

Mekanisme kontrol ini akan dilakukan melalui penggunaan hak interpelasi, yang sudah diusulkan kepada wakil DPR agar dapat diagendakan pada sidang paripurna mendatang.

Hak tanya atau mempertanyakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh presiden atau lazim disebut hak interpelasi, merupakan kewajiban dan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi kontrolnya kepada eksekutif. Usulan dari beberapa kalangan DPR terkait dengan penggunaan anggaran negara tersebut tentu dimaksudkan agar pihak eksekutif dapat menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan secara lebih efektif, efisien dan produktif dalam koridor transparansi dan *accountable*.

Apabila penggunaan hak interpelasi ini nantinya disepakati sidang paripurna DPR, Presiden mesti memberikan pernyataan resmi seputar sumber dana tersebut. Di samping akan memberikan pembelajaran bagi transparansi penggunaan anggaran, momen politik itu bisa saja dimanfaatkan untuk dikembangkan ke arah lain. Ambilah misalnya sebagai ajang untuk *bargaining position* dan lebih parah lagi menjatuhkan presiden.

Skandal asrama atau lebih populer disebut *Asramagate* ini, kemungkinan besar akan dimanfaatkan lawan politik Megawati untuk mengutak-atik kursi kekuasaan yang sedang diduduki, sementara sasaran jangka panjangnya adalah sebagai investasi politik menyongsong pemilu 2004. Ada sinyal yang mereka tangkap, upaya yang dilakukan Presiden untuk membantu merenovasi asrama TNI/Polri, dianggap tidak semata-mata ingin memperbaiki kondisi asrama yang memang perlu perbaikan, akan tetapi lebih ditempatkan sebagai usaha politik untuk membangun simpati dan basis dukungan politik dari kalangan TNI/Polri. Bagaimanapun, TNI/Polri masih menjadi kekuatan politik riil dalam percaturan politik di tingkat lembaga.

Dalam perhitungan politik kekuasaan, usaha-usaha mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang simpatik memang tidak disalahkan. Apalagi dalam konstelasi politik yang bagaikan amoeba, bentuk dan wajahnya bisa berubah setiap saat sesuai dengan waktu, ruang dan kepentingan. Kelenjangan merangkul kekuatan politik yang lain, dan hanya membanggakan kemenangan mayoritas bisa saja akan menjadi

boomerang, setidaknya membangun resistensi terhadap kekuasaan yang sedang dilakoni.

Polarisasi hubungan Presiden dan Wakil Presiden yang semakin terbuka lebar, memperkuat asumsi betapa rapuhnya kesepakatan politik yang dibangun partai politik dalam mengelola kekuasaan dan pemerintahan secara bersama-sama. Di balik usaha-usaha kebersamaan, ternyata mereka memendam rivalitas yang sewaktu-waktu bisa saja saling menjatuhkan. Dalam kehidupan politik praktis kelaziman seperti ini sudah sering kali dipertunjukkan. Gus Dur adalah korbannya. Akankah fenomena semacam ini akan menimpa Megawati? Jawabnya tentu sangat *absurd*.

Dalam dinamika kehidupan politik, apapun bisa terjadi termasuk bersatunya kekuatan-kekuatan penentang Megawati untuk berusaha melengserkan di tengah jalan. Walaupun PDI-P memiliki suara mayoritas di DPR, kekuatan politik ini akan terhempaskan apabila yang lainnya bersepakat untuk menyatukan barisan. Untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan paling tidak sampai tahun 2004, tidak ada pilihan lain, kecuali tetap menjaga hubungan baik dengan parpol lain termasuk menjaga dan membagi tanggung jawab bersama dengan PPP dan TNI/Polri. Tiga kekuatan ini di atas kertas akan dapat melampaui yang lainnya apabila ada niat menjatuhkan presiden di tengah jalan. Kenyataannya akan lain apabila Mega dengan gerbong PDI-P-nya berjalan sendiran.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 17 Mei 2002

6

Rejuvenasi Politik Aliran

Berlangsungnya kaukus partai ber-flatform Islam di kediaman Amien Rais, telah mengundang perhatian banyak kalangan. Ada apa dengan kaukus politik itu? Adakah agenda politik yang dibicarakan sekadar silaturahmi biasa, untuk konsolidasi dalam menyatukan visi dan persepsi dalam menghadapi sidang tahunan salah satu agenda utamanya mengenai amandemen UUD 1945? Ataukah ada deal-deal tertentu yang sedang digagas untuk mengkritisi perjalanan pemerintahan di bawah kepemimpinan Megawati?

Jawabnya tentu sangat *unpredictable*. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Pertanyaan yang mengarah pada maksud dan tujuan pertemuan tersebut menjadi menarik mengingat belakangan ini ada tanda-tanda terjadinya fragmentasi politik di tingkat elite. Mengemukanya keinginan beberapa kalangan anggota DPR untuk menggunakan hak interpelasi, adanya pembakaran foto Presiden yang dilakukan dalam berbagai aksi unjuk rasa, serta kritikan-kritikan tajam yang ditujukan atas lambannya kinerja pemerintah dalam menangani krisis dan berbagai kasus KKN, bisa saja dimanfaatkan sebagai konsumsi politik ke arah itu.

Dengan pengalaman politik lewat jalur poros tengah yang dianggap berhasil membangun skenario politik pada masa lalu, bisa jadi kekuatan politik yang dimiliki sewaktu-waktu

dimanfaatkan untuk lebih mengarah ke pragmatisme politik kekuasaan. Apabila kaukus yang dibangun semata-mata untuk menggoyang pemerintahan saat ini, patut dipertanyakan, bukankah pemerintahan saat ini merupakan koalisi dari partai politik? Apabila pemerintahan saat ini dinyatakan gagal, itu berarti kehadiran partai politik dalam mengelola bangsa bisa dikatakan gagal.

Di samping itu, mencurahkan kesalahan hanya pada partai pemenang pemilu dalam sistem pemerintahan koalisi di damping tidak fair, juga menunjukkan inkonsistensi terhadap kesepakatan politik untuk mengamankan proses perjalanan pemerintahan sampai 2004.

Pertanyaan Amien Rais bahwa tidaklah fair kalau semua kesalahan dalam mengurus bangsa ini hanya ditujukan kepada Megawati, secara implisit mengandung makna bahwa kaukus partai politik Islam yang difasilitasi bukanlah untuk mengotak-atik kepemimpinan Megawati.

Ungkapan ini dipertegas lagi oleh presiden Partai Keadilan Hidayat Nurwahid, bahwa pertemuan yang berlangsung ketiga kalinya itu, hanyalah dimaksudkan untuk menyatukan visi dan persepsi tentang pelaksanaan amandemen UUD 1945. Artinya, kaukus partai Islam memandang perlu penyamanan sikap mengenai materi amandemen yang nantinya akan dibahas dalam ST MPR Agustus mendatang.

Apa pun alasannya, fenomena ini menggambarkan betapa perjalanan politik kita masih belum beranjak dari usaha-usaha menghidupkan kembali sentimen ideologis politik aliran yang semestinya sudah harus berakhir. Dapat dimengerti, pragmatasi ideologis politik yang berkembang dalam masyarakat menggambarkan betapa pemetaan ideologi politik yang dilakukan Soekarno yakni Nasasos (naionalis, agama dan sosialisme) masih menjadi kekuatan laten dalam percaturan ideologi politik saat ini.

Berkutat hanya pada persoalan ideologi masing-masing dengan peta kekuatan politik yang hampir berimbang, akan

dapat menghabiskan energi bangsa hanya pada persoalan itu. Sementara persoalan-persoalan demokratisasi, keadilan, kemiskinan, kemelaratan, gejala disintegrasi bangsa yang sesungguhnya justru membutuhkan sinergisme kekuatan antar-partai politik malah terabaikan.

Patut direnungkan, ketika kita sepakat untuk membangun bangsa yang bernama Republik Indonesia, pertarungan dan pertentangan ideologi di luar Pancasila sebagai ideologi dalam berbangsa dan bernegara merupakan pilihan bijak yang paling signifikan dalam membangun tatanan demokrasi di negeri yang sangat pluralistis ini.

Partai politik sebagai bagian dari kekuatan infrastruktur politik, diharapkan dapat memaknai ideologi bersama dengan mengembangkan orientasi program merumuskan cita-cita proklamasi. Arah perjuangan yang dilakukan mestinya ada pada wilayah bagaimana dengan sesegera mungkin dapat mengimplementasikan visi dan misi bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Begitupun dalam merumuskan proses amandemen. Kepentingan sempit dan pragmatis hanya untuk menenangkan kelompok atau golongan tertentu, dengan pola-pola pemaksaan kehendak, di samping akan menjadi konter-produktif bagi kokohnya persatuan, justru akan menguak persoalan lama yang sempat mengundang perdebatan.

Kaukus yang dilakukan partai Islam tersebut akan memiliki nilai strategis apabila bisa menelorkan komitmen bagi terwujudnya hasil amandemen yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia kepada konstitusi modern yang lebih demokratis, berkeadilan dan aspiratif.

Hanya dengan cara itulah rakyat akan dapat menggantungkan harapan yang besar pada kekuatan partai politik yang benar-benar memiliki komitmen untuk menjaaga dan melindungi kemajemukan tanpa harus merasa paling berkuasa, paling banyak dan paling menentukan. Di sinilah kedewasaan berpolitik untuk menempatkan kepentingan bangsa itu diuji.

Sudah semestinya proses politik dimaknai sebagai gejala yang *testable* dan *contestable* bagi kemaslahatan bersama. Kalau tidak, proses itu akan menjadi wahana pertarungan kepentingan dan pengerasan ideologis. Rejuvenasi politik aliran tidak akan terhindarkan, sebagai pertanda pertikaian politik tidak akan pernah berakhir.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 24 Mei 2002

7

Menang Saat “*Injury Time*”

Intensnya pertemuan politik di luar parlemen yang digagas oleh tokoh-tokoh politik, telah menimbulkan pertanyaan besar dari berbagai kalangan. Ada apa dengan pertemuan politik itu? Adakah parlemen sudah tidak efektif lagi untuk mewadahi pembicaraan politik? Ataukah pertemuan itu dimaksudkan menyatukan visi dan persepsi berkenaan dengan problem bangsa yang sampai saat ini belum juga usai? Ataukah sebagai arisan politik untuk mengkritisi kinerja pemerintahan Megawati yang Agustus mendatang akan mempertanggungjawabkan lewat sidang tahunan? Ataukah sebagai lobi-lobi politik biasa sebagaimana sudah lazim dilakukan oleh partai politik dalam tradisi politik modern? Kalau sekadar lobi politik, tentu harus jelas agendanya. Lagi pula mengapa lobi-lobi yang dilakukan terbatas hanya pada parpol yang memiliki asas ciri tertentu?

Dari berbagai pertanyaan yang muncul, timbul kecurigaan, jangan-jangan pertemuan tersebut dilakukan memang sengaja dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan politik ke depan. Jangka pendek, seperti sidang tahunan, amandemen UUD 1945, bahkan sampai pemilu 2004 yang sudah makin dekat.

Pertemuan yang melahirkan kaukus politik aliran itu, memperkuat dugaan bahwa dinamika politik yang terjadi masih berputar pada poros pertentangan basis ideologi. Artinya belum beranjak pada usaha-usaha modernitas politik yang lebih

berorientasi pada program-program nyata yang dapat menjawab tantangan bangsa ke depan. Begitupun orientasi politik yang masih berkuat pada persoalan siapa mendapatkan apa. Upaya-upaya pencerdasan dan demokratisasi serta pengembangan orientasi politik parsitipatif masih belum memenuhi harapan.

Memang konstitusi memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul termasuk melakukan pertemuan politik. Akan tetapi kebebasan berserikat dan berkumpul mestinya dimaknai sebagai usaha bersama dalam memikirkan persoalan masyarakat, bangsa dan negara, bukan untuk melakukan usaha-usaha yang lebih bersifat pragmatis, apalagi konspiratif.

Beranjak dari kegalauan atas sikap dan perilaku politik elitis tersebut, di tengah-tengah gencarnya arisan politik yang dilakukan para aktor politik. Megawati justru mengimbau agar pertemuan-pertemuan politik yang agendanya tidak jelas itu dihentikan saja. Pernyataan ini mengandung makna ajakan kepada para elite politik untuk memulai berfikir ke arah penyelesaian persoalan bangsa.

Di balik itu, Megawati sendiri menangkap adanya gelagat yang kurang menguntungkan bagi munculnya kaukus politik, sewaktu-waktu bisa saja mengancam kedudukannya

Ada dua alasan yang dapat dikemukakan atas berkembangnya asumsi semacam itu. Pertama, dari perspektif lawan atau luar, belakangan ini mulai mengemuka adanya tuntutan-tuntutan yang lebih transparan dari DPR untuk menggunakan hak interpelasi berkenaan dengan berbagai kasus penggunaan keuangan negara seperti *asrama gate*, banpres serta yang terakhir ingin mempertanyakan kehadiran Megawati ketika perayaan kemerdekaan Timor Timur.

Kedua, dari perspektif kawan atau dalam, Taufik Kiemas yang notabene suami Presiden Megawati, mulai gencar melakukan lobi-lobi politik utamanya di kalangan kaukus Islam. Lobi-lobi ini mengisyaratkan betapa berbagai pertemuan yang dilaku-

kan sudah mendapatkan perhatian serius dari Presiden. Bahkan, terakhir Taufik Kiemas secara khusus bertandang ke kantor PBNU untuk bersilaturahmi dengan Gus Dur.

Lobi politik yang sedang dikembangkan oleh Taufik Kiemas bersama beberapa fungsionaris PDI-P belakangan ini menunjukkan kesadaran betapa proses dan dinamika politik yang berkembang menunjukkan arah yang makin absurd. Bagikan permainan sepak bola dunia, ruang-ruang sempit yang ada bisa saja dimanfaatkan untuk mencetak gol. Bahkan, terbukti kalah menangnya suatu tim banyak ditentukan pada saat-saat *injury time*.

Pada saat seperti inilah kemampuan lobi dan diplomasi yang dikembangkan oleh para politisi akan teruji. Sejauh mana naluri dan kepiawaian menangkap sinyal politik yang dapat dikembangkan untuk membangun kesepahaman dan kebersamaan tanpa harus menggunakan cara-cara yang kurang santun, apalagi tanpa merasa saling memerlukan.

Lobi dalam khazanah politik merupakan cerminan dari proses politik modern yang menyiratkan upaya saling mengisi, saling memahami dan saling memberikan pengertian kepada berbagai pihak agar dari padanya tumbuh rasa saling percaya tentang konsep, ide, gagasan yang ingin dikembangkan. Lewat jalur inilah biasanya akan bisa mencairkan kristalisasi kekuatan faksi yang sedang berkembang. Bahkan di Jepang, lobi politik dalam membudaya. Melalui proses informal dengan menggunakan pendekatan personal dan organisasional sebagai upaya penyatuan visi dan persepsi sebelum proses formal berlangsung.

Biasanya, langkah politik seperti ini akan lebih memberikan manfaat ketimbang gontok-gontokan di tingkat formal.

Upaya semacam ini tentunya sangat penting dikembangkan dalam budaya politik kita utamanya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rumit yang rentan konflik. Melalui jalur ini proses politik dapat berjalan lebih terarah, dengan agenda yang jelas. Akan tetapi apabila upaya lobi hanya untuk me-

ngantisipasi perkembangan politik sesaat, besar kemungkinan lobi akan mengarah pada *bargaining position*, untuk membagi-bagi alias politik dagang sapi.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 7 Juni 2002

8

Mengakomodasi Kepentingan Ideologi

Ada beberapa persoalan substansial yang mengemuka dan menimbulkan kontroversi terhadap RUU dan Parpol yang diusulkan Pemerintah ke DPR. Persoalan itu menyangkut isu strategis sebagaimana wacana publik yang berkembang. Di antaranya, keinginan untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, pemilu sistem distrik, keanggotaan KPU yang bersifat mandiri dan non-partisan, mengeleminasi peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan pemilu, pembatasan partai politik dengan menerapkan sistem *electoral trashold* sebagai bentuk seleksi alamiah, pelarangan pejabat negara untuk memanfaatkan fasilitas negara bagi kepentingan parpol utamanya pada saat kampanye, meniadakan keanggotaan DPR yang diangkat dengan konsekuensi TNI/Polri diberikan hak memilih dan dipilih.

Kalau disimak draf yang diajukan, tampaknya sudah mengakomodasi berbagai persoalan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemilu dan pengaturan parpol dari UU sebelumnya. Yang menjadi persoalan, justru bagaimana merumuskan makna ideal yang diharapkan ke dalam bahasa hukum yang benar-benar dapat diterapkan dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. Ambilah misalnya tentang keberadaan KPU sebagai lembaga independen, mandiri dan non-partisan, mestinya didukung perangkat operasional dan administratif yang

mandiri dan independen, terlepas bahwa itu diperankan oleh pemerintah. Hal ini penting mengingat pengalaman pelaksanaan pemilu tahun 1999 justru persoalan yang sering terjadi di tingkat dukungan administratif.

Aspek yang tidak kalah pentingnya menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Sistem ini akan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas pada konstituen dalam menentukan pilihan terbaik untuk memimpin bangsa. Rakyat tidak lagi memilih kucing dalam karung. Meski demikian, ketidakjelasan pengaturan bisa menjadi ajang pertarungan kepentingan yang akhirnya tidak akan pernah menghasilkan keputusan yang benar-benar representative dan kredibel bagi pimpinan nasional.

Persoalan lain menyangkut keinginan untuk memberikan hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI/Polri sebagai konsekuensi dihapuskannya keterwakilan TNI/Polri di DPR. Sepanjang kecerdasan politik, dan kedewasaan berdemokrasi tumbuh dalam masyarakat politik kita, hal ini tentu tidak akan menjadi persoalan.

Pemahaman demokrasi ideal memang harus memberikan hak dan kewajiban politik yang sama bagi setiap individu dalam berperan serta. Adanya sistem komando dan loyalitas tunggal di tubuh TNI/Polri bisa saja akan menjadi ajang pemanfaatan tidak hanya oleh kalangan internal, akan tetapi kalangan parpol untuk menarik dukungan politik. Memang di beberapa negara hal seperti itu sudah lumrah dilakukan karena tingkat kesadaran, kedewasaan dan profesionalisme relatif sudah berjalan dengan baik. Sepanjang iklim kondusif semacam itu dipandang sudah memiliki bangsa ini, memberikan hak dan kewajiban sama termasuk kepada TNI/Polri tentu tidak akan menjadi masalah. Bukankah PNS sudah terkena aturan itu?

Di samping persoalan mendasar di atas, tampaknya yang akan menjadi perdebatan politis melelahkan dari RUU itu menyangkut penerapan *electoral threshold* yang rencananya akan diberlakukan dalam Pemilu 2004. Kebijakan ini menyangkut

pemberlakukan aturan bagi parpol peserta Pemilu 1999 yang tidak memenuhi kuota suara 2% otomatis tidak bisa ikut dalam pemilu selanjutnya. Kebijakan ini sesungguhnya penting artinya bagi komunitas parpol, mengingat ada kecenderungan tumbuhnya parpol bagaikan jamur di musim hujan. Pembelajaran dan seleksi yang lebih ketat memang perlu dirumuskan, tanpa dimaksudkan untuk membatasi hak berserikat dan berkumpul.

Sistem seleksi Word Cup dalam mendegradasi tim sepak bola tampaknya dapat dijadikan inspirasi untuk pengaturan parpol yang boleh pentas dalam ajang pemilu. Kalau tidak ingin didegradasi setiap parpol harus dapat menunjukkan kualitas permainan, solidaritas tim, kepatuhan terhadap aturan serta membangun sportivitas dalam bertanding. Bagi klub yang mengelola organisasinya secara asal-asalan dengan manajemen kampungan tentu akan bermimpi untuk dapat masuk ke area permainan bergengsi itu.

Terhadap berbagai persoalan di atas, tentu menarik untuk dicamkan bahwa semua itu adalah proses, bukan tujuan. UU pemilu, UU parpol dan UU lainnya hanyalah aturan normatif sebagai kesepakatan bersama dalam menyelenggarakan proses politik yang lebih teratur, terarah dan demokratis.

Yang justru perlu ditekankan adalah konsistensi, *political will*, dan kearifan serta niat baik untuk sama-sama menyadari akan arti penting kebersamaan dan kerja sama di tingkat implementasi. Tanpa itu, sebaik apa pun aturan yang dibuat hanyalah akan menjadi pajangan aksara tanpa makna. Proses panjang dan berbelit-belit ini menggambarkan betapa membangun peradaban demokrasi bukanlah proses yang mudah dan murah. Di samping memakan waktu cukup panjang, diperlukan kecerdasan dan kesabaran. Bagaimana pun derajat demokrasi suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh tingkat kecerdasan bangsa, yang tercermin dalam kemampuan merumuskan aturan yang komprehensif, objektif, terbuka dan demokratis. Mudah-mudahan keyakinan Luciyen W Pye, sebagai-

mana disitir dalam buku *“Amies in the Process of Political Development”* bahwa semua masalah akan bisa diatasi dan dipecahkan bilamana peraturan-peraturan yang benar dilakukan untuk dilaksanakan, tercermin dalam UU Pemilu dan Parpol yang sedang digodok kalangan legislatif.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum’at, 14 Juni 2002

9

Pemilihan Langsung

Belakangan ini wacana pemilihan presiden secara langsung mengemuka. Pasalnya, selama praktik pemilihan yang lazim berlaku dianggap kurang representatif dan cenderung *mismacth* dengan keinginan dan kepentingan rakyat. Dengan cara ini diharapkan rakyat dapat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan siapa pemimpinnya.

Bagi demokrasi cara ini dianggap paling memberikan harapan bagi pembelajaran dan pendewasaan politik.

Di beberapa negara yang menganut sistem demokrasi modern, ada dua tradisi politik yang biasa dikembangkan. Pemilihan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, rakyat dalam pemilu langsung menentukan siapa paket yang mereka anggap kapabel. Sedangkan yang kedua, dalam pemilu rakyat memilih wakil-wakilnya kemudian wakil-wakil terpilih diberikan mandat untuk memilih presiden.

Pertimbangan dalam menentukan sistem pemilihan tersebut, biasanya didasarkan atas pertimbangan jumlah dan sebaran penduduk, letak geografis, tingkat heterogenitas, baik vertical maupun horizontal, maupun pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan.

Negara yang sudah mentradisi melaksanakan pemilihan langsung misalnya AS. AS dianggap negara yang paling mapan

dalam mempraktikkan demokrasi. Bahkan, dikatakan sebagai pionir dan maskotnya demokrasi. Walaupun sampai saat ini bangsa AS selalu mengatakan masih belajar berdemokrasi.

Sedangkan di Indonesia selama ini menganut sistem pemilihan tidak langsung dengan memberikan kedaulatan rakyat kepada MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945). Salah satu tugasnya adalah memilih presiden dan wakil presiden dengan suara terbanyak (pasal 6 ayat 2 UUD 1945).

Kritik yang selama ini muncul terhadap MPR dalam menjalankan kedaulatan rakyat dianggap kurang aspiratif dan cenderung berjalan sendiri dengan aturan main yang mereka buat sendiri. Maka ketika menentukan pimpinan nasional, rakyat seolah-olah disuguhi “kucing dalam karung”. Ambilah misalnya ketika pemilihan Presiden Soeharto dengan menginterpretasikan pasal 7 UUD 1945 tentang dapat dipilih kembali bisa diartikan berkali-kali. Begitupun dasar konstitusional oleh Habibie. Puncaknya, ketika pemilihan presiden antara Megawati dengan Gus Dur, di mana Megawati dari partai pemenang pemilu harus legowo menerima kekalahan.

Atas berbagai persoalan tersebut, ada anggapan UUD 1945 yang bersifat umum dan supel memberikan peluang untuk diinterpretasikan sekehendak kekuasaan. Untuk menutupi celah konstitusional tersebut perlu dilakukan amandemen, memperbaiki dan atau menyempurnakan pasal-pasal yang dianggap “bermasalah”.

MPR melalui Badan Pekerja membentuk Panitia Ad Hoc I (PAH I) yang salah satu hasilnya adalah perubahan terhadap pasal 6 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dari tidak langsung menjadi langsung dipilih oleh rakyat (Pasal 6A ayat 1).

Apabila rancangan itu diterima dan disahkan dalam Sidang Tahunan MPR Agustus mendatang, hampir dapat dipastikan dalam Pemilu 2004 adalah kali pertama rakyat Indonesia akan memilih presidennya secara langsung.

Sebagaimana model yang dikembangkan di AS.

Di negara AS sebagai Negara penyebar paham demokrasi, rakyatnya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menggunakan haknya untuk memilih. Secara kuantitatif partisipasi politik ini dianggap sangat rendah, karena hampir 35 persen lebih tidak menggunakan hak pilihnya. Namun, secara kualitatif, ternyata sangat tinggi karena didasarkan atas tingkat kesadaran rasional.

Berbeda dengan Indonesia, menurut hasil penelitian hanya 10 persen pemilih dalam pemilu adalah pemilih rasional.

Di samping hal di atas, yang menarik untuk diperbandingkan di antaranya, tentang sistem pemerintahannya yang menganut pemisahan kekuasaan, sementara di sini pembagian kekuasaan. Sistem kepartaian dengan dwi partai, sementara kita multipartai (sampai saat ini sudah terdaftar 200 lebih parpol). Sistem pemilu dengan pola distrik, sementara kita masih semidistrik. Begitupun tentang kesadaran dan pemahaman politik demokrasi.

Perbedaan-perbedaan ini dengan sendirinya akan membawa dampak terhadap perbedaan praktik demokrasi yang dijalankan. Untuk sekadar diketahui, kalau dikompilasi tidak kurang dari 45 varian demokrasi yang dipraktikkan di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini menunjukkan universalitas demokrasi dalam implementasinya akan sangat tergantung pada *cultur bound*.

Di tingkat ideal, pemilihan langsung dianggap cara yang paling *representative*, *competable*, dan *accountable* serta demokratis dalam menentukan pilihan. Sepanjang didukung budaya, kesadaran dan etika politik yang menjunjung semangat dan nilai-nilai demokrasi. Apabila tidak, cara-cara semacam ini sangat rentan menimbulkan dislokasi politik untuk direayasa, dimanipulasi, ataupun berjangkitnya *money politics* yang justru kurang menguntungkan bagi pembelajaran politik.

Untuk itu, upaya mempersiapkan *infrastruktur* dan *suprastruktur* pendukung, seperti perangkat aturan main, pengua-

tan kelembagaan dan memberikan pemahaman secara *intens* kepada masyarakat melalui sosialisasi sebagai wahana penyamaan visi dan persepsi mutlak diperlukan.

Memang, demokrasi bukanlah barang *built up* sebagaimana pemilihan langsung. Keberadaannya adalah sebagai proses bukanlah tujuan. Untuk mewujudkan demokrasi diperlukan cara-cara yang demokratis pula. Apabila pemilihan langsung disepakati akan menjadi kawah candradimuka bagi pembelajaran demokrasi di negeri ini.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 28 Juni 2002

10

Teruji di Lapangan

Jumat malam 18 Oktober lalu, pemerintah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), masing-masing Perpu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu No. 2/2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1/2002 untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan para Pelaku Peledakan di Bali.

Dalam hal ihwal keadaan genting dan memaksa, aturan konstitusi memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menanggulangi dan memulihkan situasi dengan mengeluarkan Perpu sebagai landasan berpijak. Perpu biasanya untuk mengisi kekosongan dan atau celah hukum sebagai dasar bertindak dalam kontemporer yang dianggap secepatnya diambil tindakan proposional.

Kehadiran Perpu Antiterorisme ini memang mengundang beragam opini pro dan kontra. Bagi yang pro, Perpu Antiterorisme dianggap sebagai langkah cepat dan tanggap dari pemerintah, paling tidak di tingkat kebijakan, komitmen dan *political will* pemerintah. Secara implisit kebijakan ini mengantisipasi bahwa terorisme memang benar adanya. Aksi brutal dan biadab yang dilakukan gerakan terorisme sudah menjadi ancaman serius bagi ekstensi bangsa.

Persoalannya, apakah Perpu Antiterorisme ini bisa efektif dalam implementasinya? Jawabannya masih men-

jadi bahan perdebatan. Ada kekhawatiran terhadap Perpu yang dirancang untuk mengantisipasi tindakan teroris itu, jika dalam pelaksanaannya tidak dibatasi waktu, substansi persoalan dan persamaan pemahaman tentang siapa dan tindakan apa yang termasuk tindakan teror. Hal ini penting agar Perpu yang ada, tidak digunakan sebagai alat kekuasaan yang dapat untuk diterjemahkan sebagai pasal karet, layaknya UU Subversif untuk membungkam kelompok kritikal.

Berbagai kekhawatiran itu erat kaitannya dengan sikap dan tindakan kekuatan masa lalu yang masih menorehkan trauma politik. Pernyataan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM serta Menko Polkam, merupakan garansi bahwa perpu yang dibuat bukanlah seperti yang dikawatirkan.

Oleh karena ini menyangkut *emergency action*, semuanya akan teruji di lapangan. Terorisme merupakan fakta sosial di Indonesia. Aksinya pun sangat jelas tidak hanya menyebarkan isu, tetapi sudah mengarah pada tindakan brutal dan biadab.

Perpu hanyalah alat atau sarana untuk melandasi aparat untuk bertindak secara cepat, tepat dan sistematis serta terpadu demi mengatasi usaha terorisme.

Bagi masyarakat ada atau tidak ada perpu tidaklah penting. Yang urgen bagaimana aparat kemananan dapat secara cepat dan akurat mengungkap dan menyelesaikan misteri terorisme untuk membuktikan perpu terorisme memberikan jaminan objektif bagi aparat bekerja efektif.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 25 Oktober 2002

11

Menghindari Politisasi Penegakan Hukum

Salah satu kesulitan pemerintah di masa transisi adalah upaya penegakan hukum. Di samping karena lemahnya ketentuan hukum dan para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, juga disebabkan oleh orang-orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum adalah mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat kuat di masyarakat. Upaya penegakan hukum kerap kali terganjal oleh tembok kekuasaan formal maupun nonformal. Akibatnya, pertimbangan-pertimbangan politis dapat mengalahkan pertimbangan hukum. Kerancuan melihat persoalan, apakah perbuatan yang dilakukan masuk wilayah hukum ataukah politik, menjadi blunder.

Tidak mengherankan apabila dalam menyelesaikan persoalan hukum melalui pendekatan *transitional justice* yakni menegakkan hukum dengan mempertimbangkan dampak politis yang ditimbulkan atas keputusan hukum yang ditimpa kepada pelaku pelanggaran hukum. Kentalnya warna politik yang menjangkiti proses penegakan hukum, berimplikasi pada terabaikannya supremasi hukum, rasa keadilan dan akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan dan menurunnya citra aparat penegak hukum di mata masyarakat.

Berbagai peristiwa pelanggaran hukum apakah menyangkut pidana, tindakan subvensif ataukah perdata yang melibat-

kan orang-orang “besar”, diputuskan tanpa keputusan. Berbagai kasus pengeboman di beberapa tempat di Indonesia sampai kini banyak yang belum terselesaikan dengan keputusan hukum yang tetap. Kasusnya dibuat menggantung tanpa kepastian hukum yang jelas. Celaknya, atas ketidakberdayaan itu, arah persoalannya dengan serta merta dialihkan ke pihak ketiga dengan mencari kambing hitam.

Tragedi Kuta, yang menewaskan ratusan orang, tidak hanya memerangahkan masyarakat dunia. Petaka ini menjadi buah bibir, bukan hanya besarnya korban yang berasal dari berbagai negara, namun cara-cara yang dilakukan sangat cermat, terencana dan profesional. Yang paling terpukul atas peristiwa itu adalah aparat keamanan. Tragedi ini telah menampar aparat dan sistem keamanan kita yang sangat rapuh. Jargon Bali aman seakan pupus sudah. Reputasi pihak keamanan kini sedang dipertaruhkan untuk mengungkap siapa pelaku di balik peristiwa pengeboman.

Di tengah simpang-siurnya berita dan berbagai analisis peristiwa, polisi melakukan penangkapan terhadap Abu Bakar Ba'asyir sebagai tersangka pengeboman di beberapa tempat di Indonesia dan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Megawati. Dugaan ini bukanlah informasi baru. Jauh hari sebelumnya sebuah majalah terkemuka AS telah memuat pemberitaan tentang itu. Bahkan, petinggi Singapura memperingatkan pemerintah Indonesia, bahwa di sini sedang bercokol teroris yang sedang menjadi musuh dunia. Walaupun penangkapan yang dilakukan tidak terkait langsung dengan peristiwa pengeboman di Kuta, di baliknya ada kesan yang sangat kuat peristiwa itu terkait dengan jaringan tersebut. Kini ada tanda tanya, adakah penangkapan yang dilakukan sudah berdasar pada hukum yang kuat? Ataupun sekadar konsumsi politik belaka?

Pertanyaan pertama tentu diarahkan pada upaya penegakan hukum yang didasarkan atas bukti-bukti yang kuat atas dugaan keterlibatan Ba'asyir dalam berbagai peristiwa sebagaimana yang dituduhkan. Artinya, dari berbagai pengembangan

penyelidikan yang dilakukan, ternyata memang mengarah kepada tersangka. Apabila memang itu dasarnya, walaupun sedikit terlambat, tindakan polisi patut untuk didukung oleh semua pihak, termasuk kelompok yang membela tanpa *reserve* tindakan hukum yang disangkakan.

Bagi kita yang mendambakan tertib hukum dapat berjalan secara jujur dan berkeadilan, kita pun mesti mulai dari berjalannya upaya-upaya hukum, atas berbagai persoalan hukum dengan tidak membedakan perlakuan antara satu dengan yang lainnya, termasuk terhadap Ba'asyir – siapa pun dia. Apalagi untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tersebut sudah memberikan landasan hukum yang memadai dengan dikeluarkannya Perpu I/2002 dan Perpu II/2002 terkait dengan tindakan terorisme dan pengungkapan kasus pengeboman di Kuta secara cepat dan tepat. Dari hasil penyidikan akan dapat diketahui kebenaran rumor yang selama ini beredar.

Ada anggapan yang berkembang, penangkapan Ba'asyir tidak lebih merupakan usaha pihak keamanan untuk mencari kambing hitam untuk mengalihkan substansi persoalan yang sesungguhnya terjadi. Upaya ini ke dalam diharapkan akan dapat meredakan berbagai spekulasi yang berkembang atas siapa yang terlibat di balik semua itu. Sebagaimana rumor yang berkembang, ada pihak-pihak yang mencoba memancing di air keruh untuk menciptakan instabilitas sosial dan politik dalam negeri. Pendekatan konflik yang ingin dibangun, dijastifikasi dengan cara biadab. Diharapkan momentum ini akan dapat menyebarkan keresahan ekonomi, sosial dan politik, sehingga memudahkan proses konflik antarkelompok, golongan, suku, ras dan agama mudah disulut. Atas analisa itu, kemudian muncul kecurigaan, penangkapan Ba'asyir ditengarai lebih bernuansa politik, sebagai bagian dari skenario global untuk memenuhi keinginan Barat. Apabila dugaan ini benar, betapa harga diri dan eksistensi bangsa ini terkebiri, sekadar memuaskan pihak-pihak tertentu. Semua itu tentu masih dalam koridor analisis dan asumsi-asumsi yang memang bermatra multifaset.

Di tengah kegalauan atas situasi tidak menentu ini, sudah sepatutnya kita semua tidak melakukan tindakan membabi buta dengan menebar berbagai kecurigaan yang tidak berdasar antara satu dengan yang lainnya. Artinya, masing-masing pihak diharapkan dapat menahan diri dan memberikan kesempatan kepada pihak berwenang untuk menjalankan tugasnya secara jujur, adil dan transparan. Begitu pun pihak keamanan mestinya dapat bekerja proporsional dan profesional dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Karena menyangkut kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan, tentu pihak kepolisian pada masa sekarang tidak bisa bertindak gegabah mengambil tindakan tanpa didasarkan atas bukti-bukti pendukung yang memadai.

Penegakan hukum hanya akan dapat berjalan baik, apabila didasarkan atas proses dan prosedur hukum yang baik pula. Proses itu kini sedang dilakoni pihak keamanan. Kalau kita menginginkan keputusan yang dihasilkan berjalan objektif, peranan yang seharusnya kita lakukan adalah memberikan ruang tanpa menghalangi proses situ, sembari melakukan kontrol agar proses yang dilakukan berjalan adil.

Karena semuanya sedang berproses, tentu hasilnya belum diketahui. Apakah Ba'asyir terlibat atau dibebaskan. Menghukum orang tanpa prosedur hukum, sama konyolnya dengan membebaskan tersangka tanpa pembuktian. Oleh karena itu, apa pun hasilnya, sepanjang sudah memenuhi standar hukum yang berlaku, wajib dihormati. Yang jelas, siapa pun mereka yang nantinya ditetapkan sebagai tersangka termasuk pengembangan penyidikan atas Ba'asyir, mestinya ditempatkan sebagai oknum yang mewakili personal, bukan kelompok. Apalagi disangkutpautkan dengan agama yang dianut. Sebab, tiap agama akan selalu memberikan tempat tertinggi pada sikap dan perilaku humanis kepada umatnya.

Hanya dengan memilah duduk persoalan, secara cermat dan bijaksana serta proporsional, upaya penegakan hukum di masa transisi ini akan dapat terhindar dari nuansa politis dan

tindakan yang anarkis. Bagaimana pun politisasi hukum pada akhirnya justru akan menjadi *counter-produktive* melemahnya fungsi dan peran hukum dan aparat, yang justru mempersulit diri dalam menciptakan *social order*. Ujung-ujungnya akan menafikan rasa keadilan masyarakat.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 1 November 2002

12

Momentum Bangkitkan Jati Diri

Seburuk apa pun suatu peristiwa menimpa kehidupan manusia, akan selalu ada hikmahnya. Pernyataan itu sangat signifikan dengan peristiwa pengeboman di Kuta, 12 Oktober lalu, tragedi yang mengusik rasa kemanusiaan itu, telah menorehkan luka mendalam tidak hanya bagi masyarakat Bali, tetapi masyarakat Indonesia dan dunia internasional.

Bali yang kesohor di mata internasional karena keindahan alamnya, keramahtamahan penduduk, keunikan adat dan budaya serta tingginya sikap dan perilaku religiusitas merupakan potensi yang melekatkan *brand name* Bali sebagai pulau surga, pulau seribu pura, *the morning of the world*, *the last paradise* dan sejumlah sebutan membanggakan lainnya. Inilan *basic* pariwisata itu berkembang. Semuanya itu seakan-akan ingin dinodai oleh tangan-tangan kotor aksi terorisme itu.

Musibah Kuta, menjadi pelajaran menarik untuk mengingatkan kembali memori itu sembari melakukan introspeksi terhadap berbagai hal yang menjadikan wajah Bali seperti sekarang ini. Di balik “keberhasilan” ideologi *developmentalism* yang dikuantifikasi dengan ukuran yang sangat sumir, ternyata menyisakan berbagai problematika kualitatif seperti distorsi sosial- budaya, nilai kebersamaan, lingkungan dan disparitas ekonomi. Bali kini dikatakan sebagai *lost paradise*. Kuta sebagai pusat pariwisata Bali, merupakan jantung per-

ekonomian Bali dari sektor pariwisata.

Terganggunya Kuta, sama artinya terganggunya pariwisata. Terganggunya pariwisata dapat mengganggu sektor ekonomi, sosial dan merambah ke politik dan keamanan. Dampaknya mulai merambah rantai sektoral satu per satu. Menurunnya tingkat hunian hotel dan penggunaan jasa travel menjadi momok bagi para pebisnis dan pekerja pariwisata akan nasib dan kelangsungan hidup mereka. Yang paling terpukul justru para *supplier* barang-barang kebutuhan hotel yang notabene dilakukan oleh pelaku, usaha kecil dan menengah serta para petani agrowisata.

Kini perlu dipikirkan adalah menyusun langkah strategis untuk menginjeksi agar potologi itu tidak merambah ke sektor-sektor lain. Derasnya aliran bantuan yang diberikan berbagai pihak atas sikap simpati terhadap masyarakat Bali, mesti dibarengi dengan penyusunan format yang komprehensif dalam memulihkan keadaan pasca pengeboman.

Sebagaimana sudah sering didiskusikan, tiga langkah strategis yang perlu dilakukan dalam memulihkan keadaan Bali pasca tragedi Kuta penting untuk ditindaklanjuti.

Secara garis besar format tersebut meliputi: Pertama, *recovery* jangka pendek dalam bentuk *emergency rescue* untuk membantu daerah dan mereka yang terkena dampak langsung. Upaya ini meliputi pemulihan keadaan di lokasi kejadian baik secara *skala* maupun *niskala*. Menyantuni keluarga korban tidak hanya menyangkut beban ekonomi tetapi memulihkan trauma psikis yang masih dirasakan.

Kedua, langkah jangka menengah menyangkut upaya mengembangkan sektor penyanggah pariwisata dengan kembali ke jati diri konsep pengembangan pariwisata budaya yang berbasis pada budaya dan masyarakat lokal, yakni pertanian. Dilihat dari segi strategi pertumbuhan, sektor pertanian memang relatif lamban. Di samping lahan pertanian yang makin menyempit, *image* dan prospeknya dianggap imperior diban-

ding pariwisata. Meski demikian, sektor ini tidak lantas diabaikan, mengingat keberadaannya sangat menunjang kebutuhan primer dan teruji dari godaan krisis. Sering kali sektor ini dijadikan *buffer-zone* ketika sektor andalan kelimpungan. Apa yang belakangan disebut sebagai konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) sesungguhnya bermuara pada sektor pertanian dalam artian luas.

Ketiga, secara jangka panjang, upaya untuk melakukan reorientasi terhadap strategi pembangunan Bali sudah sepatutnya dilakukan. Strategi jangka panjang ini meliputi sistem perencanaan pelebagaan dan sistem *monitoring* dan evaluasi. Reorientasi dimaksud mestinya dimulai dari sistem tata ruang Bali yang belakangan sangat merisaukan banyak kalangan. RTRW Bali yang selama ini ada belum cukup mumpuni untuk dijadikan dasar pijakan bagi penataan ruang dan kawasan. Banyak aktivitas pembangunan berlangsung di luar tata ruang yang sudah ditentukan. Eksploitasi alam dan lingkungan Bali yang bersifat terbatas, lambat laun akan merusak jaringan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Pendek kata, tragedy Kuta dapat memberikan hikmah bagi kita untuk melakukan introspeksi untuk kemudian disusun langkah-langkah retrospeksi sebagai komitmen bersama bagi keberkelanjutan pembangunan Bali berdasarkan jati diri budaya dan masyarakat Bali. Upaya ini meliputi penentuan rencana strategis tentang sistem tata ruang yang mengacu pada konsep *tri hita karana* dan *tri mandala*, dengan ditunjang oleh pengembangan sektor pertanian dalam artian luas untuk menggali sumber daya alam dan kelautan yang potensinya belum tergali secara maksimal.

Strategi pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan, mesti pula ditopang oleh berkembangnya sektor penyangga lainnya yang justru akan dapat memperkuat struktur perekonomian Bali. Tata ruang yang komprehensif dan implementatif akan dapat memberikan dasar bagi penataan isi ke-ruang-an,

akan dapat menciptakan hubungan simbiosis mutualistis antara manusia dan lingkungannya.

Karena semuanya itu menyangkut persoalan yang dapat kompleks dan strategis, amatlah tidak mungkin dikerjakan hanya oleh pemerintah. Sejalan dengan semangat *reinventing government*, pemerintah hanyalah salah satu bagian dari *stakeholders* pembangunan. Intensitas peran sektor usaha dan masyarakat dalam artian luas, akan sangat membantu terciptanya sistem perencanaan yang komprehensif.

Kehadiran tim atau apa pun namanya yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan *recovery* terhadap perekonomian Bali dengan melibatkan *stakeholders*, diyakini akan mampu *manage* pemanfaatan bantuan yang mengalir untuk secepatnya dapat keluar dari *visous sircle* itu.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 8 November 2002

13

Jaminan Akan Rasa Aman

Salah satu kebutuhan dasar atau *basic needs* manusia adalah adanya kebutuhan akan rasa aman atau *safety needs*. Rasa aman merupakan aspek instrinsik dalam mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan hidup. Aspek instrinsik dimaksud meliputi kebutuhan psikis seperti adanya perasaan bebas dari rasa takut, kemerdekaan beraktivitas dan berekspresi. Aspek psikis ini signifikan dengan kebutuhan akan jaminan rasa aman dari hal-hal yang mungkin bisa mengganggu keberlangsungan hidup baik individual maupun sosial.

Secara individual dilakukan oleh masing-masing personal dengan membuat perisai diri, berjaga-jaga menghadapi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan. Secara sosiologis, dilakukan melalui institusi khusus yang dibentuk dan secara spesifik ditugaskan untuk memberikan jaminan akan rasa aman.

Intensitas interaksi sebagai bentuk pengejawantahan kompleksitas kebutuhan manusia, mendorong meningkatnya kebutuhan akan sistem keamanan yang dapat memberikan jaminan rasa aman. Hal ini dapat dilihat dari dinamika organisasi yang secara khusus diciptakan oleh komunitas masyarakat, ditugaskan untuk melakukan tugas pokok dan swakarsa, *pecalang*, satuan tugas sebagai contoh.

Di tingkat negara, institusi khusus yang ditugaskan untuk itu bahkan dibekali dengan sistem pengamanan, penganggaran dan kewenangan yang formal. Apabila dipandang perlu dianggap *legitimate* untuk melakukan tindakan represif sekalipun. Semuanya itu dimaksudkan untuk menciptakan rasa aman baik secara individu maupun sosial.

Belakangan ini rasa aman masyarakat mulai terganggu oleh berbagai tindakan kekerasan struktural dan kultural. Aksi kriminal yang dulunya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kini secara vulgar dapat kita jumpai di tempat-tempat umum di siang bolong. Penjambretan, penodongan dan perampasan sebagaimana pernah terjadi pada nasabah bank baru-baru ini menunjukkan tindakan nekat si pelaku. Teknologi kejahatan yang dilakukan sudah makin canggih sejalan perkembangan teknologi.

Bali yang dulunya dikenal dengan *brand image*-nya, berbudaya, aman, dan indah dengan panorama lingkungan yang lestari, kini mulai terusik oleh berbagai tindakan kejahatan. Aksi terakhir yang sangat menghebohkan dunia adalah pengeboman Sari Club di Kuta. Tempat yang konon dijaga cukup ketat oleh *security* itu, ternyata bisa kecolongan oleh aksi brutal yang telah terencana cukup profesional. Peristiwa itu dengan sekejap meluluh-lantakkan *brande image*, yang justru menjadi salah satu pertimbangan wisatawan datang ke Bali.

Bagaimana pun musibah yang terjadi, tidak hanya memakan korban material dan nyawa manusia yang relatif besar, lebih dari itu secara psikis menyisakan perasaan traumatik yang mendalam akan perasaan tidak aman.

Atas peristiwa itu kita pun harus berani secara jujur dari kata hati yang mendalam melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan dan jaminan rasa aman wilayah dan masyarakat Bali.

Selama ini mungkin kita terbuai oleh sanjungan sehingga menjadikan kita lengah. Begitupun sistem pengamanan yang dilaksanakan oleh pihak keamanan yang secara formal ber-

tanggung jawab menjaga dan melindungi wilayah dan masyarakat dari ancaman dan gangguan, belum dapat berjalan secara optimal.

Belajar dari kelalaian yang selama ini terjadi, sudah seyogianya Bali memiliki standar sistem pengendalian keamanan yang terpadu antara sistem lingkungan sosial budaya masyarakat yang memang sudah memiliki institusi pengamanan wilayah berdasarkan adat dan tradisi di desa adat, dengan pola pengembangan sistem pengendalian keamanan yang dilakukan pemerintah daerah bersama-sama kepolisian daerah untuk merumuskan pola koordinatif berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab, tentu dengan menjadikan institusi kepolisian sebagai *leading sector*.

Karakteristik daerah dan posisi Bali sebagai daerah tujuan wisata utama dunia, memang telah menempatkan Bali sebagai daerah yang khusus, utamanya dalam standarisasi pengamanan. Sebagai kampung internasional, Bali sudah menjadi milik dunia. Banyak kepentingan yang mengharuskan kita untuk melakukan sistem pengamanan yang lebih komprehensif dengan melakukan langkah-langkah preventif, kuratif dan represif tentu tetap pada koridor prosedural.

Respons pemerintah pusat untuk meningkatkan status Polda Bali memang patut disyukuri. Langkah ini bisa diartikan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah, utamanya kepolisian untuk dapat bekerja lebih profesional dalam melakukan tugas-tugas pengamanan.

Pengamanan dimaksud tidak lantas diartikan sebagai upaya menghidupkan kembali *security approach* dalam artian pragmatis. Wajah manusiawi dengan tingkat kedewasaan yang tinggi sebagaimana ditunjukkan masyarakat ketika mengatasi masalah pascapengeboman, justru penting untuk dikedepankan. Artinya, dalam menciptakan rasa aman dapat dilakukan dengan tetap menempatkan *prosperity approach* dalam bentuk kesadaran dan membangkitkan partisipasi masyarakat sebagai upaya preventif, dengan tetap mengambil tindakan

cepat dan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Sistem operasional pengendalian keamanan terpadu yang mengacu pada standar internasional ini dapat berjalan baik, apabila didukung SDM, sarana dan prasarana, pendanaan serta sistem informasi manajemen dan jaringan intern dan antar lembaga terkait dapat berjalan sinergis dengan didukung tingkat disiplin dan kesadaran serta kepatuhan hukum yang tinggi oleh semua kalangan. Di sinilah inti persoalan sesungguhnya kebijakan keamanan pasca pengeboman di Kuta dirumuskan. Dengan harapan rumusan kebijakan itu dapat memberikan jaminan bagi rasa aman masyarakat.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 15 November 2002

14

Merumuskan Kebijakan yang Retrospektif

Sebulan lebih Tragedi Kuta sudah berlalu. Lambat-laun dampaknya mulai merambah keberbagai aspek kehidupan masyarakat Bali. Tragedi itu tidak hanya mengguncang bangunan fisik dan memakan korban ratusan nyawa manusia, akan tetapi mulai merasuk ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik secara psikis. Tragedi Kuta telah menorehkan trauma mendalam yang sangat mengganggu aspek kejiwaan masyarakat. Secara ekonomi, dampaknya sangat nyata.

Harus diakui, Kuta adalah *trade mark* pariwisata Bali. Pariwisata merupakan denyut perekonomian Bali. Ketika Kuta mendapatkan musibah, denyut nadi perekonomian Bali pun ikut terguncang. Terhentinya aktivitas pariwisata, dengan sendirinya akan mengubah struktur ekonomi masyarakat Bali. Empat puluh persen lebih PDRB (Pendapatan Daerah Regional Bruto) Bali ditopang oleh sektor pariwisata. Oleh karena itu, Tragedi Kuta memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian mikro dan makro Bali.

Ketika orang sudah kehilangan pekerjaan dan sumber-sumber ekonomi yang menjadi sandaran bagi keberlangsungan hidupnya, dampak penyertaannya adalah terjadinya patologi sosial. Itulah yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan yang bisa saja terjadi. Apabila itu menjadi kenyataan, merupakan bom kedua yang dampaknya lebih dahsyat.

Sikap dewasa dan bersatu-padunya berbagai komponen masyarakat dalam mengatasi peristiwa tragis tersebut, memberikan arti betapa nilai kemanusiaan sebagai wujud tingginya tingkat beragama masyarakat Bali telah mengundang simpati masyarakat dunia. *Respons* positif itu seakan-akan telah melahirkan solidaritas dan kohesi sosial baru di kalangan masyarakat.

Namun, kita pun tidak-lantas berhenti sampai di situ. Sikap alamiah sebagai ekspresi kearifan masyarakat dengan tidak melakukan tindakan destruktif dan fatalistik dalam menghadapi gerakan sistematis untuk melumpuhkan Bali, mestinya dihadapi dengan langkah-langkah yang lebih sistematis dan strategis pula.

Tindakan penyelamatan dan pengamanan serta *recovery* ekonomi darurat dan berjangka pendek sudah dilakukan. Masing-masing pihak dengan daya dan kemampuan yang dimiliki telah memberikan bantuan seperlunya. Tindakan spontanitas dan parsial untuk sementara sangat membantu kepanikan korban dan masyarakat.

Selanjutnya, yang perlu dipikirkan justru dampak jangka menengah dan panjang yang ditimbulkan. Ketika kita mulai berfikir kearah itu, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan analisis terhadap kebijakan yang telah berlangsung. Bersamaan dengan itu memformulasikan kebijakan baru yang lebih komprehensif dalam menata kembali pembangunan Bali se-segera mungkin harus dilakukan.

William Dunn, seorang ahli analisis kebijakan, mengatakan ada dua hal penting yang patut dilakukan dalam melakukan analisis kebijakan. Kedua langkah itu meliputi langkah *polecy introspective* dan *polecy retrospective*. Langkah pertama dimaksudkan untuk *me-review* kembali kebijakan pembangunan selama ini. Kajian ini meliputi *polecy formulation*, *polecy implementation*, dan *polecy evaluation* terhadap substansi kebijakan yang telah diambil. Dari situ akan ditemukan sumber persoalan yang mungkin saja belum teridentifikasi selama ini.

Penyikapan secara jujur, objektif dan rasional dalam melakukan analisis kebijakan, akan dapat menghasilkan rumusan yang visioner dan *problem solving* terhadap berbagai persoalan yang terjadi. Hal ini akan bermanfaat bagi penyusunan kebijakan baru dalam melakukan tingkat *polecy retrospective*. Kedua langkah yang dilakukan secara bersama-sama akan dapat meghindari hasil keputusan yang *overlapping*, tambal sulam dan parsial, akan tetapi dapat menghasilkan langkah-langkah yang lebih taktis dan strategis serta komprehensif.

Kewenangan dan tanggung jawab formal dalam melaksanakan tugas ini ada di pundak DPRD. Sebagaimana semangat otonomi daerah, DPRD sebagai badan legislatif daerah, merupakan instusi strategis yang dibekali kewenangan untuk melakukan fungsi legislasi. Di dalamnya melekat hak dan kewajiban melaukan perumusan kebijakan atau *folecy formulation*. Di sinilah sesungguhnya roh institusi itu berada.

Jujur harus diakui, percepatan dinamika pembangunan Bali telah mengubah struktur fisik dan sosial lingkungan dan kehidupan masyarakat. Transformasi sosial yang lebih cepat, telah melahirkan *inkogruensi* antara *man* dan *land*. Sikap permisif tanpa pengendalian yang memadai terhadap keseimbangan itu, menjadikan Bali yang kecil ini makin tersesak. Sementara konsep pembangunan pariwisata yang berbasis budaya, dengan pilar utama pada budaya dan masyarakat lokal, apabila tidak ditopang oleh insani yang mengerti, memahami terhadap budaya, justru makin memperparah degradasi pembangunan.

Justru di sinilah sensitivitas politik DPRD, untuk merumuskan kebijakan strategis itu sangat dinantikan.

Kebijakan itu meliputi, *review* terhadap strategi pembangunan Bali dengan menempatkan pariwisata budaya pada poros yang sebenarnya. Upaya ini mesti didukung dengan kebijakan RTRW Bali, sistem administrasi pengendalian kependudukan terpadu, pengaturan urusan lintas kabupaten dengan mengembangkan pola dan mekanisme koordinasi terpadu.

Strategi implementasi kebijakan penting juga dirumuskan.

Kita sering terjebak pada hanya memproduksi kebijakan tanpa implementasi. Oleh karena itu, sistem manajemen dan kelembagaan yang didukung SDM yang memadai justru menjadi kunci selanjutnya bagi berjalannya sebuah kebijakan. Sebaik apa pun kebijakan dirumuskan, tanpa dilaksanakan secara baik dan sungguh-sungguh, hanyalah akan menjadi kata mutiara yang indah untuk didengar. Akan menjadi paradoksial untuk bicara implementasi kebijakan, kalau kebijakannya sendiri belum terumuskan. Untuk itu merumuskan kebijakan yang retrospektif menjadi pekerjaan rumah yang mesti dilakukan.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 22 November 2002

15

Akuntabilitas Penyusunan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan komposisi keuangan daerah yang menyangkut perhitungan sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran berjalan. Pendapatan daerah akan meliputi komponen pajak dan retribusi daerah, pengelolaan sumber-sumber kekayaan daerah yang masuk dalam kategori Pendapatan Asli Daerah.

Di samping itu, kontribusi pusat kepada daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pinjaman daerah serta sumber-sumber pendapatan daerah yang lain yang sah, juga dimasukkan dalam kategori ini. Sedangkan, pengeluaran daerah meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran berjalan.

Dalam sistem anggaran berimbang, dari penyusunan anggaran akan dapat diketahui komposisi dan perhitungan sumber-sumber pendapatan daerah dalam menggali potensi daerah bagi pembiayaan tugas rutin dan tugas pembangunan yang dilaksanakan. Dari situ pula akan dapat diketahui perencanaan strategis yang ingin diwujudkan pemerintah bagi pelaksana kebijakan pembangunan di daerah.

Idealnya, komposisi APBD dari sumber pendapatan berasal dari PAD. Sementara komposisi pengeluaran lebih memprio-

ritaskan pada program pembangunan dan pelayanan publik yang akan dilaksanakan pemerintah. Namun, kalau kita cermati komposisi anggaran yang disusun, baik APBN maupun APBD selama ini, sumber pendapatan dari sektor bantuan dan atau hibah memiliki kontribusi yang sangat signifikan.

Di sisi pengeluaran, tampak pula biaya rutin yang dilakukan pemerintah nilainya lebih besar daripada biaya pembangunan yang akan dilaksanakan.

Sebagai contoh, usulan RAPBD Provinsi Bali tahun 2003, masih menunjukkan betapa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan anggaran berimbang. Hal ini terlihat dari adanya defisit anggaran yang jumlahnya melebihi sepuluh milyar rupiah. Begitupun dalam penyusunan anggaran pengeluaran daerah, besarnya beban biaya rutin ketimbang biaya pembangunan menggambarkan komposisi anggaran yang belum menunjukkan pola anggaran yang ideal.

Di sisi lain, tuntutan akan akuntabilitas pemerintah dalam penyusunan APBD mulai mengemuka. Berkembang gagasan perlunya debat publik dalam proses penyusunan APBD merupakan salah satunya. Munculnya gagasan ini tampaknya didasarkan atas dorongan perlunya ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran yang selama ini cenderung dilakukan secara tertutup, hanya disusun oleh pemerintah dan DPRD. Ada kekhawatiran, proses politik kebijakan seperti itu akan sangat memberikan peluang terjadinya tawar-menawar antara kedua institusi untuk saling mengakomodasi kepentingan pragmatis masing-masing. Sementara tujuan penyusunan anggaran untuk menghasilkan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, objektif dan rasional bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat terabaikan.

Sepanjang gagasan debat publik dimaksudkan untuk mendorong partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, memang penting untuk dilakukan. Apalagi tuntutan untuk mewujudkan *clean governance* dan *good governance* sudah

disikapi oleh pemerintah melalui kebijakan akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam perspektif partisipasi, debat publik akan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi berbagai hal yang menyangkut komposisi anggaran yang dirancang.

Sementara dari sudut pemerintahan, rencana yang disusun merupakan rumusan dari hasil diskusi publik, sebagai *stake holders* yang nantinya menjadi subjek dan objek ketika kebijakan anggaran itu diimplementasikan.

Yang perlu dipikirkan justru dalam meng-*create* gagasan itu sebagai wahana demokrasi dalam melakukan uji publik terhadap kebijakan. Artinya, apabila gagasan itu disepakati, dalam pelaksanaannya memerlukan persyaratan tertentu.

Pertama, menyangkut persamaan persepsi menyangkut pengertian publik. Selama ini, publik mengandung pengertian yang beragam. Istilah yang awalnya diadopsi dari *public* dalam penerjemahannya disesuaikan dengan konteksnya. Bisa berarti negara, pemerintah, masyarakat dan komponen-komponen komunitas tertentu sesuai dengan profesi, keberadaan dan batasan-batasan.

Keragaman pengertian ini lalu dapat mempersulit kita dalam mengidentifikasi siapa publik yang terlibat dalam pelaksanaan debat tersebut. Apakah keseluruhan, sebagian atau orang-orang tertentu yang dianggap memiliki kapasitas untuk membahas persoalan sesuai dengan kualifikasi *concern*-nya.

Hal ini penting, agar dalam proses pelaksanaannya tidak mengalami distorsi. Tidak jarang *agresivitas partisipatoris* yang dimiliki, justru akan menjadikan proses debat publik dimanfaatkan untuk melakukan desiminasi atas nama publik. Kecenderungan yang kerap muncul dalam proses debat publik yang dilakukan tanpa didasarkan atas rambu-rambu yang jelas, justru akan berimplikasi konterproduktif bagi kebijakan anggaran. Apa yang selama ini kita lihat dalam setiap proses debat publik yang melibatkan orang banyak tanpa mempertimbangkan kapasitas dan didasarkan atas kesadaran demokrasi yang memadai, cenderung berubah menjadi debat kusir.

Lebih-lebih di era kebebasan berbicara, banyak orang yang bisa bicara, namun sangat sedikit yang bisa mendengarkan. Padahal sebuah debat akan dapat berjalan efektif apabila masing-masing pihak mengetahui duduk persoalan, memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban serta sepakat atas aturan-aturan atau etika berkomunikasi. Cerita Dr. Nasikun, ahli sosiologi UGM tentang dua orang gila cerita, dari kejauhan tampak asyik berbicara, berdialog dan saling adu argumentasi. Namun ketika didekati masing-masing bicara sendiri-sendiri tanpa saling mengetahui dan memahami apa yang sedang dibicarakan. Maklumlah mereka adalah orang gila.

Kedua, gagasan untuk melakukan debat publik agar berjalan efektif sudah seharusnya didukung dengan sikap dan perilaku demokratis, rasional, transparan sebagaimana harapan kita untuk mendapatkan akuntabilitas penyusunan anggaran. Tanpa itu, proses uji publik yang diharapkan, tidak lebih sebagai ajang pembantaian publik yang tidak produktif dan peningkatan responsibilitas kebijakan APBD.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 29 November 2002

16

Kesempatan Lembaga Peradilan

Lima belas tersangka aksi terorisme pengeboman di Kuta Bali, sudah ditangkap dan kini berada di rumah tahanan Polda Bali. Kerja keras kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku pengeboman di Kuta, membuahkan hasil yang cukup menggembirakan.

Dalam tenggang waktu relatif singkat – dua bulan – satu per satu tersangka pelaku dapat dididuk. Merupakan langkah spektakuler, karena dalam waktu yang relatif singkat jaringan terorisme itu dapat digulung. Awalnya, banyak pihak ragu, kasus pengeboman yang menewaskan 185 orang lebih itu, nasibnya akan sama saja dengan peristiwa serupa sebagaimana terjadi di beberapa tempat di daerah lain di Indonesia, yang sampai saat ini para pelakunya belum teridentifikasi. Berkat kerja keras dan kerja sama Polri dengan AFP (*Australian Federal Police*) yang tergabung dalam Tim Investigasi Bom Bali ini, telah menjawab keraguan itu.

Penghargaan yang tulus atas pemerintah khususnya pihak kepolisian ini ternyata mendapatkan pujian masyarakat internasional. Sebagaimana dikatakan Menlu Hassan Wirajuda, banyak negara memuji upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi aksi terorisme yang sangat mengganggu rasa aman dan mengancam nilai kemanusiaan itu.

Aksi pengeboman 12 Oktober di Kuta, tidak hanya menghancurkan bangunan fisik, menelan korban ratusan manusia,

akan tetapi dampaknya telah menghancurkan kehidupan ekonomi masyarakat dan merendahkan martabat bangsa di mata internasional. Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat religius, ramah tamah dan memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap sesama, ternyata *image* itu dihancurkan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Adalah wajar apabila publik sangat mengutuk keras aksi tersebut, sebagai tindakan biadab, di luar perikemanusiaan. Bahkan, agama mana pun tidak membenarkan tindakan itu.

Keberhasilan kinerja tim investigasi dalam mengumpulkan data, barang bukti dan sampai pada penetapan tersangka dalam proses hukum, barulah langkah awal. Masih ada proses pembuktian hukum lainnya yang harus dilalui sampai akhirnya para tersangka secara sah dan meyakinkan, perbuatannya dinyatakan melanggar hukum dan karenanya ditetapkan sebagai terpidana untuk mendapatkan ganjaran hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Masyarakat berharap, kesigapan kepolisian untuk mengungkap kasus ini, diikuti pula oleh lembaga pengadilan, untuk melakukan pemrosesan secara tuntas, lugas dan profesional serta dapat memberikan ganjaran hukum yang setimpal dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Setelah proses penyidikan dapat dituntaskan, harapan masyarakat kini tertuju pada instusi hukum selanjutnya. Yakni lembaga pengadilan. Sudah dapat dipastikan, bahwa tersangka akan diproses di Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai wilayah yurisdiksi kejadian. Pihak pengadilan sendiri tampaknya tidak mau kehilangan momen, untuk mempertaruhkan reputasi dalam menyelesaikan kasus yang mendapat sorotan publik internasional. Ketua PN Denpasar telah mengatakan dirinya akan secara langsung turun tangan memimpin tim yang akan mengadili kasus “bergengsi” ini.

Memang, aksi pengeboman telah kerap terjadi di berbagai daerah. Sebagian besar kasus tersebut pelakunya belum teridentifikasi, sehingga proses hukum terhadapnya belum dapat

dilakukan. Maka, penanganan hukum terhadap para tersangka pelaku tindakan pidana teroris yang dengan sengaja menghilangkan ratusan nyawa orang tak berdosa, merupakan pengalaman baru bagi lembaga pengadilan kita. Begitu pun dasar pijakan baru dengan diberlakukannya Perpu Antiterorisme dan penanganan secara tuntas kasus bom Bali ini, perlu dijabarkan secara lebih teknis bagi para penegak hukum sebagai sumber rujukan.

Komitmen dan *political will* pemerintah untuk memberangus gerakan terorisme di Indonesia dengan dikeluarkannya Perpu tersebut, merupakan bentuk dukungan politik pemerintah bagi aparat untuk tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas dalam menghadapi aksi terorisme yang benar-benar nyata adanya di bumi Indonesia.

Dukungan politik ini tampaknya tidak hanya datang dari pemereintah. Sebagaimana opini yang berkembang, harapan, keinginan masyarakat agar proses pengadilan terhadap tersangka benar-benar dilakukan secara terbuka dan objektif mulai berdatangan. Harapan dan dukungan itu, tidak terlepas dari rasa *jengah* masyarakat terhadap para pelaku.

Di samping itu, harapan besar terhadap kehadiran “Ratu Adil” sebagaimana imajinasi kaum petani Jawa yang dulu tertindas oleh kebijakan pemerintah kolonial dalam memberlakukan sistem perpajakan dan mengebiri hak keadilan petani, kini seakan-akan bermetamorfosis dalam harapan masyarakat bagi lembaga peradilan yang selama ini citranya cenderung merosot.

Langkah dewasa yang ditunjukkan masyarakat ketika menghadapi tragedi pengeboman dengan memberikan dukungan moral kepada pihak kepolisian untuk melakukan penanganan secara profesional dalam mengungkapkan kasus tersebut, tampaknya perlu dijaga dan diberikan kepada lembaga peradilan. Artinya, dukungan publik dalam bentuk pengawasan terhadap proses hukum dalam melakukan proses penegakan hukum secara adil dan objektif.

Momen ini merupakan kesempatan yang baik bagi lembaga peradilan dan para hakim untuk menunjukkan reputasinya sebagaimana yang telah dilakukan oleh hak kepolisian.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 13 Desember 2002

17

Bantuan Pemerintah dan “*Bargaining*” Politik

Dinamika politik kepartaian sebagai bagian dari tatanan politik baru dalam proses demokratisasi saat ini sedang menunjukkan geliatnya. Sistem multipartai, mendorong tumbuhnya parpol bagaikan jamur di musim hujan. Ada dua kecenderungan yang dapat terjadi dari fenomena ini. Pertama, sistem multipartai yang telah melahirkan ratusan parpol menunjukkan adanya divergensi kepentingan ideologi politik dari kultur masyarakat pluralistis. Dalam kehadiran banyak parpol diharapkan dapat memberikan ruang bagi sinergisme politik kepentingan untuk diperjuangkan secara legal.

Kedua, lahirnya banyak parpol, dengan sendirinya akan menjadikan persaingan politik di antara mereka semakin kompleks. Dalam suasana kompetisi, masing-masing parpol diharuskan dapat menjual dirinya kepada konstituen dengan selalu menampilkan *performance* partai yang memberikan harapan dan ruang publik yang luas bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi.

Sistem multipartai sebagaimana telah dipraktikkan di berbagai negara *modern*, dengan sendirinya harus didasarkan pada semangat demokrasi yang tinggi, adanya sikap dan perilaku politik yang tidak menafikan perbedaan serta semangat untuk melakukan *political coalition* di antara parpol yang ada. Sebab, sistem ini tidak akan pernah melahirkan tatanan

kekuasaan politik mayoritas.

Berangkat dari kesadaran tersebut, setiap parpol yang ada sudah semestinya dibangun atas dasar idealisme profesional dan memiliki *self confident* baik dari segi manajemen, pengelolaan maupun sistem pendanaan bagi berjalannya kinerja partai.

Lahirnya tiga paket Undang-Undang Politik baru (UU No. 2,3 dan 4 Tahun 1999) sebagai pengganti UU bidang politik sebelumnya, merupakan momentum baru bagi penataan kerangka sistem politik Indonesia. Dari suatu kondisi sebelumnya yang sangat jauh dari definisi ruang *public*, menuju tumbuhnya proses partisipasi dalam kerangka demokratisasi rakyat.

Ada tiga substansi mendasar yang dapat disimak dari perubahan tatanan politik itu. Pertama, mengenai susunan dan kedudukan DPR/MPR, dan DPRD sebagai lembaga legislatif yang ditempatkan pada fungsinya, bahkan cenderung *legislative heavy*. Kedua, menyangkut keberadaan partai politik (Parpol), sebagai institusi politik yang diharapkan benar-benar mampu memainkan perannya sebagai wahana artikulasi, agregasi kepentingan politik masyarakat. Ketiga, menyangkut Pemilu dengan sistem *proporsional plus*, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil (*luber-jurdil*).

Khusus tentang eksistensi parpol, dalam UU tersebut telah sangat jelas diatur bahwa pemerintah tidak lagi ditempatkan sebagai pembina politik. Dengan menganut sistem multipartai, masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik sebagai wahana partisipasi politik dalam merebut kekuasaan. Sementara pengelolaan partai politik dan sumber-sumber keuangan parpol diharapkan dapat diusahakan secara mandiri dengan tidak menutup kemungkinan bagi sumbangan pihak ketiga, baik perorangan, organisasi atau perusahaan dan bantuan pemerintah dalam jumlah tertentu.

Dengan demikian, parpol sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam memperjuangkan kepen-

tingan lewat jalur kekuasaan, diharapkan benar-benar dapat menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya. Parpol diharapkan dapat menjalankan fungsi sosial dan politiknya secara mandiri dan berkelanjutan.

Perubahan paradigma politik kekuasaan, yang tidak lagi menempatkan pemerintah sebagai pembina politik, sudah semestinya disikapi oleh parpol sebagai ajang pengembangan jati diri dan kemandirian. Semangat ini telah menempatkan parpol tidak lagi di bawah bayang-bayang kekuasaan pemerintah.

Menyimak dinamika politik kepartaian kontemporer saat ini, ruang politik yang ada tampaknya belum dapat dikelola secara optimal. Era kepartaian yang sesungguhnya mesti dimaknai sebagai era kebebasan dan demokratisasi politik bagi tumbuhnya pengorganisasian politik yang *modern* dalam mempersiapkan sirkulasi kekuasaan yang kompetitif, rasional dan partisipatif, ternyata masih menyisakan metamorfosis paradigma politik lama yang usang. Hal ini terlihatnya dari sikap dan perilaku politik yang kurang kondusif sebagaimana terlihat dari perselisihan paham tentang pendistribusian dana bantuan parpol oleh pemerintah.

Di satu sisi, parpol yang jumlahnya mencapai puluhan itu menghendaki adanya pembagian yang merata, karena ini menyangkut bantuan terhadap organisasi (dengan mengabaikan besar kecilnya perolehan suara pada Pemilu 1999). Di sisi yang lain pembagian merata dianggap kurang adil, utamanya oleh partai besar yang memenangkan suara terbanyak pada pemilu lalu.

Untuk menjembatani perbedaan persepsi tentang keadilan tersebut, pemerintah membuat peraturan yang disepakati adanya pembagian dana bantuan berdasarkan jumlah konstituen yang dihitung dari besarnya jumlah suara yang diraih oleh masing-masing parpol. Konsekuensinya, parpol yang meraup suara terbesar akan mendapatkan bantuan terbanyak.

Adanya dualisme interpretasi terhadap aturan tersebut, memang tidak terlepas dari proses dan kepentingan politik

yang melekat pada masing-masing pihak yang ada di wilayah politik itu. Fenomena ini bukanlah hal yang baru dalam proses politik, apalagi menyangkut pembagian “rezeki”.

Tidak tertutup kemungkinan penetapan besarnya bantuan dan pola pendistribusian yang didasarkan atas kesepakatan legislatif ikut memberikan warna terhadap keputusan yang dihasilkan. Oleh karena menyangkut proses politik yang melibatkan legislatif dalam penetapan bantuan, sudah dapat dipastikan peranan politik dominan di legislatif akan sangat memberikan warna bagi keputusan itu. Dalam hal ini pemerintah sebagai fasilitator diposisikan hanya sebagai pelaksana dari keputusan politik yang telah disepakati oleh Dewan.

Terlepas dari semuanya itu, ke depan tampaknya perlu dikaji lagi efektivitas dan relevansi bantuan pemerintah tersebut dalam mewujudkan kesadaran dan peningkatan pemahaman politik bagi terciptanya iklim politik yang demokratis bagi masyarakat. Sepanjang bantuan dimaksud dapat diarahkan manfaatnya bagi kepentingan konstituen dalam artian yang sesungguhnya, tentu bantuan tersebut masih relevan untuk tetap dianggarkan. Namun kalau tidak, hendaknya dana yang ada diarahkan untuk kepentingan publik yang lebih mendasak.

Adanya bantuan dana dari pemerintah dalam bentuk uang segar kepada parpol, di samping sebagai bagian dari paradigma politik lama yang kurang relevan, bisa saja dimanfaatkan sebagai ajang *bargaining* politik dan tentunya akan sangat mengganggu kredibilitas dan ekstensi parpol di mata rakyat.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum’at, 20 Desember 2002

18

Efektifitas Kunker Gubernur

Gubernur beserta rombongannya baru saja mengakhiri kunjungan kerja (kunker) ke daerah kabupaten/kota di seluruh Bali. Kunjungan kerja ini tidak saja melibatkan jajaran birokrasi pemerintah, akan tetapi pimpinan DPRD provinsi sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi Bali.

Sebagai bagian dari sistem pengawasan struktural, kunjungan kerja Gubernur ini merupakan tradisi birokrasi, dilaksanakan dalam setiap tutup tahun anggaran. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) terhadap efektivitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dicanangkan.

Gubernur selaku pimpinan daerah provinsi berkewajiban melakukan monitoring yakni melihat secara langsung berbagai program pembangunan utamanya yang bersumber dari dana-dana pembangunan propinsi dan pusat atau sumber-sumber yang lainnya, baik yang bersifat fisik seperti pembangunan gedung, kantor, jembatan dan yang lainnya, maupun non fisik yang menyangkut peningkatan *human development indeks* masyarakat di daerah seperti tingkat pendidikan masyarakat, kesehatan dan kesejahteraannya.

Hasilnya akan dijadikan bahan kajian dalam mengevaluasi *out put* dan *out come* termasuk kualitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi pemba-

ngunan, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena menyangkut penilaian kinerja, pada masa yang lalu kunjungan kerja seperti ini lazim dimanfaatkan sebagai ajang unjuk kebolehan dan *bargaining position* pejabat terkait dengan mengatur dan menampilkan program-program pembangunan tertentu yang dianggap memiliki tingkat keberhasilan untuk ditinjau oleh Gubernur. Tidak jarang rekayasa kunjungan ini dilakukan hanya untuk memuaskan dan menyenangkan hati pimpinan daerah, atau asal bapak senang (ABS). Sementara persoalan krusial yang sesungguhnya memerlukan penanganan lintas sektoral dengan sistem koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik yang bersifat horizontal di daerah masing-masing maupun vertikal dengan pemerintahan yang lebih atas, nyaris terabaikan. Hal ini terjadi karena kultur birokrasi masa lalu yang sangat *hirarchial* dan sentralistik menyuburkan tumbuhnya “birokrasi jenggot” yang akarnya menggelayut ke atas.

Upaya *reinventing governance* sebagai pengembangan paradigma baru dalam sistem birokrasi pemerintahan, dengan menempatkan pemerintah propinsi bukan lagi atasan langsung kabupaten/kota, dengan sendirinya membawa konsekuensi atas makna sistem pengawasan struktural yang dilakukan gubernur kepada bupati/wali kota. Artinya, hubungan gubernur dengan bupati/wali kota lebih bermakna fungsional ketimbang struktural.

Perubahan Paradigma

Perubahan paradigma ini tidak lantas memandang kunjungan kerja gubernur sebagai langkah mubazir. Walaupun UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah atau yang dikenal dengan UU Otonomi Daerah, telah menempatkan kewenangan di kabupaten/kota, itu bukan berarti peran gubernur sebagai kepala wilayah terabaikan. Justru dalam menyikapi berbagai persoalan daerah, baik yang menyangkut

sistem pelimpahan kewenangan, pengaturan urusan, koordinasi antar kabupaten/kota, serta sistem koordinasi dan jaringan antardaerah kabupaten/kota, keberadaan gubernur menjadi sangat penting.

Sepanjang perubahan paradigma di atas juga diikuti oleh paradigma baru bagi sikap dan perilaku birokrasi dalam melaksanakan fungsi *monitoring* dan evaluasi dengan sistem pengembangan analisis kebijakan komprehensif, maka kunjungan kerja yang dilakukan tidak sekedar *ngelawang*, apalagi *malancaran*, namun tujuannya adalah *macecingak* untuk melihat kondisi *real* masyarakat, perkembangan pembangunan daerah serta merumuskan kendala dan tantangan yang dihadapi daerah yang bisa saja saling terkait antara satu dan yang lainnya untuk dapat dirumuskan pemecahannya di tingkat provinsi.

Sistem analisis kebijakan komprehensif dimaksud adalah dengan memadukan hasil temuan kunjungan kerja tim yang selanjutnya dilakukan upaya analisis evaluasi sebagai bagian dari *polecy introspective* yang menghasilkan kelemahan, kekuatan dan tantangan serta peluang, sebagai bahan penyusunan *polecy restropective* bagi pemecahan masalah pembangunan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi utama pemerintahan.

Yang perlu juga dipikirkan dalam perumusan ini adalah pemaknaan sistem *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan, tidak ditempatkan sebagai upaya pengawasan yang parsial. Namun, ia merupakan proses kontinuitas dari perencanaan berkelanjutan. Kalau kita sepakat bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka pemberdayaan, partisipatif dan berkelanjutan, maka *monitoring* dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui dan mencermati tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan dalam rangka ketiga hal diatas.

Begitupun untuk daerah kabupaten/kota yang menjadi objek kunjungan. Kunjungan kerja tersebut mestinya dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tentang kondisi objektif daerah termasuk kendala dan tantangan yang

dihadapi dalam menunjang proses keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Keluhan yang disampaikan gubernur atas respons bupati/wali kota dalam setiap penyelenggaraan rapat koordinasi misalnya, merupakan pertanda adanya misinterpretasi bagi daerah kabupaten/kota dalam memaknai otonomi daerah.

Kita pun mesti mahfum, di tengah kompleksitas persoalan kemasyarakatan, pembangunan, dan pemerintahan yang makin *mondial*, membutuhkan sistem birokrasi yang handal untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara cepat, murah dan tidak berbelit-belit. Upaya ini di samping membutuhkan aparatur yang memiliki kualifikasi teoretikal dan *technical skill*, yang terpenting adalah bagaimana *distribution of power* yang dilakukan diikuti sistem koordinasi yang komprehensif. Kunjungan kerja yang dilakukan gubernur dapat menjadi wahana efektif untuk membangun kembali sistem koordinasi yang selama ini mengalami hambatan.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 27 Desember 2002

19

Idealisme “Sepi Ing Pamrih”

*B*erbagai catatan politik akhir tahun memprediksi, memasuki tahun 2003 akan ditandai alunan terompet politik, sebagai pertanda meningkatnya aktivitas politik kepartaian. Kecenderungan ini ditandai oleh makin maraknya perhelatan politik kepartaian, melalui berbagai kegiatan sosialisasi, konsolidasi dan strategi pemenangan menyongsong Pemilu 2004.

Boleh dikata, tahun 2003 merupakan tahun terakhir bagi parpol untuk melakukan uji sah bagi visi, misi dan strategi politik kepartaian dalam meraup simpati konstituen. Pemanasan suhu politik akan terjadi tidak hanya antarpartai, namun juga internal partai. Intrik-intrik politik antarkader untuk merebut posisi. Terjadinya faksi di tubuh partai akan merepotkan pengelolaan dan pengorganisasian dalam menyatukan langkah bagi soliditas menghadapi hambatan dan tantangan.

Yang lebih menarik, justru pertarungan antarpartai dalam menanamkan investasi politik. Kecenderungan ini akan berpengaruh pada dikotomi sikap dan perilaku politik di kalangan elite. Pertama, ada kecenderungan munculnya sikap politik progresif-revolusioner di kalangan elite politik yang berkepentingan dalam merebut kekuasaan 2004 dengan mengembangkan intrik dan kritik atas tindakan dan kebijakan politik yang ada. Sasaran empuk yang akan menjadi konsumsi politik menarik di antaranya komitmen bagi pemberantasan KKNK, situ-

asi keamanan, komersialisasi aset-aset nasional, penegakkan hukum dan HAM serta keadilan, pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Begitupun naiknya tarif listrik, telepon dan harga BBM dengan sendirinya akan berpengaruh langsung terhadap tingkat konsumsi dan daya beli sebagian besar rakyat.

Sementara *actor* politik yang ada di lingkaran kekuasaan saat ini cenderung menunjukkan sikap konservatif, yakni bagaimana sebisanya mempertahankan kekuasaan yang telah ada di genggamannya. Tidak jarang cara-cara yang dilakukan menyerupai proses politik sebelumnya. Gejala metamorfosis dalam proses politik bisa menggenjala. Terjadinya tarik-menarik kepentingan dan merebut pangsa pasar politik merupakan wajah perpolitikan kita memasuki tahun kambing air.

Start awal alunan terompet politik dimulai oleh PDI-P yang pada tanggal 12 Januari 2003 merayakan ulang tahunnya di Mengwi, Bali.

Sebagaimana layaknya setiap perayaan ulang tahun, kegiatan ini tentu tidak hanya dimaknai sebagai proses seremonial dengan menampilkan berbagai acara hiburan yang spektakuler, sebagai ajang *show-force* belaka. Jauh lebih penting adalah bagaimana partai pemenang pemilu ini dapat merenungkan makna substansial dengan melihat lebih jernih dan objektif langkah-langkah konkret yang sudah dan sedang dipikirkan dalam menghadapi kompleksitas persoalan bangsa.

Belum hilang dari ingatan kita, hadirnya PDI-P di pentas panggung politik nasional pada waktu itu, didorong oleh situasi dan kondisi politik yang tidak kondusif. Megawati sebagai pimpinan partai, boleh dikata mencerminkan makna simbolik dari representasi keterwakilan rakyat yang tertindas dan terpinggirkan oleh arogansi kekuasaan. Keberhasilan Kongres I di Bali di tengah-tengah tekanan dan ketertindasan, telah mampu menghipnotis nurani rakyat. Kelahirannya seakan-akan memberikan harapan baru bagi berkibarnya panji-panji keberpihakan kepada rakyat, kemandirian, solidaritas,

nasionalisme yang sesungguhnya masih lekat mengitari sentimen sebagian besar rakyat Indonesia.

PDI-P, partai yang berbasis nasionalis, partainya kaum marhenis, dapat tampil sebagai pemenang dengan mendulang lebih dari 33% suara di tingkat nasional. Sementara di tingkat lokal seperti Bali mendapatkan mayoritas suara di legislatif.

Ketika kepercayaan rakyat telah diserahkan untuk dikelola PDI-P, dan pada saat kekuasaan sudah ada di genggamannya para pejuang demokrasi ini, berbagai persoalan yang ada dan terjadi tidak serta merta sirna. PDI-P tidak hanya harus berhadapan dengan kondisi internal yang mengalami keterlambatan dalam menata, memantapkan dan mematenkan kader. Tanggung jawab untuk mengawal berbagai agenda yang telah dicanangkan sebelumnya oleh gerakan reformasi, memerlukan perhatian khusus untuk direalisasikan.

Di tingkat keterbukaan, kebebasan dan penghargaan terhadap berkembangnya demikian kritis serta konsepsi pengembangan potensi lokal melalui otonomi daerah dan konsep *reinventing governance*, mungkin kita bisa sedikit menghela nafas segar. Namun, warisan kompleksitas persoalan urgen yang secara langsung menyentuh kebutuhan intrinsik masyarakat seperti situasi ekonomi yang tidak menentu, rasa aman, penegakan hukum, konflik *vertical* dan *horizontal*, tantangan munculnya *etno-nasionalism* serta pemberantasan KKNK sebagai bagian agenda reformasi, masih menyisakan persoalan yang patut dituntaskan.

Memasuki tahun ke-4 dalam mengawal dan menjalankan roda kekuasaan politik dan pemerintahan, ulang tahun yang dipusatkan di Bali ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengunggah kembali semangat kerakyatan, kemandirian, emoh-kekerasan, kesantunan politik dan kedislipinan dalam memegang amanat reformasi yang dianggap belum berjalan normal itu.

Upaya replikatif bagi tumbuhnya semangat nasionalisme, demokrasi dan kemandirian serta kebudayaan politik menjadi

urgen dilakukan. Apalagi di tengah sorotan tajam yang kini tertuju pada petugas partai yang duduk baik di legislatif maupun eksekutif. Belumah terlambat kiranya, apabila momen perayaan ulang tahun ini dimanfaatkan oleh seluruh jajaran partai untuk melakukan introspeksi, utamanya dalam mentransformasikan melekatnya kata Perjuangan dalam untaian kata Partai Demokrasi Indonesia.

Transformasi ideologi politik kepartaian ini menjadi mendesak dilakukan utamanya dalam menyatukan visi dan persepsi serta strategi partai di kalangan kader-kader partai yang tampaknya masih mengalami kendala, kesenjangan komunikasi di antara tokoh-tokoh lama yang sangat ideologis dengan mereka yang *new comers* tetapi memiliki kekuasaan karena duduk di struktur partai dengan sikap politik yang lebih pragmatis.

Memadukan kedua kekuatan yang memang tidak harus dipertentangkan itu niscaya akan dapat melahirkan kader-kader militan rasional, nasionalis sejati, bersahaja, santun dan berkomitmen bagi pembelaan kepentingan rakyat kecil. Harapan untuk menjadikan PDI-P sebagai partai baru, yang terbebas dari konflik laten dari strategi fusi ideologis beberapa partai sebelumnya bisa terwujud. Ini bisa berkembang sebagai wahana munculnya kader-kader partai yang memiliki mentalitas yang tangguh bagi berjayanya pejuang demokrasi dan demokrat pejuang, dengan diliputi idealisme *rame ing gawe sepi ing pamrih*.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 3 Januari 2003

20

Nasib Partai-Partai Kecil

Sidang Paripurna DPR RI pada 18 Februari 2003 telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Penetapan Undang-Undang ini, telah memberikan kepastian hukum bagi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum 2004. Masih banyak tahapan yang harus dilaksanakan pasca rampungnya *gawe* DPR tersebut. Di antara sekian banyak tahapan itu adalah tahapan penilaian terhadap partai-partai politik peserta Pemilu 2004.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan kewenangan untuk menetapkan dan meneliti keabsahan syarat-syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu. Untuk bisa menjadi peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Bab III, Pasal 14 UU Pemilu, politik yang ada harus memenuhi persyaratan: diakui keberadaannya sesuai dengan UU tentang partai Politik, memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 jumlah propinsi dan di kabupaten/kota di propinsi termaksud, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang pada setiap kepengurusan partai politik, yang dibuktikan dengan kartu anggota partai politik. Persyaratan lain, harus memiliki kantor tetap dan mengajukan nama dan tanda gambar partai bersangkutan.

Sementara bagi partai politik yang sudah pernah mengikuti Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 15, diharuskan memenuhi persyaratan memperoleh sekurang-kurangnya 3%

jumlah kursi DPR, memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD propinsi yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% jumlah propinsi di Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPR, memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di 50% jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Bertolak dari kedua pasal tersebut dapat dipastikan hampir sebagian besar partai politik yang jumlahnya telah mencapai 237 parpol, akan kelimpungan. Ambisi mendirikan parpol boleh menjadi keniscayaan bagi para tokoh politik, namun ambisi untuk ikut dalam perhelatan Pemilu sama sekali soal lain. Bagaimanapun keberadaan parpol sangat berbeda dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), atau sekadar *sekaa demen*.

Parpol sebagai wadah bagi pengejawantahan idealisme politik, orientasinya sangatlah jelas, yaitu mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik melalui kekuasaan. Legitimasi kekuasaan hanya dapat diperoleh melalui Pemilu. Apabila tidak ikut dalam Pemilu kesempatan untuk berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan politik menjadi sirna.

Memang orientasi politik demokrasi tidak semata-mata dapat diterjemahkan pada formalisme politik belaka. Sistem politik demokratis akan memberikan ruang kepada siapapun termasuk parpol yang tidak dapat ikut dalam Pemilu untuk turut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Namun ruang itu menjadi terbatas, karena kanal agregasi dan artikulasi politik formal memang diperuntukkan bagi parpol peserta Pemilu.

Dalam Pasal 16 ayat (2) disebutkan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu akan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum hari pemungutan suara. Kalau pemungutan suara dilaksanakan bulan Juni 2004, itu berarti kesempatan untuk melakukan konsolidasi organisasi bagi parpol-parpol kecil tinggal 3 bulan lagi. Adalah sesuatu yang absurd untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan parpol-parpol itu untuk lolos ikut Pemilu.

Disinilah komitmen politik dan kesungguhan mereka yang membangun gagasan lewat pendirian parpol akan diuji. Tuntutan legalitas atas keberadaan parpolnya mengharuskan mereka untuk bersungguh-sungguh dapat melakukan pengembangan organisasi sampai dapat memenuhi syarat minimal sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Demikian pula bagi parpol yang telah pernah menjadi peserta Pemilu namun prosentase suaranya berada di bawah *electoral threshold*, harus mulai mengambil ancang-ancang melakukan merger dengan parpol yang lain kalau berkeinginan untuk menjadi peserta Pemilu 2004.

Jaminan UUD 1945

UUD 1945 memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, termasuk membentuk partai politik. Kebebasan untuk mendirikan partai politik merupakan hak bagi setiap warga negara dan dijamin oleh UU. Yang perlu dipahami, tidak semua partai politik yang ada harus bisa ikut menjadi peserta pemilu, karena untuk dapat menjadi peserta pemilu diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU.

Kalau ditelusuri sejarah perkembangan partai-partai politik di Indonesia dari sebelum Kemerdekaan sampai pada pasca-Kemerdekaan, sangatlah tampak segmentasi politik rakyat terdistribusi dalam lima kekuatan ideologi besar, yakni kekuatan nasionalis, sosialis, islam, islam-nasionalis, komunis. Ada kalanya kekuatan-kekuatan tersebut tersegmentasi lagi menjadi partikel-partikel kecil dan pada waktunya juga akan berkolaborasi, sepanjang faktor ideologis sebagai pendorong berdirinya partai-partai politik itu similar.

Saat ini memang sangat sulit untuk melakukan pemetaan segmentasi ideologis sebagai parameter pembeda antara partai politik yang ada. Kesamaan ideologi tidak dengan sendirinya dapat menggabungkan kelompok menjadi satu wadah partai. Sangat banyak dijumpai partai yang senyatanya seideologi, karena perbedaan kepentingan yang bersifat personal terpecah menjadi partai baru.

Lebih celaka lagi, justru berdirinya partai politik yang tidak jelas ideologisnya. Menurut mereka, ideologi tidaklah penting, yang penting bagaimana kehadiran partai dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada konstituen dan rakyat dalam artian seluas-luasnya. Mungkin ini yang disebut *the end of ideology*.

Dengan sistem dan aturan Pemilu tersebut, nasib partai-partai kecil akan menjadi sangat nelongso. Melalui persyaratan sangat ketat, tersedianya waktu yang relatif singkat mereka harus mampu mengembangkan organisasi di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas. Untuk itu, diperlukan kesungguhan, kemampuan dan kerja keras bagi pengurus partai, membangun suprastruktur dan infrastruktur kepartaian. Tampaknya, hanya dengan berbekal idealisme tidaklah cukup bagi pendirian sebuah parpol, diperlukan tambahan energi ekstra, dengan dukungan pendanaan yang kuat, kalau berkeinginan mendirikan partai yang kuat.

Belajar dari pengalaman partai-partai besar seperti di AS, Jepang, dan Malaysia, untuk dapat menjadi partai berkuasa memerlukan waktu yang panjang dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Pengalaman ini dapat dijadikan cermin berharga bagi keberadaan parpol di Indonesia dengan menjalankan kiprah politiknya bagi kesejahteraan masyarakat. Jangan lantas hanya karena mendekati Pemilu mereka beramai-ramai mendirikan parpol, setelah itu hilang, dan muncul kembali ketika Pemilu berikutnya tiba.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 28 Februari 2003

21

Kembali ke Jati Diri

Mengisi dan mempertahankan kemerdekaan sama sulit dan pentingnya dengan merebut kemerdekaan. Begitulah pesan *founding fathers* kepada generasi penerus perjuangan. Dalam merebut kemerdekaan, semua potensi dan kekuatan terpadu dibingkai oleh semangat soliditas, menghadapi musuh bersama tanpa diselimuti pamrih, terkecuali bagaimana kemerdekaan itu sesegera mungkin dapat diraih.

Ketika kemerdekaan telah ada dalam genggaman, tibalah saatnya untuk mengisi, mengelola, memanfaatkan dan memaknainya dengan mengimplementasikan komitmen, mewujudkan cita-cita bersama. Musuh bersama sebagai sumber motivasi terbangunnya solidaritas mulai sirna. Yang ada, pembagian peran, siapa melakukan apa, di mana, kapan serta siapa mendapatkan apa.

Ungkapan di atas, tampaknya sangat signifikan untuk menggambarkan keberadaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saat ini. Sebagai partai pemenang, banyak kritik dan sorotan yang tertuju padanya. Baik menyangkut kondisi internal partai, kinerja partai, sikap dan perilaku kader serta sentuhan kebijakan strategis bagi kepentingan publik.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P yang berlangsung di Jakarta, tampaknya akan menjadi ajang evaluasi bagi petugas partai terhadap fenomena yang berkembang, yang langsung

maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra partai. Dalam pesan politik Megawati selaku ketua umum partai, secara tegas mengatakan perlunya komitmen, disiplin dan kepatuhan terhadap hukum bagi setiap kader.

Apabila kader-kader partai terbukti terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, melakukan tindakan korupsi, partai tidak akan membelanya, bila perlu selesaikan menurut aturan hukum yang berlaku.

Sikap dan pernyataan tegas sang ketua ini, mestinya tidak dilihat sebagai pemanis bibir, namun merupakan peringatan bagi setiap kader untuk kembali ke jati diri.

Perubahan simbol, semangat, dan perekrutan kader baru di bawah bendera PDI-P awalnya diharapkan mampu tampil sebagai partai modern yang terbebas dari konflik kultural sebagaimana terjadi sebelumnya.

Semangat ini tampaknya tidak begitu mudah dapat direalisasikan. Konflik antar kader tidak dapat dihindarkan. Henggangnya kader-kader militan dan ideologis seperti Dimiyati Hartono, Eros Djarot, serta pertentangan internal antar-elit, mengindikasikan betapa perbedaan antarkelompok kultural (militan-ideologis) dengan kelompok rasional pragmatis di berbagai tingkatan belum terelaborasi secara utuh, menjadi satu kekuatan partai dalam mengisi dan mempertahankan kekuasaan dalam arti yang sebenarnya.

Sementara di sisi lain, sebagian di antara mereka cenderung berasyik-masyuk dengan kemenangan yang diraih tanpa sadar bahwa kontrak sosial yang diberikan rakyat melalui dukungan politik bersifat temporer. Sikap dan perilaku politik seperti ini tentu akan sangat berbahaya bagi sinergitas konstituen. Hal ini akan menjadi referensi bagi rakyat dalam menentukan dukungan politiknya, apakah diteruskan, diperbarui ataukah cukup sampai di situ. Kejujuran Kwik Kian Gie dalam melontarkan otokritik terhadap para kader partai misalnya, tidak serta merta ditanggapi secara subjektif, apalagi reaktif emosional. Akan tetapi mesti disikapi secara jernih dan objek-

tif sebagai langkah introspektif agar tidak kebablasan.

Momentum rakernas, dapat menjadi wahana strategis bagi PDI-P untuk melakukan konsolidasi, introspeksi, dan sekaligus retrospeksi kebijakan partai ke depan.

Pernyataan politik Megawati sebagaimana dilansir oleh banyak media, secara implisit sesungguhnya mengakui kondisi yang terjadi sebagaimana dikatakan Kwik Kian Gie. Mereka yang seperti itu, disamping sangat merugikan partai, justru mengingkari perjuangan reformasi. Oleh karena itu, penyelesaian hukum dan politik perlu dilakukan, sebelum wabah ini menular menjadi virus di tubuh partai.

Sikap jujur, dan pernyataan bersalah kalau memang benar melakukan kesalahan merupakan langkah awal yang baik untuk penataan kembali soliditas dan manajemen partai. Sikap bijak *learning by doing*, mau belajar dari kesalahan merupakan upaya perbaikan citra dan kinerja. Kesempatan itu masih terbuka lebar, utamanya dalam menghadapi tantangan politik yang serba absurd ke depan.

Bagaimana pun, tantangan politik ke depan akan jauh lebih sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lebih-lebih lagi, dalam menghadapi Pemilu 2004 yang tinggal 13 bulan. Tingkat kecerdasan politik konstituen tantangan oposisi partai politik pesaing yang tidak segan-segan melakukan pembusukan, perlu menjadi catatan penting, untuk disikapi.

Energi politik yang selama ini banyak terbuang oleh hal-hal yang sesungguhnya tidak substansial dan menyentuh kepentingan rakyat, seperti rebutan jabatan sesama rekan gontok-gontokan ke dalam tentang calon pimpinan daerah, serta aspek-aspek pragmatis lainnya, sesungguhnya cukup diselesaikan ke dalam dengan tetap memperhatikan aspirasi politik yang berkembang.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 14 Maret 2003

22

Alat Hegemoni

*D*i kegelapan, di tengah-tengah badai gurun, pesawat-pesawat tempur AS di pangkalan militer Kuwait mulai bergerak menggempur tempat-tempat strategis kota Baghdad. Tidak kurang dari 40 rudal dimuntahkan dari pesawat tempur dan kapal perang AS. Gempuran ini dilakukan satu setengah jam setelah ultimatum George W. Bush, yang meminta pemimpin Irak Saddam Hussein hengkang dari negerinya.

Seruan antiperang yang dikumandangkan oleh berbagai kelompok dari berbagai komunitas di berbagai negara, seakan tak mampu menyurutkan kesungguhan AS membumi-hanguskan kekuatan Saddam Hussein yang dianggap sebagai musuh bebuyutannya.

Sebagai negara adidaya, dengan kekuatan teknologi dan militer yang handal, AS bukanlah lawan yang sepadan bagi Irak. Lebih-lebih dengan didukung oleh kekuatan negara sekutu yang notabene memiliki kekuatan memadai. Di atas kertas, tidaklah sulit bagi mereka untuk menghancurkan kekuatan negara kecil seperti Irak yang notabene mengalami embargo sosial, ekonomi dan politik ini. Dari hitung-hitungan kekuatan, boleh dikata, itu bukan perang, namun lebih sebagai intervensi politik dengan menggunakan kekuatan militer.

Di balik ambisi politik AS untuk menunjukkan hegemoninya mengakhiri rezim Saddam Hussein dengan menggunakan

kekuatan militer, sesungguhnya ada aspek kemanusiaan yang patut mendapatkan porsi perhatian. Ada jutaan anak manusia, para perempuan dan masyarakat sipil tanpa dosa yang akan menjadi korban atas agresi itu. Anak manusia tanpa dosa ini kini sedang berharap-harap cemas akan keberlangsungan hidupnya. Mereka ini bisa menjadi perisai hidup atas tragedi keangkuhan kekuasaan.

Serangan ini pun tampaknya, hanya sebagai kelanjutan dari dendam lama George Bush yang kini diwariskan kepada sang anak, George W. Bush. Komentar dari orang-orang AS sendiri atas serbuan itu pun beragam. Di antaranya ada yang melihat bahwa hal itu hanya ambisi pribadi dari George W. Bush.

Kini, kita tinggal melihat dan menyaksikan pameran senjata canggih, dan gelimangan korban manusia yang hangus oleh terjangannya.

Memang dalam sejarah peradaban manusia, damai dan perang merupakan dua sisi dikotomis yang selalu hadir dalam setiap kisi-kisi kehidupan. Konsep *rwa bhineda* – baik dan buruk, hitam dan putih – selalu tampak dalam peringai setiap manusia. Walau keduanya sebagai fakta sosial yang tak terbantahkan, kebanyakan kita akan merasa nyaman dalam pilihan yang bersifat putih, kebaikan dan kedamaian.

Realita sejarah peradaban manusia itu pula menunjukkan, perang tidak pernah menyelesaikan masalah, justru kehadirannya akan menimbulkan masalah baru dalam setiap generasi, kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan dan bahkan kematian. Dampak politik diplomasi, perang memang pilihan terakhir. Kehadirannya pun hanya sebagai alat negoisasi untuk memaksakan kehendak satu atas yang lainnya. Pada akhirnya harus diselesaikan dalam meja perundingan. Semua itu mengandung hikmah pembelajaran bagi kemanusiaan. Perang bukanlah salah satunya cara dalam mewujudkan perdamaian. Bahkan, ia merupakan pilihan yang antagonistis, yang mengancam peradaban itu sendiri.

Agresi kekuatan militer AS terhadap Irak bisa saja berlangsung singkat, namun dampaknya akan meluas tidak hanya di Irak sendiri, akan tetapi berpengaruh pada struktur politik dan ekonomi dunia.

Bagi sebagian masyarakat dunia, perang yang terjadi bisa saja dimaknai sebagai perang antar dua kekuatan negara – AS dan Irak – namun bisa saja diramu menjadi perang yang bernuansa agama. Reaksi kelompok Islam garis keras terhadap perang tersebut dengan melakukan perlawanan bisa saja terjadi. Hal itu tidak hanya dilakukan di Irak, akan tetapi di seluruh belahan bumi di mana kepentingan AS berada. Sentimen ini akan menyebarkan perasaan was-was negara-negara lain akan ancaman tersebut.

Secara ekonomi, sebagaimana pernah dirasakan ketika Perang Teluk I pecah, hal yang sama akan terjadi. Bahkan, bisa lebih parah. Jalur Gaza sebagai jembatan emas distribusi ekonomi Barat dan Timur akan menjadi mandek. Begitupun berbagai proses ekonomi ekspor, impor yang sama. Fluktuasi harga minyak akan mengalami guncangan, dan krisis moneter tidak terhindarkan. Itu berarti perang yang sedang berkecamuk, tidak hanya dirasakan oleh mereka yang saat ini sedang melakukan pertempuran, namun seluruh dunia akan merasakan dampaknya.

Bagi Indonesia dan khususnya Bali yang bergelut di sektor pariwisata, dampaknya tentu akan sangat terasa. Bali yang telah jatuh oleh pengeboman Kuta, kini harus tertimpa tangga pula atas kejadian perang itu.

Menyusun skenario dalam rangka mengantisipasi dampak Perang Teluk menjadi penting dilakukan. Paling tidak berjaga-jaga, atas anjloknya sektor pariwisata yang menjadi tumpuan ekonomi rakyat Bali. Mengembangkan sektor-sektor yang memiliki daya tahan atas terjadinya gejolak internasional menjadi penting untuk dikembangkan. Kini kita tinggal berharap tahun 2003 sebagai tahun anti kekerasan, mudah-mudahan gaungnya dapat menyentuh nilai kemanusiaan mereka. Gong perda-

maian ini mungkin perlu dipukul lebih keras lagi, untuk sampai ke gendang telinga para pemimpin yang sedang berseteru. Sebagai anak bangsa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berkeinginan menjaga peradaban, tidaklah cukup hanya hadir dan menyaksikan keganasan monster-monster perang itu menerjang korban sipil yang tak berdosa. Seruan antiperang dan kekerasan perlu terus dikumandangkan, sebagai wujud kepedulian terhadap nasib generasi.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 21 Maret 2003

Menuju Pemilu Berkualitas

*P*emilu 2004, menjadi pemilu pertama bagi rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta presiden dan wakil presiden secara langsung. Sebelumnya, rakyat hanya memilih DPR, DPRD I dan DPRD II sebagai wakilnya. Begitu juga tentang sistem pemilu yang digunakan. Ada perubahan, dari proporsional tertutup ke sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Untuk anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak.

Perubahan ini membawa konsekuensi terhadap tingkat kerumitan Pemilu 2004. Tidak mengherankan banyak pihak menaruh pesimis, merasa waswas dan khawatir akan keberhasilan pelaksanaannya. Hal semacam ini pernah terjadi ketika pemilu dipercepat pada tahun 1999 digelar. Walaupun akhirnya kekhawatiran itu dapat terjawab dengan lancar dan amannya pelaksanaan pemilu ketika itu.

Untuk menjawabnya, peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai institusi pelaksana pemilu sebagaimana diamanatkan UU menjadi sangat penting dan strategis. KPU, bertanggung jawab atas terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia dengan memenuhi unsur jujur, adil dan demokratis.

KPU sebagai institusi pelaksana pemilu menjalankan tugas dan kewajiban untuk mempersiapkan proses pelaksanaan

pemilu dari penyiapan perangkat aturan pelaksanaan, penyusunan administrasi, penyusunan daftar pemilih, pengorganisasian KPU daerah sampai ke tingkat Kelompok Penyelenggara Pelaksana Pemungutan Suara (KPPPS). Bersama Departemen Kehakiman dan HAM, melakukan verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu, menetapkan partai politik peserta pemilu, merancang sistem kampanye sampai pada penghitungan suara, pengesahan suara, pengesahan partai politik pemenang yang pada akhirnya melakukan pelantikan dan mempertanggungjawabkan semua pekerjaan tersebut kepada Presiden.

Dengan begitu luas dan rumitnya pekerjaan yang harus dilakukan, sudah sewajarnya mereka yang duduk di lembaga terhormat tersebut, formasinya harus dipilih berdasarkan kualifikasi tertentu. Mencerminkan kemampuan, baik *teoritical skill* maupun *technical skill* di bidang politik, hukum dan kemasyarakatan serta berpengalaman dalam pelaksanaan teknis kepemiluan. Kemampuan ini harus didukung oleh komitmen, dan konsistensi dalam penegakan demokrasi, integritas personal serta memiliki *treck record* yang tidak tercela.

Di tingkat pusat, formasi ini sudah terisi. Mereka yang duduk kebanyakan orang-orang yang memang sudah dikenal dan memiliki kemampuan di bidangnya. Kini tinggal menunggu terbentuknya KPU Daerah, sebagai perpanjangan tangan dari KPU pusat untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan di daerah.

Tidak jauh berbeda dengan persyaratan di pusat, KPU Daerah ini pun hendaknya dipilih melalui mekanisme dan sistem yang transparan dengan uji publik yang memadai. Baik kemampuan, komitmen dan konsistensi serta integritasnya. Bagaimanapun, institusi yang memegang amanat penting dalam menyukseskan pelaksanaan tahapan ketatanegaraan melalui pemilu ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya penyelenggaraan Pemilu 2004.

Dengan limit waktu yang makin dekat, beban tugas yang sangat berat, sudah seharusnya KPU Daerah (provinsi maupun

kabupaten/kota) segera dibentuk. Untuk memenuhi kualifikasi dimaksud, gubernur dan bupati/wali kota diharuskan membentuk tim independen yang nantinya ditugaskan untuk melakukan verifikasi terhadap calon anggota. Tiap calon anggota akan dilakukan *fit and proper test* atau uji kelayakan dan kecakapan dalam mengemban tugas mulia ini. Cara uji ini diyakini akan dapat menghasilkan anggota yang benar-benar dapat mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar. Hasil verifikasi ini kemudian diajukan kepada KPU untuk ditetapkan sebagai anggota KPU Daerah prosesnya sama namun ditetapkan oleh KPU provinsi.

Terbentuknya KPU barulah langkah awal, masih banyak persoalan yang terlihat baik langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Di antaranya menyangkut aspek konstitusional yang meliputi aturan-aturan pelaksana baik dalam bentuk PP, Juklak dan Juknis bagi pelaksana daerah. Begitu pun yang tidak kalah pentingnya menyangkut aspek institusional seperti partai politik yang menjadi pemain dalam pemilu.

Mulai saat ini, parpol yang jumlahnya sudah mencapai 238, harus membuatancang-ancang untuk memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam UU. Melakukan persiapan-persiapan dalam rangka memahami aturan main, mempersiapkan kader partai untuk terjun ke kancah politik dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.

Memahami dan memenuhi aturan main yang ada, merupakan kata kunci bagi kedewasaan politik parpol untuk terjun ke gelanggang pertarungan politik pemilu. Demokrasi sebagai dasar dari proses tersebut akan menjadi saksi, sejauh mana para petinggi partai beserta kadernya bisa memulai permainan politik, dengan alur pikir cerdas, rasional sehat dan berkepribadian.

Cara-cara menghalalkan segala cara seperti: intimidasi, kekerasan, pengebirian terhadap koridor hukum, moral dan etika, serta ingin memaksakan kehendak di tengah mulai me-

tingkatnya kesadaran politik rakyat, tidak saja menjadikan pelaksanaan pemilu akan terganggu, akan tetapi justru menurunkan derajat, *image* dan kredibilitas personal ataupun partai di mata rakyat.

Kini saatnya bagi partai politik yang benar-benar telah memenuhi syarat, berlomba-lomba membangun simpati, mengemban visi dan misi serta strategi partai, menarik sebanyak mungkin dukungan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sah atas negeri ini, perlu menyikapi semuanya secara lebih cerdas, rasional dan objektif atas tawaran program partai politik,

Apabila eskalasi kesadaran demokrasi ini mengental, baik pada para pelaksana, partai politik maupun rakyat, niscaya Pemilu 2004 sebagai wahana demokrasi akan dapat berjalan secara damai dan berkualitas.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 28 Maret 2003

Titik Rawan Pemilu

Pemilihan Umum 2004, merupakan momentum politik strategis bagi tatanan politik dan demokrasi di negeri ini. Pelaksanaan Pemilu 2004 tidak hanya bersandar pada sistem pemilu yang berbeda dari sebelumnya, akan tetapi rakyat secara langsung dapat mengekspresikan pilihan politiknya untuk menentukan para wakilnya di DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Ini telah diamanatkan dalam hasil amandemen UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2003 sebagai hasil revisi dari UU Pemilu sebelumnya.

Sistem proporsional terbuka yang dianut, memberikan ruang demokrasi bagi rakyat untuk menentukan pilihannya terhadap parpol kepercayaannya. Pun orang yang dianggap kredibel mewakili aspirasinya.

Dari amanat tersebut terbersit *need of achievement* yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan semangat demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Komitmen ideal yang secara legal dituangkan dalam undang-undangan ini, semestinya dapat diimplementasikan secara sungguh-sungguh oleh rakyat Indonesia, dan dapat dijadikan wahana yang *legitimate* bagi berjalannya proses demokratisasi.

Tidak berlebihan kalau di kebanyakan Negara yang menganut sistem demokrasi, menjadikan pemilu sebagai ajang

politik yang sah bagi bekerjanya sistem politik. Dengan kata lain, pelaksanaan pemilu di suatu negara, akan menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat pemahaman, kesadaran dan berjalannya budaya politik demokrasi. Makin berkualitas pelaksanaan pemilu, maka akan makin berkualitas pula pemahaman, kesadaran dan budaya politik demokrasi masyarakat, pun sebaliknya.

Untuk mewujudkannya, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak kerja politik yang harus dilakukan. Di antaranya meliputi konstitusional *reform*, institusional *reform* dan pembudayaan sikap dan perilaku politik demokratis bagi berjalannya pakem politik demokrasi.

Konstitusional *reform*, menyangkut perubahan mendasar terhadap aturan-aturan yang menjadi landasan bagi semua pihak dalam menjalankan proses pelaksanaan pemilu. Semangat konstitusi telah memberikan ruang yang sangat luas bagi terwujudnya pemilu yang berkualitas.

Semangat ini hendaknya dapat dijadikan pedoman yang sungguh-sungguh bagi para pihak dalam menerjemahkan aturan pelaksanaannya, sehingga terhindar dari pembelokan makna atas dasar kepentingan pragmatis.

Institusional *reform*, menyangkut struktur, fungsi serta tugas dan kewenangan lembaga pelaksana pemilu, parpol peserta pemilu *shareholder* dan *stakeholder* yang secara institusional terlibat baik langsung bagi berjalannya tahapan pemilu.

Kedua prasyarat tersebut, tidak serta merta menjadikan pemilu berkualitas. Tumbuhnya budaya politik yang demokratis di kalangan masyarakat menjadi kata kunci keberhasilan pelaksanaan pemilu. Di tingkat implementasi, aturan main hanya akan menjadi pijakan. Lembaga pelaksana hanya sebagai *enabler*, fasilitator, sementara partai politik merupakan pemain utamanya. Sedangkan masyarakat, jelas sebagai subyek sekaligus obyek politik.

Belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, ketiga aspek itu berpengaruh sangat signifikan terhadap sukses – tidaknya pelaksanaan pemilu. Fenomena ini tidak tertutup kemungkinan akan bermetamorfose dalam Pemilu 2004, lebih-lebih lagi kompleksitas pelaksanaannya memiliki tingkat kerumitan yang lebih, dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Munculnya pandangan pesimistis terhadap pelaksanaan Pemilu 2004 dapat dijadikan acuan bahwa berbagai tantangan dan kendala bakal terjadi.

Tampaknya penting untuk dicamkan titik-titik rawan yang perlu diantisipasi, seperti: Pertama, pada tahap pendaftaran pemilih. Secara makro, sampai penutupan pendaftaran pemilih, yang sudah tercatat baru mencapai kurang dari 80 persen jumlah pemilih. Kondisi ini disebabkan oleh kemampuan petugas untuk melakukan pendataan, dan yang cukup memprihatinkan adanya sikap penolakan bagi calon pemilih untuk didaftar. Atas hasil tersebut KPU telah memutuskan untuk memperpanjang pendaftaran sampai pertengahan Mei. Pencatatan calon pemilih ini akan dapat menjadi persoalan rentan, apabila dalam proses pencatatan tidak dilakukan secara cermat, jujur dan obyektif.

Kedua, verifikasi parpol untuk dapat ikut sebagai kontestan peserta pemilu. Dirjen Anggaran telah mencairkan dana bagi Departemen Kehakiman dan HAM untuk melakukan verifikasi yang jumlahnya mencapai 237 parpol. Titik rawan yang bakal terjadi, diperkirakan tidak seluruh parpol yang ada, dapat memenuhi persyaratan untuk lolos menjadi peserta pemilu. Bagi parpol yang lolos tentu tidak menjadi masalah, namun mereka yang dinyatakan gugur, terbuka kemungkinan untuk melakukan perlawanan dan reaksi atas hasil verifikasi.

Ketiga, kelazim yang kerap terjadi, kampanye pemilu merupakan titik yang paling rawan bagi berjalannya transformasi politik partai kepada konstituennya. Kampanye yang semestinya dimanfaatkan untuk melakukan desiminasi, sosialisasi dan transformasi nilai-nilai *hight politics*, dalam realitanya sering

antagonistic. *Feformance low politics, political destructive*, pengabaian moral dan etika politik menjadi pemandangan yang memilukan.

Keempat, pemungutan suara dan penghitungan suara. Pada tahap ini intimidasi dan kecurangan dalam menghitung, menentukan suara sah serta total perolehan suara. Melakukan kerja sama dengan parpol untuk menghadirkan saksi, dengan pengawas serta pemantau menjadi penting untuk menjaga obyektivitas hasil penghitungan suara.

Kelima, penentuan kuota suara dan perwakilan di legislatif. Tidak seluruh calon anggota bersandar pada hasil perolehan kuota suara. Bagi mereka yang belum memenuhi kuota, akan menjadi problem di internal partai dan berdampak pada pelaksanaan pemilu. Parpol peserta pemilu diharapkan dapat lebih cermat dalam menyusun daftar calonnya, dan memberikan orientasi bagi para calon yang diusulkan atas nomor urut mereka.

Atas berbagai problematika tersebut, bukan lantas menjadi kita surut untuk berkomitmen. Justru inilah tantangan bagi bangsa, para penyelenggara, parpol bersama-sama masyarakat, untuk bersinergi membangun *frame work* bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis. Kerja politik ini pula akan menjadi catatan sejarah politik bangsa dalam menata kehidupan demokrasi di masa depan. Sehingga pada saatnya nanti kita akan dapat melihat diri masing-masing dan mengukurnya secara jujur, sejauh mana kesadaran kolektif bangsa ini telah menapaki perjalanan terjal demokrasi yang hendak dicapai.

Disadari, berjalannya kerangka sistem, tidak hanya ditentukan oleh hanya salah satu komponen, apakah aturannya saja, institusi pelaksanaannya saja ataupun kesadaran politik rakyatnya saja. Sebagai sebuah sistem, satu dengan yang lain akan saling terkait dan bersinergis. Sebagai suatu proses yang saling terkait, komitmen untuk menegakkan demokrasi melalui kepatuhan terhadap aturan main yang disepakati akan menjadi modal awal bagi pendakian proses dan tahapan se-

lanjutnya. Semuanya itu tentu akan sangat tergantung pada kesadaran kolektif bangsa, bahwa pemilu merupakan wahana yang *legitimate* untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 4 April 2003

25

Suara Rakyat

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung sudah diajukan Pemerintah untuk dibahas oleh DPR. RUU ini diharapkan segera dapat diundangkan, guna dapat dijadikan landasan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung bulan April 2004 bersamaan dengan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu). Hal itu berarti Pemilu 2004 merupakan Pemilu pertama bagi rakyat Indonesia untuk secara langsung memilih tidak saja wakil-wakilnya di DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota, akan tetapi memilih secara langsung presiden dan wakil presiden.

Gagasan melakukan pemilihan secara langsung ini sesungguhnya muncul pasca-Pemilu 1999. Ketika itu salah satu hasil Sidang Umum MPR adalah keputusan tentang penetapan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak paralel dengan hasil Pemilu Legislatif. Caslon Presiden (Capres) PDI Perjuangan yang notabene pemenang Pemilu dengan perolehan suara 33% suara, justru dipecundangi oleh calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang hanya mengantongi 10% suara di DPR.

Realita politik yang terjadi dalam Sidang Umum MPR itu menorehkan luka di hati rakyat. Proses demokrasi yang sesungguhnya sudah dilakukan rakyat, ternyata dengan mudah dikebiri oleh mereka yang telah dipercaya dan dipilih untuk

mewakilinya di lembaga terhormat itu. Adanya inkonsistensi akibat tindakan konspiratif, serta merebaknya apa yang kerap disebut 'politik dagang sapi', baik langsung ataupun tidak langsung telah merendahkan dan mencederai kepercayaan rakyat atas lembaga dan orang-orang pilihan tersebut.

Beranjak dari pengalaman politik itu gagasan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden menyeruak ke permukaan dan menemukan momentum sejarahnya. Aspirasi ini kemudian diwujudkan dalam Amandemen UUD 1945, khususnya menyangkut pasal pemilihan presiden dan wakil presiden.

Hasil amandemen sebagaimana diatur dalam Pasal 6a UUD 1945 mengatakan: (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum; (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden; (4) dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden; (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Dengan disahkannya amandemen ini amanat konstitusi ini sesegera mungkin dilaksanakan. Pemilu 2004 merupakan momentum politik untuk itu. Perangkat UU yang drafnya sedang dibicarakan di DPR yang mengatur tentang proses dan tata-cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung hendaknya sesegera mungkin dapat diselesaikan.

Sudah menjadi kelaziman, setiap kali pembahasan RUU, akan terjadi pembahasan yang amat serius dari kalangan anggota Dewan, utamanya menyangkut pertarungan kepentingan. Hal ini dapat dipahami karena keberadaan mereka bertolak dari perbedaan kepentingan, untuk kemudian diperjuangkan melalui jalur politik yang ada. Namun demikian, pertarungan kepentingan yang terjadi tidak lantas dijadikan alasan pembenaran untuk mewarnai UU yang hasilnya justru mengabaikan substansi, filosofi serta maksud dan tujuan UU itu dibuat.

Ambillah misalnya pasal-pasal yang menuai protes karena dianggap dirkriminatif dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Di antaranya menyangkut waktu pelaksanaan pemilihan, proses pencalonan presiden dan wakil presiden melalui partai politik, dan hanya boleh diisi kader partai.

Kecenderungan yang bakal terjadi adalah pemilihan langsung presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara terpisah. Hanya partai politik atau gabungan partai politik yang boleh mengajukan calon. Itu berarti keinginan kelompok independen atau perorangan untuk mengajukan calon akan terabaikan. Walaupun seseorang berkehendak untuk menjadi calon, namanya harus muncul dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan kuota suara yang telah ditentukan.

Logika ini didasarkan asumsi bahwa parpol atau gabungan parpol diperbolehkan mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Hanya parpol yang mempunyai suara 20% yang dapat mengajukan calon dan atau gabungan parpol sehingga memenuhi kuota suara dimaksud.

Di sisi lain diatur pula calon-calon yang diajukan parpol atau gabungan parpol harus sudah diumumkan sebelum pelaksanaan Pemilu. Ada beberapa persoalan yang dapat terjadi, utamanya di tataran implementasi. Pertama, dalam sistem multi partai seperti yang akan dilaksanakan pada Pemilu 2004, komposisi suara akan tersegmentasi ke dalam beberapa partai. Tidak akan ada partai yang secara mencolok menjadi mayoritas atas yang lainnya. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana kalau

tidak ada partai yang mencapai perolehan suara minimal 20%? Atas pertanyaan ini penting untuk dipikirkan oleh parpol untuk melakukan koalisi awal, untuk berjaga-jaga siapa nyana tidak dapat memenuhi kuot suara sebagaimana ditentukan.

Kedua, pilihan terhadap sistem demokrasi langsung ataupun tidak langsung mestinya tidak ditempatkan sebagai tujuan. Keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada lingkungan internal, seperti tingkat pengetahuan politik, homogenitas, kondisi geografis dan luas wilayah, jumlah dan sebaran penduduk, tingkat ekonomi, serta kesadaran dan penegakan hukum. Berhasil tidaknya justru tidak terletak pada sistem yang digunakan, akan tetapi sejauh mana komitmen dan konsistensi pelaku mematuhi aturan main yang menjadi koridor utama sistem tersebut.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 11 April 2003

26

Ketika Harus Memilih

Vox populi vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Itulah pepatah Yunani yang mempersonifikasikan betapa suara rakyat dalam masyarakat demokrasi begitu sangat bernilai. Dikatakan demikian karena dalam masyarakat yang menganut sistem demokrasi, tiada yang dapat dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan rakyat, tiada yang dapat terlaksana tanpa dukungan rakyat, pun tiada yang dapat tercipta tanpa kehendak rakyat. Rakyatlah yang berdaulat.

Universalitas nilai demokrasi ini, dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat di mana nilai-nilai tersebut diejawantahkan. Ketika bersentuhan dengan matra sosial, budaya, geografis dan demografis. Proses akulturasi, asimilasi dan imitasi terhadap nilai demokrasi, melahirkan konsepsi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berkembangnya pola demokrasi perwakilan diantaranya terlahir dari proses lokalitas terhadap nilai demokrasi.

Keterwakilan itu sendiri mengandung makna paralelisasi antara yang diwakili dengan yang mewakili. Artinya, prosesnya internalisasi suara rakyat terhadap orang yang mewakili yakni partai politik dan petugas partai yang ada di legislatif. Makin dekat harapan masyarakat dengan tindakan-tindakan kebijaksanaan legislatif, maka makin signifikan keterwakilan aspirasi yang diembannya.

Logika politik ini tampaknya menjadi penting untuk dijadikan bahan analisis dalam mencermati fenomena pemilihan pemimpin baik di tingkat nasional seperti presiden dan wakil presiden, gubernur dan bupati yang belakangan ini mulai mengemuka.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, mungkin sistem keterwakilan sebagaimana berlangsung pada tahun 1999 akan berakhir, karena pada Pemilu 2004 sistem pemilihan akan dilaksanakan secara langsung. Namun, untuk melanjutkan tradisi pelaksanaan sistem perwakilan, utamanya bagi daerah-daerah yang sedang mempersiapkan suksesi baik gubernur ataupun bupati, persoalan signifikansi keterwakilan, aspirasi dan pilihan politik menjadi penting untuk mendapatkan perhatian. Paling tidak untuk mencermati beberapa contoh kasus yang sedang terjadi di beberapa daerah.

Dulu, sebelum reformasi proses perekrutan politik calon pimpinan daerah terkesan sangat tertutup. Kala itu, Golkar sebagai kekuatan politik dominan memiliki peran politik yang sangat strategis dalam mengambil keputusan dan menentukan pilihan sesuai kehendak dan instruksi induk organisasinya. Kecenderungan politik yang terjadi dalam menentukan siapa yang bakal menjadi calon dan calon jadi sudah terselesaikan di bawah meja perundingan tiga jalur, jauh di luar gedung. Sementara petugas partai di legislatif hanyalah perpanjangan tangan, oleh karena itu berkewajiban untuk menyelamatkan dan mengamankan.

Tidak mengherankan apabila hasil pemilihan sangat mudah diprediksi siapa yang bakal terpilih sebelum proses pemilihan berlangsung.

Gerakan reformasi yang menghasilkan pergantian rezim pemerintahan orde baru ke orde reformasi telah menghasilkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara relatif lebih bebas, terbuka dan “demokratis”. Oleh karena saking bebas, terbuka dan “demokratisnya”, dalam beberapa hal dan momen-momen tertentu kesan sikap dan perilaku

politik yang serba bisa, serba boleh dengan mengabaikan pakem, etika dan aturan main politik yang ada. Setiap orang seakan-akan bebas sebebaskan-bebasnya dapat menginterpretasikan aturan yang ada, keinginan dan kepentingan masing-masing.

Garis partai sebagai bentuk kuatnya ikatan ideologis dan kepatuhan atas keputusan partai sebagai institusi tertinggi yang harus diamankan dan dilaksanakan, di tingkat implementasi kerap kali dibelokkan, dilanggar bahkan ditentang karena dianggap tidak aspiratif, tidak sesuai dengan realitas politik ataupun dalih lainnya.

Memang dalam pemaknaan demokrasi yang seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya, setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Pemaknaan ini dapat pula diinterpretasikan secara bebas, siapapun boleh mencalonkan diri. Apalagi kesempatan dan peluang untuk itu terbuka lebar. Gembling dan improvisasi politik aji mumpung dan mumpung ada kesempatan, paling tidak untuk memperpanjang daftar riwayat hidup, dapat menjadi pemandangan politik keseharian kita.

Gembling politik dengan menggunakan metode partisipasi yang dimobilisasi, membangun basis dukungan terkadang menjadi cara untuk membangun *image* dan pencitraan akan kuatnya arus bawah sebagai referensi politik untuk memunculkan *figure*. Sementara di tingkat internal sendiri baik itu partai politik maupun legislatif akan selalu mengambil posisi *wait and see*, kreatifitas calon untuk berketetapan hati memasuki arena pemilihan tampaknya menjadi faktor penentu dalam mengkondisikan suatu opini.

Dalam situasi kegamangan politik seperti ini, kerap terjadi adanya proses politik berjalan di luar dugaan. Kejutan-kejutan politik ini misalnya terlihat dari kalahnya calon-calon partai politik yang secara kalkulatif sangat signifikan untuk memenangkan suara. Ambilah misalnya dengan kekalahan PDI-P di beberapa daerah yang sesungguhnya menjadi basis PDI-P,

seperti yang terjadi di Jawa Barat beberapa waktu yang lalu serta beberapa daerah yang lain.

Fenomena ini menjadi lebih menarik, tatkala signifikansi suara partai yang secara kalkulatif mestinya memenangkan pemilihan justru dalam realitanya dipecundangi. Realita politik ini menggambarkan betapa mayoritas suara belum menjamin seseorang yang mendapatkan dukungan dari partai tersebut akan dapat keluar sebagai pemenang. Pembelotan suara baik karena persoalan idealisme, ketidakcocokan pribadi maupun pengingkaran terhadap komitmen, tampaknya sering menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi setiap calon dan mementahkan rasionalisasi pengamatan terhadap hasil pemilihan.

Adanya berbagai variable tertentu diluar prediksi kelaziman politik tampaknya memeiliki kecenderungan yang kuat mempengaruhi pilihannya. Sepanjang perbedaan pilihan itu disebabkan oleh dorongan aspirasi yang kuat dari masyarakat, didasarkan atas kecermatan melihat kelebihan, kekurangan, tantangan dan peluang calon dalam menjalankan visi dan misi serta pembangunan daerah ke depan, tentu hal seperti itu masih dapat dimaklumi walau akan menjadi persoalan di tingkat internal akan loyalitas kader terhadap partainya. Namun, menjadi mengkhawatirkan apabila dasar pertimbangannya lebih mengarah ke faktor yang sangat pragmatis.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 18 April 2003

27

Bursa Calon Presiden

*P*emilu 2004, merupakan pemilu pertama bagi rakyat Indonesia untuk memilih presiden secara langsung. Draf Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) sedang dibahas oleh Pansus di DPR. Ada perdebatan menarik yang muncul atas substansi materi. Di antaranya menyangkut persyaratan calon dan mekanisme pengusulannya. Dari persyaratan yang diusulkan terungkap, calon presiden dan wakil presiden harus berpendidikan minimal S-1 – sarjana. Di sisi lain seorang calon tidak sedang menjalankan status terdakwa.

Dapat dipastikan usulan yang masuk dalam daftar inventarisasi masalah tersebut memiliki maksud agar calon yang muncul benar-benar memiliki kredibilitas baik dari segi keilmuan maupun integritas pribadi, tampaknya ada muatan politik untuk menjegal jago yang dimunculkan oleh partai besar yang berkuasa saat ini (PDI-P dan Golkar).

Dapat dipastikan, PDI-P sebagai partai pemenang yang mengendalikan kekuasaan saat ini akan mencalonkan Megawati Soekarnoputri (presiden sekarang), pada pemilu langsung tersebut. Sementara Golkar, walaupun belum secara tegas diputuskan, beredar kabar Akbar Tandjung menjadi alternatif terkuat di samping calon-calon lain yang sedang dikonvensikan.

Di sisi yang lain, usulan dari partai besar yang memiliki keyakinan yang kuat untuk bisa – paling tidak mempertahankan suara yang diperoleh menyamai dengan perolehan suara pemilu sebelumnya, mengeluarkan jurus yang dapat menghambat munculnya calon-calon dari partai kecil yang tidak memenuhi kuota suara 20 persen di DPR. Kontan saja usulan ini ditentang keras, karena dianggap mengebiri representasi politik dan munculnya kandidat alternatif yang kemungkinan akan dimunculkan melalui pintu masuk partai-partai kecil.

Dari proses pembahasan draf RUU dapat dicermati betapa perdebatan yang berlangsung sangat diwarnai *political interest*. Bahkan, upaya *politicking* yang cenderung ingin memenangkan kepentingan pragmatis masing-masing.

Disadari pula, legiflatif merupakan lembaga yang merepresentasikan kepentingan partai politik. Oleh karena itu, tidak mengherankan dalam setiap proses pengambilan keputusan kerap diwarnai perdebatan yang cenderung berdasarkan atas kepentingan yang hendak diperjuangkan. Hal ini tidak jarang menimbulkan perbedaan paham, perselisihan dan apabila dibiarkan berkembang menjadi sangat konter-produktif terhadap proses dan tujuan serta semangat yang menjiwai terwujudnya sebuah aturan.

Dalam teori kebijakan dikatakan, lahirnya sebuah produk hukum lebih didorong oleh adanya kebutuhan hukum atas persoalan publik (*public affair*) ataupun dorongan kepentingan publik (*public interest*) untuk diatur agar tidak terjadi benturan satu dengan yang lain. Adanya produk hukum diharapkan dapat menjadi landasan atau dasar pijakan bersama dalam melakukan regulasi atas kepentingan bersama.

Agar proses formulasi kebijakan hukum dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan publik, maka sudah semestinya ada *rule of the game* yang disepakati bersama. Di dalamnya tidak semata menyangkut *legal drafting*, akan tetapi substansi hukumnya harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi dengan memberikan ruang sebebaskan-bebasnya kepada setiap warga

Negara untuk berpartisipasi secara aktif untuk menggunakan hak politik, baik dipilih maupun memilih.

Kalau dikaitkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, aturan yang hendak dibuat mestinya dapat dijadikan rambu-rambu. Tak hanya oleh parpol ataupun calon presiden, namun oleh seluruh rakyat yang memiliki kedaulatan serta hak dan kewajiban politik.

Jangan lantas karena sudah memiliki calon, lalu menyusun kriteria yang disesuaikan dengan calonnya. Atau sebaliknya bagi parpol yang tidak setuju dengan calon yang diusulkan partai lain membuat aturan yang memungkinkan calon yang diusulkan gugur karena tidak memenuhi persyaratan.

Ketika kita sudah mulai membuka diri untuk membangun peradaban yang demokratis, dengan memberikan secara langsung kepada rakyat untuk memilih dan menentukan pemimpinnya, sudah semestinya perangkat aturan yang dibuat dapat mewadahi ekspresi politik rakyat dengan memberikan ruang partisipatoris kepada rakyat untuk menentukan pilihannya. Bila perlu mengajukan diri sebagai salah satu calon.

Memang, ekspresi politik memilih dan dipilih, belakang ini sudah mulai berkembang. Dari pemilihan kepala desa, bupati, gubernur sampai kepada presiden dan wakil presiden, bursanya selalu ramai. Masing-masing calon tidak lagi sembunyi-sembunyi menyatakan kehendaknya. Berbagai upaya dari pembentukan tim sukses, membangun manajemen organisasi pemenangan, pembangunan opini sampai gerilya politik dilakukan. Upaya ini tentu sangat positif, apalagi didasari oleh pakem demokrasi yang hendak dibangun.

Dari bursa calon yang sudah mulai diopinikan, tampaknya sudah ada sederetan nama yang muncul dari berbagai latar belakang profesi. Dari politisi, militer, pengusaha, wartawan serta tokoh agama.

Beragamnya latar belakang calon yang muncul, sebagai pertanda kesadaran kolektif masyarakat, utamanya dalam memasuki ranah kepemimpinan politik dapat menjadi refensi,

dan sajian bagi rakyat untuk menentukan pilihannya sesuai dengan selera masing-masing. Walau sejatinya, dari sederetan calon tersebut belum sepenuhnya dapat mempresentasikan kehendak dari keseluruhan rakyat. Sirkulasi politik yang terjadi masih diwarnai nuansa elitis. Di mana calon-calon yang muncul masih berkuat pada transformasi kultur politik paternalis yang bersifat sangat penutup. Padahal, demokrasi yang hendak dibangun diharapkan mampu menembus lingkaran elite, melalui *bargaining power* yang kuat diciptakan oleh kesadaran kolektif rakyat.

Kondisi ini memang semestinya harus dikembangkan. Namun, untuk mewujudkan tampaknya masih perlu waktu yang lebih lama lagi dalam memaknai arti penting pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dengan didasarkan atas *need assesment* bangsa dalam menata nilai-nilai kebangsaan dan persatuan yang sudah mulai runtuh, dan menghadapi tantangan, globalisasi yang kian meluber.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 9 Mei 2003

28

Pengingkaran Komitmen Kebangsaan

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan momok yang tidak menguntungkan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sekaligus menakutkan bagi *nation state* atau negara bangsa. Negara kebangsaan itulah sebutan untuk Indonesia yang terajut sebagai bangsa oleh berbagai suku yang menghuni untaian pulau-pulau yang membentang di zamrud khatulistiwa. Dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*, terbangun kesadaran dan kesepakatan akan adanya perbedaan di satu sisi dan persatuan di sisi yang lain.

Memori kesadaran kolektif bangsa ini tampaknya penting dimunculkan kembali di tengah mulai memudarnya semangat nasionalisme dan kebangsaan oleh gempuran *neo-nasionalism*, chauvinistik dan gerakan separatisme yang mulai meletup di beberapa daerah.

Merasuknya semangat dikotomi dengan selalu menempatkan diri secara berseberangan seperti mayoritas-minoritas dalam kehidupan sosial, politik, suku, ras dan bahkan agama, merupakan awal dari penggerusan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan.

Kini, sangatlah mudah untuk mengidentifikasi diri apakah melalui suku, ras, golongan dan agama, untuk membedakan ke-kita-an yang telah terbangun menjadi mereka yang lain dari kita.

Padahal, kesadaran akan perbedaan semestinya ditempatkan sebagai perekat untuk saling memahami eksistensi masing-masing tanpa harus saling meniadakan. Dari situ semestinya dapat terbangun kesadaran kolektif (*collective consciousness*) sebagaimana pernah ditanamkan oleh para *founding fathers* dalam merajut gugusan elemen bangsa yang berbeda karakteristik, suku, ras dan perbedaan agama, menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia.

Ada kearifan yang dapat dipetik di situ. Perbedaan di antara kita merupakan fakta sosiologis tak terbantahkan. Multi-kultur merupakan ciri dan sekaligus rujukan ke-Indonesia-an sebagaimana untaian kata yang tergeggam erat di kaki burung garuda – *Bhinneka Tunggal Ika*.

Terbangunnya nilai-nilai kebersamaan persatuan dan kesatuan serta solidaritas bukanlah barang sekali jadi. Namun merupakan proses sejarah yang panjang dan berkembang dari adanya perasaan senasib dan sepenanggungan dalam menghadapi musuh bersama, yaitu para penjajah. Tonggak-tonggak sejarah lahirnya Gerakan Boedi Oetomo 1908, Soempah Pemoeda 1928, Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan untaian sejarah perjuangan bangsa, sebagai kehendak bersama membangun komitmen kebangsaan yang diharapkan makin memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka Nargara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasca kemerdekaan, tantangan terberat yang dihadapi bangsa Indonesia bukan lagi bagaimana mengusir penjajah, akan tetapi mengisi kemerdekaan ini. Salah satunya adalah membangun *character and nation building*. Satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa – Indonesia.

Kehendak untuk membangun satu-kesatuan itu, bukan tidak menuai tantangan.

Adanya keinginan di berbagai daerah untuk melepaskan diri dari NKRI merupakan persoalan laten yang memiliki akar sejarah yang panjang dan sewaktu-waktu bisa menjadi konflik *manifest*. Gerakan Kartosuwiryo, gerakan RMS di Maluku,

Organisasi Papua Merdeka dan yang paling populer dalam opini publik belakangan ini yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan fenomena historis yang sampai saat ini belum terselesaikan secara tuntas.

Memang, selama pemerintahan Orde Baru dengan ideologi *developmentalism*-nya dianggap “berhasil” meredam gerakan-gerakan semacam itu. Pada waktu itu gangguan separatisme sebagaimana belakangan mulai merebak, nyaris tak terdengar. Upaya membangun persatuan dan kesatuan dengan pendekatan yang monokultur, sentralistik dan otoriter ternyata “mampu” membungkam sementara keinginan pihak-pihak untuk melakukan perlawanan atas kekuasaan yang sentralistik. Dengan ditopang kekuatan militer pada saat itu, integrasi dan stabilitas nasional dipermukaan menjadi sangat mantap.

Di balik semuanya itu, pola-pola penyeragaman dan pendekatan sentralistik yang dikembangkan ternyata menorehkan luka-luka baru, utamanya bagi masyarakat lokal untuk mengekspresikan karakteristik budaya serta kreativitasnya. Disparitas sosial, ekonomi dan politik antara pusat dan saerah terbuka sangat lebar. Bibit-bibit menyeruaknya kembali keinginan lokal untuk melakukan perlawanan terhadap pusat makin mendapatkan jastifikasi. Lebih-lebih lagi dengan digulirkannya otonomi daerah yang sementara ini cenderung dimaknai keliru.

Tanpa bermaksud mengorek kesalahan masa lalu, tampaknya penting untuk dimengerti pengalaman dan perjalanan sejarah kebangsaan kita dalam menata kembali nilai-nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan sebagai fondasi tegak dan berdirinya NKRI. Gerakan separatisme sebagai gerakan yang berkehendak menentang pemerintahan yang sah dengan melakukan teror dan berkeinginan membentuk negara sendiri merupakan tindakan subversif, yang harus dihentikan.

Semisal dalam mengatasi persoalan konflik Aceh yang sudah berjalan sangat lama. Upaya pemerintah untuk memberi-

kan *deadline* tanggal 12 Mei bagi Gerakan Aceh Merdeka yang sudah sangat berani dan terang-terangan melakukan perlawanan dan berkeinginan memisahkan diri dari pangkuan NKRI, sudah seharusnya diselesaikan secara cepat, sistematis dengan bersandar pada nilai kemanusiaan.

Berbagai perundingan sudah sempat dilakukan. Bersamaan dengan itu pengingkaran atas kesepakatan pun terus berlangsung. Selama ini upaya pendekatan dan jalan perundingan yang ditempuh seakan-akan menempatkan RI sejajar dengan GAM. Dalam positioning seperti itu, ada kesan RI memberikan angin bagi keberadaan GAM yang notabene merupakan gerombolan yang ingin merongrong kewibawaan dan keutuhan bangsa Indonesia. Apabila jalan perundingan sudah tidak dianggap efektif untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pengerahan militer yang memang ditugaskan untuk menjaga keutuhan bangsa sangat memungkinkan untuk dilakukan.

Meski demikian, operasi militer dimaksud hendaknya dapat menghindarkan sekecil mungkin jatuhnya korban sipil, perempuan dan anak-anak yang biasanya turut menjadi sasaran dan korban dari setiap operasi militer.

Sebagai manusia normal, tentu kita tidak berkehendak peperangan terjadi di muka bumi ini, termasuk di Aceh. Karena bagaimanapun peperangan dan operasi militer akan sangat jelas memakan korban manusia, lebih-lebih di Aceh yang merupakan bagian dari saudara kita. Namun, kalau itu dibiarkan akan menjadi “duri dalam daging” yang sewaktu-waktu akan mengancam persatuan bangsa. Yang pasti, kesabaran sebagai bangsa yang beradab memang ada batasnya.

Kehadiran TNI di tengah kehidupan kita memang salah satunya menjaga dan mengamankan setiap upaya yang mencabik-cabik harga diri bangsa dan mengganggu keutuhan bangsa. Kini saatnya kekuatan itu dapat digunakan, tentu bukan untuk membumi-hanguskan bagian dari wilayah kita. Namun, melakukan upaya pendekatan dengan penuh kemanusiaan, agar mereka sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah keliru.

Bagaimanapun Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Kisah heroik perjuangan Tjoet Nja Dien, seorang pahlawan nasional dari Serambi Mekah ini, dalam menentang penjajah sudah sepatutnya diteladani. Upaya GAM untuk memisahkan diri merupakan gerakan separatisme dan pengingkaran komitmen kebangsaan dan nilai perjuangan yang telah dibangun oleh para pahlawannya di masa lalu.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 16 Mei 2003

Memecahkan Masalah Tanpa Masalah

Relokasi pembangunan Asrama Militer Yonif 741 di kawasan Desa Pecatu, Kuta tidak dapat berjalan mulus. Pasalnya, kegiatan pekerjaan terkait pembangunan asrama tersebut memunculkan protes warga Desa Pecatu sebagaimana laporan Kepala Desa Pecatu kepada DPRD Badung. Sebelumnya, protes masyarakat juga telah ditujukan kepada Pemkab Badung, untuk dapat mengambil tindakan tegas terkait dengan kegiatan pembangunan tersebut.

Di sisi lain, pihak Kodam Udayana sesuai dengan perencanaan pembangunannya, tampaknya sudah berketetapan hati untuk menjadikan tanah yang dimiliki di kawasan tersebut menjadi asrama militer. Dikatakan, pembangunan asrama tersebut merupakan langkah final sebagaimana telah direncanakan secara matang. Persoalan yang menimbulkan polemik berkepanjangan ini, boleh dikata merupakan fenomena baru di mana rakyat dengan terbuka menyampaikan 'keberatannya' atas pembangunan sarana publik.

Mencermati polemik yang berkembang dapat dipahami, bahwa berdasarkan analisis kebutuhan, pembangunan asrama militer memang sangatlah diperlukan lebih-lebih tempat sebelumnya kapasitasnya dianggap sudah tidak memadai. Dengan merelokasi dianggap sebagai langkah yang tepat dilakukan agar

para prajurit yang bertugas khususnya di Yonif 741 mendapatkan fasilitas baik kantor maupun asrama yang memadai.

Sementara penolakan yang dilakukan oleh warga sesungguhnya dapat dipahami sebagai wujud kepedulian masyarakat dalam menjaga alam dan lingkungannya. Lebih-lebih pembangunan asrama yang memakan banyak lahan, yang bisa saja mengenai tanah milik masyarakat. Itu tidak hanya berdampak pada aspek ekologi, yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak resiprositasnya. Di samping dampak psikologi sosial masyarakat Pecatu yang memang pernah mengalami trauma tertentu dalam pembebasan tanah di masa lalu.

Atas fenomena yang berkembang, memang kita tidak lantas bermaksud memasuki dua sisi yang kebetulan ada pada dua kutub argumentasi yang berbeda. Akan tetapi, perlu menelusuri akar persoalannya.

Mencuatnya persoalan itu sendiri sesungguhnya sudah memberikan pembelajaran bagi kita bahwa reformasi, transparansi dan demokratisasi telah memberikan ruang yang sangat luas dan terbuka kepada kita, termasuk masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan pendapat atas berbagai kegiatan yang terjadi di sekitarnya. Termasuk upaya masyarakat Pecatu untuk mempertanyakan kegiatan pematangan lahan yang sedang dikerjakan di wilayahnya

Dari situ pula dapat diketahui bahwa proses perencanaan dan pekerjaan yang sedang berlangsung, belum diketahui, dimengerti dan dipahami oleh masyarakat, sehingga menimbulkan mis-informasi dan mis-komunikasi.

Memang, di era keterbukaan saat ini berbagai persoalan akan sangat mudah dan cepat mengemuka lebih-lebih menyangkut persoalan publik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran dan daya kritis masyarakat akan hak dan kewajibannya. Serta kepedulian masyarakat terhadap berbagai hal yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap dirinya.

Munculnya manajemen konflik yang belakangan lazim dijadikan orientasi manajemen organisasi, merupakan pilihan konsep yang dianggap signifikan dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Dari situ, kita dapat belajar tentang banyak hal berkenaan dengan kelayakan teknis dan kelayakan sosial atas suatu proyek pembangunan yang hendak dilakukan melalui pendekatan analisis *strength* atau kekuatan, *weakness* atau kelemahan, *opportunity* atau peluang dan *treatment* atau tantangan.

Artinya, apabila suatu kegiatan apabila menyangkut pekerjaan relokasi, sudah semestinya tidak hanya diawali dengan perencanaan fisik. Di dalamnya harus menyangkut perencanaan sosial utamanya berkenaan dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam hal ini sosialisasi program dan perencanaan utamanya terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung atas suatu proyek menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi.

Maka, terkait dengan persoalan yang sedang terjadi, tentu tidak berhenti hanya di tingkat polemik. Resolusi atas perbedaan pendapat, pandangan dan pemahaman sudah semestinya harus dirumuskan. Di antaranya menyangkut tiga persoalan pokok yakni hukum, tata ruang dan sosiologi-politik.

Menyangkut persoalan hukum, erat kaitannya dengan hak dan kewajiban atas kepemilikan tanah dan penggunaannya. Sepanjang itu memang sudah menjadi hak dan dibenarkan menurut hukum, maka tidak ada satu pun baik perorangan maupun institusi yang bisa menghalang-halangi suatu kegiatan dilakukan. Sebaliknya, institusi apa pun tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk melakukan kegiatan sepanjang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku.

Pendekatan semacam ini memang terkesan sangat pragmatis, namun akan dapat menjadi rujukan atas kebuntuan penyelesaian persoalan.

Masih terkait dengan upaya tersebut, peranan Rencana Tata Ruang Wilayah (RUTR) yang mengatur kawasan men-

jadi dasar yang tidak boleh diabaikan. Dalam hal ini peranan pemda kabupaten sebagai institusi yang memang ditugaskan salah satunya mengimplementasikan RUTR menjadi kata kunci dalam menentukan apakah suatu kegiatan pembangunan bisa dilakukan atau tidak.

Biasanya, politik perizinan akan menjadi sarana yang ampuh bagi pihak-pihak terkait dalam menentukan berjalan tidaknya suatu proyek. Pendekatan terakhir yang tampaknya sering diabaikan adalah pendekatan sosiologi-politik, menyangkut interaksi simbolis mutualistik antara *stakeholders* dalam hal ini pihak Kodam, DPRD, Pemkab Badung dan masyarakat Desa Pecatu, untuk duduk bersama membangun rasa saling mengerti, saling memahami dan saling percaya untuk menghasilkan solusi terbaik atau *win-win solution*. Tawaran yang terakhir ini memang kurang populer di tengah-tengah masyarakat *modern* dan individualis. Akan tetapi, justru banyak persoalan yang dapat diselesaikan lewat jalur ini.

Pemahaman atas aspek sosial masyarakat termasuk di dalamnya trauma masa lalu menjadi penting untuk didengarkan. Sementara pemerintah dan DPRD sebagai *shareholders* dapat mengambil peran *enabler* untuk memfasilitasi rembuk warga tersebut. Melalui pendekatan sosiologi politik, diharapkan masing-masing pihak saling mengkomunikasikannya dari hati ke hati tanpa harus merasa paling benar, paling kuat dan paling berkuasa. Dalam *positioning* seperti ini, pola komunikasi homopili akan sangat membantu usaha penyelesaian masalah tanpa masalah.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 23 Mei 2003

Dusta di Antara Kita

“Mabuk lagi aaah, mabuk lagi. Judi lagi aaah judi lagi...”

Untaian lagu berirama dangdut itu mengingatkan betapa judi itu membuat orang menjadi mabuk, lebih memabukkan dari minuman keras. Pesan yang disampaikan merupakan bentuk protes sosial para ibu-ibu terhadap para suami yang memiliki kebiasaan bermabuk-mabukan dan menghabiskan hidupnya di arena perjudian.

Dari lantunan lagu itu pula dapat ditangkap makna sosiologis yang menggambarkan betapa judi yang sesungguhnya diharamkan agama dan dilarang aturan, dalam realitanya masih saja menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bahkan, hampir di seluruh belahan bumi, fenomena judi menjadi bagian dari budaya masyarakat. Tidaklah berlebihan disebutkan keberadaan judi sama tuanya dengan peradaban manusia.

Mencermati fenomena judi yang sudah begitu mengakar dengan berbagai bentuk, cara, model yang dilakukan kaum judiawan dan judiawati – julukan mereka memang yang suka berjudi – memang sungguh sangat memprihatinkan.

Judi dengan segala bentuk dan modelnya, jelas-jelas dilarang agama dan pemerintah, namun dengan kasat mata dapat disaksikan di tempat-tempat umum, bahkan disebelah kantor

aparatus yang ditugaskan untuk memberantas segala bentuk judi tersebut.

Fenomena ini dapat menandakan betapa kesadaran akan kepatuhan terhadap ajaran agama sebagai pengawal moral setiap pemeluknya sudah begitu sangat rapuh. Pun aturan hukum yang melarang segala bentuk perjudian hanya menjadi macan kertas yang sulit ditegakkan. Lebih memprihatinkan lagi apabila aparat yang semestinya menjalankan tugas untuk memberantas segala bentuk perjudian justru bermain mata, bagaikan suguhan film India yang sering melakukan autokritik atas sikap dan perilaku aparat.

Atas realita sosiologis tersebut menggugah kesadaran kritis kita untuk mempertanyakan kembali ada apa sesungguhnya dengan dunia perjudian. Dan, mengapa itu sangat sulit untuk diberantas.

Kalau ditelusuri lebih jauh, kegiatan yang dikategorikan judi seperti *tajen* misalnya untuk membedakannya dengan *tabuh rah* (biasanya digunakan untuk mempersonifikasi wujud apresiasi adat, tradisi dan bahkan legalisasi ajaran agama), ternyata kita akan menemukan pola interaksi simbiosis mutualistik yang sangat unik dan menarik.

Di dalamnya terlibat berbagai komponen kehidupan sebagai *stakeholders* yang saling tergantung satu dengan yang lainnya. Antara *bebotoh*, *pakembar*, *saya*, *tukang taji*, penonton dan pedagang. Belakangan ketika *tajen* dikategorikan judi dan dilarang oleh pemerintah, muncul *stakeholders* baru yakni "aparatus" yang secara terang-terangan mendatangi penyelenggara untuk memberikan "keamanan".

Dengan aturan main yang disepakati, para pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung membangun rasa saling percaya dan saling tergantung. Yang lebih "mengagumkan" ternyata perbedaan dalam menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani sangat kental di situ. Para *bebotoh* itu pun memiliki sikap yang sangat jentelmen atas konsistensi dan konsekuensi taruhan atas pilihannya. Dan, apabila ternyata mereka kalah,

dengan sadar dan sukarela menyatakan kekalahannya sepanjang sudah sesuai dengan pakem pertajenan.

Pada masa lalu mereka yang secara intens terlibat di situ diistilahkan sebagai bebotoh. Arena “perjudian” yang dilangsungkan tidak semata-mata dilakukan dengan cara *gambling*, budaya terabas, ataupun pola permainan Sangkuni yang mencerminkan kelicikan dan kepicikan. Lebih dari itu, di dalamnya mengandung nilai keakuan, kekuasaan dan kemasyuran bagi mereka yang disebut bebotoh, karena yang dipertaruhkan adalah bobot, kualitas aduannya, apakah dalam bentuk binatang seperti ayam, sapi, kuda bahkan sampai manusia.

Memang apabila itu dilakukan secara berlebihan tanpa didasarkan atas kesadaran dan rasionalitas tertentu, inilah kemudian disebut *momotoh*, sebagai wujud sikap dan perilaku serakah.

Kekhawatiran mengapa judi itu dilarang oleh agama dan pemerintah adalah dampak sosial yang ditimbulkan, baik terhadap pelaku, keluarga maupun lingkungan masyarakat. Pola hidup hedonisme, budaya terabas dan pemikiran potong kompas serta pandangan pragmatis-materialistik merupakan buah dari konstruksi pemikiran perjuangan. Lebih parah lagi, patologi sosial yang makin memprihatinkan ini akar persoalannya berawal dari sini.

Upaya untuk melakukan pemberantasan bisa jadi sama tuanya dengan lahirnya istilah perjudian. Seperangkat aturan dengan dilengkapi aparat penegaknya sudah dibuat untuk mengeliminasi wabah judi. Namun, realita sosiologis menunjukkan judi masih saja menjadi problem yang tak terpecahkan secara tuntas. Bahkan, kecenderungan *trend*-nya meningkat.

Gebrakan Kapolda Bali Mangku Pastika untuk membebaskan Bali agar tidak kebablasan menjadi pulau judi, sangat diharapkan dan sudah sepatutnya didukung oleh seluruh aparat maupun masyarakat Bali. Sebagai pejabat baru yang kebetulan putra daerah, tentu ada tanggung jawab moral lebih yang harus dicurahkan untuk mewujudkan komitmen tersebut.

Dalam hal ini melarang secara langsung dalam artian seketika, mungkin terlalu berlebihan dan bisa-bisa menimbulkan frustrasi. Namun, membiarkan semuanya terjadi sangat liar tanpa kontrol, itu pun tidaklah benar.

Apabila komitmen untuk memberantas perjudian hendak dilakukan, agar tidak hangat-hangat tahi ayam, maka diperlukan strategi yang komprehensif, di mana pihak kepolisian menjadi inisiator untuk secara bersama-sama dengan tokoh agama, adat, pemerintah dan tokoh-tokoh bebotoh sendiri melakukan proses penyadaran dan pencerahan bagi dampak yang ditimbulkan utamanya terhadap generasi berikutnya.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat aturan main bersama, mensosialisasikan aturan main tersebut dan memberikan sanksi-sanksi bersama dan seterusnya sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku. Persoalan yang sering terjadi justru karena ada dusta di antara kita.

Apabila kesepakatan aturan main sudah dilanggar, disitulah sikap inkonsistensi dan pengingkaran atas solidaritas terjadi dan sebagai pertanda adanya rasa saling tidak percaya.

Belumlah terlambat bagi kita untuk membangun kesepakatan sosial melalui pengaturan terhadap perjudian dan menerapkan bersama secara konsisten, konsekuen dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tidak hanya represif akan tetapi juga persuasif, upaya pemberantasan judi tidak lagi terjebak pada lingkaran setan dan niscaya lambat laun dikikis secara pelan tetapi pasti.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 30 Mei 2003

31

Pemanasan Politik

Sebagai lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melaksanakan sidang sekurang-kurangnya setahun sekali dalam bentuk Sidang Tahunan (ST) MPR. Digelarnya sidang tahunan dimaksudkan untuk mendengarkan dan memberikan advisor atas pidato laporan presiden dalam satu tahun penyelenggaraan tugas-tugas eksekutif dan menilai kinerja lembaga tinggi negara lainnya. Sebagai institusi pemegang mandat rakyat, MPR juga mengagendakan pengkajian terhadap Tap-Tap MPR.

Hasil amandemen ketiga UUD 1945 memang telah terjadi perubahan yang mendasar terhadap tata hubungan kelembagaan. Meski demikian, MPR saat ini boleh dikata masih melanjutkan proses UUD 1945 sebelum diamandemen.

Keberadaan para anggota termasuk tugas dan fungsinya merupakan produk dari UUD 1945 sehingga dalam beberapa hal tradisi yang melekat masih dijalankan. Setelah amandemen, banyak hal baik itu susunan dan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangannya secara substansial mengalami perubahan. Lebih-lebih lagi dalam UU Susduk yang baru saja disahkan sudah sangat jelas menyebutkan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi, tetapi sebagai lembaga negara. Tugas dan fungsinya menjalankan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD.

Sudah menjadi tradisi ST MPR selalu digelar setiap bulan Agustus. Untuk tahun ini rencanakan akan dilaksanakan dari tanggal 1-10 Agustus mendatang. Tidak jauh bergeser dari agenda-agenda yang sudah lazim dilaksanakan. Agenda yang akan menjadi topik bahasan tampaknya masih tetap di seputar mendengarkan pidato laporan presiden, laporan lembaga tinggi negara lainnya serta melakukan pengkajian terhadap Tap-Tap MPR yang dianggap perlu dicabut. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pergeseran agenda dalam artian masuknya agenda-agenda baru yang dipandang perlu dilakukan dan menjadi keinginan mayoritas fraksi untuk dibicarakan.

Gelagat untuk memasukkan agenda baru misalnya mulai berkembang dalam rapat konsultasi pimpinan MPR dengan Badan Pekerja (BP) MPR. Diantaranya muncul keinginan untuk membentuk komisi yang secara khusus nantinya membahas pidato laporan yang disampaikan presiden. Apabila komisi dimaksud disetujui ada kekhawatiran pembahasan yang dilakukan, akan melebar ke persoalan penilaian, meminta klarifikasi dan ujung-ujungnya akan bisa menyudutkan posisi presiden. Padahal, kita tahu presiden saat ini ada keinginan untuk ikut kembali dalam bursa pemilihan langsung di Pemilu 2004. Tidak dapat dihindari ST MPR saat ini akan menjadi ajang pemanasan politik awal dalam menyongsong Pemilu 2004.

Tap MPR Nomor III/MPR/2002 menggariskan laporan yang disampaikan oleh presiden dan lembaga tinggi negara lainnya merupakan pertanggungjawaban publik atas kinerja yang dilakukan dalam setiap tahunnya melalui ST yang digelar. Dalam menyimak laporan yang disampaikan sebagaimana diatur dalam Tap tersebut fraksi-fraksi yang ada di MPR tidak lagi menilai laporan yang disampaikan. Akan tetapi lebih sebagai *advisori* untuk memberikan catatan-catatan penting tentang hal-hal yang belum maksimal dikerjakan untuk selanjutnya dapat lebih ditingkatkan di tahun mendatang. Artinya, MPR cukup

memperhatikan hal-hal yang telah dilakukan dan dikerjakan terkait dengan pelaksanaan mandat yang telah diputuskan MPR.

Boleh jadi keluarnya Tap III Tahun 2002 kala itu merupakan residu politik pascakeberhasilan Sidang Istimewa melengserkan Presiden Abdurrahman Wahid dan menetapkan Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz sebagai presiden dan wakil presiden. Untuk menjaga proses serupa takkan terulang, perlu ada jaminan politik bagi keberlanjutan kepemimpinan presiden terpilih agar tidak dihantui oleh perasaan waswas bahwa hal serupa akan terjadi pula di tahun berikutnya.

Penting untuk diperhatikan sinyal yang disampaikan Ketua MPR Amin Rais pada saat rapat konsultasi antara pimpinan MPR dan Badan Pekerja (BP), bahwa presiden hanya menyampaikan pidato laporan. Sementara karena masa jabatan baik presiden maupun anggota MPR tinggal setahun lagi, laporan yang disampaikan cukup dibahas dan tidak perlu ada tanggapan balik atas pembahasan yang dilakukan.

Atas dua kemungkinan yang bisa terjadi atas skenario ST tersebut. Pertama, suasana sidang tahunan akan berjalan sangat landai, sebagai ajang reuni politik jumpa pisah para anggota MPR. ST kali ini merupakan yang terakhir bagi anggota MPR yang ada sekarang, karena pada April 2004 pemilu untuk memilih anggota legislatif yang baru diselenggarakan. ST kali ini merupakan ajang bagi mereka untuk bersayonara. Kedua, yang tidak dapat diabaikan justru ST ini akan menjadi ajang adu strategi bagi partai-partai politik untuk melakukan pemanasan awal dalam menyongsong Pemilu 2004. Artinya, semangat rivalitas yang memang sudah terpelihara, boleh jadi makin mengental pada saat ini. Bagaimana pun ajang ST merupakan awal bagi parpol untuk melakukan penjejalan terhadap lawan politik masing-masing.

Kini tinggal bagaimana ST yang akan digelar dapat lebih memantapkan fondasi konstitusional dapat disikapi melalui

penguatan kelembagaan pada masing-masing bidang. Hal ini penting dilakukan agar perubahan konstitusi yang dihasilkan dapat memberikan garansi bagi terciptanya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan semakin mantap.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 25 Juli 2003

Cengkeraman Kapitalisme Global

Futurolog kondang John Naisbitt mengatakan, arah perkembangan dunia abad ke-21 bergerak menuju *the world village* atau kampung dunia. Suatu kondisi di mana batas-batas negara makin mengabur, intensitas komunikasi dan interaksi akan menembus setiap ruang publik dalam suatu tatanan dunia baru. Sudah menjadi keharusan bagi setiap negara untuk menyesuaikan diri dalam pergaulan internasional.

Pemberlakuan kesepakatan AFTA 2003 merupakan awal dari lantunan era baru itu. Diawali dengan kesepakatan pasar bebas sebagai awal dari cengkraman kapitalisme global. Sebuah era kompetisi bebas dalam menguasai produksi dan distribusi atas konsumsi masyarakat dunia tanpa harus direcoki oleh perlindungan negara. Negara hanyalah sebagai regulator dan memfasilitasi proses pasar, sementara pelaku pasar diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi dan basis ekonomi secara bebas sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

Sodoran akan pilihan terbaik dari alternatif yang terburuk ini, khususnya bagi kita yang masih belajar untuk berkompetisi, membawa konsekuensi atas gerusan arus perubahan yang suka-tidak suka dan mau-tidak mau harus dihadapi, kalau tidak ingin tersisih dan disisihkan dari percaturan internasional.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan telepon sebagai lanjutan dari kesepakatan politik memangkas subsidi telah dilakukan oleh pemerintah bersama DPR, boleh jadi hanya merupakan awal dari skenario global itu tadi. Sebab, salah satu prasyarat dalam memasuki arena global itu adalah fungsi pemerintah tidak lagi memberikan perlindungan berupa subsidi kepada sektor-sektor yang dikompetisikan.

Akan tetapi, momen penerapannya ternyata kurang kondusif memberikan dukungan bagi kebijakan. Pemerintah dianggap tidak memiliki *sense of crisis*, karena kebijakan yang diambil sangat tidak berpihak kepada situasi dan kondisi *real* sebagian besar masyarakat yang masih berjuang untuk hidup.

Refleksi jeritan atas beban ekonomi baru ini terlihat nyata dari munculnya reaksi untuk menolak kenaikan itu. Apabila jeritan sosial ekonomi ini menemukan katup solidaritas, tidak menutup kemungkinan bisa membesarkan gelombang tuntutan. Apalagi memasuki tahun 2003 dianggap sebagai tahun konsolidasi kepentingan-kepentingan politik menyongsong regulasi suksesi kepemimpinan nasional. Menjadikan kesempatan ini sebagai momen politik yang kondusif bagi pengkondisian gerak perjuangan politik. Sesungguhnya, tanda-tanda konfrontasi pemikiran ideologi politik kepartaian sudah mulai dapat diendus ketika perdebatan sengit dua politisi yang memiliki perbedaan wilayah kekuasaan dan wadah kepartaian –antara Laksamana Sukardi dan Amin Rais.

Sebelumnya gelombang aksi tertuju pada langkah Laksamana Sukardi selaku Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya meningkatkan kinerja serta penyelesaian masalah BUMN serta kasus-kasus BPPN dapat segera dituntaskan. Tugas ini mengandung konsekuensi pada penyelamatan aset

aset nasional yang jumlahnya trilyunan rupiah untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber baru dalam menopang proses pembangunan.

Sumber kebijakan yang dipersoalkan meliputi kebijakan *release and discharge* (R & D) sebagai upaya memberikan pengampunan kepada para konglomerat nakal pada masa lalu, untuk dapat mengoperasionalkan perusahaan. Kebijakan ini dianggap tidak memberikan keadilan bagi masyarakat utamanya dalam menegakkan proses hukum bagi penyelesaian kasus KKNK yang dilakukan. Kenapa pemerintah begitu mudahnya memberikan pengampunan, sementara upaya hukum untuk menyelesaikan kasus yang merugikan negara tidak dilakukan secara optimal.

Persoalan kedua, menyangkut kebijakan penjualan atau divestasi saham Indosat. Sebagaimana diketahui, PT Indosat adalah salah satu perusahaan milik pemerintah yang bergerak di sektor strategis bidang telekomunikasi. Sebuah bisnis yang sangat menjanjikan di era informasi saat ini.

UUD negara telah menggariskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat. Apabila kita sepakat bahwa sektor telekomunikasi sebagai *basic* bisnis Indosat ini sebagai sektor strategis yang menguasai hayat hidup orang banyak, maka sudah semestinya pemerintah harus mempertimbangkan secara seksama untuk melakukan divestasi yang dilakukan sangat memberikan peluang kepada pemodal asing untuk menguasai mayoritas saham dan apabila ini terjadi, kepemilikan sektor strategis akan berpindah tangan kepada pihak asing.

Memang, argumen yang diajukan oleh para penggagas dianggap sebagai pilihan kebijakan rasional untuk meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pendapatan negara. Selama

ini perusahaan-perusahaan BUMN cenderung belum menunjukkan kinerjanya secara profesional bahkan selalu merugi. Di sisi lain pemerintah sangat memerlukan sumber pendapatan yang signifikan dari usaha yang dikembangkan. Privatisasi dianggap sebagai obat mujarab untuk mengurangi beban negara di satu sisi dan meningkatkan pendapatan negara di sisi yang lain. Paling tidak dalam hitungan jangka pendek. Karena ada anggapan, ketika usaha itu dikelola swasta akan dapat memberikan nilai lebih ketimbang masih di bawah ketiak negara.

Atas kebijakan itu, kontan saja masyarakat merasa gerah. Kebijakan yang dikeluarkan dianggap sebagai langkah keliru yang sangat membebani masyarakat. Tidak kurang Amien Rais selaku ketua MPR bersuara lantang menyerukan agar PT Indosat sebagai aset negara tidak dijual kepada pihak asing.

Lontaran kritik itu pun ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Tanggapan yang dilakukan Laksamana lebih serius lagi. Bahkan, pernyataan Amien dianggap sangat mengganggu dan cenderung menyerang pribadi.

Bila dicermati, perdebatan dua kubu yang memiliki perbedaan garis politik itu justru mengarah pada persoalan pribadi, bukan pada substansi kebijakan. Padahal dari persoalan ini rakyat mestinya dapat menyaksikan sajian debat publik yang jernih, obyektif dan rasional dari dua tokoh yang dikenal memiliki kapabilitas intelektual yang mumpuni.

Dari realita politik itu, tidak berlebihan kiranya, kalau orang pun mulai mereka-reka bahwa dibalik persoalan tersebut ada skenario politik yang sedang dimainkan. Dugaan ini makin diperkuat oleh adanya dukungan dari masing-masing pihak berdasarkan garis partai.

Terlepas dari semuanya itu, tampaknya penting untuk diperhatikan dampak psikologis yang ditimbulkan. Pertimbangan ekonomis saja belumlah cukup untuk dipakai dasar pertim-

bangun. Diperlukan sensitivitas emosional nilai kebangsaan dan pemaknaan rasa nasionalisme atas kepemilikan itu. Sebab, hanya dengan semangat inilah kita akan dapat bertahan dari cengkeraman kapitalisme global.

Rubrik Orasi, Bali Post: Jum'at, 1 Agustus 2003

BAGIAN KEDUA

WAWANCARA

33

“Vote Getter” Sekadar Mesin Suara

Vote getter muncul dalam perpolitikan yang sangat elitis, tatkala demokrasi belum mewarnai massa di kalangan bawah. Kenapa *vote getter* muncul? Berikut komentar Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si. pengamat politik yang juga dosen Universitas Warmadewa Denpasar, yang dihimpun Made Subrata dari DenPos.

Sebenarnya yang dimaksud “vote getter” dalam pemilu itu apa?

Vote getter bisa diartikan pengumpul suara. Jadi, *vote getter* adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh kuat untuk dimanfaatkan atau memanfaatkan massa untuk digiring ke salah satu parpol.

Secara yuridis formal, apakah “vote getter” diatur dalam pemilu?

Tidak. Sesungguhnya tradisi itu muncul dalam perpolitikan yang sangat elitis – di mana demokrasi belum begitu mapan sampai ke akar rumput. Sehingga dalam pemikiran perpolitikan yang elitis ini, seolah-olah dengan memegang elite-elite – baik nasional, maupun lokal; formal dan informal – diharapkan para pengikut atau massa yang dimiliki ikut terbawa ke mana elite itu pergi. Jadi tradisi ini sangat paternalistik.

Apakah “vote getter” itu merugikan rakyat?

Bisa merugikan rakyat, karena ada semacam manipulasi politik di tingkat akar rumput. Kadang-kadang perjuangannya tidak semata-mata untuk kepentingan basis massa. *Vote getter* akan baik, ketika ia betul-betul bisa memperjuangkan hak-hak politik rakyatnya. Cuma, masalahnya *vote getter* itu ikut bermain dalam kancah politik, tetapi akhirnya tidak duduk di lembaga legislatif. Mereka ditempatkan pada nomor jadi, tetapi dalam proses penentuan akhir mengundurkan diri. Ini yang sering terjadi. Inilah yang saya sebut penipuan politik terhadap massa.

Sisi negatifnya di sana?

Ya. Tetapi sepanjang yang *vote getter* ini betul-betul berjuang untuk massanya, ya itu positif. Cuma masalahnya, *vote getter* hanya sebagai alat. Setelah mendapatkan suara, ia pergi begitu saja.

Selama ini fungsi “vote getter” demikian?

Kalau kita lihat proses pemilu selama ini ya seperti itu. Gaya-gaya berpolitik semacam itu semestinya dihilangkan, sebab cenderung menipu massa.

Dalam era transparansi sekarang, cara-cara seperti itu masih bisa dipakai?

Mestinya parpol tidak menggunakan *vote getter* lagi. Mengapa demikian, sebab sistem pemilu yang akan datang adalah kombinasi antara proporsional dan distrik. Di samping massa memilih secara proporsional, juga berdasarkan orang yang tercantum dalam daftar caleg. Tidak ada istilah nomor jadi dan tidak jadi. Daftar urut hanya mengurut nama caleg. Bisa jadi nomor urut terbawah menjadi calon jadi, karena mendapat dukungan. Kalau *vote getter* diberlakukan dalam sistem kombinasi seperti itu akan sangat mengecewakan massa dan merugikan partai. Massa akan bisa menuntut kepada parpol yang diberikan dukungan, karena yang dipasang itu, calon-calon tipuan.

Selama ini orang-orang yang dipakai sebagai “vote getter” dari golongan mana saja?

Biasanya orang yang dipakai karena ketokohnya. Misalnya menteri, gubernur, bupati dll. Ia dipakai karena ketokohnya dalam birokrasi – tokoh formal. Begitu juga tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya dipakai *vote getter* karena ketokohnya dalam lembaga informal.

Tokoh-tokoh ini biasanya hanya dipakai saat pencoblosan, betul demikian?

Ya betul. Ini yang saya sebut sebagai penipuan politik terhadap massa. Di mana orang-orang itu digunakan hanya sebagai mesin suara. Dan sesungguhnya orang-orang itu tidak duduk di legislatif.

Ada yang menilai “vote getter” juga penting, asal tidak dimodifikasi. Komentar Anda?

Dari segi peristilahan saja *vote getter* itu sudah tidak benar. Dalam artian, ia dipakai alat untuk mengumpulkan suara, atau yang saya sebut pekerja-pekerja politik. Dia hanya sebagai alat, setelah suara terkumpul ia pergi. Di alam demokrasi hal-hal semacam ini kan tidak *fair*. Yang kita pentingkan dalam alam demokrasi itu adalah *fair play* dalam segala aspek, termasuk juga nama-nama yang ditawarkan.

Orsospol yang paling banyak menggunakan “vote getter” selama Orba?

Ya jelas Golkar. Golkar telah memproklamasikan diri sebagai partai pemerintah dan partai mayoritas tunggal, sehingga ia bisa memasang siapa pun yang ia mau. Karena konsep monoloyalitas terhadap partai itu sudah sedemikian kental, Golkar bisa memasang siapa saja.

Dengan adanya PP No. 5 Tahun 1999 tentang netralitas PNS bagaimana?

Saya lihat ini tantangan berat partai Golkar. Sejauh mana perjuangan atau manajemen politik yang selama ini diagungkan itu bisa diterapkan. Jawabannya kita tunggu pada pemilu yang akan datang. Saya tidak mengatakan bahwa Golkar terpuruk atau tidak. Tetapi ujiannya terletak pada pemilu nanti. Di sana kita bisa mendapatkan tolok ukur, apakah Golkar itu betul-betul sebuah organisasi yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat atau tidak, hal itu bisa dilihat pada pemilu nanti.

DenPos, Rabu, 3 Februari 1999

Target 48 Persen Sudah Maksimal

Maraknya partai baru dan bangkitnya PDI Perjuangan, sama sekali tidak membuat Partai Golkar patah semangat. Di tengah merahnya Bali oleh atribut PDI Perjuangan, ternyata partai berlambang pohon beringin tersebut cukup berani mematok target perolehan suara minimal 55 persen. Bagaimana kans Partai Golkar pada pemilu mendatang? Apakah target itu realistis? Berikut komentar pengamat politik Drs AAG Oka Wisnumurti, M.Si, seperti yang disampaikan kepada wartawan DenPos, Ketut Karya.

Ketua DPP Partai Golkar H. Effendi Jusuf SH menargetkan Partai Golkar Bali minimal meraup 55 persen suara dalam pemilu mendatang. Apa pendapat Anda tentang hal itu?

Kondisi politik nasional saat ini, tampaknya Partai Golkar sudah membuat semacam prediksi perolehan suara. Dalam prediksi itu disebutkan untuk Jawa, Partai Golkar menargetkan 40 persen suara, sedangkan di luar Jawa berkisar antara 60-70 persen. Apa yang dikatakan oleh pengurus DPP Effendi Jusuf, saya cenderung melihatnya sebagai bentuk motivasi untuk daerah. Harus diingat target tersebut hanya sebuah harapan, paling tidak menjadi tanggung jawab pengurus daerah untuk memenuhinya. Apa yang dilontarkan itu lebih dominan men-

garah pada motivasi, untuk kader-kader daerah agar bisa memacu diri.

Dibandingkan perolehan suara pada pemilu sebelumnya, di mana Partai Golkar Bali berhasil meraup 95 persen suara memang target sekarang sangat jauh. Menurut Anda apakah itu realistis?

Saya tetap berkeyakinan untuk Bali akan muncul dua partai besar yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Kedua partai ini akan bersaing dengan ketat. Cuma saya masih menempatkan PDI Perjuangan yang lebih unggul pada pemilu mendatang khususnya di Bali. Bisa jadi PDI Perjuangan melebihi 50 persen dan Partai Golkar Bali 40 persen saja saya pikir sudah bagus.

Alasannya?

Pertama, di Bali terjadi perubahan sikap politik tingkat massa. Perubahan itu sangat kentara ketika massa di tingkat bawah melakukan aktivitas politik secara terbuka, dalam bentuk dukungan terhadap parpol di luar Golkar. Itu saya pikir merupakan indikasi yang tak pernah nampak sebelumnya. Kedua, PDI Perjuangan sebagai partai yang bisa unggul di Bali sudah melakukan langkah-langkah yang sangat efektif. Misalnya dalam hal sosialisasi terhadap logo, yang secara cepat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Tindakan tersebut sangat positif. Ketiga, basis ideologi nasionalisme yang begitu kental kini ditemukan di PDI Perjuangan.

Bagaimana dengan Partai Golkar?

Partai Golkar yang awalnya merupakan partai pembaharu dengan paradigma barunya, dalam menampilkan *platform* yang jelas. Yang dimaksud Partai Golkar dengan paradigma baru itu seperti apa? Ditataran massa paradigma baru tersebut belum dipahami. Di tingkat massa masih perlu disosialisasikan.

Belum lagi masalah bendera Golkar yang ternyata masih memanfaatkan gambar lama, padahal sekarang sudah berubah menjadi partai politik. Sosialisasi kebawah harus sesegera mungkin dilakukan.

Sebaliknya ada yang mengatakan banyaknya partai politik, justru akan menguntungkan Partai Golkar. Gambar dan warnanya yang khas memungkinkan Golkar tetap menjadi alternatif bagi pemilih tradisional khususnya pemilih tua yang buta politik?

Bisa saja terjadi pemilih “bingung” sehingga muncul suara spekulasi. Cuma jika dalam perhitungan politik mestinya Golkar tidak mendasarkan diri pada sesuatu yang bersifat *non contability*. Mestinya prediksi politik dilakukan dalam bentuk bagaimana *platform* partai telah mnyentuh sampai ke tataran yang paling bawah, mencakup pemahaman politik.

Terlepas kurangnya sosialisasi paradigma baru, Partai Golkar memiliki sejumlah keunggulan seperti pengalaman politik, kemantapan struktur dan dana. Pendapat Anda tentang hal itu?

Memang Partai Golkar sebagai partai politik senior, pengalaman politik dan kemantapan struktur organisasi serta kedekatan dengan birokrasi, merupakan indikator yang perlu diperhitungkan. Di samping massa tradisional yang sangat loyal terhadap tanda gambar dan partai itu sendiri. Semua itu merupakan indikator yang perlu digaris bawahi, sehingga saya tetap mengatakan Partai Golkar nanti akan menjadi salah satu partai besar dari lima partai besar di tingkat nasional. Jika di Bali jelas dua partai yang akan bersaing ketat.

Tentang kuatnya dukungan dana?

Keunggulan Golkar baik dalam hal pendanaan manajemen sumber daya manusia mestinya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak *fair*. Sekaranglah saatnya bagi Partai Golkar untuk menampilkan permainan politik yang cantik, penuh

dengan etika dan norma politik yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Menghindari hal-hal yang memunculkan kecurigaan massa. Sebab dengan cara begitu yang dimaksud Golkar dengan paradigma baru dapat dipahami masyarakat luas. Artinya Golkar berani mereformasi diri yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku politik yang betul-betul menjunjung tinggi nilai etika dan demokratisasi.

Jika seandainya dalam waktu dekat Partai Golkar mampu melakukan sosialisasi tersebut, apakah mungkin targetnya akan tercapai?

Saya fikir sangat sulit. Karena citra masa lalu Golkar masih lekat di tingkat massa. Di samping beberapa indikator yang berpengaruh terhadap perolehan suara Golkar, seperti birokrasi dan ABRI sudah mulai menjaga jarak. Itu suatu tantangan yang sangat berat bagi Golkar untuk memenuhi target yang dipatok.

Figur calon presiden dikatakan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara. Bagaimana dampaknya terhadap Bali seandainya nanti Golkar tetap ngotot mencalonkan B.J Habibie?

Figur calon pemimpin nasional jelas berpengaruh. Selain *platform* partai, figur calon presiden yang dicalonkan parpol sangat menentukan dalam meraih simpati massa. Figur calon presiden yang dimunculkan merupakan salah satu alat *bargaining*. Terlebih di negara-negara maju. Sedangkan untuk Partai Golkar menyangkut calon presiden saya fikir merupakan keputusan nasional. Kenapa Habibie muncul, karena banyak DPD yang mencalonkan Habibie, kecuali Jatim. Sedangkan Bali tak menyebut nama hanya kriteria. Itu artinya memunculkan figur Habibie bagi Golkar Bali masih menimbulkan keragu-raguan. Jadi secara implisit bisa diartikan begitu.

Bagaimana seharusnya Partai Golkar Bali agar mereka memiliki posisi tawar lebih baik di tingkat massa, dikaitkan dengan figur calon presiden?

Bali seharusnya menyebut nama yang diterima oleh masyarakat Bali. Hal itu jelas akan berpengaruh di tingkat lokal. Bahwa DPD Golkar Bali mempunyai sikap. Masalah calonnya nanti tidak menjadi calon pilihan pusat itu urusan lain, paling tidak apa yang dilakukan Jatim suatu langkah maju, bahwa dia dalam struktur kepartaian tidak terjadi lagi kooptasi total pusat terhadap daerah.

Bagaimana dengan target 48 persen yang dilakukan pengurus Partai Golkar Kodya Denpasar?

Saya pikir itu sudah target yang sangat maksimal. Mungkin saja target tersebut tidak tercapai, tetapi dengan target tersebut Golkar sudah mulai realistis dalam melihat pergeseran peta politik. Realistis menurut saya dilihat dari latar belakang sejarah, di mana Golkar jarang mematok target di bawah 70-100 persen. Sekarang mulai tampak sikap realistis dalam melakukan perhitungan politik.

Apakah Anda melihat target di Kodya itu hanya bersifat motivasi saja?

Kodya sebagai barometer politik Bali nantinya akan menjadi ladang perebutan simpati masing-masing partai. Saya pikir target yang dipatok Partai Golkar juga sifatnya motivasi. Akan sangat lucu jika sebuah partai mematok presentase yang sangat rendah. Secara psikologis hal itu sangat tidak kondusif bagi kader-kadernya.

DenPos, Jumat, 29 Maret 1999

35

PDI Perjuangan Enam, Partai Golkar Tiga

Partai Golkar dan PDI Perjuangan di Bali, diprediksi akan bersaing memperebutkan sembilan jatah kursi DPR RI. Kalau dulu kesembilan kursi itu, semuanya diduduki partai berlam-bang beringin. Tetapi pada pemilu mendatang, justru PDI Perjuangan akan lebih banyak menduduki kursi tersebut. Menurut pengamat politik Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si. perolehan kursi tersebut 6:3. Enam kursi untuk PDI Perjuangan dan tiga kursi untuk Golkar. Berikut komentar dosen Fisip Unwar yang disarikan Made Subrata dari DenPos.

Bali diprediksi memperoleh jatah sembilan kursi di DPR RI. Dibandingkan pemilu lalu, apakah jumlah ini ada peningkatan?

Jumlah itu tidak meningkat, karena untuk Bali jumlah kursi di DPR RI ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tingkat II. Pada pemilu lalu Bali juga mendapat jatah sembilan kursi, tetapi semuanya dari Golkar. Namun, nantinya ada suatu daerah yang tingkat II kecil, tetapi jumlah penduduknya banyak akan mendapat kebijakan lain, seperti halnya DKI Jakarta dan Jawa Barat pada pemilu lalu. DKI Jakarta kan sebagian lima kursi, tetapi karena jumlah penduduknya banyak akhirnya daerah ini mendapat tambahan lima belas kursi. Jadi untuk daerah seperti ini akan ada kebijakan lain. Artinya di samping berdasarkan daerah tingkat II, juga dilihat jumlah penduduknya.

Karena pertimbangan jumlah penduduk, apakah Bali akan mendapat tambahan kursi, mengingat jumlah urbannya cukup banyak?

Saya kira tidak. Menurut saya Bali sudah cukup sembilan kursi. Tetapi kalau toh nanti jumlahnya melebihi sekian kali, saya pikir ini akan menjadi perhitungan lain.

Untuk membagi suara sisa, pertama ditentukan singkat II-nya dulu. Kalau ada suara lebih, sisanya ini akan distribusikan ke daerah yang jumlah penduduknya banyak, tetapi daerah tingkat II kecil – sehingga akan ada aspek keadilan.

Kalau pada pemilu lalu kesembilan kursi di DPR RI diduduki anggota legislatif dari Golkar. Sekarang kira-kira bagaimana?

Untuk Bali saya kira kesembilan kursi itu akan diperebutkan oleh dua partai yakni PDI Perjuangan sama Partai Golkar. Saya tetap mempunyai keyakinan dua partai ini sama-sama memiliki peluang untuk meraih kursi di DPR RI.

Selain dua partai tersebut, kira-kira ada nggak partai lain di Bali yang berpotensi “mencuri” satu kursi di DPR?

Saya belum lihat partai-partai baru yang mampu menyaingi kedua partai tersebut (Golkar dan PDI Perjuangan-red). Tetapi kalau boleh saya memprediksi, yang berpotensi untuk mendapatkan satu kursi di DPR adalah PKP. Yang lainnya saya pikir sangat sulit, karena secara internal mereka belum bisa melakukan konsolidasi secara intens, khususnya di daerah-daerah tingkat II. Saya lihat belum semua daerah tingkat II terisi pengurus partai-partai tersebut. Ini merupakan suatu masalah bagi partai-partai baru untuk melakukan konsolidasi dalam hal meraup suara yang nantinya bisa mengantarkan kadernya duduk di tingkat pusat. Saya tetap melihat PDI Perjuangan dan Golkar akan bersaing untuk meraih kursi di tingkat pusat.

Kira-kira berapa perbandingannya perolehan kursi tersebut?

Saya memperkirakan 6:3. Enam kursi untuk PDI Perjuangan dan tiga untuk Partai Golkar. Dari kacamata pengamatan saya tetap mengunggulkan PDI Perjuangan.

DenPos, Selasa, 6 April 1999

36

Masyarakat Sudah Tahu Partai Status Quo

Masyarakat sudah dapat menilai dan tahu, partai mana yang pro status quo, walaupun semua parpol mengaku sebagai Reformis. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Unwar, Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si. kepada DenPos, Sabtu (1/5) kemarin di Denpasar. Berikut petikannya.

Menurut Anda sebenarnya partai mana saja yang diklasifikasikan sebagai partai reformis dan pro status quo?

Secara vulgar dan berdasarkan wacana para elit parpol yang semuanya mengaku reformis, sulit membedakan mana sebenarnya yang disebut partai pro status quo. Diperlukan parameter yang jelas sebagai tolok ukur. Karena sudah jelas belepotan dengan gampangnyanya menyebutnya reformis.

Lalu menurut anda, apa yang bisa dijadikan parameter?

Paling tidak yang pertama harus dilihat adalah komitmennya membangun serta mewujudkan demokrasi. Di samping sikap dan perilaku politik para elitnya selama ini. Artinya, sejauh mana elite parpol sudah mampu meletakkan etika dan moral sebagai landasan dalam politik.

Jika dilihat dari perilaku politik, parpol reformis itu bagaimana?

Etika dan moral politik juga menyangkut perilaku dan praktik politik. Tentunya praktik politik yang sesuai tujuan kaum reformis adalah meninggalkan praktik kekerasan, memobilisasi massa dengan memanfaatkan institusi formal dan informal. Juga menghindari praktek politik menggunakan uang dalam kegiatannya meraih suara.

Berdasarkan parameter itu apakah anda melihat adanya kecenderungan munculnya partai pro status quo?

Jika diklasifikasikan antara partai reformasi dan partai status quo memang sangat susah. Namun berdasarkan parameter tadi, masyarakat sudah dapat melihat dan sadar, partai mana yang menjurus ke dua hal tadi. Bila hal itu terjadi, partai yang dimaksud tak lebih merupakan perpanjangan kekuasaan masa lalu.

Peta kekuatan di Kodya Denpasar menurut anda bagaimana?

Jika dilihat dari ukuran reformis dan pro status quo, agak sulit. Tetapi jika dilihat dari partai-partai yang bertarung saya masih unggulkan PDI Perjuangan. Menyusul Partai Golkar. Namun siapapun yang menguasai kursi legislatif, mereka harus melebur mewakili rakyat. Artinya tidak lagi duduk mengatasnamakan kelompok atau golongan.

Jika kekuatan reformis dan pro status quo berimbang, bagaimana?

Semua berharap semua kekuatan yang ada di legislatif bersatu. Mereka dituntut lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Satu-satunya jalan mereka harus melebur. Mudah-mudahan partai reformis yang mendominasi. Bisa dibayangkan jika legislatif kembali di dominasi kelompok yang pro status quo. Selain citra legislatif sudah menurun, kemungkinan mereka akan didikte elite partainya, sehingga aspirasi rakyat tidak tersalurkan.

Bagaimana dengan peran kelompok penyeimbang?

Andai kata komposisinya berimbang dan ternyata aspirasi rakyat tersumbat, maka rakyat akan bersuara lagi. Harus diingat infrastruktur politik bukan hanya parpol, tetapi juga ada kelompok penekan, kelompok idealis (anomi) yang berada di luar sistem. Kelompok penyeimbang itu memiliki kekuatan yang mampu memberikan kontrol terhadap penguasa.

DenPos, Senin, 3 Mei 1999

37

Praktik Nepotisme Rugikan Parpol

Praktik nepotisme dalam proses pencalonan anggota legislatif mendapat tanggapan serius dari masyarakat. Pasalnya selain diklaim sebagai warisan orde sebelumnya, secara politis praktik tersebut sangat rentan memunculkan korupsi dan kolusi. Permasalahannya sekarang apa sebenarnya batasan nepotisme itu, terutama dalam proses pencalegan? Berikut petikan wawancara wartawan DenPos dengan pengamat politik Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si.

*Praktik **nepotisme** dalam pencalegan kembali muncul. Komentar Anda?*

Masalah praktik nepotisme sebenarnya isu yang didengungkan oleh Orde Reformasi. Terutama dalam upaya merenovasi dan memperbaiki segala bentuk kerusakan yang terjadi pada era Orde Baru. Salah satu komitmen itu adalah penghapusan dan tidak terjangkitnya kembali praktik nepotisme. Nah, kalau itu sudah dibangun sebagai sebuah komitmen, maka harus diwujudkan dalam setiap tindakan, termasuk dalam proses pencalegan.

Jika kenyataannya ada parpol yang melakukan hal itu. Apakah nanti akan berpengaruh terhadap parpol bersangkutan?

Jelas. Karena hal itu telah keluar dari komitmen reformasi. Masalahnya sekarang perlu dipertegas tentang ukuran nepotisme. Katakanlah di Bali yang mengenal istilah keluarga kecil dan keluarga besar, dalam bentuk klan. Apakah hal itu dikategorikan sebagai praktik nepotisme? Batasan-batasan tentang nepotisme itu seperti apa? Lalu proses kemunculan mereka bagaimana? Ini penting agar tidak terjebak pada pengertian nepotisme yang sempit.

Menurut Anda sendiri yang mana dikategorikan sebagai nepotisme?

Proses kemunculan seseorang perlu mendapat perhatian. Di sinilah apa yang saya sebut sebagai *track record* seseorang. Misalnya, dalam sebuah keluarga mereka bersaudara lima orang. Kebetulan semuanya menekuni dunia sama yakni politik. Dan dari segi politik mereka sudah belajar betul, sehingga *track record*-nya terbilang baik. Kalaupun toh mereka muncul sebagai caleg, itu tentu bukan atas prinsip keluarga. Tetapi mereka muncul karena memiliki kemampuan. Berbeda dengan seseorang yang jadi pengurus parpol, yang memunculkan keluarganya yang sebenarnya tidak aktif dan tak mengerti politik. Itu baru bisa disebut nepotisme. Jadi janganlah terjebak pada pengertian nepotisme yang sempit.

Jika dilihat dari proses kemunculannya, masih ditoleransi keluarga jadi caleg. Nah, dari kaca mata politis bagaimana?

Dalam aturan bisnis tegas dilarang dan tidak memungkinkan satu keluarga menempatkan dua atau lebih dalam satu perusahaan. Apakah, suami istri atau anaknya. Saya kira dalam bidang politis pun sama. Sebelumnya apa yang menjadi pertimbangan, tentu untuk menghindari terjadinya kolusi dan korupsi. Sesungguhnya jika satu keluarga berada dalam suatu perusahaan sangat memungkinkan mereka melakukan kolusi.

Berarti tidak sepenuhnya nepotisme itu jelek?

Nepotisme itu akan menjadi jelek jika berkembang menyuburkan praktik kolusi. Sepanjang nepotisme itu proses kemunculannya didasari atas *track record* tidak jelek. Justru kalau berkembang menumbuhkan kolusi itulah jeleknya.

Jika dilihat dari sudut strategi, bagaimana Anda mengamati dampak dari nepotisme itu?

Sebenarnya sepanjang keluarga yang ditampilkan memiliki kapabilitas dan diakui massanya tak masalah. Namun hendaknya dihindari dalam satu instansi. Misalnya suami caleg tingkat I, istri di tingkat II. Tetapi jika ingin menarik massa, model seperti ini secara strategi merugikan parpol. Dukungan massa bisa jadi pecah. Umpamanya, suami punya massa dan istri juga. Kemudian jika keduanya masuk calon dukungannya akan pecah. Bila hanya suami yang menjadi calon otomatis orang-orang yang dekat istri akan terakomodir. Berdasarkan strategi politik nepotisme itu salah dan merugikan parpol yang bersangkutan.

Apakah Anda setuju dengan dalih dan alasan apapun praktik nepotisme harus dihindari?

Ya. Bila dilihat dari kepentingan reformasi hal itu harus dihindari. Apalagi sekarang masyarakat tengah gencarnya menolak praktik nepotisme. Intinya jangan sampai gerakan reformasi yang dengan gigih diperjuangkan mentah kembali. Kesalahan masa lalu harus tidak diulang pada era ini.

DenPos, Jumat, 21 Mei 1999

38

Kesepakatan PDI Perjuangan-Golkar, Kenapa Tidak?

Bentrok massa PDI Perjuangan dan Partai Golkar diprediksikan pengamat akan terjadi di Bali. Kenyataannya memang begitu. Dua partai inilah yang akan bersaing kuat untuk menempati posisi teratas perolehan suara di Bali. Bentrok dan gesekan telah berlangsung di beberapa sisi wilayah Bali. Sejauh mana kesepakatan yang telah dibuat forum komunikasi antarpol dan kesepakatan pada pertemuan *coffee morning* bisa efektif meredam terjadinya kerusuhan di lapangan? Berikut perbincangan wartawan Bali Post Suana dan pengamat politik Drs. AAG Oka Wisnumurti. M.Si yang juga anggota PPD I Bali.

Pemasangan atribut partai begitu marak dan para pendukung partai cenderung fanatik, khususnya pendukung PDI Perjuangan dan Golkar. Apa yang terjadi saat kampanye atas kenyataan itu?

Dengan sendirinya kampanye yang merupakan tahapan paling rawan, cenderung akan menimbulkan konflik. Konflik dan bentrokan terjadi karena adanya pengerahan massa di mana massa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kondisi begini sangat mudah memancing tindakan destruktif. Tak dipungkiri bisa memancing terjadi bentrokan, pencabutan bendera dan sebagainya.

Apakah figur pimpinan partai berperan mengendalikan massanya?

Saya akui kegaيران massa di tingkat bawah ini yang sulit diantisipasi elite parpol. Untuk itu semestinya elite parpol memberikan kesejukan, memberikan pemahaman politik yang benar, memberikan pemahaman demokrasi yang benar kepada massanya. Jadi komunikasi politik yang diharapkan tidak hanya vertikal juga horizontal.

Bagaimana efektivitas kesepakatan forkom antar parpol dan coffee morning?

Saya fikir kesepakatan yang telah dibuat sangat efektif untuk meredam konflik atau kerusuhan. Saya fikir kesepakatan antar-partai ini merupakan suatu cara untuk meredam persoalan yang terjadi di lapangan. Kesepakatan itu boleh dikatakan merupakan pendekatan persuasif agar kerusuhan yang ditakuti masyarakat tidak terjadi. Persoalannya mampukah elit parpol yang telah membuat kesepakatan itu mengendalikan massanya di lapangan. Dalam tataran realitas ini yang perlu diwujudkan. Jangan kesepakatan itu berada pada tingkat wacana politik semata. Justru tindakan nyata itu yang lebih baik. Inilah tanggung jawab moral dari pimpinan parpol untuk menyebarkanluaskannya dalam kampanye ini sehingga kesepakatan itu merupakan tanggung jawab moral pimpinan.

Bagaimana kesepakatan itu bisa mengantisipasi bentrok antara PDI Perjuangan dan Partai Golkar?

Di Bali saya menganggap kedua partai ini sebagai partai besar kalau dilihat dari massanya. Karena itu mestinya kedua partai besar ini hendaknya membangun kesepakatan di antara mereka agar pemilu ini bisa berlangsung jujur, adil, luber, aman dan demokratis. Atas dasar kesepakatan itu elit partai politiknya bisa membangun komunikasi sampai tingkat ke bawah. Sebab konflik-konflik yang terjadi selama ini di lapangan seperti pen-

cabutan bendera, kebingasan massa dan lainnya, di Bali terjadi antara dua massa partai itu.

Lantas bagaimana PPD I mengantisipasinya?

Melihat beberapa peristiwa belakangan yang paling mengkhawatirkan bertemunya massa kedua partai ini. Oleh karena itu upaya mengantisipasi secara persuasif selain di tingkat kesepakatan tadi juga di PPD I. Kebetulan saya ikut sebagai perumus jadwal kampanye. Saya sudah perkirakan hal itu akan terjadi. Untuk itu saya mencoba menyusun jadwal agar sejauh mungkin massa kedua partai tadi tidak bertemu baik dari segi wilayah maupun waktunya. Nah, ini upaya maksimal yang kita telah lakukan. Andaikata terjadi bentrok massa di lapangan terpulang kembali tanggung jawab pimpinan parpol yang bersangkutan.

Bali Post, Senin, 24 Mei 1999

39

Agar Diperhitungkan, PKP Bali Perlu Waktu

Menurut rencana Kamis besok, PKP Bali akan dideklarasikan. Dengan hadirnya PKP nanti bertambah jumlah parpol yang akan menyemarakkan pesta demokrasi di Bali. Bagaimana prospek PKP Bali ke depan? Berikut perbincangan wartawan DenPos Ketut Karya dengan pemerhati politik Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si.

PKP akan segera hadir di Bali, apa komentar Anda?

Dilihat dari keberadaannya kehadiran PKP merupakan sebuah proses. Partai hanyalah merupakan alat untuk mengakomodir berbagai kepentingan. Banyaknya partai sekarang bisa diartikan sebagai suatu bentuk bahwa sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat yang majemuk telah berkembang berbagai macam kepentingan. Beraneka kepentingan itu nantinya diharapkan terakomodir di dalam partai yang ada.

Artinya itu akan membawa masyarakat ke arah yang lebih baik?

Jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, munculnya banyak partai belum tentu menjanjikan hal yang lebih baik. Masalahnya, apakah kehadiran banyak partai itu wujud dari artikulasi kepentingan masyarakat di tingkat bawah. Atau se-

baliknya hanya merupakan kepentingan elite politik yang tujuannya merebut kekuasaan.

PKP sendiri kelompok mana menurut Anda?

Semuanya perlu diuji dulu melalui pelaksanaan Pemilu mendatang. Setelah melalui proses pengujian baru kelihatan partai mana yang lahir dari akomodasi kepentingan masyarakat. Itu terlihat dari dukungan yang diperolehnya. Sedangkan yang tidak mendapat dukungan bisa dikelompokkan kelompok yang lahir dari kepentingan elite, sehingga partai akan mati dengan sendirinya. Banyaknya partai nanti akan terseleksi secara alamiah.

Bagaimana dengan PKP?

Menurut saya Golkar kini sedang mengalami kepingan-kepingan. Orang-orang yang dulunya bernaung di Golkar, sekarang mereka keluar membuat partai baru. Fenomena itu merupakan suatu bentuk permainan elite, yang eksistensinya akan ditentukan dalam proses lebih lanjut.

Idealnya berapa jumlah partai yang ada?

Sekarang kelihatannya terlalu banyak. Idealnya di Indonesia hanya ada lima partai saja. Itu nanti akan terbukti dengan munculnya lima partai politik besar. Semuanya merupakan supremasi artikulasi kepentingan publik. Artinya, sejauh mana elite politik dapat mengartikulasikan berbagai kepentingan masyarakat ke dalam *platform* partai maupun dalam program aksinya.

Apakah kehadiran PKP akan menggembosi Golkar?

Tanpa dikatakan ingin menggembosi, dengan sendirinya sudah langsung menggembosi Golkar. Sesungguhnya proses penggembosan terjadi karena kader yang dulunya bergabung

sudah memisahkan diri. Elite yang keluar bisa jadi memiliki dukungan di tingkat massa.

Apa komentar Anda tentang figur calon pimpinan PKP Bali?

Terus terang saya belum memiliki pandangan terhadap *track record* terhadap masing-masing kandidat yang muncul. Sebab, di masa mendatang ketika berbicara soal elite politik yang muncul, terpenting bagaimana *track record* itu menyangkut konsistensi dan kapabilitasnya dari awal sampai menduduki puncak pimpinan. Itu harus jelas dan betul-betul bersih. Tentang yang akan muncul di PKP, saya pribadi tak memiliki catatan prestasinya. Termasuk ketika di Golkar dan lain-lain.

Berarti PKP Bali belum bisa diperhitungkan?

Tampaknya di Bali masih perlu waktu. Berbeda dengan pusat yang didukung oleh Edi Sudrajat. Di Bali tampaknya belum ada figur baru yang bermain. Orangnyanya hanya itu-itu saja termasuk di PKP. Berbeda dengan di tingkat nasional ada figur baru.

Apakah track record itu bisa dijual?.

Jelas itu bisa dijual oleh partai. Konsistensi dan kapabilitas figur sangat menentukan sehingga massa dapat menentukan pilihannya. Konsistensi tokoh merupakan dasar pertimbangan bagi massa untuk melakukan pilihan terhadap partai yang ada. Termasuk konsistensi berfikirnya, bagaimana dia berucap dan pelaksanaannya dalam perjuangan. Yang terjadi sekarang kan wacana berbeda dengan laksana, sehingga muncul ketidakpercayaan. Jika ternyata figur yang ditampilkan tidak konsisten justru akan menjadi bumerang bagi partai itu sendiri.

Apa nilai positifnya dengan sistem multi partai?

Dalam alam demokrasi makin banyak partai makin banyak alternatif pilihan. Program yang disodorkan makin aspiratif dan

masyarakat juga dituntut lebih banyak melihat. Sehingga mengetahui partai mana yang dapat mewakili aspirasinya. Artinya dengan banyaknya partai akan memperkuat *bargaining position* massa pemilih. Sebab mereka bisa melakukan *bargaining power* atau tawar menawar kekuasaan. Arti suara sangat tinggi sehingga tawar menawar terhadap partai makin kuat. Sekarang nilai massa itu sangat tinggi, ketimbang kalau partainya sedikit.

Kaitannya dengan kesadaran berpolitik?

Cuma banyaknya partai juga harus didukung dengan peningkatan kesadaran politik masyarakat. Masalahnya sekarang kan masyarakat mengalami *gap* politik sebagai akibat penerapan politik *massa mengambang*. Artinya wacana politik selama ini masih ada pada tataran elit. Sementara massa boleh dikatakan steril dari wacana politik. Mereka hanya bisa merasakan kegiatan politik lima tahun sekali, ketika dia harus memberikan suaranya pada Pemilu.

Apa akibatnya jika wacana politik hanya menjadi kapling elit?

Sekarang ketika multi partai di mana wacana politik tidak hanya menjadi kapling elite dan massa pun ikut melakukan *bargaining* politik serta ikut berpartisipasi aktif justru memunculkan masalah karena kesadaran politik rendah. Muncullah fanatisme sempit terhadap partainya. Idealnya dalam multi partai, massa itu bisa meneropong *platform* partai. Bukan semata-mata figur dan bendera. Sekarang yang terjadi kan masih sebatas mendukung figur dan bendera atau sebatas politik warna. Bukan substansi politiknya dalam bentuk *platform* yang ditawarkan.

Solusinya?

Dalam mengatasi hal ini elite harus melakukan pencairan politik terhadap massanya. *Political lag* (*kemacetan politik*) yang terjadi selama ini antara elite dan massa mesti dicairkan.

Caranya dengan memperkuat kelas menengah partai itu. Selama ini kurve perpolitikan sangat kerucut, seharusnya seperti belah ketupat. Di mana kelas menengah partai dan ternokrat perlu diperbanyak, sebagai mediator antara elite dan massa.

Terkait dengan banyaknya partai, kontrol terhadap kekuasaan?

Seharusnya, semua partai mandiri dulu. Lima M (*man, material, money, metode dan market*) harus jelas dulu. Bagaimana harus melakukan kontrol terhadap kekuasaan jika parpol masih disuapi pemerintah. Akibatnya keberadaannya terkooptasi oleh kekuasaan sehingga kemandirian tidak ada.

DenPos,

40

“Itu Seruan Moral dan Etika Politik”

KPU melarang menteri atau pejabat negara melakukan kampanye, sebab dikhawatirkan timbul kerancuan. Di samping itu untuk menghindari pemanfaatan fasilitas negara. Berikut komentar pengamat politik Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si.

KPU kan melarang pejabat negara berkampanye. Komentar Anda?

KPU sebagai lembaga otonomi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu mempunyai pertimbangan-pertimbangan etik, mengapa keputusan itu diambil. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu saya pikir bukan pertimbangan legal, tetapi lebih pada pertimbangan etika. Dan kita tahu dalam proses penyelenggaraan pemilu sebelumnya, menteri juga terlibat aktif berkampanye untuk memenangkan salah satu partai politik tertentu. Ini menjadi catatan sendiri bagi KPU sehingga Rudini yang dulunya terlibat menjadi Ketua KPU tahu bagaimana sih sesungguhnya menteri-menteri melakukan kampanye. Termasuk dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas negara.

Bagaimana Anda melihat keputusan yang diambil KPU tersebut?

Apa yang dilakukan KPU merupakan peringatan atau seruan

moral dalam membangun budaya politik yang demokratis. Cuma masalahnya sekarang bagaimana presiden sebagai pimpinan menteri bisa menangkap itu sebagai suatu *warning*. Paling tidak memberi dasar pertimbangan dan memikirkan kembali keputusan KPU tersebut – melarang menteri berkampanye.

Keputusan presiden kan lebih legal dari keputusan KPU?

Seperti yang saya sebut tadi, pernyataan KPU itu lebih kepada aspek etika, bukan aspek legalitas. Kalau itu dibawa ke aspek legalitas memang aturan untuk itu tidak ada. Dan kewenangan ada di tangan presiden. Cuma masalahnya sekarang bagaimana *warning* itu dipandang sebagai suatu bentuk penerapan etika politik dalam membangun budaya politik demokratis.

Bagaimana kalau presiden ngotot menteri boleh berkampanye?

Saya pikir karena itu merupakan keputusan yang memiliki nilai moral tentunya sanksi yang akan ditimbulkan lebih pada sanksi moral. Di sana masyarakat akan menilai, termasuk juga kredibilitas menteri-menteri sendiri dalam melakukan aktivitasnya.

Kira-kira presiden berani nggak melawan keputusan KPU?

Ya kita lihat nanti. Apakah presiden itu akan mengikuti pola pemikiran KPU atau mempunyai pandangan sendiri. Karena di sini akan terjadi semacam pertarungan elite di mana menteri-menteri yang akan berkampanye notabene ketua partai juga. Masalahnya nanti terletak pada pertarungan elite semacam itu.

Saat ini kita sudah mengalami krisis moral. Oleh karenanya pembangunan moral ini sangat penting. Kalau kita sepakat tentang itu, maka upaya pembangunan moral ini hendaknya dimulai dari berbagai unsur.

Kalau presiden membubarkan KPU, secara moral presiden akan jatuh?

Jelas. Kita akan berhadapan dengan membangun kredibilitas. Citra pemerintah kan sudah buruk. Kalau ditambah lagi hal semacam itu, lebih memburukkan lagi.

Kekuasaan kan tetap di tangan presiden?

Masalahnya di situ. Dia bisa menggunakan kekuasaan itu sebagai alat apa pun. Tetapi masalahnya kembali pada aspek moral tadi. Sejauhmana etika politik itu dijalankan secara proporsional. Kalau dulu dianggap jelek, jangan dipakai sekarang. Kayaknya semangat itu yang menjiwai KPU mengapa keputusan itu dilakukan.

41

PDI Memiliki Prospektus Masa Depan, Asal...

Boleh dibilang, Pemilu 1997 merupakan kekalahan paling buruk dalam catatan pemilu bagi PDI. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana prospek PDI ke depannya? Berikut wawancara Bali Post dengan Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si., Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Warmadewa.

Kalau dicermati, kenapa perolehan suara PDI pada pemilu kali ini begitu jeblok?

Sebenarnya perolehan suara PDI seperti hasil pemilu kali ini sudah diprediksi para pakar sebelumnya. Juga hasil-hasil *polling* pemilu, misalnya *polling* PKM Akademika untuk tingkat lokal, sudah memprediksi hal itu. Puncaknya saat pemungutan suara, hasilnya suara Golkar paling banyak, PPP melambung, sementara PDI tersungkur.

Kalau ditanyakan mengapa hal ini bisa terjadi, ini tidak terlepas dari figur ketua partai. Seorang ketua partai tidak boleh semata-mata mendasarkan pada legalitas sistem. Akan tetapi, untuk sistem perpolitikan Indonesia yang bersifat *paternalisme*, figur itu masih dominan sekali dalam mengumpulkan dan mendapatkan simpati massa. Contohnya Golkar sendiri yang kita anggap sudah menggunakan manajemen modern masih

menggunakan figur untuk mengumpulkan massa. Dan figur untuk PDI, tampaknya yang masih kuat adalah figur Soekarno dan keluarganya. Ini dapat dilihat dari perbandingan suara hasil Pemilu 1992 dan 1997. Di mana ketika Megawati masuk dalam PDI, perolehan suara PDI terdongkrak, meningkat secara tajam. Bahkan, ada prediksi PDI ini adalah partai masa depan. Namun, setelah kongres di Medan tahun 1996, muncul kembali nama Soerjadi sebagai ketua – dianggap sebagai hasil rekayasa – yang menyebabkan perolehan suara pada Pemilu 1997 menurun drastis. Ini merupakan dosa Soerjadi. Jadi saya kira seharusnya karier politik Soerjadi cukup sampai di sini.

Jadi sebenarnya yang terpuruk itu bukan PDI-nya?

Ya. Bukan partainya. Karena DPI secara realitas tetap eksis. Dukungan pada PDI tetap banyak, hanya dalam PDI ini terpecah menjadi dua, pro Mega dan pro Soerjadi

Bali Post,1997

42

“Politik Sama dengan Bisnis, Modalnya Kepercayaan”

Masing-masing parpol jauh sebelumnya sudah mempersiapkan program yang akan ditawarkan kepada massa. Dalam pertarungannya nanti, mereka diharapkan tidak sekadar mengobral janji. Andaikata antara program yang ditawarkan berbeda jauh dengan kenyataan, massa bisa melakukan gugatan politik. Program-program apa saja yang mesti ditawarkan kepada masyarakat, saat negara sedang dalam keterpurukan ini? Berikut komentar Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si. pengamat hukum yang juga dosen Fisip Unwar, kepada Made Subrata dari DenPos.

Program apa saja yang mesti ditawarkan para elite politik dalam kampanye nanti?

Selama pemerintahan Orde Baru, negara kita mengalami keterpurukan dalam berbagai aspek. Dari situ sebenarnya dapat diagendakan beberapa permasalahan penting yang mesti diangkat dalam program yang ditawarkan. Termasuk juga dalam aspek politik.

Lalu yang bisa diangkat dalam aspek politik?

Yang menarik diangkat dalam bidang ini adalah demokratisasi dan pemberdayaan politik rakyat. Dalam hal ini, posisi tawar

masyarakat mestinya dimunculkan sebagai suatu bentuk partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan politik. Termasuk dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang nantinya dilakukan oleh pemerintah.

Dalam aspek ekonomi?

Hal yang menarik diangkat dalam aspek ini adalah pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberdayaan ini hendaknya tidak sekadar slogan, tetapi ada tindak lanjutnya. Karena itu diperlukan format-format kerja yang bisa dioperasikan dalam usaha-usaha tersebut.

Selain itu bidang agama juga merupakan aspek penting yang perlu dipikirkan para parpol. Bagaimana partai politik bisa menempatkan agama sebagai sumber moralitas dalam berbagai macam aspek kehidupan. Artinya, parpol bisa menempatkan tokoh-tokoh agama dalam memberikan saran-saran dan pemikiriannya dalam menciptakan kerukunan hidup bernegara. Termasuk di dalamnya parpol bisa menempatkan agama sebagai sesuatu yang sangat disucikan. Bukan malah dieksploitasi.

Selama ini agama dikondisikan demikian?

Memang ada kecenderungan mempolitisasi agama. Ke depan mestinya agama ditempatkan pada posisi yang suci, yang dapat memberikan siraman moral kepada semua komponen bangsa. Termasuk juga melakukan penghargaan terhadap tokoh-tokoh agama. Sebab selama ini kayaknya kok cenderung mereka dimanfaatkan. Oleh karenanya tempatkanlah mereka pada posisi yang benar. Dan tak kalah pentingnya juga bagaimana agar agama-agama yang ada di Indonesia ini bisa tumbuh dan berkembang, serta umatnya dapat dijamin beribadah secara tenang, tanpa rasa takut dan waswas.

Di bidang sosial budaya?

Penghargaan terhadap budaya lokal dan memberikan kesem-

patan tumbuhnya budaya itu mesti terus diupayakan. Sehingga ada semacam semangat berbeda dalam kebersamaan. Bukan penyeragaman. Tetapi budaya-budaya lokal yang memang tumbuh dan hidup dalam masyarakat itu jangan malah dimatikan. Konsep berbeda dalam kebersamaan budaya, sehingga ada semacam keterasingan budaya bagi masyarakat dengan masyarakat lain. Padahal sesungguhnya mesti dibalik.

Dalam “pertarungan” nanti, para parpol akan berlomba untuk menyampaikan programnya. Agar bisa bersaing parpol mestinya bagaimana?

Di sinilah sebenarnya massa pemilih itu bisa melihat program-program partai yang ditawarkan. Program-program mana yang bisa dipakai acuan bagi massa jika partai bersangkutan bisa berkuasa nantinya. Andaikata antara program yang ditawarkan berbeda jauh dengan kenyataan, di situ massa bisa melakukan gugatan politik terhadap partai bersangkutan. Karena itu apa yang ditawarkan hendaknya tidak sekadar sloganistis – hanya untuk menarik massa seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Apa betul ada rincian data dari program itu. Sehingga partai politik tidak sekadar mengobrol kata-kata begitu saja. Karena itu mesti ada semacam proposal. Saya berharap partai politik ketika berkampanye sudah bisa menyodorkan proposal kepada massa tentang apa yang dilakukan selama lima tahun ke depan. Proposal ini akan menjadi pegangan bagi masyarakat untuk melihat apa betul partai-partai itu sudah menjalankan apa-apa yang tercantum dalam proposal.

Apakah dibenarkan para parpol mengumbar janji dalam berkampanye?

Sekarang masalahnya ada pada tanggung jawab moral partai bersangkutan. Mestinya apa yang diucapkan bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang disebut dengan bagaimana kita menjalankan etika politik. Jadi politik itu tidak sekadar ucapan, tetapi dalam ucapan itu nantinya ada tindakan yang akan di-

lakukan. Kalau seseorang mengobral janji kemudian diingkari ini menipu namanya. Harus dibedakan antara menipu dengan program. Kalau hanya sekadar menipu untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya sesaat itu mungkin boleh-boleh saja. Cuma masalahnya, ia tidak akan mendapat kepercayaan. Yang penting, justru menjaga kepercayaan itu. Sebab kegiatan politik tidak jauh berbeda dengan kegiatan bisnis yang modalnya adalah kepercayaan. Untuk membangun kepercayaan itu mestinya partai itu seminal mungkin melakukan kesalahan dan tipuan politik.

Khusus di Bali program yang paling urgen ditawarkan?

Ini berkenaan dengan aspek budaya dan pariwisata. Bagaimana parpol-parpol yang ada dapat menjamin bahwa budaya Bali tetap eksis dan berkembang. Sebab masyarakat kita hidup dalam berbudaya. Kehidupan keseharian masyarakat Bali sangat dibingkai oleh budaya.

Soal keamanan?

Saya pikir masalah ini tidak terlalu mencolok. Memang keamanan itu penting, tetapi selama ini Bali kan masih tergolong aman dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Cuma, ketentraman dan keamanan yang sudah terjaga begitu baik jangan malah dirusak. Oleh karenanya dalam kampanye nanti, di samping program juga saat penting adalah cara mereka berkampanye. Dalam kampanye ini mesti ada aturan yang jelas. Ada kesepakatan-kesepakatan antarpol. Satu hal yang penting jangan mempolitisasi agama dan lembaga adat. Kalau ini tersentuh, masyarakat akan bergejolak.

Bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi program yang ditawarkan para parpol?

Ini berpulang pada kemampuan masyarakat untuk merespons program itu. Untuk sementara, hal inilah yang menjadi

masalah. Sebab pemahaman dan pengetahuan politik masyarakat kita masih dalam tahap pembelajaran. Dalam kondisi seperti ini *money politics* akan tumbuh subur.

DenPos,

43

Masyarakat Takkan Serta Merta Memilih Golkar

Ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap kinerja PDI Perjuangan (PDI-P) di Bali sebagai pemenang pemilu, diyakini akan menimbulkan konstelasi politik lima tahun mendatang berubah. Artinya, PDI-P perlu bekerja lebih keras lagi, sehingga kepercayaan masyarakat kembali pulih. Namun, belum tentu masyarakat yang tidak puas terhadap PDI-P serta merta menyerahkan suaranya kepada Golkar, partai yang pernah berkuasa 32 tahun bersama Soeharto dan Orde Barunya. Mengapa demikian? Berikut petikan perbincangan Bali Post dengan pengamat politik Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si.

Sikap sejumlah LSM yang tidak mempercayai lagi PDI Perjuangan pasti menimbulkan perubahan konstelasi politik, khususnya lima tahun mendatang. Bagaimana pandangan Anda?

Sudah jelas ketidakpercayaan tersebut pasti akan berpengaruh terhadap peta politik lima tahun mendatang. Khusus terhadap PDI Perjuangan, saya lihat terjadi semacam perubahan yang kurang berkenan di hati masyarakat. Artinya, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu dihadapkan pada berbagai persoalan yang sangat pelik. Terutama sekali kepercayaan yang kian menipis, yang perlu dicarikan jalan pemecahannya. Langkah ke depan ya... mesti konsolidasi secepatnya. Kepada para elite

partai hendaknya membatasi ngomong, sehingga setiap pembicaraan tidak senantiasa membuat bingung masyarakat.

Dari pernyataan Anda tadi, apakah Anda melihat suatu friksi dalam tubuh PDI Perjuangan?

Saya belum melihat terjadi hal demikian. Cuma saya sarankan PDI Perjuangan mesti melakukan konsolidasi lebih erat lagi. Sayangnya dalam kondisi yang belum mantap, di lingkungan masyarakat terjadi masalah kompleks. PDI Perjuangan yang secara legitimasi didukung sebagian masyarakat, mesti sudah mengambil tindakan penting sebelum lawan politik memainkan peranannya lebih jauh.

Terlepas dari ketidakpercayaan masyarakat kepada PDI Perjuangan, hal apa yang sudah bisa Anda tangkap?

Dalam situasi pemahaman politik yang sudah meluas, masyarakat sekarang lebih mengutamakan keterbukaan ketimbang omongan yang muluk-muluk. Di sinilah keuntungannya Indonesia memiliki sistem multi partai. Yang jelas dengan sistem multi partai, masyarakat pasti akan berpikir seribu kali sebelum mengambil sebuah keputusan. Jelasnya, masyarakat tidak begitu saja menyerahkan suaranya kepada partai lain, meski harapannya kepada PDI Perjuangan belum terjawab.

Artinya di sini, untuk lima tahun mendatang semua partai politik memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilu?

Tepat seperti yang Anda katakan. Setiap partai politik memiliki kesempatan sama besar untuk memenangkan pemilu. Permasalahannya sekarang, bagaimana partai politik itu bisa merangkul masyarakat. Sekaranglah sebenarnya langkah permulaan tersebut pantas dilakukan. Jangan ketika pemilu berlangsung, masyarakat baru direcoki dengan berbagai macam janji muluk-muluk. Masyarakat yang saat ini boleh dikatakan sedang kepanasan, tidak mau diajak berpikir rumit. Mereka menginginkan hasil yang nyata, bukan hanya sekadar wacana.

Terlepas dari keterlibatan partai politik lain, bagaimana peluang Golkar setelah kepercayaan terhadap PDI Perjuangan menyusut?

Peluang Golkar untuk bersaing, tetap ada. Buktinya dalam pemilu sebelumnya di beberapa daerah, kekuatan Golkar ternyata pantas diperhitungkan. Saya akui, Golkar dalam kiprahnya ditunjang oleh dua kelebihan. Pertama, dari struktur organisasi, Golkar termasuk sudah mapan. Mereka sudah terbina secara baik. Begitu pula dalam melakukan konsolidasi tetap bisa diandalkan. Kedua, sistem kadernya yang sudah tertata rapi, mulai tingkat atas sampai tingkatan paling bawah. Tegasnya, pemilu mendatang mesti diperhitungkan.

Apakah di sini berarti suara Golkar yang hilang dalam pemilu sebelumnya akan kembali bisa diraih?

Bukan berarti demikian. Tidak percaya terhadap PDI Perjuangan, tidak serta merta akan mengalihkan perhatiannya kepada Golkar. Bagaimana pun Golkar memiliki kenangan masa lalu, yang tetap terpatri dalam ingatan masyarakat.

Golkar sendiri pasti sudah menyadari problema yang dihadapinya itu. Menurut Anda, langkah apa yang mesti dilakukan Golkar, sehingga tidak terpuruk untuk kedua kalinya?

Khusus untuk di Bali, pimpinan yang ada sekarang mesti legowo dalam mengambil sikap. Golkar perlu koreksi diri, dan jangan mengikutsertakan rekan segolongan semata. Kalau ini kembali terjadi, berarti perubahan yang dicanangkan sebatas bibir saja. Golkar mesti merekrut orang-orang yang konsen terhadap perjuangan politik partai. Golkar mesti membawa paradigma baru, dan jangan lagi mengulang masa lalu. Biarlah masa lalu itu terkubur. Masyarakat dengan sendirinya pasti mengetahui perubahan apa yang akan dicanangkan Golkar. Satu lagi perlu dicatat, Golkar mestinya tanggap terhadap kemungkinan munculnya kutu loncat. Bahaya besar menyertakan kader-kader

demikian, karena bukan mustahil justru kembali memberikan noda terhadap perjuangan Golkar.

Dari kesimpulan pernyataan Anda tadi, berarti Golkar harus mengadakan reformasi terhadap kepengurusan sekarang?

Mau tidak mau harus langkah demikian yang mesti dilakukannya. Boleh dikatakan, kepengurusan sekarang banyak terkontaminasi oleh perilaku negatif rezim Orde Baru. Bagi pengurus yang merasa terbina oleh rezim lama, mesti menyadari dan jangan bersikeras harus terpilih lagi, sadarilah apa yang telah dilakukan. Ingat masyarakat sudah melek dengan berbagai persoalan yang ada. Jangan karena ambisi pribadi, semuanya jadi tercoreng moreng.

Lantas kepengurusan model apa yang mesti mengendalikan Golkar di masa mendatang?

Kalau tidak ingin tergelincir untuk kedua kalinya, alangkah baiknya Golkar sudah memberikan kepercayaan kepada kalangan generasi muda. Bukannya apa, generasi muda yang memiliki jiwa energik, merupakan sumber daya manusia yang bagus dalam mencapai sebuah tujuan. Cuma, mereka yang akan diberikan kepercayaan itu, mesti memiliki pendalaman politik yang bagus. Artinya, di sini mereka itu tidak mudah terjebak oleh kepentingan pribadi yang menyesatkan.

Bali Post,

Rakyat Masih Mengagumi Masa Lalu

Hasil polling DenPos yang menunjukkan bahwa 91 responden dapat memaafkan kesalahan masa lalu Golkar cenderung karena pertimbangan pragmatis. Masyarakat membandingkan situasi sebelum reformasi yang cenderung kondusif dengan sesudah reformasi. Sehingga, masyarakat masih mengagumi masa lalu. Begitu pendapat yang dikemukakan pengamat politik Drs. AAG Oka Wisnumurti terkait hasil polling DenPos tersebut. Berikut petikan wawancaranya dengan wartawan DenPos, Sujaya.

Bagaimana komentar Anda terhadap hasil polling DenPost yang menyebutkan sekitar 91 persen responden memaafkan kesalahan Golkar di masa lalu?

Tampaknya ada semacam komparasi yang dilakukan masyarakat dengan kepemimpinan partai politik yang pernah berkuasa pasca-situasi politik tahun 1965. Sejak tahun 1965 akan ada dua partai politik yang mengendalikan pemerintahan yakni Golkar serta PDI Perjuangan yang saat ini sedang menata kekuasaan itu. Ketika kekuasaan masih dipegang Golkar saat orde baru (orba), pemahaman masyarakat dalam tingkatan umum merasakan bahwa stabilitas politik mantap, begitu juga pertumbuhan ekonomi mantap. Walau pun pada masa itu

ada persoalan-persoalan yang sangat mendasar terabaikan. Seperti demokrasi yang terabaikan serta pemerintahan bersifat otoriter.

Sedangkan ketika pemerintahan dikendalikan PDI Perjuangan sekarang, situasinya sarat dengan permasalahan. Siapa pun yang berkuasa saat ini akan dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sangat kompleks dan tingkat daya kritis masyarakat sangat tinggi. Menurut saya, masyarakat masih mengagumi masa lalu. Yang dibandingkan itu situasinya. Sedangkan kondisinya sangat jauh berbeda. Padahal, pemerintahan orba jatuh karena akumulasi berbagai macam krisis yang sebelumnya terjadi. Sedangkan pemerintah sekarang tengah memperbaiki krisis titipan itu.

Kalau dilihat dari segi karakter politik masyarakat Bali, apakah memang begitu mudah memaafkan kesalahan?

Karakter politik masyarakat Bali saya rasa tidak seperti itu. Menurut saya, politik balas dendam itu masih ada, semangat politik balas dendam itu masih mewarnai perilaku politik kita. Politik memaafkan itu kan sangat jauh beda dengan politik balas dendam itu. Karenanya, pertimbangan memaafkan kesalahan Golkar itu saya lihat sangat pragmatis. Lebih cenderung melihat situasinya. Masyarakat beranggapan lebih baik berada di bawah pemertintahan otoriter yang penting situasi kondusif dibandingkan berada di bawah pemerintahan demokratis terjadi konflik terus.

Kalau begitu, berarti kan sebuah ganjalan yang sangat serius bagi upaya menegakkan demokrasi ke depan?

Jelas. Karena itulah kita perlu melakukan semacam upaya menciptakan kesadaran politik dan pendewasaan politik. Tidak semata di tingkat *grass root*, tapi juga di tingkat elit. Sebab, proses politik itu lebih ditentukan pada tingkat elit politik. Elit-elit politik mesti bisa memberi contoh bagi sebuah proses politik yang demokratis.

Apakah bukan karena adanya semacam frustrasi politik melihat perilaku partai pemenang pemilu saat ini yang sedang berkuasa?

Itulah. Siapa pun partai yang berkuasa semestinya merumuskan agenda yang jelas. Kita kan belum tahu akan dihadapkan ke mana. Kita seperti berada dalam kebingungan. Kondisi itu terjadi di tingkat nasional maupun lokal. Karenanya, kita perlu mengembangkan komunikasi yang homofili. Partai pemenang jangan semata-mata menganggap kemenangan sebagai kemenangan partai, melainkan kemenangan rakyat. Karena ketika kita membicarakan masalah pembangunan tidak semata bisa ditangani partai cq pengurusnya. Tapi juga melibatkan rakyat dan komponen politik lainnya.

Bagaimana dengan Golkar sendiri?

Dalam logika demokrasi, sistem itu memberi peluang partai mana pun untuk mengambil sikap oposisi terhadap partai pemenang. Saya kira itu yang mesti kita kembangkan sekarang. Asalkan partai itu memiliki wakil-wakilnya dan dewan bisa memberikan koreksi terhadap partai yang berkuasa. Tentu, akan menjadi lain persoalannya bila partai-partai itu juga secara tidak sengaja melakukan kolusi politik. Pemilu akan menjadi sekadar luapan emosi politik pada saat itu, setelah itu tak ada apa-apanya.

DenPos, 22 Juli

BAGIAN KETIGA

BERITA

45

Suara Tak Sah Pemilu 1997 Karena Tak Tahu atau Disengaja

*P*enyelenggaraan *Karya Agung* Pemilu 1997 sudah usai. Namun demikian tahapan penghitungan suara masih tetap berlangsung. Berdasarkan catatan sementara, dari jumlah suara yang dikumpulkan menunjukkan masih banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik. Terbukti, banyak suara tidak sah yang ditemui di hampir seluruh TPS yang ada. Tidak saja di TPS di banjar-banjar, suara tidak sah juga banyak di temui di lingkungan kerja karyawan yang bernaung di bawah BUMN/BUMD. Apakah itu disengaja atau tidak tahu, yang jelas suara tidak sah warnai hasil pemungutan suara di TPS-TPS.

Mengapa sampai itu terjadi? Padahal sebelum hari “H” pemilu pihak manajemen suatu perusahaan sudah mengadakan pelatihan semacam santiaji pemilu – yang pada intinya berisi ceramah tentang teknik-teknik mencoblos tanda gambar. Bahkan ada pula yang langsung melakukan latihan mencoblos walau dengan alat peraga. Semua itu dimaksudkan agar pemilih pemula benar-benar menggunakan hak pilihnya dengan baik dan sah, di samping untuk menghindari suara tak sah akibat ketidaktahuan pemilih.

“Kami tidak ada maksud menggiring mereka (karyawan-red) untuk memilih salah satu OPP. Semua itu terserah mereka menggunakan hak pilihnya sesuai asas luber,” ujar

GM Hotel The Grand Bali Beach Sanur I D.N. Dharma Setiawan pada suatu kesempatan di Sanur.

Dikatakannya, latihan mencoblos yang dilakukan karyawan (pemula) itu bertujuan memberi pengarahan tentang tata cara mencoblos sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Berdasarkan jumlah hasil penghitungan suara di TPS IX dan TPS X Br. Pengastian Sanur (lingkungan Hotel The Grand Bali Beach) tercatat lebih seratus kartu suara tidak sah dari 1.170 orang pemilih. Sementara di TPS Br. Peminge III Nusa Dua (kawasan BTDC) seperti dicatat Humas BTDC Wayan Kayun, kartu suara yang dinyatakan tidak sah 98 buah.

Pengamat Sosial Politik Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si., berpendapat, banyaknya suara tak sah pada Pemilu 1997 di wilayah pemilihan Bali merupakan salah satu langkah protes yang dilakukan massa PDI pro Megawati. "Harus diakui, Bali merupakan basis PDI Megawati. Rupanya massa tersebut mengikuti jejak Mega untuk menggunakan hak pilih sesuai hati nurani," tegas Dosen Fisipol Universitas Warmadewa itu.

Kata Wisnumurti, massa PDI pro Mega tak punya pilihan yang sesuai hati nuraninya, sehingga mereka golput atau datang ke TPS namun suaranya dibuat tidak sah. "Meningkatnya suara tak sah pada pemilu kali ini, tampaknya sebagian besar disengaja oleh para pendukung Mega, di samping orang yang tidak puas terhadap sistem politik pada Pemilu 1997," tegas Dosen lulusan S-2 Sosiologi Politik di UGM ini.

Kesengajaan ini barang kali ada benarnya. Menurut Ngurah, saksi mata di sebuah TPS di Kelurahan Pedungan Denpasar, ada kesan aneh pada penghitungan suara Pemilu 1997 ini. "Saya heran, ketika kartu yang diperlihatkan menunjukkan dukungan sah pada OPP resmi, masyarakat diam tak beraksi. Namun ketika ada suara tidak sah, sekelompok anak muda malah bersorak kegirangan," tutur Ngurah penuh ketidakmengertian. Keanehan lain juga terlihat pada acara pencoblosan ada yang merobek, atau mencoblos tiga-tiganya. Bahkan ada mencoblos

menggunakan putung rokok. “Saya pikir suara rusak memang disengaja kelompok masyarakat tertentu,” tandasnya.

Wisnumurti melihat ada faktor lain yang menyebabkan kesengajaan merusak kartu suara. Massa Megawati yang sebelumnya ikut gebyar memenangkan OPP tertentu tampaknya malu jika tidak datang ke TPS. Makanya mereka datang menggunakan hak pilih namun suaranya dirusak.

Bali Post, Sabtu, 31 Mei 1997

46

Tantangan Peradah Masa Datang Pelecehan dan Eksploitasi Simbol Agama

Umat Hindu kini banyak menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Peradah, salah satu organisasi pemuda Hindu menjadi tumpuan untuk menghadapi tantangan itu. Adakah hal itu menjadi bahan perbincangan pada *lokasabha* II dari 22 s.d. 23 Januari di Hotel Dewi, Denpasar. Apakah yang harus dikerjakan Peradah tiga tahun ke depan. Berikut rangkuman pendapat dan harapan pada Peradah dalam kiprahnya membina umat menjadi yang lebih baik.

Pengamat sosial Putu Suasta, M.A, mengatakan Peradah Bali sebagai organisasi pemuda, tak cukup hanya mempersoalkan masalah Bali. Masih ada masalah lain yang perlu disikapi dengan lapang dada. Masih banyak umat Hindu perlu perhatian. Karena itu, pendalaman *tattwa* dan ke-*srada*-an ini agar diprioritaskan untuk program mendatang.

Putu melihat aktivitas Peradah Bali masih terfokus di perkotaan. Untuk itu program Peradah mendatang disosialisasikan ke desa-desa adat. Mengapa? Karena potensi umat Hindu ada di sana.

Hal senada juga diungkapkan pemerhati agama Prof. Dr. Ngurah Bagus. Menurutnya, pendalaman agama dan peningkatan *srada* perlu segera dilakukan. Karena itu, dalam program Peradah ke depan setidaknya mulai memikirkan strategi pendalaman agama.

Selama ini, menurut Ngurah Bagus, kegiatan umat Hindu hanya marak pada aktivitas upacara, pendalaman *srada* kurang mendapat perhatian.

Sementara Sekjen PHDI Pusat I Putu Gelgel, S.H. mengatakan, pihaknya sangat terbuka siapa saja berhak jadi Ketua Peradah. Namun bukan itu persoalannya. Yang penting mensosialisasikan program-program Peradah dalam kehidupan sehari-hari. Soal figur ketua, nanti diserahkan pada peserta *lokasabha* yang punya hak suara.

AA Alit Putra, S.E. Ketua Peradah Kodya Denpasar setuju dengan pendapat Swasta dan Ngurah Bagus. “Saya siap menjadi calon ketua dan mengemban amanat serta program yang diputuskan dalam *lokasabha*,” kata Alit Putra.

Drs. Wayan Sukarma, mantan Ketua Peradah Kodya Denpasar mengatakan, pada intinya semua kader Peradah siap jadi ketua. Bagaimana kita sebagai umat Hindu bisa ber-*yadnya* kepada Ida Sang Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Esa), pada pemerintah, pada guru, dan pada masyarakat. Langkah ini ditempuh untuk menciptakan rasa kebersamaan dan persatuan, sehingga – menjadi harmonis di antara umat mendatang.

Ia mengakui, banyak program-program yang dirancangnya belum berjalan dengan baik. “Diharapkan pada periode kepemimpinan sekarang, program yang belum tuntas bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Lalu bagaimana dengan masalah dana? AA Alit Putra dan Sukarma menyadari dana akan menjadi masalah yang urgen kepengurusan Peradah Bali mendatang.

Ketua Peradah Indonesia Bali Dr. Ida Bagus Yudha Triguna mengatakan, siap mempertanggungjawabkan segala program dalam periode baru. Ditanya soal kesiapan jadi calon ketua Peradah ia mengatakan siap. Ia mengharapkan kepada peserta memilih calon yang berani mengabdikan, memiliki pandangan ke depan dan siap menghadapi tantangan. Karena itu, Peradah – diharapkan peka terhadap masalah-masalah sosial. Terlalu banyak simbol-simbol Hindu menjadi korban. “Tetapi menga-

pa Peradah tidak berjuang,” katanya.

Sementara itu, Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si. yang pendiri Peradah di Jember ini siap juga menjadi calon. Harapan dia siapa pun yang menjadi ketua harus didukung sepenuhnya. Ia menyadari tantangan yang dihadapi umat Hindu makin banyak. Terhadap tantangan ini, Peradah harus memiliki tanggung jawab moral. Tanggung jawab terhadap organisasinya, pemerintah dan umat Hindu.

Wakil Ketua Panitia *Lokasabha* dan Seminar Pendalaman *Srada* Drs. Wayan Suja mengatakan, bahwa organisasi Peradah adalah organisasi pengayom. Di harapkan organisasi ini mampu meredam konflik-konflik sosial. Inilah salah satu program Peradah di masa mendatang yang perlu dilanjutkan.

Kandidat lain yang ikut bersaing untuk menjadi ketua adalah Sekretaris Peradah Bali Drs. IDG Windhu Sancaya, M.Sc., dan Drs. IKG Dharmaputra, M.Sc. Menurut Dharmaputra, ketua yang terpilih harus mengarahkan programnya kepada *tattwa* yaitu mendalami arti dan konsep-konsep keagamaan.

Menurut AA Alit Putra, ada tujuh orang yang telah mendaftarkan diri sebagai calon ketua Peradah periode 1998-2001. Calon- calon itu adalah Dr. IB Yudha Triguna, Drs. Sukarma, Ir. Nyoman Prastika, AA G Oka Wisnumurti, M.Si., AA Alit Putra S.E., Drs. IDG Windhu Sancaya, M.Sc., dan Drs. IKG Dharmaputra, M.Si.

Bali Post, Januari 1998

Utang Peradah Harus Dijelaskan Transparan

Utang DPD Bali Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia hendaknya tidak diartikan lain. Utang tersebut bukan utang yang sebenarnya, tetapi pengorbanan pengurus Peradah Bali.

Sekretaris DPD Bali Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia, Drs. IDG Windu Sancaya, M.Sc mengatakan hal itu di Denpasar, Rabu (21/1) kemarin. Hal itu dikatakannya menanggapi penjelasan Ketua Peradah Bali Dr. IB Yudha Triguna (BP, 21/1) yang mengatakan organisasi ini defisit Rp. 50 juta lebih.

Kata Windu, uang sebanyak itu merupakan pengorbanan semua pengurus, bukan Yudha Triguna saja. "Namanya pengabdian ya... harus berani berkorban,"

Di tempat terpisah salah seorang pengurus DPD Bali Peradah Indonesia, I Gede Koyan Eka Putra mengatakan, utang organisasi sebanyak Rp. 50 juta-an tersebut mesti dijelaskan secara transparan pada *lokasabha*. "Saya sendiri akan mempertanyakan kejelasan utang tersebut," kata Koyan yang duduk sebagai Seksi Kepemudaan di DPD Bali Peradah Indonesia.

Koyan Eka Putra menambahkan bahwa dirinya sangat jarang dilibatkan dalam kegiatan organisasi. Jadi, utang tersebut tidak diketahuinya. "Saya sangat jarang dilibatkan. Tidak tahu apakah karena saya tidak ada di Denpasar atau bagaimana?" katanya berkali-kali.

Bahkan untuk *lokasabha* II ini, dia mengaku belum mendapat undangan. Meskipun begitu, dia bertekad akan hadir dalam *lokasabha* tersebut. “Bagaimana pun saya pengurus, dan saya berhak hadir,” tegasnya.

Sesepuh Peradah Drs. I Nengah Sudarma mengharapkan organisasi ini tidak lepas dari rel yang sebenarnya. Peradah sebenarnya didirikan untuk terlibat dalam pembinaan umat Hindu, terutama di kalangan pemuda.

Kegiatan Peradah selama ini, lanjutnya, sudah mengarah ke arah tersebut. Akan tetapi, perlu terus ditingkatkan. Karena aktivitasnya belum menyentuh pemuda Hindu sampai tingkat terbawah. “Ini tampaknya yang belum digarap Peradah,” katanya.

Bali Post, 22 Januari 1998

Waspadai Siluman Politik Dalam Gerakan Reformasi

Dalam perjalanan sejarah, banyak muncul siluman dan badut politik mengatasnamakan rakyat. Untuk itu, agar perjuangan reformasi mahasiswa tidak ternoda, perlu diwaspadai bentuk-bentuk siluman politik tersebut.

Demikian kesimpulan diskusi panel bertajuk “Tantangan Reformasi dan Nilai-nilai Pancasila” Rabu (3/5) kemarin di aula Fakultas Sastra Unud. Panel diskusi yang diadakan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sejarah Faksas Unud itu lebih banyak menyoroti nilai-nilai Pancasila dan penerapan hukum di Indonesia. Tampil empat panelis yakni Prof. Dr. Ngurah Bagus, Wapemred Bali Post Widminarko, Dr. I Gede Parimarta, dan dosen Jurusan ketatanegaraan Fakultas Hukum Unud Pasek Diantha, S.H.

Ngurah Bagus mengingatkan, jangan sampai hasil perjuangan tokoh reformasi dinikmati orang lain. Waspadai kekuatan baru setelah reformasi yang memiliki visi dan misi yang sama dengan rezim Soeharto. Apabila strategi itu sampai terwujud, perjuangan reformasi bisa kandas di tengah jalan.

Menurutnya, tanda-tanda mempertahankan status quo sudah dilakukan dengan mengalihkan perhatian pada perbaikan sistem ekonomi, sehingga perhatian reformasi bidang hukum, ekonomi dan politik menjadi terpecah. Padahal, terjadinya krisis ekonomi sekarang karena sistem politik yang kurang transparan.

Selain itu, lanjutnya, perlu diwaspadai kelompok atau golongan yang mengawasi ekonomi dan harta pejabat. Sebab, kelompok semacam ini bisa sebagai subjek dengan mengiming-imingi jabatan tertentu dalam upaya mematahkan reformasi. “Cara-cara yang salah ini yang harus diwaspadai tokoh reformasi agar jangan mudah tergiur dengan janji-janji jabatan,” katanya.

Dosen Fisip Universitas Warmadewa Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si mengatakan, “di dalam ilmu politik ada istilah budaya parokial, artinya budaya politik kelas kampung. Ada budaya subjek dan budaya demokrasi. Di tengah gerakan reformasi ini muncul budaya parokial, yakni budaya cari selamat”. Sementara politik di Indonesia sekarang ini sedang mengarah ke demokratis.

Bunglon Politik

Salah seorang peserta Arif mengatakan, ada kecenderungan sebagian orang mencari selamat di tengah gerakan reformasi mahasiswa. Di dalam keadaan seperti ini banyak muncul bunglon politik yang mengaku sebagai tokoh reformasi, padahal semua itu tidak benar. Inilah yang perlu diwaspadai, sehingga terwujud reformasi murni, jauh dari kendaraan orang-orang yang tidak bermoral.

Widminarko mengatakan, salah satu penyebab krisis nasional sekarang ini, tersumbatnya kontrol sosial. Aspirasi yang berkembang tidak tersalurkan, kalau toh disalurkan lewat media pers misalnya, tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya. Padahal, kritik-kritik terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, atau konglomerat yang semu, sudah diingatkan sejak lama. Jika kritik itu didengar dan diperhatikan, bukan mustahil krisis yang menimpa bangsa Indonesia tidak separah sekarang ini.

Ia berpendapat, momentum kontrol sosial yang mulai terbuka sumbatnya sekarang ini terpelihara dalam orde reformasi. “Eksponen generasi muda, khususnya mahasiswa,

jangan mudah tergiur tawaran tahta atau harta yang akan melunturkan perilaku kritisnya. Jika toh berkesempatan menduduki jabatan, jadilah pejabat yang tetap kritis dan inovatif demi kebenaran, apa pun resikonya,” pintanya.

Ia mengatakan, komponen pers tetap seiring dengan gerakan reformasi. Namun, sebagai lembaga kemasyarakatan, pers juga harus menjadi sasaran reformasi.

Menurut Widminarko, pers Indonesia memerlukan aturan perundang-undangan yang tidak menjadikan wartawan takut menyalurkan dan memperjuangkan kebenaran. Ia sependapat dengan Pasek Diantha, bahwa dalam undang-undang jangan terlalu banyak dirumuskan “ketentuan lebih lanjut akan diatur pemerintah”. Ini peluang bagi eksekutif untuk membuat peraturan atau surat keputusan sesuai naluri kepentingannya sebagai penguasa. Contoh, Peraturan Menpen No.1/1984 tentang SIUPP, sebagian isinya tidak selaras dengan jiwa dan semangat UU No.21/1982.

Bali Post, Kamis, 4 Juni 1998

Marhaenisme Relevan Hadapi Tantangan Masa Depan

Dalam masa reformasi, bangsa Indonesia masih akan mengalami tantangan yang tidak ringan. Penjajahan bentuk baru melalui berbagai rekayasa ekonomi (neo-kolonialisme), penumpukan modal pada salah satu kelompok (kapitalisme) dan feodalisme baru dalam segala bentuknya masih mengancam bangsa ini. Karena itu, Marhaenisme masih sangat relevan dikedepankan untuk menghadapi tantangan tersebut.

Demikian kesimpulan diskusi panel Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Denpasar di Sekretariat GMNI, Jalan Banteng Denpasar, Jumat (5/6) kemarin. Dalam diskusi tersebut hadir pengamat politik Drs. AAG Oka Wisnumurti M.Si, Presidium GMNI Pusat Alit. K. Kelakan, Ketua PDI Perjuangan Denpasar Drs. Puspayoga, pemerhati masalah sosial-politik, A.A. Arwata, pemerhati politik I Ketut Nurja, S.H., Ketua GMNI Denpasar Kresnadhana dan undangan lainnya.

Wisnumurti menjelaskan, Marhaenisme sebenarnya subuah ajaran yang berorientasi kerakyatan. Ajaran ini bercita-cita mengangkat potensi perekonomian rakyat dengan segala kemampuan yang dimilikinya. "Ajaran Soekarno ini ingin mengoptimalkan kemampuan rakyat kecil yang mempunyai modal sangat minim," tandas dosen Universitas Warmadewa ini.

Dijelaskan, dalam 30 tahun ini, kebijakan ekonomi Indonesia bertumpu pada industrialisasi yang padat modal. Potensi eko-

nomi rakyat yang bertumpu pada pertanian dinomorduakan, sehingga pembangunan bergeser menuju pembangunan dengan teknologi tinggi (*Habibie Economic*). Kebijakan seperti ini akhirnya menimbulkan krisis yang berkepanjangan, karena pondasinya sangat lemah. “Karena itu, Marhaenisme relevan untuk menghadapi hal ini,” jelasnya.

Alit K. Kelakan juga mengatakan hal itu. Dijelaskan, selama 30 tahun telah terjadi kroni kapitalisme di Indonesia. Perekonomian dikuasai segelintir orang yang tergolong masih kerabat. Hal itu kemudian menimbulkan krisis seperti ini. Karena itu, Marhaenisme perlu dikedepankan untuk menghadapi tantangan serupa di masa depan.

Puspayoga menjelaskan, ajaran-ajaran Soekarno itu sesuai dengan realita sosial. Ajaran ini juga memiliki idealisme untuk kesejahteraan bersama dan fleksibel dalam menghadapi tantangan zaman. “Karena itu, ajaran ini akan sangat relevan sepanjang zaman,” tandasnya.

Bali Post, Sabtu, 6 Juni 1998

50

Dari Diskusi GMNI Denpasar Pemikiran Bung Karno Muda Layak Dihidupkan

Untuk menindaklanjuti reformasi total di segala bidang, sudah semestinya pemikiran Bung Karno muda dihidupkan kembali. Pemikiran yang intinya terdiri dari Pancasila, Marhaenisme dan Trisakti itu dinilai masih relevan untuk memperbaiki kondisi bangsa pasca Orde Baru.

Demikian salah satu pokok pikiran yang muncul dalam diskusi memperingati hari kelahiran Bung Karno yang digagas Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Denpasar, Jumat (5/6) kemarin. Diskusi bertajuk Revitalisasi Pemikiran Bung Karno dalam Konteks Reformasi, menghadirkan tiga pembicara yaitu Alit K. Kelakan (PP GMNI), Ketut Dwija (TPDI Bali), dan Drs. AAG Oka Wisnumurti (Dosen Fisipol Universitas Warmadewa).

“Ajaran Trisakti yaitu bahwa kita harus berdaulat secara politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan adalah tujuan kita setelah reformasi,” kata Alit Kelakan.

Selama Orde Baru, kata dia, tidak pernah diupayakan adanya kedaulatan politik rakyat. Hal itu tampak pada keberadaan lembaga-lembaga wakil rakyat dan pemegang kekuasaan yang justru direayasa hanya sebagai alat legitimasi kepentingan elit politik tertentu. “Rekrutmennya sekadar mereka yang memiliki jaringan kolusi, korupsi, nepotisme, dan koncoisme (KKNK),”

katanya. Di pihak lain, kata dia, Indonesia juga gagal berdikari secara ekonomi karena jaringan kapitalisme kekeluargaan yang tak dikontrol sistem politik.

Sejalan dengan penyimpangan itu, kata Alit Kelakan, terjadi usaha untuk mencitrakan bahwa ajaran Bung Karno bertentangan dengan Pancasila.

Marhaenisme yang dirumuskan setelah melihat seorang petani kecil sebagaimana banyak ditemukan di seluruh pelosok Tanah Air. Untuk kondisi saat ini, kata dia, ajaran itu pun masih sesuai dengan kondisi Indonesia.

AAG Oka Wisnumurti kemudian menggugat pola pembangunan Orde Baru yang dinilai justru bertentangan dengan realitas masyarakat Indonesia.

Pola pemikiran Bung Karno, lanjut Wisnumurti, tidak terlepas dari apa yang dihadapi rakyat sesungguhnya saat itu. "Hingga kini konsep tersebut sangat masuk akal untuk dikembangkan, dengan pertimbangan bahwa penduduk Indonesia kebanyakan sebagai petani," tegasnya. Tetapi, lanjut Wisnumurti, apa yang terjadi belakangan ini justru mengabaikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep pemikiran Bung Karno.

"Kita lihat sendiri bidang pertanian kita sangat jauh ketinggalan. Padahal kita selalu mengaku sebagai negara agraris dengan lahan pertanian yang luas, namun justru pembangunan dengan pendekatan teknologi canggih yang dikedepankan," katanya.

Sementara itu, Ketua TPDI Bali Ketut Dwija menyatakan, pemikiran Bung Karno menjadi sangat relevan saat ini. Pasalnya, menurut Dwija, pemikiran itu merupakan jawaban atas kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. "Dan sekarang kita lihat kesenjangan itu masih merata di mana-mana," katanya.

Harian Nusra, Sabtu, 6 Juni 1998

51

Pemilihan Langsung Bisa Menjebak

Sistem pemilihan gubernur secara langsung dalam situasi politik seperti sekarang ini bisa menjebak, sebab aturannya belum ada. Bisa saja terjadi rekayasa, sehingga orang yang tak dikehendaki bisa unggul.

Pengamat politik Drs. AAG Oka Wisnumurti M.SI dan pakar hukum tata negara I Gede Marhaendra Wija Atmaja, S.H. M.H. mengatakan hal itu, Kamis (9/7) kemarin di Denpasar. Marhaendra mengatakan, sistem pemilihan gubernur secara langsung – seperti pemilihan kepala desa – merupakan ide bagus. Tetapi sistem pemilihan seperti ini harus diatur dahulu dalam UU, sehingga aturan utamanya menjadi jelas. “Itu ide bagus, tetapi harus dimasukkan dulu ke dalam aturan perundang-undangan. Justru sistem pemilihan pemimpin secara terbuka seperti itulah yang kita idam-idamkan,” katanya. Dia menanggapi usulan Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Bali untuk Reformasi (SMPBR) ke DPRD Bali. Karena DPRD Bali dianggap masih bermasalah, mereka mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan dengan sistem langsung (BP, 9/7).

Wisnumurti mengatakan, sistem pemilihan gubernur secara langsung memang bagus. Namun, dalam situasi politik sekarang ini dan karena belum adanya aturan main seperti itu, rakyat belum siap.

Untuk mengobati kekecewaan rakyat akibat krisis kepercayaan, kata Wisnumurti, proses pemilihan gubernur bisa dilakukan dengan debat terbuka para calon dengan kelompok kritis, tokoh-tokoh masyarakat dan intelektual. “Tempatnya boleh di mana saja, tetapi jangan hanya melibatkan berbagai tokoh kritis, terutama dari kalangan kampus,” kata dosen Universitas Warmadewa itu.

Marhaendra menambahkan, debat cagub hendaknya tak dilakukan sekali saja, apalagi hanya digelar satu lembaga. Minimal, debat cagub dilakukan tiga kali oleh tiga lembaga, sehingga lebih representatif dan jauh dari tuduhan rekayasa.

Bali Post, Jum’at, 10 Juli 1998

DPRD Akan Pertimbangkan Hasil Debat Kelompok Independen

*P*ara pengamat dan tokoh masyarakat sepakat, hasil debat cagub yang diselenggarakan kelompok independen – Komisi PFKKNB-PWI Bali – perlu dipertimbangkan DPRD Bali untuk memilih gubernur. “Apalagi debat ini merupakan pendidikan politik bagi masyarakat sekaligus sebagai masukan bagi masyarakat sekaligus sebagai masukan bagi anggota Dewan,” ujar Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si. saat ditemui di sela-sela debat cagub yang berlangsung di gedung PWI Bali, di Denpasar.

Ketua F-PP DPRD Bali Muhaji yang hadir pada forum itu menilai debat ini bagus untuk dijadikan cermin bagi DPRD Bali. Untuk itu, ia berjanji akan mengusulkan kepada pimpinan DPRD agar dalam debat cagub di DPRD nanti juga mengundang peserta tokoh kritis.

Menurut Muhaji, debat cagub ini akan berpengaruh pada keputusan Dewan. “Mudah-mudahan hasil penilaian di sini sama dengan di DPRD nanti. Sebab, ini terkait dengan legitimasi rakyat dan beban moral bagi DPRD,” akunya.

Kusuma Wardana juga mengatakan hal serupa. “Debat ini sangat positif dan mencerminkan demokratisasi,” tegasnya. Bahkan, katanya, seharusnya anggota DPRD ramai-ramai datang pada acara debat itu, meskipun tidak semuanya mendapat undangan. “Kalau memang mereka mengaku bervisi kerakyatan, ya... harus datang ke mari,” ujarnya.

Ketua KNPI Bali Pande Maliana sependapat dengan Kusuma Wardana. “Debat ini meskipun tidak banyak mempengaruhi hasil pemilihan di DPRD Bali, perlu dijadikan bahan masukan bagi anggota Dewan,” ujarnya.

Bali Post, Sabtu 18 Juli 1998

Penghitungan Jajak Pendapat Peradaha Akan Diawasi Kritisi

*P*enghitungan hasil jajak pendapat Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradaha) Indonesia yang dilaksanakan Minggu (19/7) akan diawasi kalangan kritisi Bali, yang dikoordinatori dosen senior Fakultas Sastra Unud Dr. I Wayan Bawa dengan sekretaris Agus Indra Udayana (Ashram Bali Gandhi Vidyapith)

Mereka menyatakan kesediannya menjadi pengawas perhitungan suara dalam pertemuan Peradaha dengan berbagai kalangan di Rumah Makan Sari Warta Boga, Denpasar, Jumat (17/7) kemarin. Mereka yang hadir pada pertemuan ini antara lain A.A. Ngurah Wirawan (Ketua Umum Peradaha), IB Yudha Triguna (Ketua Peradaha Bali), Arya Suharja (DPP Peradaha), IDG Palguna (pengamat hukum), Kusuma Wardana (tokoh Puri Kesiman), Dr. I Wayan Bawa (pengamat), Udi Prayudi (aktivis), I Putu Alit Bagiasna (aktivis), Drs. IK Ngastawa (aktivis), Pande Malihana (KNPI Bali), eksponen Senat Mahasiswa Warmadewa dan Senat Mahasiswa UNHI.

Dalam pertemuan yang dimoderatori Ngurah Wirawan, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Jajak Pendapat Peradaha Drs. AAG Oka Wisnumurti mengatakan, panitia bertekad melakukan kegiatan ini secara jujur. Karena itu, pihaknya membuka diri bagi pengawas independen. Bahkan, pihaknya menantang kalangan kritisi untuk mengawasi perhitungan hasil jajak pendapat ini.

Berdasarkan pengamatan Bali Post, dua kotak suara jajak pendapat ini sudah penuh. Bahkan, suara yang masuk sangat melimpah, sehingga surat suaranya terpaksa harus ditampung dalam tiga tas plastik ukuran besar.

Bali Post, Sabtu 18 Juli 1998

Hasil Sementara Jajak Pendapat Peradiah Dewa Made Beratha Memimpin

Drs. Dewa Made Beratha untuk sementara memimpin dalam pengumpulan jumlah suara pada perhitungan sementara jajak pendapat calon gubernur (cagub) Bali yang dilaksanakan Peradiah. Dewa Beratha yang Sekwilda Bali ini mengumpulkan 3.545 suara. Figur lainnya yang mengejar, Mayjen Pol. (Pur) IGM Putera Astaman (1.550) dan Mayjen TNI (Pur) Ketut Wirdhana dengan 1.655 suara.

Hasil perhitungan suara itu dicatat Bali Post sampai pukul 19.00, Minggu (19/7) kemarin. Di urutan keempat dan kelima masing-masing ditempati Prof. Dr. dr. Ketut Sukardika, DSMK (911) dan IGB Alit Putra (710), sedangkan Drs. IBP Sarga memperoleh 232 suara, I Nyoman Suwandha, S.H. (30) dan I Made Suwindha, S.H (3).

Sementara itu, Prof. Drs. IB Adnyana Manuaba memperoleh 33 suara, Drs. IB Ardana (40), Drs. AAN Made Arwata, M.M. (6), Drs. I Putu Gede Ary Sutha, MBA (1), Prof. Dr. Made Bandem (13), Tjok Gede Budi Suryawan (32), Drs. IB Indugosa (3), Drs. IBGA Ladip, S.H. (26), Pande Made Latra (1), Mayjen TNI IGK Manila (17), Dr. IGM Mantera (35), Prof. Dr. Dra. NK Mardani Ratta, M.S. (1), IDG Oka (55), AA Oka Mahendra, S.H (1), Drs. Pariasta Westra (4), Mayjen Pol. (Pur) IGM Sudiarta (1), Ketut Sundria (1), Prof. Dr. Nyoman Sutawan (5), Prof. Dr. dr. Luh Ketut Suryani, Sp.J. (45), Drs. Made Suwendha (5), Mayjen

TNI (Pur) Tjokorda Swatika (1) dan IBP Wesnawa, B.A. (16).

Panitia penghitungan suara didampingi tim pengawas independen tampak bekerja keras menghitung hasil jajak pendapat yang diperkirakan berjumlah sekitar 12.000 lembar. Meski menyiapkan tiga tempat penghitungan suara dan bekerja maraton, ternyata sampai pukul 19.00 tampak lembar jajak pendapat masih banyak yang belum terhitung. “Kami akan bekerja terus malam ini sampai selesai. Kami tak akan menunda perhitungan hasil jajak pendapat ini, untuk menghindari kecurigaan – bahwa kami berbuat tidak jujur,” ujar Ketua Panitia Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si. dan salah seorang anggota tim pengawas independen Drs. I Ketut Ngastawa, S.H.

“Kemungkinan kami baru selesai bekerja pukul 04.00 Senin dini hari,” tambah ketua DPD Bali Peradah Dr. Ida Bagus Yudha Triguna, M.S.

Bali Post, Senin 20 Juli 1998

Dari Diskusi di DPRD Denpasar Ekstra Parlemerter Masih Diperlukan

Belum maksimalnya kinerja Dewan, baik DPRD tingkat II dan I dalam memainkan fungsi kontrol terhadap eksekutif, maka kehadiran politisi ekstra parlemerter masih sangat diperlukan. Demikian benang merah dari diskusi yang digelar LBH KRI-SBSI Bali di gedung DPRD Kota Denpasar, Sabtu (19/2) lalu.

Menurut Cok Sri Narendra dari LBH KRI Bali, sejauh ini tidak ada perubahan yang signifikan dilakukan anggota Dewan hasil Pemilu 1999 lalu. Dia mencontohkan, sebuah kasus kecil yang ada di DPRD Kota Denpasar. Ternyata, disinyalir kerap 'kecolongan' terhadap isu-isu strategis.

Terkait dengan kenyataan itulah belum adanya perubahan yang signifikan sesuai dengan tuntutan Reformasi, kehadiran kelompok ekstra parlemerter diperlukan.

DPR, kata Cok Sri Narendra, tak hanya bisa mengontrol eksekutif, DPR pun mesti dikontrol dalam melaksanakan misinya. Dan itu adalah tugas kalangan kritisi, LSM dan mahasiswa, sebagaimana dulu ketika bersama menjatuhkan rezim Orba.

Dengan control semacam itu, Dewan yang notebene adalah pilihan rakyat jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat rakyat kecewa.

Sementara pengamat politik Unwar Drs. AA Gede Oka Wisnumurti M.Si, menyatakan kehadiran politisi ekstra parlemen-

ter, yang dulu dilakoni kalangan kritisi, LSM, dan mahasiswa, perlu dihidupkan kembali.

Menurut Wisnumurti, hal itu penting untuk memberi kontrol, tak hanya kepada pihak eksekutif, tetapi juga kepada Dewan dalam melakukan fungsi kontrol.

“Pressure group masih sangat kita perlukan,” demikian Wisnumurti.

Menurut Wisnumurti, setelah jauhnya Soeharto, gerakan ekstra parlementer mengalami penurunan bahkan cenderung menghilang. Setelah kejatuhan rezim Orba, LSM, mahasiswa dan kritisi sepertinya tidak memiliki musuh. Padahal tidak demikian.

Yang perlu mendapat perhatian dan kemungkinan bisa menjadi musuh adalah munculnya opini-opini perseorangan atau kelompok tertentu yang terkadang mengatasnamakan publik.

“Ini yang sangat berbahaya dan perlu disikapi, sehingga ekstra parlementer yang dilakoni kalangan LSM, mahasiswa dan kritisi lain, tetap diperlukan,” tegas Wisnumurti.

Sementara menurut mantan aktivis yang kini anggota DPRD I Bali, I Nyoman Partha, gerakan ekstra parlementer memang perlu dibangkitkan.

“Kita masih memerlukan kelompok-kelompok penekan, baik terhadap eksekutif maupun legislatif,” tegasnya.

Harian Nusa, Senin, 21 Februari 1999

56

Pemilu harus Berlangsung secara Reguler Komunikasi Politik Terimpotensi

Pemilu yang mencerminkan politik yang demokratis harus memenuhi lima syarat, salah satunya harus diselenggarakan secara reguler, dalam suasana kehidupan politik yang memungkinkan partai-partai bersaing secara sehat.

Hal itu diungkapkan pengamat politik yang juga dosen FISIP Unwar, Drs. AAG Oka Wisnumurti, M. Si, ketika tampil sebagai pembicara dalam diskusi panel bertajuk “Membangun Budaya Politik Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemilu yang Jujur dan Adil” di Kampus Unwar, Denpasar, Kamis (25/3) kemarin. Diskusi itu dibuka Rektor Univ. Warmadewa, Prof. Dr. Ir. Nyoman Sutawan.

Dia menambahkan, empat syarat lainnya, pemilu diselenggarakan oleh lembaga di luar kekuasaan pemerintah. Hal itu diharapkan tidak menimbulkan kontroversi yang mengakibatkan meluasnya tuduhan terhadap penyelenggara yang memihak kepada salah satu parpol. Kedua, partai-partai politik mempunyai kesempatan yang sama untuk akses dan membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Ketiga, dalam proses pelaksanaannya diperlukan lembaga pemantau yang independen dan *credible*. Keempat, partai-partai politik, aktor-aktor politik hendaknya dapat menunjukkan perilaku politik yang menjunjung tinggi moral dan etika politik dalam menggalang dan mempengaruhi massa pemilih. “Tanpa persyaratan terse-

but pemilu mudah dituduh sebagai alat manipulasi dan memobilisasi kekuatan rakyat demi kepentingan kekuasaan atau bertahannya status quo,” ujar Wisnumurti.

Provokator

Sementara itu Pemimpin Umum/Pemred Denpasar Pos, Made Nariana mengatakan reformasi membuka momentum perubahan sistem politik otoriter ke arah demokrasi dengan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. “Paradigma baru kehidupan pers nasional adalah kebebasan pers yang didukung prinsip keadilan demokrasi dan supremasi hukum,” ujarnya.

Menurut Nariana, di era reformasi ini salah satu misi pers nasional adalah mencerahkan, mengungkapkan dan melaporkan apa adanya gerak kehidupan masyarakat serta menyajikan informasi yang benar untuk pendidikan politik masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. “Karena itu pers berhak meminta informasi kepada pihak manapun. Kalau sumber tersebut menghindar atau tidak mau memberikan informasi, dapat dituntut karena melanggar hak asasi. Itu sudah ditetapkan dalam Tap MPR, “ tegasnya.

Ketua Forum Pemerhati Hindu Dharma Indonesia (FPHDI), Dewa Ngurah Swasta, S.H., sebagai peserta menyoroti soal kebebasan pers yang cenderung ke-bablas-an bila memberitakan kasus SARA. Khususnya kemungkinan eksekusi yang ditimbulkan yang dapat memperluas konflik SARA.

Menanggapi pertanyaan Swasta bahwa pers sering dituduh sebagai provokator atau setidaknya memperluas konflik SARA, dibantah oleh ketua PWI Bali ini. “Saya justru curiga pemerintah yang jadi provokator, “ ujar Nariana.

Kaditsospol Bali, Al. Subagyo yang juga tampil sebagai pembicara mengatakan peranan komunikasi supra dan infra struktur politik dalam tatanan dan mekanisme politik perlu ditingkatkan. Dengan demikian mampu memberikan sumbang-an nyata dalam pengembangan mutu etika, moral dan budaya politik berdasarkan Pancasila.

Soal budaya politik mendapat sorotan dari salah seorang peserta yang juga dosen Program Studi D-4 Pariwisata Unud, Drs. Chusmeru, M.Si.

Menurutnya, budaya politik yang demokratis hanya tercipta dalam komunikasi politik yang demokratis juga. “Artinya ada proses transisional antara pemerintah dan rakyat. Komunikasi politik ini di era Soeharto terimpotensi,” tandasnya.

Denpos, Jumat 26 Maret 1999

Di Bali Disiapkan 10.000 Sukarelawan

University Network For Free and Fair Election (UNFREL) atau Jaringan Perguruan Tinggi Pemantau Pemilu (JPTPP), Sabtu lalu dideklarasikan di Bali.

Divisi materi JPTPP Pusat Dr. Ani Sucipto Kuncorojati mengatakan, JPTPP telah membuat sekitar 27 Koordinator daerah di seluruh kota di Indonesia. JPTPP yang sudah memantau jalan Pemilu di antaranya Sumsel, Sumbar, Sumut, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Jabar, Irian Jaya, NTT, NTB. Sebanyak 150.000 sukarelawan disiapkan memantau pelaksanaan pemilu di 200.000 tempat pemungutan suara (TPS).

Posisi sukarelawan ini menurut Koordinator JPTPP Daerah Bali Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si tidak menjadi anggota parpol tertentu. Mereka bersikap netral dan sama-sama memiliki integritas kuat dan tanpa berpihak. Dalam menjalankan itu tidak ada ikatan struktural terhadap siapa dan lembaga apa pun., kecuali kerja sama dengan pihak-pihak lain yang memiliki visi dan misi yang sama.

Menurut Ani Kuncorojati, sumber dana JPTPP adalah UNDP yakni sekitar Rp.22 milyar lebih. Dana ini akan dikelola secara profesional dan pertanggungjawabnya disahkan akuntan publik. “Kami tak main-main mengelola dana bantuan UNDP, karena ini menyangkut kepercayaan,” tegas Ani.

Dikatakan, dana tersebut diarahkan membeli peralatan

komputer, administrasi, dan teknologi perhitungan suara. Sistem kerja JPTPP adalah mengumpulkan data mentah dari TPS, kemudian data mentah itu disektor ke pusat pengolahan data untuk dianalisis dan dikaji lebih lanjut.

Mengantisipasi penyimpangan dan pelanggaran, pihak JPTPP sudah menjalin kerja sama dengan KIPP dan lembaga independen pemantau pemilu yang lainnya. JPTPP juga meminta bantuan masyarakat, aparat kepolisian, dan lembaga independen yang lain apabila ditemukan ada penyimpangan.

Untuk daerah Bali disiapkan sekitar 10.000 sukarelawan yang akan ditempatkan di 5.500 TPS. Jumlah ini tentu masih kurang dibanding dengan jumlah TPS yang ada. Minimal satu TPS ada tiga sukarelawan. Karena itu, JPTPP akan bekerja dengan KIPP untuk membangun jaringan Informasi.

Bali Post, Senin 5 April 1999

“Cepat Diproses, Sehingga Tahu Pelakunya”

Menanggapi kasus Purbalingga dan penghadangan Partai Golkar di Surabaya, pengamat politik dari Unwar Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si. mengatakan, kesadaran politik masing-masing parpol perlu lebih ditingkatkan.

Partai politik, katanya, mesti bersama-sama menempatkan Pemilu sebagai suatu upaya strategis guna melakukan perubahan terhadap pemerintahan dan sistem politik secara demokratis.

Kata Wisnumurti, kalau menyadari hal semacam itu, mulai kini semua pihak mestinya bisa menciptakan suasana kondusif. Dalam artian semua parpol bisa membangun bagaimana keamanan dan citra Pemilu bisa dijaga, baik sebelum, selama maupun setelah Pemilu dilaksanakan. Sebab yang berkepentingan terhadap Pemilu ini yang dominan adalah partai politik.

“Secara formal mereka akan beradu di sana. Event politik ini kan milik mereka. Mereka sebenarnya sangat berkepentingan menjaga agar Pemilu ini bisa berjalan secara demokratis dan adil,” katanya.

Kalau hal ini benar dilakukan simpatisan PDI Perjuangan, pengaruhnya bagaimana? Wisnumurti mengatakan, rakyat sudah bosan dengan gaya-gaya politik premanisme sebagaimana pernah berkembang pada masa lalu. Menyadari akan hal itu

tentunya tindakan-tindakan politik yang cenderung brutal akan membawa citra kurang baik bagi partai bersangkutan. Hal itu justru akan mengurangi rasa simpatik dari rakyat, khususnya massa yang masih memiliki keraguan-keraguan dalam memilih dalam Pemilu.

Tindakan seperti itu, kata dia, justru merupakan kampanye yang negatif. Sebab secara tidak langsung berpengaruh terhadap dukungan massa pada partai bersangkutan. Karena itu yang penting sekarang bagaimana parpol membangun moral dan etika politik yang selama ini terabaikan.

Wisnumurti juga mendukung jika sikap arogansi dan eksklusivisme untuk sementara ini direm dulu. Di samping perlu penegakan hukum dari pemerintah, siapa yang bersalah harus ditindak secara hukum. Kalau hal itu tidak dilakukan, pasti akan menjadi preseden buruk, bahwa sesuatu itu boleh-boleh saja dilakukan.

Dengan diproses melalui hukum, dari sana masyarakat akan tahu, siapa yang melakukan itu. Apakah itu penyusupan atau murni dari kader atau simpatisan PDI Perjuangan.

“Jadi kepastian hukum ini perlu dibangun, sehingga tidak ada rasa saling curiga. Apalagi sekarang musim provokator ini mulai berkembang. Di sini perlu upaya penjernihan,” katanya.

Tak Terjadi di Bali

Sementara itu Sekretaris FIP2B Drs. Nengah Dasi Astawa, M.Si. mengatakan agar kasus Purbalingga tidak terjadi di Bali, diharapkan hasil dialog antarpapol yang terbentuk dalam wadah Forkom Antarpapol mesti disosialisasikan sampai ke tingkat *grass root*. Di samping itu, elite parpol mesti memahami karakter masing-masing simpatisannya. Caranya melalui dialog dan pendekatan dari hati ke hati. Jika kurang memahami karakter simpatisannya, hal itu akan mengalami kesulitan dalam meredam kasus yang terjadi. Selain itu elite parpol kembali menekankan agar seluruh simpatisannya menaati hukum dan kesepakatan moral.

Yang terpenting sekarang, kata dosen Undiknas ini, kasus tersebut harus menjadi perhatian semua pihak. Sebab bisa saja ada pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan nama baik PDI Perjuangan, sehingga massa tidak simpatik lagi terhadap partai yang dipimpin Megawati tersebut. Sebaliknya, sayang sekali jika itu memang betul dilakukan simpatisan PDI Perjuangan.

“Kalau memang betul sangat disayangkan. Jika betul demikian, elite PDI Perjuangan mesti introspeksi diri. Mudah-mudahan hal itu tidak benar,” katanya.

Di Bali khususnya, jika ada kasus senada dengan itu, misalnya pencabutan bendera dengan memakai baju partai tertentu, pelakunya mesti cepat ditangkap agar jelas siapa orangnya. Apa betul mereka simpatisan partai tertentu sesuai dengan baju yang dikenakan. Ini penting untuk menjaga citra partai dari tangan pihak-pihak yang ingin mengacaukan suasana.

Menanggapi pernyataan Gus Dur, bahwa pelaku kasus Purbalingga adalah orang-orang Golkar, Dasi justru mengatakan jika memang terbukti, itu fenomena buruk yang masih berlaku di alam Reformasi ini. Tetapi untuk diselidiki dan dikaji lebih jauh. Caranya, ya cepat proses dan diadili. Dari situ kita tahu siapa mereka dan tahu siapa otak di balik kasus itu.

Denpasar Pos, Rabu, 7 April 1999

Soal Ancaman Tjok. Pemecutan Bisa Jadi Senjata Makan Tuan

Ancaman salah seorang pimpinan Golkar Bali Ida Tjokorda Pemecutan akan menyewa orang untuk mencabuti bendera parpol lain, dinilai tak bijaksana oleh beberapa pengamat politik di Bali. Hal itu menunjukkan rendahnya kualitas seorang elite parpol dan bisa menjadi senjata makan tuan, terutama bagi orang-orang yang mengerti politik.

Pengamat politik Drs. I Putu Gede Suwitha, S.U. mengemukakan penilaian tersebut, Selasa (13/4) kemarin di Denpasar. Menurut Suwitha, sistem ancam-mengancam semacam itu merupakan gaya Orde Baru. Sudah sangat tak sesuai dengan era reformasi sekarang ini. Apalagi masyarakat kini makin melek politik, serta pilihan parpol makin banyak. “Pada zaman sekarang ini, siapa lagi yang mau diancam-ancam? Ancam-mengancam dari seorang pimpinan parpol adalah cara yang sangat tak bijaksana. Ini menunjukkan kualitas pimpinan yang menggunakan cara seperti itu sangat rendah dan tak berpendidikan,” ujarnya.

Pengamat politik Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si. juga mengatakan, secara implisit ancam-mengancam seperti itu seakan-akan sudah menjadi pembenaran cara-cara politikus pada zaman Orba. Cara-cara seperti itu dikhawatirkan tak memberikan harapan bagi terciptanya demokrasi. “Politik dengan membayar orang untuk mengerjain lawan politik,

merupakan wujud politik kekerasan. Sebaiknya Pak Tjok. Pemecutan mengklarifikasi ucapannya itu,” ujar dosen Universitas Warmadewa tersebut.

Ancaman, intimidasi, libas atau sikat, kata Suwitha, merupakan gaya Orba yang sangat dibenci kaum reformis. Dia mengaku sependapat dengan pengamat politik UGM Dr. Mahfud, bahwa secara organisatoris Golkar sudah tak ada karena sudah berubah menjadi parpol, tetapi yang lebih dikhawatirkan gaya dan cara lamanya. Soal ancaman Tjok. Pemecutan, katanya, sangat tak sesuai dengan iklan partai Golkar, yakni “Saya lihat Ketua Umum Pusat Partai Golkar Ir. Akbar Tandjung lebih mampu bersikap bijaksana, mungkin karena pengetahuannya luas,” ujarnya.

Tanpa bermaksud merendahkan kualitas kader Partai Golkar Tjok. Pemecutan, kata dosen sosiologi itu, dia melihat Golkar sudah makin kehilangan kader-kader yang memiliki pendidikan memadai. “Kalau seseorang pimpinan parpol mempunyai kualitas baik, sudah terjadi ketahanan mentalnya menghadapi berbagai situasi politik, mestinya bisa menggunakan cara-cara yang lebih bijaksana dan tak mudah emosional,” ujarnya.

Menurut Suwitha dan Wisnumurti, akan sangat bijaksana kalau misalnya Golkar menempuh jalur hukum. Menangkap pencabut bendera tersebut, lalu membawanya ke pengadilan, sehingga pelakunya jelas diketahui, apakah simpatisan PDI Perjuangan, provokator, atau malah massa Golkar sendiri. Kenapa cara seperti itu tak dilakukan. Prinsip hukum, yakni praduga tak bersalah mestinya dijunjung tinggi. “Aparat keamanan juga hendaknya bersikap proaktif menangani kasus ini dan jangan dipandang sebagai kasus politik yang akhirnya hanya diselesaikan secara politis. Kalau terus menerus begitu, akan terjadi akumulasi ketidakpuasan,” papar Wisnumurti.

Dalam situasi kemanan yang berkembang seperti belakangan ini, kata keduanya, pimpinan parpol harus memberi contoh yang baik. Bahkan harus mengayomi, memberikan contoh

yang baik dan harus mampu menyejukkan simpatisannya kalau memanas. Jangan justru menjadi provokator. "Saya harapkan pimpinan parpol di Bali berhati-hati. Sebab, Bali sudah menjadi target provokator untuk membuat kerusuhan di Bali. Perlu lebih waspada, jangan-jangan pelaku pencabutan bendera parpol di Bali dilakukan para provokator," tegas Suwitha.

Menurutnya dalam situasi yang sudah makin memanas belakangan ini, Suwitha mengaku tak bisa membayangkan apa jadinya Bali kalau ancaman Tjok. Pemecutan dilaksanakan. Pimpinan Parpol hendaknya mengutamakan ketenangan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan.

Wisnumurti mengatakan, "Sebenarnya ada dua esensi pemasangan atribut parpol. Pertama sebagai wujud partisipasi simpatisan parpol, sedangkan yang kedua cara pengurus parpol mensosialisasikan partainya. Kalau pemasangan atribut parpol itu murni sebagai wujud partisipasi simpatisan suatu parpol, maka mereka mempunyai rasa memiliki dan dengan demikian mereka turut menjaga keutuhannya. Sebaliknya, jika atribut parpol itu dipasang pengurus parpol tertentu dengan tujuan mensosialisasikan partainya, rasa tanggung jawab masyarakat untuk menjaganya agak kurang," tandas Wisnumurti.

Bali Post, Rabu, 14 April 1999

Pemilu Multi Partai Berpotensi Timbulkan Konflik di Desa Adat

Tidak adanya suprastruktur yang secara langsung membina desa adat merupakan salah satu kelemahan, karena koordinasi antar desa adat menjadi lemah. Secara individual desa adat tidak berdaya menghadapi tantangan luar. Di samping kelemahan tersebut, pemilu dengan sistem multi partai berpotensi menimbulkan persaingan yang mengarah pada konflik di desa adat. Bahkan jika tak ditangani dengan baik, bisa mengarah pada konflik fisik. Itu diungkapkan Dr. Ir. I Gde Pitana, M.Sc, Selasa, kemarin Seminar Sehari “Strategi Pemberdayaan dan Model Desas Adat di Masa Depan,” di gedung Pemuda KNPI Bali.

Menurut Pitana hingga kini desa adat tetap efektif karena masih menjadi pusat orientasi yang sangat penting. Bahkan pada tingkat tertentu dapat dilihat terjadinya kegairahan dalam pelaksanaan berbagai aktifitas yang terkait dengan desa adat. Namun di balik berbagai kepedulian terhadap desa adat, eksistensi dan fungsionalisasinya desa adat kata Pitana dihadang oleh berbagai hal yang tak menguntungkan. Di antaranya dominasi desa dinas, kurangnya dukungan ekonomi desa adat, kualitas *prajuru* dalam aktifitas *modern* masih rendah serta tidak dimilikinya posisi tawar desa adat.

Dikatakannya, faktor lain yang berpotensi menimbulkan konflik di desa adat, euphoria reformasi dan demokrasi. Se-

dangkan dominasi desa dinas juga kurang menguntungkan. Terkait dengan persoalan itu, Pitana mengatakan desa adat merupakan benteng terakhir untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan kebudayaan Bali. Termasuk membendung berbagai dampak negatif dari luar. Oleh sebab itu sudah saatnya desa adat diberi peran yang lebih besar dan lebih nyata dalam menghadapi internasionalisasi dan globalisasi. “Berbagai kegiatan yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab desa adat harus diserahkan kepada desa adat. Pemerintah hendaknya hanya sebagai fasilitator dan *service provider*,” katanya.

Karena kelemahan desa adat tidak adanya suprastruktur, kata Pitana perlu dipikirkan pembentukan struktur tertentu untuk mengkoordinasikan desa adat pada suatu wilayah tertentu. “Struktur MPLA/BPPLA mungkin dapat dimodifikasi dimana, yang ditingkat kecamatan diberdayakan sebagai forum koordinasi desa adat,” katanya seraya berharap pemerintah dan masyarakat Bali sesungguhnya dapat belajar dari konsep lama untuk direinterpretasi dan direkontekstualisasikan. Perbedaan kedua konsep tersebut perlu dikembangkan tetapi bermuara pada kebersamaan, dan konsep *multiple identity* yakni *sesana manut linggih* dan *linggih manut sesana*.

Hal senada juga dikatakan pengamat politik Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si dan Ketua Div. Adat dan Budaya FIP2B Bali Dewa Ketut Maardiana, yang hadir sebagai peserta seminar.

Wisnumurti sepakat ada yang bergeser dalam desa adat. Oleh sebab itu dia mengajak agar semuanya belajar dari kearifan sosial masyarakat Bali. Tidak terjebak dengan paradigma birokrasi, terutama membentuk lembaga baru yang lebih berdaya dari MPLA/BPPLA. “Saya hanya menyerukan agar MPLA diganti dengan Majelis Lembaga Adat (MLA). Sedangkan pembinanya dihilangkan, sehingga MLA dapat mengorganisir seluruh lembaga lokal yang bernuansa adat,” katanya.

Sedangkan menurut Mardiana ketidakberdayaan desa adat selama ini karena ada pilar-pilar yang telah hilang. Misalnya

awig-awig yang sebelumnya merupakan pilar utama dalam desa adat kini telah hilang. Terutama sejak adanya intervensi pemerintah yang menghilangkan keragaman *awig-awig* di setiap desa."Kini semuanya sudah diseragamkan dan disesuaikan dengan kondisi pemerintah," ujarnya seraya mengatakan UU No. 5 / 1979 dan Perda No 6 / 1986 harus dicabut.

Seminar sehari yang digelar P3K (Pusat Pengkajian Pedesaan dan Kawasan) dengan KNPI Bali itu, dibuka kadis Kebudayaan Bali Drs. IB Pangjaya. Selaku pembicara diantaranya, Dr Ir Gde Pitana, M.Sc, Drs I Gusti Ngurah Oka (MPLA Bali), Dr I Nyoman Erawan, SE., Prof. I Made Widnyana, SH., Drs. I Nyoman Wiraatmaja, M.Si., dan Prof. Dr I Nyoman Sirtha, SH, MS.

Rabu, 21 April 1999

61

Simbol Figur, Target Para Pengacau

Ada kecenderungan pihak-pihak tertentu mengembangkan pola-pola sistematis yang tujuannya ingin memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu dapat dilihat dari peristiwa yang muncul belakangan ini seperti kasus Kupang, Banyuwangi, Ambon, dan Sambas. Pengamat politik dari Unwar Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si. mengatakan itu Kamis (22/4) kemarin. “Jadi perekat persatuan sudah mulai disentuh,” tandasnya.

Kerusuhan tersebut mulai diawali dari daerah-daerah yang berpotensi memunculkan konflik. “Pola gerakannya seperti makan bubur panas. Tidak langsung ke sasaran tetapi yang diserang terlebih dahulu adalah daerah pinggir,” ujarnya.

Tampaknya pola ini juga dikembangkan dengan melakukan pemboman terhadap tempat beribadah, seperti Masjid Istiqal Jakarta. Dengan cara itu diharapkan dapat memunculkan emosi umat Islam. Jika kasus ini tidak segera ditangani, jelas akan berkembang.

Menurut Wisnumurti, munculnya kasus-kasus seperti itu tidak terlepas dari “kegerahan” kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan status quo. Mereka menginginkan pemilu ini gagal, sebab jika pesta demokrasi ini sukses, jelas akan melahirkan pemerintahan yang bersih. “Jadi ada semacam kegerahan pada kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan status quo tersebut. Karena itu mereka mengacau keadaan,” katanya.

“Untuk menjadikan pemilu gagal, satu upaya yang ditempuh ya dengan mengacau, membuat kerusakan dan mengebom situs-situs keagamaan,” tambahnya.

Namun tidak menutup kemungkinan, setelah upaya ini berhasil, mereka memiliki target lain yakni simbol-simbol figur, tokoh-tokoh masyarakat yang merupakan simbol perekat persatuan (tokoh reformis) seperti Megawati, Amien Rais dan Gus Dur. Karena itu kekhawatiran Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Haryanto Taslam sangat beralasan.

“Setelah simbol-simbol fisik dihancurkan, bisa jadi simbol-simbol figur juga menjadi sasaran mereka,” katanya.

Agar kasus ini tidak sampai merembet ke Bali, Wisnumurti mengharapkan ada upaya untuk mencairkan komunikasi politik di daerah ini, baik antarpol maupun elite parpol dengan akar rumputnya. Forkom Antarpol yang sudah dibentuk itu hendaknya dimanfaatkan sebagai *sharing* komunikasi. Sehingga kasus yang terjadi cepat bisa diredam.

Dalam kondisi seperti sekarang, yang perlu dikembangkan adalah arah politik, pendidikan politik, dan menerima perbedaan. “Kita boleh saja berbeda warna, tetapi kita meski sadar masing-masing warna memiliki tujuan sama – ingin membawa rakyat menuju adil dan makmur,” katanya.

Kesadaran inilah yang diperlukan untuk membangun bangsa ini dari kehancuran.

Wisnumurti optimis pemilu ini bisa terlaksana, mengingat kesadaran politik masyarakat sudah mulai tinggi. “Saya optimis pemilu 7 Juni mendatang bisa sukses, asal dengan catatan berjalan jujur dan luber,” katanya

Untuk menjaga merembetnya kasus pemboman tempat suci, menurut dia, umat perlu menjaga situs-situs keagamaan di Bali. “Kita tetap waspada, tetapi jangan terlalu khawatir berlebihan,” katanya

Berkaitan dengan ini, tokoh-tokoh agama mesti bekerja sama dengan aparat keamanan.

Denpasar Pos, Jum’at 23 April 1999

Bukan Wewenang Panwaslu: Soal Klaim Wilayah Bebas Atribut Parpol

Ketua Panwaslu II Buleleng Adi Dachrowi SA, S.H. mengemukakan, lembaga yang dipimpinnya tidak berwenang melakukan tindakan peneguran atau sejenisnya terhadap main klaim wilayah bebas atribut parpol, atau klaim basis parpol tertentu. Dijumpai di sela kesibukan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja, Kamis (29/4) kemarin, dia menyebut fungsi tugas lembaga yang dipimpinnya mencakup empat tahapan Pemilu, termasuk menyelesaikannya persoalan seputar tahapan Pemilu jika ada pengaduan dari parpol.

Adanya wilayah bebas atribut parpol di Kelurahan Banjar Jawa, sempat dipertanyakan sejumlah peserta Forkom Antarparpol di Singaraja – bahkan, dinilai sebagai “pemasungan” hak demokrasi dan membingungkan masyarakat. Mereka itu meminta agar hasil kesepakatan tokoh masyarakat di Kelurahan Banjar Jawa itu segera dicabut. (BP, 28/4). Sementara itu pakar hukum dan pengamat politik di Bali, seperti Prof. Dr. Dewa Gede Atmaja, S.H, M.H dan AAG Oka Wisnumurti di tempat terpisah berkomentar Panwaslu paling berwenang melakukan tindakan.

Dachrowi merujuk Juklak MA disamping UU No.3 tahun 1999 tentang Pemilu pasal 26, tugas wewenang Panwaslu untuk mengawasi tiap tahapan Pemilu. Di samping menyelesaikan sengketa atas perselisihan yang timbul dalam penye-

lenggaraan Pemilu serta menindaklanjuti persengketaan yang tak dapat diselesaikan aparat penegak hukum. Apabila ada parpol di Buleleng keberatan atas hasil kesepakatan tokoh masyarakat di Kelurahan Br. Jawa itu, dia meminta mengajukannya sebagai pengaduan. Dari pengaduan yang diterima itu, pihaknya akan melanjutkannya ke PPD II, di samping mengecek ke lapangan. Dikatakan, sampai saat ini belum ada pengaduan dari pimpinan parpol maupun masyarakat terhadap permasalahan tersebut.

Keterangan pers dari penggagas kesepakatan di Kelurahan Br. Jawa, kemarin menekankan semata-mata untuk mewujudkan kondisi di wilayah tersebut aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan. Kesepakatan yang dideklarasikan 1 Maret 1999 menyikapi berbagai peristiwa nasional khususnya kasus-kasus yang terjadi di Buleleng, seperti Kasus Sukasada maupun Tragedi Banjar. Warga masyarakat di Kelurahan Br. Jawa dikatakan trauma atas kejadian-kejadian tersebut. Kesepakatan di wilayah Kelurahan Br. Jawa bebas atribut parpol, demikian siaran pers itu, bukan berarti menghambat Pemilu, apalagi memasung hak demokrasi warga masyarakat setempat. Sebagai bukti, disebutkan dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, ternyata 2.499 atau 99% dari 2.601 jiwa atau 895 KK calon pemilih sudah mendaftarkan diri untuk Pemilu 1999 mendatang. "Apakah hal ini masih dituding sebagai menghambat atau pun memasung hak demokrasi warga masyarakat," katanya

Bali Post, Jum'at, 30 April 1999

63

Batas Pendaftaran Pemilih Mundur, Kesankan Panitia Kurang Siap?

Batas akhir pendaftaran pemilih yang ditetapkan 4 Mei 1999 ternyata mengalami pengunduran menjadi 9 Mei, menyusul keterlambatan pembentukan PPK dan PPS di Bali dari rencana semula 1 April menjadi 5 April.

Pengunduran itu dinilai Direktur Eksekutif KIPP Daerah Bali Budi Adnyana, S.H. menimbulkan kesan kekurangsiapan panitia, penyelenggara pemilu. Bahkan kredibilitas KPU bisa dipertaruhkan jika pemilu 7 Juni diundur.

Namun sebenarnya kelambatan proses pendaftaran, lebih banyak karena juklak dan juklis belum turun. Di samping itu kelambatan ini juga dipengaruhi oleh sistem yang digunakan tergolong baru – sistem stelsel aktif, kendati setelah itu kembali menggunakan pola lama. Selain itu dukungan birokrasi tidak seoptimal pemilu lalu. “Adanya peraturan bahwa PNS netral juga berpengaruh,” katanya.

Tetapi dibandingkan dengan pemilu lalu, proses pemilu kali ini jauh lebih demokratis. Apakah mungkin pemilu diundur?

“Pemilu kali ini sangat istimewa, karena itu, ini taruhan KPU. Apa pun alasannya pemilu mesti jalan,” katanya sembari mengatakan jika dihitung, pasti lebih banyak yang menginginkan pemilu sesuai jadwal daripada diundur.

Hal senada dikatakan pengamat politik Drs. AA Oka Wisnumurti, M.Si. menurut dosen Unwar ini, jika pemilu diundur

prosesnya sangat rumit, karena pemilu kali ini sudah ditetapkan berdasarkan Tap MPR No. 16/98. Kalau diundur mesti ada SI untuk mengubah tap tersebut.

Alasan pengunduran pendaftaran itu, menurut Wisnu karena alam demokrasi ini memberi ruang toleransi. Di samping itu mungkin dilihat masih memungkinkan adanya waktu.

Untuk daerah Bali, katanya, tidak masalah karena sekitar 90% sudah mendaftarkan diri. Tetapi daerah lain mungkin saja belum mencapai angka yang diinginkan, mengingat kondisi daerahnya, sulit dijangkau alat transportasi. Dengan demikian juklak dan juknis terlambat sampai di tujuan.

DenPos, 5 Mei 1999

64

Cegah Konflik Perlu Komunikasi Integratif

*P*engamat politik Drs AAG Oka Wisnumurti, M.Si, mengatakan sebenarnya masyarakat sadar dengan kondisi riil kehidupan bernegara saat ini yang riskan menimbulkan konflik. Cepatnya perubahan dari masa Orde Baru ke Orde Reformasi, telah menimbulkan berbagai akumulasi permasalahan. Kemudian konflik tak bisa dihindari setelah menemukan wadah penyelesaian masalahnya di era multi partai itu.

Dikatakan, kondisi ekonomi masyarakat yang merosot juga merupakan salah satu faktor pemicu, kenapa di tingkat massa riskan terjadi konflik. Di samping belum tuntasnya penanganan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Keterlambatan penanganan KKN itu berakibat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum.

Selain akumulasi permasalahan bangsa di atas, kata Wisnumurti, kesalahan menterjemahkan arti kebebasan dalam bidang politik berakibat fatal. "Politik balas dendam sulit dihindari, jika masyarakat mengartikan keterbukaan dan kebebasan itu dengan boleh melakukan apa saja," katanya.

Era multipartai, kata Wisnumurti, resolusi konflik tersebut mestinya menemukan wadahnya yaitu parpol. Hal itulah kemudian hanya memunculkan sentimen kolektif yang melibatkan massa antar parpol. "Suasana politik sekarang ibarat anak gadis pingitan yang baru dilepas," katanya menganalogikan

kondisi politik sekarang. Sehingga kebebasan dan keterbukaan politik diartikan sebagai pesta pora politik.

Pengajar di Fisipol Unwar itu mengatakan berdasarkan kesadaran tentang adanya kerawanan itu, berbagai upaya telah dilakukan. Di antaranya pembentukan forum komunikasi antarpol plus dan forum komunikasi antar umat beragama. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran politik dan beragama masyarakat.

Masalahnya sejauh mana efektivitas mencapai sasaran, Wisnumurti menegaskan tak hanya tergantung forum itu sendiri. Justru yang memegang kunci adalah partai politik, di samping masyarakat dan aparat keamanan. "Pola integratif inilah yang perlu dioptimalkan," katanya.

Untuk meminimalisasi konflik, fungsi partai politik harus ditingkatkan. Komunikasi politik yang intens harus dijalin sehingga terbangun kesamaan persepsi antar elite dan massanya.

Setelah suasana itu terbangun, kemudian dilanjutkan dengan upaya yang konsisten menegakkan HAM, hukum dan peraturan. "Selama ini jika terjadi pelanggaran seperti mencuri *start* kampanye tidak ditindak," katanya.

"Demokrasi sesungguhnya memberikan ruang untuk mengambil posisi yang berbeda. Justru yang tekonstruksi di tingkat massa sekarang malah menganggap perbedaan itu sebagai dasar permusuhan," katanya seraya menyatakan perubahan itu bisa dilakukan oleh parpol melalui pemberdayaan politik.

DenPos, 7 Mei 1999

65

Penyerahan DCS Diundur Hingga 12 Mei Pemilih di Bali 91,8 Persen

Setelah batas waktu pendaftaran pemilih diperpanjang, kini giliran penyerahan nama daftar calon sementara (DCS) juga molor. Bagi parpol yang belum menyerahkan nama DCS, diberikan kesempatan hingga 12 Mei bersamaan dengan masa berakhirnya penyerahan perlengkapan administrasi caleg.

Anggota PPD I dari unsur pemerintah Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si mengatakan hal itu, Kamis kemarin, di ruang kerjanya.

Hingga Kamis (6/5) kemarin, dari 31 parpol yang terdaftar, sudah 30 parpol yang menyerahkan DCS. Satu-satunya parpol yang belum menyerahkan adalah Partai Murba.

“Namun sesuai keputusan pusat, panitia masih memberikan waktu hingga batas terakhir 12 Mei mendatang,” kata Wisnumurti menyitir pernyataan ketua PPD I Bali AAN Oka Ratmadi, S.H.

Ketika ditanya apakah alasan keterlambatan itu sudah dikonfirmasi, Wisnumurti belum melakukan pengecekan sejauh itu. Bahkan dia berharap pengurus Partai Murba secara proaktif memberikan informasi yang dialaminya.

Sementara sambil menunggu penyerahan DCS itu, PPD akan mulai bekerja untuk mengecek perlengkapan administrasi semua caleg seperti surat keterangan kesehatan, dan KTP. “Yang pasti surat keterangan sehat tak hanya dari dokter jiwa,” ujarnya.

Dikatakan, setelah batas yang ditetapkan tidak ada kemungkinan lagi perpanjangan, mengingat mendesaknya waktu. Selain keputusan tentang perpanjangan penyerahan DCS, Wisnumurti mengatakan akhir bulan ini semua parpol sudah harus tentukan sikap. Parpol diharuskan sudah memilih calon koalisinya, sebelum pemilu berlangsung. Tujuannya agar tidak menimbulkan kerancuan dan menyulitkan panitia. “Keputusan itu di pusatnya,” tegasnya.

Dari seluruh parpol yang telah menyerahkan nama DCS – kecuali Partai Murba – tercatat 409 orang caleg sementara. PRD dan PAY yang sebelum terancam didiskualifikasi (Den-Pos, 6/5) kini sudah menyerahkan DCS masing-masing 1 dan 2 orang. PDI Perjuangan mencalonkan 85 orang kadernya di DPRD I, di susul Partai Golkar 66 orang.

Ketika ditanya soal identitas calon, Wisnumurti enggan memberikan keterangan. “Besok saja kan administrasi caleg diteliti,” ujarnya.

Kampanye di TVRI

Mengenai kampanye di TVRI dan RRI, Wisnumurti mengatakan, pihaknya akan menerapkan pola kampanye dialogis di TVRI. Sejumlah parpol akan diundang sebagai narasumber untuk menyampaikan program dan *platform* partai dan menanggapi isu *actual* secara dialogis. Acara ini akan dipandu kalangan independen.

Sedangkan untuk RRI, pihaknya akan menerapkan pola kampanye monologis. Tiap parpol diberikan waktu untuk menyampaikan materi program secara bergilir.

Pada kesempatan terpisah, Gubernur Bali Dewa Beratha mengatakan hingga saat ini pemilih di Bali tercatat, 91,8 persen. “Data tersebut kami peroleh dari PPD II se-Bali,” ungkapnyanya di sela-sela *coffe morning* di Jaya Sabha kemarin.

Menyoal ketidakhadirannya dalam Forkom Antarpol Plus, Gubernur sekali lagi menegaskan bahwa dirinya tetap komit dengan program forkom tersebut. “Kalau pun tak bisa

hadir, toh telah diwakilkan kepada Kaditsospol. Lagi pula, kami telah lebih dahulu mengadakan dialog lewat acara *coffe morning* ini," ujarnya.

DenPos, 7 Mei 1999

Dampak Politis Pengunduran Jadwal Tahapan Pemilu

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau Pemilu sebelumnya bersifat regular, maka Pemilu kali ini bersifat *emergency*. Maka tidak mengherankan kalau dalam Pemilu kali ini diwarnai oleh berbagai perubahan jadwal yang terus – menerus diobrak-abrik oleh KPU.

Tapi bagaimanapun, kita semua harus sadar bahwa waktu pelaksanaan pemilu kali ini sangat mendesak dan para pelaksanaannya juga berbeda dengan pemilu yang lalu. Pemilu kali ini dilaksanakan sepenuhnya oleh parpol; dari lembaga PPI hingga ke tingkat petugas pendaftaran pemilih (gastarlih) sepenuhnya dilaksanakan oleh parpol peserta pemilu.

Orang-orang yang terlibat dalam lembaga-lembaga pemilu itu pun kebanyakan anggota parpol yang belum berpengalaman dalam pengurusan pemilu karena pemilu sebelumnya sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Panitia pemilihan umum kali ini kelabakan dalam menangani masalah-masalah terkait dengan pelaksanaan pemilu mendatang karena sebelumnya mereka tidak dilengkapi santiaji atau pembekalan seperti pemilu sebelumnya.

Hal itu menyebabkan banyak jadwal yang terhambat dan mau tidak mau harus diundur. Pengunduran jadwal-jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya disebabkan kekurangsiapan sarana-

sarana komunikasi karena tidak disiapkan secara optimal akibat mendesaknya waktu. Keadaan tersebutlah yang akhirnya menyebabkan inkonsistensi jadwal yang telah ditetapkan.

Inkonsistensi jadwal pemilu kali ini secara politis akan mengganggu proses kerja dari lembaga-lembaga pemilu itu sendiri dan hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu hari H pelaksanaan pemilu.

Tetapi untuk dapat mengantisipasi kemoloran waktu tersebut, parpol yang terlibat dalam lembaga pemilihan umum dari tingkat pusat hingga daerah hendaknya mulai belajar mengambil keputusan melalui *voting*. Karena jalur *voting* merupakan alternatif terbaik mengingat banyaknya parpol yang terlibat dalam kepanitiaan pemilu. Hasil yang diperoleh dari *voting* tersebut hendaknya ditaati oleh semua parpol yang terlibat dalam lembaga pemilu karena bagaimanapun suara terbanyak itu merupakan keputusan yang diambil bersama dan hasilnya harus diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan bersama pula.

Hal yang kecil seperti itu akan dapat mempersingkat waktu sehingga jadwal yang lain tidak terganggu hanya karena masalah sebelumnya belum terselesaikan akibat diskusi yang berlangsung lama untuk mencapai kata mufakat.

Pemunduran jadwal yang terjadi berulang kali di tubuh KPU merupakan cermin dari adanya toleransi terhadap parpol yang terlibat dalam lembaga KPU itu sendiri. Sebatas hanya suatu bentuk toleransi, hal itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Tetapi kalau sudah mengarah pada kesengajaan untuk mengulur-ulur waktu, maka hal itu sudah seharusnya diwaspadai agar tidak mengarah pada pengunduran pelaksanaan pemilu atau kegagalan pemilu.

Parpol yang terlibat dalam KPU dan sudah lolos verifikasi sudah seharusnya lebih konsisten terhadap aturan yang mereka buat sendiri. Kalaupun terjadi pemoloran, maka harus ada batas yang tegas dan jelas sampai kapan molornya dan jangan sampai terus ditoleransi. Bagaimanapun partai yang

sudah berani ikut dalam pemilu mendatang seharusnya sudah mempersiapkan diri untuk terjun di kancah perpolitikan nasional. Parpol sudah seharusnya mulai membangun budaya politik yang baik. Salah satunya adalah konsisten terhadap segala aturan yang telah dirumuskan dan selalu menghormati aturan-aturan yang telah mereka tetapkan.

Pengunduran jadwal secara politik tidak terlalu mengkhawatirkan dan tidak akan mengundurkan hari H pelaksanaan pemilu selama lembaga pemilu dari tingkat pusat hingga daerah tetap konsisten terhadap tujuan akhir yang ingin dicapai dan tidak terpengaruh oleh proses. Dalam pemilu yang sifatnya *emergency*, kita tidak bisa terlalu berpedoman pada proses tetapi bagaimana kita tetap konsisten terhadap tujuan akhir yaitu pemilu 7 Juni 1999 dan tidak boleh mundur dari jadwal.

Nusa Tenggara, 7 Mei 1999

67

Disepakati, Waisak Tak Ada Kampanye

Meski belum ada kesepakatan mengenai jadwal kampanye, namun disepakati pada hari Raya Waisak (30/5) tidak ada kampanye. Dengan demikian jadwal kampanye yang semula 19 Mei s.d. 3 Juni molor menjadi 4 Juni.

Dalam pertemuan PPD I yang dipimpin Wakil Ketua PPD I Drs. HS Abdul Wahab, di Wiswa Sabha, Selasa (11/5) kemarin diputuskan jadwal kampanye tetap dipakai namun perlu penyempurnaan. Untuk menyempurnakan jadwal kampanye, ditunjuk tim perumus Drs. Wisnumurti, M.Si., wakil pemerintah dan Jaya Warsa Wardana. Pertemuan tersebut selain dihadiri PPD I dan PPD II juga Wakapolda Bali Kol.Pol. M. Saudi.

Dicapainya kesepakatan itu setelah mendengar usulan Yuri Saiful Bahri dari Partai Indonesia Baru dan Drs. Oka Wiratma dari PDI. Menurut Yuri, ditiadakan kampanye pada hari raya semata-mata untuk menghormati kekhidmatan upacara. Oka Wiratma juga mengatakan, 30 Mei lebih bagus diliburkan karena bertepatan dengan bulan purnama, banyak upacara adat di Bali.

Wisnumurti menyatakan akan berusaha menyusun jadwal dengan membagi per periode bukan per wilayah. Sebab kalau per wilayah sulit dihindari adanya eksodus massa dari satu wilayah ke wilayah lain. "Periode ini terbagi per kabupaten sehingga tak terjadi di eksodus massa,"

Namun usulan ini ditentang M, Ali Sahib. Ketua DPW PPP Bali ini mengatakan, kenapa mesti membuat jadwal baru, cukup jadwal lama disempurnakan dengan menambah partai yang baru masuk. Alasannya jadwal lama telah disepakati, hanya perlu perbaikan beberapa kelemahan. Misalnya ada partai yang mendapat kesempatan kampanye empat kali ada pula dua kali. Anehnya dalam jadwal lama satu partai berturut-turut mendapat kampanye mulai 20, 21, dan 22 Mei. “Tolonglah diatur lagi agar pembagiannya adil dan merata,” katanya.

Kampanye Simpatik

Selain itu, Wisnumurti juga mengusulkan pada 19 Mei kampanye pertama diawali dengan simpatik diikuti seluruh partai dengan pemasangan bendera bersama. “Kita undang semua parpol dengan satgasnya sambil membacakan kesepakatan yang telah dicapai,” katanya.

Baik Wahab maupun Sahib menilai itu sebuah ide bagus yang perlu ditindaklanjuti. Persoalannya bagaimana dengan partai yang sudah memasang bendera. “Saya selaku pimpinan PPP siap bertanggung jawab mencabut kembali bendera yang telah terpasang,” katanya.

Ide tersebut, kata Wakapolda Bali akan direalisasikan pada apel bersama Rabu (12/5) ini di Lapangan Puputan Renon. Semua partai dengan satgasnya akan dilibatkan pada apel bersama.

Terkait dengan perubahan jadwal kampanye, pimpinan PPD II sangat menyesalkan jadwal yang telah dikeluarkan akhirnya diubah lagi. Padahal sejumlah PPD sudah menyusun jadwal menyesuaikan dengan jadwal tingkat I. Atas pertanyaan tersebut, Wahab mengakui sangat sulit menegakkan konsistensi kesepakatan karena aturan dari PPI tiap saat berubah. “Kita tak mungkin menolak parpol yang mengirim calegnya sehingga akhirnya mengubah jadwal,” katanya.

Meski agak keberatan terhadap perubahan jadwal, PPD II akhirnya mau menyesuaikan jadwal yang telah disusun dengan

PPD I. kehadiran utusan PPD II dalam pertemuan PPD I untuk mendengarkan penjelasan utusan KPU yang diwakili Wayan Lasia mengenai pembentukan tim akreditasi dan aturan paman-tapan pemilu di daerah.

Bali Post, 12 Mei 1999

Pemilu Sukses, Gusur Kelompok Status Quo

*I*ndonesia sedang terpuruk di mata dunia. Kerusuhan pecah di sentero nusantara, ekonomi merosot luar biasa. Di Asia, Indonesia termasuk negara yang paling korup sementara di dunia Indonesia duduk pada posisi nomor enam. Dalam kondisi seperti inilah bangsa Indonesia menyongsong pemilihan umum 7 Juni 1999 yang akan datang.

Memang masih ada pro-kontra untuk pelaksanaan Pemilu. Namun, orang-orang yang melihat pemilu merupakan pilihan terbaik dari sekian alternatif yang memang buruk-buruk itu, masih berharap pemilu bisa menghasilkan legislatif dan pemerintahan yang sanggup melaksanakan reformasi secara konsekuen.

“Pemilu bisa dikatakan sukses bila berlangsung secara jujur dan adil serta luber. Dan satu syarat lagi, bila yang menang dan nanti memerintah adalah orang-orang yang betul-betul reformis,” kata Wayan Sudirta, S.H. salah satu pembicara dalam diskusi tentang pemilu yang jurdil di Universitas Mahasaraswati, 8 Mei lalu. Advokat senior yang juga anggota Dewan Pertimbangan KIPP Bali ini memaparkan argumennya. “Kalau melihat reaksi penolakan masyarakat terhadap temu kader yang dilakukan Golkar, itu sudah menunjukkan bahwa mereka tidak siap menerima kemenangan Golkar,” katanya.

Sementara Drs. Wisnumurti, M.Si, seorang dosen Universitas Warmadewa yang ditunjuk Pemda Bali untuk duduk di pengurus Panitia Pemilihan Daerah Tk. I Bali yang jadi pembicara dalam seminar itu menilai, pemilihan umum akan sukses bila berlangsung jujur dan adil serta luber. “Partai manapun yang menang, masyarakat harus siap menerimanya, bila kemenangan diperoleh secara konstitusional,”

Prof. Dr. I Dewa Gede Atmaja, guru besar UNUD yang juga berbicara dalam seminar tersebut, menilai kesuksesan pemilu memang hanya bisa ditakar dari ukuran-ukuran konstitusi: berlangsung jujur dan luber. Namun, sebagai mantan “orang dalam” yang kritis di Golkar, Dewa Atmaja tidak lupa mengkritik partai beringin itu. “Selaku intelektual dan ilmuwan hukum tatanegara, saya terus-menerus mengingatkan berbagai penyimpanan yang dilakukan Golkar. Tapi, saya ternyata tidak mampu dan memutuskan memisahkan diri,” katanya. Dia juga menambahkan, bahwa sebuah pemilihan yang jujur dan adil serta luber tidak selamanya menghasilkan pemerintah yang demokratis. “Hitler adalah salah satu contoh. Ia dipilih secara demokratis, tetapi ternyata menjadi pemimpin yang otoriter dan kejam,” kaktanya.

Revolusi Sosial

Sudirta bukannya tak punya argumentasi, mengapa ukuran sukses pemilu itu harus jujur-luber dan berhasil menyingkirkan status quo, yang secara tersirat mengarah ke Partai Golkar. Dikatakan, berita-berita di koran, dan merujuk pengalaman pribadinya melakukan afvokasi masyarakat yang teraniaya, ia menyebut penolakan mahasiswa dan masyarakat terhadap Golkar itu luar biasa.

“Akbar Tanjung dihadang di sana-sini, mahasiswa minta Golkar dibubarkan, dan apa yang dilakukan Golkar dalam orde reformasi ini tidak menunjukkan “pola-baru” seperti yang mereka dengung-dengungkan,” katanya.

Ada tuduhan penyelewengan dana JPS (Jaring Pengaman Sosial), penggunaan mobil plat merah untuk kegiatan Golkar, mobilisasi pegawai BUMN di Tanjung Priok, dan lain sebagainya, yang tidak mendapat tindakan tegas dari penanggungjawab pemilu BJ Habibie.

“Gus Dur dan banyak pakar memprediksi kemungkinan terjadinya revolusi sosial apabila reformasi tidak dilaksanakan secara konsekuen. Saya hanya mengingatkan saja, reformasi tidak akan berlangsung bila yang memenangkan pemilu dan kembali memerintah nanti adalah kelompok pro status quo. Makanya, kelompok status quo yang sudah 30 tahun lebih memerintah mbok ya tahu diri minggirilah. Jangan lagi macam-macam,” sambung Sudirta.

Namun kelompok status quo rupanya tidaklah tinggal diam. Manakala di Golkar tercium adanya gelagat dikotomi antara yang akan mencalonkan Habibie dan Akbar Tanjung sebagai capres mendatang segera dibentuk Partai Daulat Rakyat sebagai kendaraan lain Habibie.

Namun rupanya Partai Golkar belumlah berlapang dada dan tidak bersikap kesatria. Selain nampak pada fenomena manipulasi dana JPS seperti secara tersamar diakui orang Bapenas Jakarta, di Bali ada DPD Golkar Kodya Denpasar malah secara tersamar melakukan *money politics* dengan mengundang pedagang kaki-lima, kemudian memberi mereka baju kaos serta mengajaknya makan siang.

“Saya bertanya, mengapa baru sekarang Partai Golkar itu menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat marginal? Kalau mereka reformasi atau menjadi partai dengan pola baru, mengapa tidak menengok reklamasi Pulau Serangan yang merusak lingkungan, begitu juga proyek PLTP Bedugul?,” katanya.

Gede T. Bhaktiyasa, mahasiswa Unmas yang berbicara dalam seminar tersebut memperkirakan, sisa-sisa kekuatan status quo alias Golkar masih bercokol pada banyak posisi strategis di pemerintahan, sehingga reformasi terhambat.

Penegakan hukum tidak berlangsung dan ia mempertanyakan kemana kaum intelektual Bali dan Indonesia pada saat-saat kritis seperti sekarang.

Partai Fiktif?

Nyoman Mudiyasa, mahasiswa yang juga panitia seminar, mempertanyakan kepada PPD I Perihal sekretariat sejumlah partai yang “tidak jelas”.

“Kami yang mengantarkan surat undangan mendapatkan, ada partai yang sekretariatnya di tempat kost dan tidak ada siapa-siapa di tempat,” tanyaya. Ia melansir, setidaknya ada 7 partai yang tidak bisa “ditemui” pengurusnya. Ada kecurigaan, jangan-jangan partai seperti itu dibentuk secara “fiktif” hanya untuk menanggung bantuan uang dari pemerintah. Uangnya diambil, sementara partainya tidak punya program.

Wisnumurti dari PPD I menolak menjawab pertanyaan ini. “Itu wewenang Kaditsospol pemerintah daerah masing-masing, bukan PPD I. Kami hanya pelaksana Pemilu,” ujarnya.

Bali Post, 12 Mei 1999

DCS Bali Aman Dari Protes

Meski penandatanganan daftar calon sementara (DCS) DPRD I sudah berlangsung seminggu yang lalu (Rabu, 12/5), karena kelangkaan penyebarluasannya di lapangan menyebabkan hingga batas akhir penyampaian kritik masyarakat ke PPD, tidak satu pun masyarakat melayangkan protesnya terhadap daftar tersebut. Ketua PPD I Oka Ratmadi, S.H. dan anggota PPD I Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si mengatakan hal itu ketika secara terpisah, Rabu (19/5) kemarin.

Oka Ratmadi yang ditemui di sela-sela rapat intern PPD I mengatakan, persoalannya bukan terbentur pada kelambatan PPD dalam menandatangani daftar caleg. "Penandatangan-nya kan sudah sesuai jadwal," katanya. Permasalahannya, percetakan DCS sesuai format aslinya. Ternyata di Bali tak ada percetakan yang mampu menanganinya. Akhirnya terjadi kelambatan penyebarluasan, kendati yang disebarluaskan hanya fotokopi. DCS itu hanya dipasang dalam bentuk lembaran fotokopi di PPD I saja, sementara tempat strategis daftar tersebut belum tampak.

Menyadari keadaan tersebut, pihaknya mengharapkan masyarakat tetap memberikan penilaian dan kritik terhadap caleg yang telah disusun, karena masih ada perpanjangan waktu sampai 1 Juni.

Wisnumurti juga mengatakan hal senada. Dalam kaitan ini dia berharap media massa terus mensosialisasikan. Meski tidak ada protes, dia juga mengamati ada persoalan caleg yang mencuat ke permukaan. Misalnya soal nepotisme. “Jika itu terjadi jelas akan mempengaruhi kredibilitas calon dan partainya di masyarakat,” katanya tanpa memberikan rincian.

Pihak PPD I siap melayani protes tersebut. “Kalau menyangkut soal teknis persyaratan silahkan sampaikan ke PPD I. Jika menyangkut soal kredibilitas calon, PPD I akan meneruskan ke masing-masing parpol,” katanya. Misalnya, persoalan ijazah ternyata setelah dikritik memang betul tak memenuhi persyaratan, pihak PPD I tentu akan mengoreksi lagi sebelum keluar menjadi calon tetap. “Jadi cukup diselesaikan di PPD I, kalau dulu harus dikuatkan surat keterangan dari Pengadilan kalau terlibat suatu perkara, misalnya,” tambah Oka Wiratma, anggota PPD I yang lain.

Bali Post, 20 Mei 1999

Soal Penolakan Jadwal Kampanye PPD I Bisa Timbulkan Bentrok Massa

Keinginan menciptakan kampanye pemilu yang aman justru bisa menjadi boomerang jika PPD II Karangasem tetap ngotot menolak jadwal kampanye PPD I. Bahkan dikhawatirkan terjadi bentrokan massa antarpol, PPD I Drs A.A.G Oka Wisnumurti, M.Si., Rabu (19/5) kemarin di Renon.

Dia menyebutkan bentrokan antarmassa itu terjadi jika PPD II Karangasem tidak menggubris jadwal kampanye tingkat I. Bentrokan ini terjadi karena keengganan menyelaraskan dengan jadwal kampanye PPD 1.

Pengamat politik yang ditugaskan menyusun jadwal kampanye PPD I ini menilai secara hirarki jadwal kampanye tingkat I justru lebih absah dibandingkan tingkat II, sehingga mestinya tingkat II yang mengalah. Hal yang sama juga berlaku kepada PPD I yang mesti tunduk pada keputusan PPI. “Kami sudah berupaya menyusun jadwal agar tidak terjadi bentrokan massa antarpol di kabupaten. Misalnya jadwal kampanye PDI Perjuangan tidak berbarengan dengan Partai Golkar,” paparnya.

Melihat kekhawatiran itu, dia berharap PPD II menyesuaikan jadwalnya dengan jadwal kampanye tingkat I, bukan sebaliknya. Apalagi dari segi kewenangan sifatnya berjenjang, makin ke bawah lebih diarahkan pada operasional. Di pihak lain, partai yang terdaftar di tingkat I jauh lebih banyak dari tingkat II.

Dari catatan, di tingkat I terdaftar 31 parpol, sedangkan di Karangasem hanya 13 parpol.

Soal jadwal kampanye PPD II yang menempatkan satu parpol kampanye tiap hari, dia menilai boleh-boleh saja disesuaikan dengan partai dan kondisi setempat. Namun jadwal tersebut hendaknya tetap memperhatikan jadwal kampanye di tingkat atasan. Dalam kaitan ini, dia menyebutkan salah satu fungsi PPD II membantu PPD I dalam melaksanakan tugasnya. Hal yang sama juga berlaku bagi PPD I membantu kelancaran tugas PPI. Misalnya dalam sosialisasi aturan tingkat pusat yang mesti dijabarkan ke daerah-daerah.

Tak Ubah Jadwal

Di tempat terpisah Ketua PPD I AA Ngurah Oka Ratmadi, S.H. mengharapkan agar PPD II mengatur secara bijaksana jadwalnya. Sebab PPD I tak akan mengubah lagi jadwal kampanyenya. Kunci pengaturan jadwal itu tak hanya tergantung PPD II juga pihak kepolisian yang memberikan izin/permakluman kepada parpol yang akan kampanye. Misalnya dia menyebutkan sebelum partai kampanye beberapa harinya telah mengirim jadwal ke polisi. “Kalau terjadi tabrakan dua partai di kabupaten kewenangan polisi untuk mengaturnya,” Misalnya di wilayah Karangasem hanya ditetapkan satu partai kampanye, namun jadwal PPD I menetapkan wilayah timur ada dua s.d. tiga partai kampanye tiga hari. Dalam kaitan ini dia berharap PPD II agar berkoordinasi lagi dengan pihak kepolisian dan parpol. “Kalau ada dua partai mau kampanye di Karangasem, kami silahkan salah satu partai memilih di daerah lain di wilayah timur selain Karangasem, di Klungkung atau Bangli, kalau mereka ngotot dengan jadwalnya,”katanya.

Sebelumnya Ketua PPD II Karangasem Drs. I Gede Suman-tara Adipranata menyatakan tak akan menindaklanjuti jadwal kampanye PPD I. Penolakan terhadap jadwal kampanye PPD I, kata dia, semata-mata untuk menciptakan rasa aman di

Karangasem. “Sama sekali tak ada maksud menyepelkan jadwal tingkat I,” katanya. Lagi pula jadwal kampanye itu telah merupakan hasil kesepakatan antarpol di wilayahnya.

Bali Post, 20 Mei 1999

71

Evaluasi Kampanye Putaran Pertama di Bali Elite Bikin Kesepakatan Massa Bikin Ulah

Berbagai ekses yang bahkan mengambil korban jiwa dan material selama putaran pertama kampanye pemilu timbul akibat adanya penyimpangan aturan. Di antaranya pengerahan massa dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain, konvoi massa yang memunculkan ekses kekerasan.

Bahkan jika persoalan itu tidak ditidakanjuti pihak terkait, dikhawatirkan peserta kampanye membawa senjata tajam pada kampanye putaran kedua. Pengamat politik yang juga anggota PPD I Bali Drs. A.A.G Oka Wisnumurti, M.Si mengatakan hal itu, Rabu (26/5) kemarin di PPD I.

Dosen Fisipol Unwar ini menyebutkan, secara jelas ada pengerahan massa dari satu wilayah ke wilayah lain. Salah satunya pada kampanye PDI Perjuangan di Kuta terjadi pengerahan massa besar-besaran dari Kodya Denpasar. Padahal pimpinan partai sudah berulang kali diingiatkan hal itu dilarang. "Hal itu jelas-jelas menunjukkan ketidakmampuan elite parpol untuk mengatur massanya. Bisa saja akibat ketidakmampuan elite itu, pada putaran kedua, massa membawa senjata tajam untuk menjaga diri,"

Konvoi kendaraan jelas pula menyimpang dari aturan, karena selain membahayakan keselamatan pengemudinya juga menimbulkan ekses bagi warga lain. Munculnya konvoi di jalan-jalan ini, kata Wisnumurti, karena aturan KPU melarang

kampanye di lapangan terbuka. Akibat keterbatasan tempat, peserta kampanye lebih banyak konvoi di jalan-jalan. “Mestinya KPU sudah mengantisipasi dengan memberikan kampanye partai politik yang memiliki massa dalam jumlah besar di lapangan terbuka,” katanya.

Melihat pelanggaran yang terjadi pada kampanye putaran pertama yang sampai menimbulkan aksi kekerasan, dia khawatir kampanye pada pekan kedua bisa jadi akan muncul masalah yang lebih besar. Lebih-lebih kalau aparat keamanan dan Panwaslu tidak mampu menangani secara baik pelanggaran kampanye tersebut.

Ketua Panwaslu Bali Sarijanto ketika dihubungi per telepon tak merinci jumlah pelanggaran yang terjadi selama sepekan kampanye. Namun selama sepekan itu pihaknya melihat kasus Sesetan dan Yeh Malet sebagai tindak pelanggaran politik yang telah mengarah pada kekerasan. Untuk itu dia memberikan dua kartu kuning kepada pimpinan PDI Perjuangan dan Parai Golkar, karena kampanye partainya telah mengarah terhadap kekerasan.

Soal penindakan terhadap peserta kampanye yang membawa senjata tajam dia menyebutkan itu bukan kewenangan Panwaslu tetapi kepolisian.

Kesepakatan di Atas Kertas

Kampanye Pemilu 1999 sudah berjalan lebih dari seminggu. Kesepakatan akan melakukan kampanye secara damai bagi parpol peserta pemilu ternyata hanya di atas kertas. Banyak tindak kekerasan politik muncul pada massa kampanye seperti Kasus Sesetan, Yeh Malet Manggis Karangasem.

Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma (FPMHD) Unud bekerja sama dengan Yayasan Manikaya Kauca, Rabu (26/5) kemarin melaksanakan diskusi evaluasi kampanye pemilu di Bali.

Kampanye memiliki arti strategis, karena identik dengan perbuatan memodifikasi tingkah laku masyarakat agar mau

dan bersedia untuk memilih parpolnya. Sekjen Forkom Parpol Plus I Nengah Dasi Astawa mencermati parpol dalam massa kampanye digolongkan menjadi dua. Sekelompok parpol yang tak berdaya melaksanakan kampanye, sementara di kelompok lain ada parpol berhasil berkampanye namun belum optimal.

Lantas apa penyebab parpol tak berdaya melaksanakan kampanye? Sekretaris Forum Independen Pemantau Pembangunan Bali itu memaparkan ada enam ganjalan parpol berkampanye. Uang menjadi ganjalan utama mengingat belakangan banyak keluhan elite parpol tak punya dana. “Banyak juga parpol yang bingung menentukan materi kampanye, jurkam tidak tahu harus ngomong apa untuk menarik simpati massa pada partainya,” tegasnya.

Ganjalan lainnya metode penyampaian materi, massa, dan moral. Kesan umum yang parpol gagal kampanye di Bali, katanya, tidak punya massa. Parpol sering tidak mampu mengidentifikasi massanya yang dibidik untuk memenangkan pemilu.

Kendati mengevaluasi pelaksanaan kampanye di Bali. Dasi tak berani memaparkan parpol mana saja yang dimaksud gagal kampanye. “Kita tak etis menyebutnya di sini,” ujarnya kepada para peserta diskusi.

Dosen FH Unud Gede Marhaendra Wija Atmaja, S.H. menyatakan prihatin atas kemampuan elite parpol di Bali yang baru bisa membuat kesepakatan saja. “Mereka belum bisa melaksanakan kesepakatan itu, padahal kesepakatan merupakan undang-undang bagi pembuatnya yang harus dilaksanakan atau ditaati,” tegasnya.

Dicontohkan, parpol se-Kodya Denpasar sepakat tidak akan memasang tanda gambar di tiang telepon, tiang listrik atau tidak mengganggu trotoar serta tidak memasang atribut di taman atau pohon penghijauan. Nyatanya kesepakatan itu dilanggar oleh parpol.

Maraknya pelanggaran kampanye pemilu, katanya, akibat tidak dihormati atau dilaksanakan hukum secara baik.

Rendahnya ketaatan masyarakat Indonesia pada aturan akibat produk, pelaksana, dan budaya masyarakat yang kurang mendukung.

Drs. Wayan Loka dari PNI Supeni menyatakan kesemrawutan situasi massa kampanye merupakan akibat dari amburadulnya sistem politik, sosial ekonomi, dan hukum yang berlangsung lama. "Pemerintah tidak punya wibawa," tegasnya.

Loka mengakui penyelenggaraan kampanye pemilu saat tidak optimal karena waktu persiapannya sangat singkat.

Bali Post, 27 Mei 1999

72

Bentrok Massa Parpol Bisa Membesar dan Meluas Golkar dan PDI-P Langgar Empat Aturan

*P*engamat politik Drs. A. A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si mengatakan, kalau mau terbuka, Partai Golkar dan PDI Perjuangan sudah menunjukkan adanya penyimpangan aturan kampanye. Pertama, penyimpangan gerakan massa antar kabupaten. Kedua, soal konvoi juga dilanggar. “Hanya, untuk konvoi susah memang didefinisikan,” ujarnya. Ketiga, tidak diperbolehkannya berkampanye di tempat terbuka. Namun kedua partai melanggarnya. Dan keempat, satgas membawa senjata tajam jelas tak dibolehkan dalam aturan. “Mestinya kampanye kan membawa konsep politik bukan kekerasan” ujar dosen FISIP Unwar ini.

Soal kontrol oleh Panwaslu, Wisnumurti menegaskan, Panwaslu punya mekanisme dalam melakukan kontrol. Panwaslu punya tiga tahap sebelum melarang parpol kampanye. Tahapan itu berupa teguran lisan, tertulis dan peringatan. “Tahapan ini memerlukan proses dan ada kondisi real yang mengharuskan Panwaslu harus bijak,” katanya.

Menurut dia, mestinya aparat keamanan bisa mengklarifikasi mana pelanggaran yang berbau kriminal dan politik. Hal-hal yang terkait kriminal harusnya segera ditindak secara hukum tanpa harus diselimuti bingkai politik. “Dengan demikian kami berharap supremasi hukum bisa menjadi pilar utama,” katanya.

Wisnumurti memprediksi, bisa saja terjadi bom waktu, pada periode kedua. Pihaknya melihat ada kecenderungan muncul masalah yang lebih besar dan meluas pada periode kedua ini. Karena itu, parpol harus tetap menjaga kesepakatan yang ada.

Selain itu, lanjut dia, pimpinan parpol harus terus menjalin komunikasi politik dengan massanya. “Soalnya apakah pimpinan parpol efektif meredam emosi massanya. Ini saya ragukan,” ujarnya.

Tak Berwenang

Sementara Ketua Panwaslu Bali H. Sarijanto, S.H. di ruang kerjanya kemarin mengatakan, hingga berakhirnya putaran pertama masa kampanye di Bali Panwaslu baru mengeluarkan dua kartu kuning untuk dua parpol. Keduanya terkait dengan pelanggaran administrasi seperti pelanggaran melintasi batas wilayah yang ditetapkan. Sedangkan menyangkut temuan satgas membawa senjata tajam (sajam), sepenuhnya hanya kewenangan polisi.

Kewenangan Panwaslu terbatas hanya pada pelanggaran administrasi. Sedangkan yang sifatnya kriminal sepenuhnya menjadi kewenangan aparat keamanan. Terhadap dua temuan Panwaslu, kata Sarijanto pihaknya telah mengeluarkan dua surat peringatan (kartu kuning).

Klasifikasi kedua kartu kuning yang dikeluarkan berbeda, disesuaikan dengan temuan di lapangan. Kartu kuning biasa sifatnya berupa imbauan. Sedangkan kartu kuning plus lebih tegas, yang mengarah pada sanksi hukum. Indikator pelanggarannya, berupa melakukan arak-arakan melewati batas wilayah yang telah ditetapkan. Hal itu dinilai melanggar keputusan KPU pasal 49 ayat 1 A. “Masalah temuan senjata tajam itu bukan kewenangan kami,” ujarnya didampingi Sekretaris Panwaslu Drs. IBG Wiyana dan Wakil Ketua Dr. Drs Johanes Usfunan, S.H., M.H.

Tanpa merinci parpol yang telah diberikan kartu kuning plus, Sarijanto kembali mempertegas dua temuan Panwaslu pada tahap pertama. Temuan pertama yang terjadi di Sesetan melibatkan kader PDI Perjuangan dan Golkar. Berdasarkan hasil investigasi Tim Yudistira kasus itu berawal dari perobekan bendera Golkar. Sedangkan kasus kedua yakni pelanggaran lintas batas sehingga mengakibatkan terjadinya insiden Yeh Malet, Manggis, Karangasem.

Terkait dengan kasus Yeh Malet, Panwaslu hanya memfokuskan pada pelanggaran lintas batas mengacu pada keputusan KPU terutama pasal 49. Sedangkan kasus pembakaran mobil sepenuhnya merupakan kewenangan aparat kepolisian.

Tentang kemungkinan keluarnya kartu merah sehubungan terjadinya kasus Pupuan, Wiyana menyatakan yang berhak melakukan investigasi terkait dengan hal itu adalah Panwaslu II. Sejauh ini pihaknya belum menerima tembusan dari Panwaslu II tentang adanya indikasi pelanggaran administrasi dalam kasus tersebut. "Perlu dipahami yang ditindaklanjuti Panwaslu I adalah semua bentuk temuan di tingkat I," ujarnya.

Tentang kemungkinan dikeluarkannya kartu merah menyusul kartu kuning plus, Johannes Usfunan mengatakan itu masih sangat jauh. Sebelum kartu merah berupa pelarangan kampanye dikeluarkan, Panwaslu mengeluarkan peringatan kedua dan ketiga. "Jika peringatan ketiga tak diindahkan baru dilanjutkan dengan kartu merah," kata pengajar di FH Unud itu.

DenPos, 27 Mei 1999

Di Balik Kemelut Politik di Gianyar Kelompok Frustrasi PDI-P Berupaya Jatuhkan Suryawan?

*P*elencengan masalah teknis rencana pengembangan lembaga di lingkungan Pemkab Gianyar, kini mulai diplintir oleh orang-orang yang ingin menggeser kedudukan Bupati Gianyar Tjok Gde Budi Suryawan, S.H. Dibalik kemelut politik itu, ada indikasi kelompok frustrasi PDI-P berupaya untuk menjatuhkan kepemimpinan Suryawan. Dalam dunia politik apapun bisa terjadi dan bisa berubah. Namun permasalahan yang berkembang di Gianyar seharusnya ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya.

Hal tersebut dikatakan pengamat politik dari Universitas Warmadewa Drs. AA Oka Wisnumurti, M.Si dan Rektor Universitas Ngurah Rai Tjok Gede Atmaja, S.H, ketika diminta pendapatnya secara terpisah, Kamis (21/12) kemarin.

Wisnumurti mengatakan, gagasan Bupati Suryawan mengembangkan lembaga di lingkungan Pemkab Gianyar telah sesuai dengan esensi UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah. Untuk pengembangan pembangunan di daerah tingkat II memang harus didukung oleh lembaga yang lengkap dan disesuaikan dengan situasi dan koindisi, serta tuntutan masyarakat. Gagasan ini, memang perlu mendapat tanggapan yang positif oleh kalangan anggota DPRD Tk II Kabupaten Gianyar.

Dikatakan, jika sekarang permasalahan itu dilebarkan menjadi masalah politik dan ditarik-tarik ke masalah pelengseran Bupati Gianyar, jelas melenceng dari permasalahan awal. Padahal, ide pembentukan atau penambahan lembaga di lingkungan Pemkab Gianyar hanya bersifat teknis dan bukan substansial. Jika ada kader PDI-P membuat perhitungan dengan cara melengserkan Suryawan dari kursi bupati, apakah dari segi aturan sudah ada? Apakah Suryawan selama ini, pernah melakukan kesalahan dan bertentangan dengan Undang-undang dan aturan yang ada?

Salah Paham

Menurut Wisnumurti, ada kesalahpahaman antara eksekutif dan legislatif tentang rencana pengembangan lembaga itu. Paling tidak, eksekutif menawarkan lembaga itu karena pertimbangan fungsional dan personal. Apakah selama ini lembaga-lembaga yang sudah ada sudah berfungsi. Ataukah lembaganya perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Sehingga, masing-masing lembaga punya fungsi masing-masing.

Hal senada dikatakan Atmaja. Menurutnya, perbedaan antara eksekutif dan legislatif soal penambahan lembaga di lingkungan Pemkab Gianyar hanya miskomunikasi. Padahal, esensi dari UU No.22 Tahun 1999 tersebut, daerah Tk II diberi wewenang mengurus dan mengelola daerahnya. Dalam mengelola daerah ini, apakah dari segi kelembagaan sudah mencukupi, sebagaimana dengan SDM yang sudah ada, dan bagaimana dengan keuangan. Sebab, mengembangkan lembaga atau sebuah daerah harus didukung oleh sumber dana yang cukup besar.

Wisnu menyayangkan sikap eksekutif yang tidak melakukan pendekatan lebih dulu dengan legislatif soal pengembangan lembaga di lingkungan Pemkab Gianyar. Eksekutif seharusnya melakukan kajian lingkungan dan *hearing* (dengar pendapat) dahulu dengan legislatif sebelum dibawa kerapat

gabungan anggota DPRD. Sebelum dibawa ke Dewan, eksekutif perlu mensosialisasikan rencana pengembangan lembaga ke masyarakat. Pendapat publik perlu didengar oleh eksekutif dan DPRD.

Kalau tahapan-tahapan itu dilakukan oleh eksekutif, lanjutnya masalah ini takkan sampai ke hal-hal yang bersifat politik. Apalagi masalah yang sesungguhnya sangat teknis ini, tidak perlu diplintir untuk melengserkan Bupati Gianyar. Hal ini hanya menguntungkan bagi orang-orang yang frustrasi untuk ikut bermain menjatuhkan Suryawan.

Atmaja mengatakan, menjatuhkan Suryawan adalah sikap yang terlalu dini. Anggota DPRD Gianyar harus berhati-hati menentukan pilihan politik. Sebab, dukungan masyarakat Gianyar buat Suryawan sangat tinggi. Anggota DPRD dari PDI-P harus mendengar dan menyerap aspirasi yang berkembang masyarakat. PDI-P bukan partai pemenang pemilu, tetapi PDI-P partai dominan. Untuk itu, anggota DPRD dari PDI-P harus tetap bijak menyikapi masalah ini. Sementara Ketua Forum Merah Putih Bali Drs. Putu Suasta MA menyarankan agar dikembalikan masalah pengembangan lembaga itu ke persoalan awal.

Sebelumnya, BP Kamis (21/12) memberitakan, kondisi politik di Gianyar belakangan ini agak hangat, menyusul sikap Fraksi PDI-P DPRD setempat tidak menjalankan kesepakatan rapat gabungan dalam menentukan jumlah kelembagaan di Gianyar. Buntutnya sejumlah warga Ubud yang simpatisan PDI-P bereaksi. Mereka mengancam akan turun ke jalan berunjuk rasa untuk tetap mendukung kepemimpinan Bupati Tjok Budi Suryawan, S.H.

Bali Post, 22 Desember 1999

Harus Profesional dan Punya Visi Jelas

Eksistensi lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peranan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami hukum, politik dan berbagai persoalan lainnya. Sebagai lembaga independen, sudah tentu kontrol dari LSM bisa memberikan implikasi positif. Atau dengan kata lain, berusaha mengangkat derajat masyarakat dari penindasan sewenang-wenang. Tidak sebaliknya, justru membuat masyarakat tertindas.

Pemerhati politik Drs. AA Oka Wisnumurti, M.Si. menyatakan mendukung tumbuhnya sejumlah LSM di Bali. Di harapkan LSM dapat membuka saluran aspirasi masyarakat yang di zaman orde baru sempat tersumbat. LSM yang sebelumnya sering dianggap sebagai musuh bukan lagi lawan yang mesti diberangus. "Cuma perlu diingat, peran yang ditampilkan LSM jangan sampai melebar dari spesifikasi bidang kerja saat mana lembaga itu didirikan. Hal ini sesuai konsep LSM, dimana kebanyakan bergerak di bidang mikro," tandasnya.

Mengenai maraknya LSM yang menangani persoalan selain bidang kerja, menurut dosen FSIP Unwar ini, sepenuhnya kembali tergantung pada itikad baik para pendirinya. Begitu pula masyarakat dengan sendirinya bisa menilai kemampuan LSM itu dalam mewakili aspirasinya. Lambat laun penyimpanan tersebut, dengan sendirinya akan berpengaruh pada

realitas bidang kerjanya. “Dalam alam yang demikian modern, masyarakat sudah demikian kritis dalam menanggapi berbagai persoalan. Termasuk dalam masalah LSM, masyarakat tanpa diberitahu pun sudah mengetahui duduk persoalannya. Dengan sendirinya mereka bisa menilai, bagaimana bentuk LSM itu sesungguhnya,” katanya.

LSM akan sendirinya mendapat tempat di tengah kehidupan masyarakat, bila dalam pelaksanaannya berpatokan pada profesionalisme dan harus memiliki misi dan visi yang jelas. Profesionalisme artinya, mereka yang mengendalikan LSM itu, haruslah orang-orang yang ahli di bidangnya. Atau minimal mengerti permasalahan yang akan dibicarakan. Sangat tidak masuk akal, keterlibatannya hanya mengejar popularitas. Lebih jelek lagi, keterlibatannya memiliki peran ganda atau ada udang di balik batu.

Mengenai misi dan visi, sebagaimana sebuah lembaga didirikan, kata dia, LSM harus memiliki spesifikasi bidang kerja. “Jangan mumpung ada kesempatan, semua permasalahan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat di raup begitu saja. Syukurlah kalau permasalahan itu bisa dicarikan jalan keluar. Kalau terjadi sebaliknya, bukan mustahil menimbulkan permasalahan baru,”

Lain lagi pendapat praktisi hukum J. Roberth Khuana, S.H. Menurutnya, LSM kehadirannya berfungsi mengkritisi jalannya pemerintahan. Karena bagaimanapun, jalannya pemerintahan perlu ada sebuah lembaga yang mengontrol kinerjanya. “Syukurlah pada era sekarang, pemerintah tidak lagi mengang-gap LSM mesti di berangus, melainkan diajak berdiri sejajar dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” kata Ketua AAI Bali ini.

Cuma ia menyarankan, LSM dalam mengkritik pemerint-h jangan terlalu atraktif. Artinya disini, LSM jangan sampai menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan sebuah

tekanan kepada pemerintah. Apakah itu dengan mengadakan unjuk rasa atau menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan sebuah tekanan kepada pemerintah. Apakah itu dengan mengadakan unjuk rasa atau menganjurkan terjadinya sebuah pemogokan. LSM dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, tidak perlu dengan cara-cara seperti itu. Ia yakin, mereka yang duduk pada sebuah LSM, telah mengerti langkah-langkah apa yang mesti diambil. "Saya yakin rekan-rekan yang duduk pada sebuah LSM, sudah memiliki program kerja yang jelas," katanya.

Kehadiran LSM, katanya, sebenarnya bagaimana memberdayakan masyarakat itu agar mengerti persoalan yang dihadapinya. Contoh di bidang hukum, masyarakat tidak perlu merasa takut berhadapan dengan pemerintah bila menyangkut masalah hukum. Dengan bantuan LSM itu, masyarakat sendiri sudah mengetahui jalur-jalur yang ditempuh. Begitu pula di bidang permasalahan lainnya. Lingkungan misalnya. Dengan berdirinya LSM yang mewadahi lingkungan, berarti segala kepentingan masyarakat di bidang itu akan terwakili.

Bila masyarakat sudah mewakili persoalan kehidupannya, menurut Roberth, berarti misi LSM itu sudah mencapai tujuan. Tidak menutup kemungkinan, suatu saat peran LSM itu sudah bisa dikurangi. "Bukan sebuah tujuan kalau selama-lamanya permasalahan kehidupan masyarakat di tangani para LSM. Merupakan sebuah tindakan mulia, bila kinerja LSM itu akan menyebabkan masyarakat bisa memahami kehidupannya sehari-hari," kata Roberth, seraya menduga tujuan tersebut justru ditakuti para pendiri LSM.

Soal adanya sinyalemen LSM merupakan kepanjangan tangan pihak-pihak tertentu, baik Wisnumurti maupun Roberth sangat menyayangkannya. Keduanya sama sekali tidak setuju, kalau kehadiran LSM hanya dipakai untuk kepentingan pribadi. Hal itu secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat. "Bagaimana mau mewakili aspirasi masyarakat, kalau justru yang terjadi mereka itu lebih mengurus kepada kepentingan pribadi," ujarnya.

Hanya keduanya yakin, LSM semacam itu tidak akan bisa berkembang di masa mendatang. Masyarakat yang mestinya diwakili, dengan sendirinya bisa menilai sejauh mana keberadaan LSM itu. Bila masyarakat sudah tidak mempercayai lagi, apa gunanya LSM itu diteruskan.

Bali Post, 8 Agustus 2000

75

Langkah Mundur, Jika Humas Badung Dilikuidasi

Dalam rangka restrukturisasi di Pemkab Badung beberapa Dinas dan Bagian dipastikan terlikuidasi. Selain Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga yang akan digabung ke Dinas PU, Bagian Humas dikabarkan akan digabung dengan Penerangan dan KPDE. Kendati hal itu baru sebatas rencana, dan belum diputuskan tak pelak menimbulkan berbagai reaksi. Pakar komunikasi dan kalangan jurnalis menilai, penggabungan Humas merupakan langkah mundur.

Drs. Chusmeru, M.Si, menilai dilikuidasinya Humas mengindikasikan DPRD Badung tak tahu sejarah humas (*public relation/PR*). Padahal, dengan makin pesatnya kemajuan iptek ekstensi Humas sangat diperlukan. Menghadapi ketatnya persaingan bisnis, serta makin meningkatnya kebutuhan masyarakat, Humas diharapkan berperan banyak. Khususnya sebagai media yang dapat membentuk *image positif* sebuah lembaga. "Bisa dalam hal menjalin hubungan internal maupun eksternal. Menciptakan *good will*, dalam hubungan berkomunikasi maupun menginformasikan hal-hal yang benar tentang lembaga tersebut," tegas Chusmeru, Rabu (24/1) kemarin.

Kecenderungan abad ini, katanya, kehadiran *public relation*, mutlak perlu. Bukan saja di kalangan perusahaan seperti PLN, Telkom dan perusahaan-perusahaan besar lainnya, tapi parpol pun seperti PDI Perjuangan perlu humas.

Menyinggung tentang rencana digabungnya Humas dengan Deppen, Chusmeru mengatakan, kendati ada kemiripan namun fungsinya berbeda. Penerangan cenderung bersifat komunikasi satu arah, instruksional. Bahkan, dalam Orde Baru terkesan intimidatif. “Saya sangat menyayangkan jika sampai Humas dilikuidasi. Hal itu mengindikasikan Dewan tak memahami fungsi humas. Atau mungkin masukan dewan sangat sedikit tentang humas, sehingga muncul keinginan untuk melikuidasi. Dewan terkesan terbius euphoria di mana ada bagian yang potensial dilikuidasi,” tandasnya

Bentuk Citra

Dikatakan, dengan melaksanakan peran Humas sangat penting dalam memelihara *image positif* sebuah lembaga. “Khusus untuk pemda, humas masih diperlukan. Tentu ujung-ujungnya humas dapat memulihkan citra pemerintah,” katanya seraya menilai Dewan terlalu sembrono jika humas dilikuidasi.

Dalam konteks pengamat politik dan pemerintahan Drs. AAG Wisnumurti, M.Si berpendapat, ke depan peran humas lebih ditingkatkan lagi, bukan dihapus. Tak hanya sebagai pusat komunikasi dan informasi pemerintah. Selama ini memang terkesan sebagai juru bicara bupati. Tapi itu semua karena struktur humas sebagai *Public Relation* sehingga wajar muncul kesan seperti itu.

Dalam konteks otonomi, katanya, peran lembaga ini harus ditingkatkan. Dia kurang sependapat jika humas digabung dengan penerangan. “Kurang tepat. Karena Deppen dulu sangat sektoral. Kurang tepat dijadikan dinas. Justru saya khawatir jika digabung maka setiap dinas akan muncul humas-humas tersendiri. Akan lebih bagus jika fungsi humas ditingkatkan sebagai badan informasi yang mampu mengolah informasi untuk disampaikan kepada masyarakat,” tandasnya.

Rencana strukturisasi ini hingga kini masih sebatas wacana. Menurut ketua Pansus Kepegawaian DPRD Badung Prof Drs I Wayan Nuada, SH., MBA., MSc PD.D., pembahasan baru akan dilakukan Senin depan.

Bali Post, 23 Januari 2001

76

Sembrono, Humas Badung Kok Dilikuidasi

Perampingan struktur menyusul akan dilikuidasinya sejumlah dinas dan bagian di Pemda Badung setelah otonomi daerah dilaksanakan, membuat waswas sejumlah pegawainya. Salah satunya Humas Badung akan dilikuidasi, mengundang sorotan pakar dan pengamat.

Pakar komunikasi Drs. Chusmeru M.Si. Rabu (24/1) kemarin dihubungi per telepon menyatakan prihatin atas kinerja Dewan yang dinilai sembrono melikuidasi dan merger humas dengan dinas lain. "Ini jelas-jelas menunjukkan ketidaktahuan dan ketidakmengertian Dewan terhadap fungsi humas," kata sarjana komunikasi UGM ini. Ia juga mempertanyakan sejauh mana pemahaman Dewan terhadap fungsi humas. "Saya sayangkan Pak Nuadha (DPRD Badung-red) tak tahu persis fungsi humas," tegasnya.

Dosen Unud ini mengatakan, sejarah lahirnya *public relations* karena persaingan bisnis, kemajuan iptek khususnya media cetak sampai internet dan meningkatnya kekritisian masyarakat. Kehadiran humas diharapkan dapat membentuk citra positif suatu lembaga, khususnya menjalin hubungan saling pengertian baik internal maupun eksternal, sekaligus membentuk opini publik yang menguntungkan lembaga itu. Terlebih lagi *trend* abad ke-21, humas menjadi bagian yang diperhitungkan di perusahaan negara seperti PLN, Telkom serta

jaringan perusahaan multinasional lain seperti Unilever dan Toyota. “Mereka berhasil karena kinerja humas yang profesional,” katanya. Bahkan, humas sudah memasuki ruang politik termasuk PDI Perjuangan sendiri yang memiliki humas.

Atas pertanyaan, ia menyebutkan, kalau humas digabung dengan Deppen jelas tidak pas, karena komunikasinya cenderung satu arah bahkan sifatnya instruksional – yang di masa orde baru cenderung intimidatif. Karena itu, jika humas masuk Deppen, ia menilai Dewan keblinger atau terbalik pola pikirnya. “Sebaiknya DPRD studi banding dulu atau mendengar pakar komunikasi sebelum memangkas atau melikuidasi sebuah lembaga,” tegasnya.

Ia tak ingin karena alasan Dewan yang *saru gremeng* akan berakibat fatal. “Saya khawatir humas dilikuidasi akan melecehkan insan pers,” katanya.

Pengamat sosila politik Drs. Wisnumurti, M.Si. dihubungi di tempat terpisah khawatir kalau humas dimerger dengan dinas lain, akan menjadikan bagian yang terkooptasi dalam birokrasi sendiri. “Jangan-jangan setelah dimerger birokrasi makin rumit, ini jelas tak sesuai dengan esensi otonomi peningkatan pelayanan,” tegas dosen Unwar ini.

Ke depan, ia menilai strategisnya peran humas bukan saja sebagai jubah tetapi mengkaji kebijakan bupati yang berdampak pada publik. Dalam kaitan ini, Chusmeru berpendapat, humas harus memiliki kajian riset mengenai dampak kebijakan pimpinan maupun *image*-nya di masyarakat karena ujung-ujungnya mempengaruhi citra lembaga.

Karo Humas dan Protokol Pemda Bali Drs. Gede Nurjaya mengatakan, humas Badung masih layak dipertahankan dan tak bisa digabung dengan Deppen, karena fungsinya sangat berbeda. Humas mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada publik, sementara dinas lebih banyak fungsi teknis. Ia berharap Pemda Badung jangan ikut-ikutan dengan kabupaten lain karena kompleksitas persoalan dihadapi.

Mantan Camat Kuta ini menilai, dari segi *financial* kemampuan Badung tak perlu diragukan dan humas tak akan banyak membebani anggaran. Tetapi kalau digabung ke Dinas Informasi dan Komunikasi, ia menilai kurang pas. Sebab, dinas itu berfungsi teknis, lebih pas bergabung dengan protokol karena tugasnya saling menunjang.

Sekda Badung Wayan Subawa, S.H. sependapat dengan pakar tentang peranan humas. Sampai saat ini humas masih dibutuhkan untuk membentuk citra positif pemda dalam mengkomunikasikan kebijakan bupati. Selain itu, juga memberikan masukan kepada pimpinan atas informasi yang berkembang. "Soal dilikuidasi atau tidak itu kewenangan bupati, pihaknya hanya memberi masukan setelah bertemu dengan Dewan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Pansus Kepegawaian DPRD Badung Wayan Nuadha mengisyaratkan adanya pemangkasan asisten dan sejumlah dinas dan bagian dilikuidasi kemudian dimerger di Badung. Salah satunya humas dilikuidasi, kemudian dibentuk dinas informasi dan komunikasi yang merupakan sempalan Kantor Penerangan. Bagian Humas dan KPDE (Kantor Pengolahan Data Elektronik).

Bali Post, 25 Januari

Jika Pemilu Gagal Bisa Melalui Dekrit

Semua orang berharap agar empat agenda politik yang akan dihadapi bangsa Indonesia tidak gagal. Demikian juga pengamat politik Prof. Dr. Dewa Atmaja, S.H., M.S. ketika ditanya jika agenda politik gagal, langkah antisipatif apa yang harus dilakukan.

“Itu kan harus asumsi. Kita berharap agenda itu tidak gagal, sebab ini menghadapi krisis. Kalau itu gagal asumsi kita akan terjadi prahara atau *chaos*,” kata Dekan Fak. Hukum Unud ini Jum’at kemarin.

Bali, kata Atmaja, bagaimana pun tetap merupakan bagian dari satu sistem, tentu akan merasakan dampak negatifnya. Yang perlu dicermati, kita harus berdialog. Dalam dialog tersebut harus dikembangkan pemikiran dan rumusan-rumusan bagaimana bisa membuat program untuk kepentingan bersama, untuk menjaga keamanan atau kedamaian.

“Sebagai umat manusia, tentu tidak ingin menderita. Dialog cukup antisipatif. Mudah-mudahan dalam dialog bisa ditumbuhkan pemikiran-pemikiran dan langkah-langkah taktis untuk mengembangkan moralitas politik, pikiran-pikiran untuk berbuat kebajikan atau *dharma* untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Langkah-langkah taktis, kata dosen yang rajin mengikuti diskusi ini, bisa merupakan program bersama khususnya elite

politik. “Secara hukum bisa agenda itu gagal, tentu akan diatasi melalui dekrit, suatu pernyataan darurat,” katanya.

Dalam hal ini diperlukan komitmen semua pihak khususnya pemerintah dan pimpinan parpol untuk menjaga agar Bali tetap aman. “Saat ini justru mereka yang duduk di DPR melalui masing-masing fraksinya tetap ngotot untuk mempertahankan kepentingannya,” katanya.

Ketika ditanya mereka itu ngotot karena memang untuk mempertahankan kepentingan fraksi atau pribadi, ia menjawab, “Berdasarkan yang saya amati, kelihatannya mereka ngotot lewat fraksi, namun di balik itu tidak lebih hanya untuk kepentingan pribadi agar eksis di dunia politik.”

Sesungguhnya, lembaga inilah yang harus mempelopori sikap semangat patriotisme. “Justru di lembaga DPR hal ini menjadi ganjalan, yang seharusnya cair,” tandasnya.

Rambu-Rambu

Agar tidak terjadi gesekan-gesekan dalam kampanye pemilu yang melibatkan banyak partai, ia menyarankan agar massa parpol mematuhi dua hal. Pertama, secara formal harus dipahami betul rambu-rambu ketentuan pemilu. Kedua, harus disepakati rambu-rambu kebatasan, apa yang bebas disentuh dan mana dilarang.

“Di Bali ada gejala mempolitikkan agama dan mengagamakan politik. Saya lihat ada parpol sudah melakukan pendakian *dharma* melalui politik di Klungkung. Ini akan berbahaya,” katanya.

Sementara dosen Universitas Warmadewa Drs. AAG Wisnumurti, M.Si. mengatakan alotnya RUU akibat adanya “perebutan” PNS. Di satu pihak PPP menginginkan PNS netral sementara Golkar ingin tetap PNS seperti semula. Mestinya, kata dia, Golkar akomodatif dan melihat ke bawah. “Andaikata keputusan terburuk yang keluar dengan membolehkan PNS berpolitik, tampaknya Depdagri telah menyiapkan langkah alternatif. Sedangkan pembahasan sistem pemilu tidak mengalami ham-

batan.” Katanya seraya menambahkan, RUU Politik dan Pemilu tidak begitu berpengaruh terhadap masalah keamanan.

Yang paling berpeluang terhadap gangguan keamanan justru saat kampanye menjelang pemilu. Tiga partai saja, katanya telah menimbulkan berbagai kerusuhan, apalagi dengan multipartai.

Oleh karena itu, kata Wisnumurti, harus ada kesepakatan antara elite politik untuk menjamin pemilu sukses. Dengan adanya komitmen itu, dengan sendirinya timbul tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan. “Komitmen itu tidak sekadar dalam retorika, tetapi implementasinya di lapangan,” katanya.

Dalam tingkat operasional kampanye pun, kata dia, harus ada aturan yang disepakati, misalnya mengenai atribut, pengerahan massa, jadwal kampanye. “Yang terpenting, dalam proses menarik simpati masyarakat jangan menggunakan institusi adat. Lembaga adat jangan dipolitisasi. Ini akan mengancam perpecahan di tingkat rumpun. Kalau boleh saya mengimbau, pola pengamanan Kongres PDI lalu bisa dijadikan pilot proyek. Artinya, dalam kampanye nanti, masing-masing desa adat mengerahkan pekalang untuk ikut membantu menjaga keamanan wilayahnya,” kata lelaki berkumis tebal ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, sudah saatnya kita harus melakukan dialog yang intens yang melibatkan semua pihak untuk menyatukan visi dan persepsi.

Tidak bisa Ditawar

Sedangkan pemilu, dalam pandangan Wisnu, tidak boleh ditawar lagi dalam upaya menyusun pemerintahan baru yang dilegitimasi oleh rakyat. Pemilu merupakan sarana perubahan kekuasaan yang selama ini mengalami kemacetan demokrasi. “Kalau pemilu tidak terwujud, apa yang diprediksi selama ini akan terwujud, yakni revolusi sosial. Oleh karena itu, dalam wacana demokrasi, elite partai harus siap kalah,” tandasnya.

Setelah pemilu sukses, dilanjutkan dengan sidang umum (SU). Wisnu menandakan, mereka yang duduk di DPR, seba-

liknya jangan ngotot-ngototan untuk menang-menangan. Yang penting bagaimana mereka tetap berupaya mempertahankan persatuan dan kesatuan, UUD 45 dan Pancasila.

DenPos,

Selama Orba, Rakyat Krisis Figur

Para PNS memilih Megawati sebagai capres lantaran semasa Orde Baru mereka krisis figur panutan. Sepak terjang Mega selama ini bisa disebut mewakili perasaan tertekan sebagian besar bangsa ini.

*P*engamat politik Drs. AAG Oka Wisnumurti, M.Si. menegaskan, selama masa Orde Baru rakyat Indonesia kehilangan figur, dalam artian tokoh panutan yang memiliki konsistensi berpikir, berkata dan berbuat. Masyarakat kehilangan figur yang bisa memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.

Ketika Megawati muncul di kancah politik, tekanan datang bertubi-tubi dari penguasa. Walaupun demikian, Megawati tetap tegar. Justru dalam posisi demikian, putri proklamator RI ini dapat menunjukkan konsistensinya.

Ditambahkan, apa yang dilakukan Mega itu bisa dikatakan sebagai perwakilan dari perasaan tertekan sebagian besar bangsa ini.

Oleh karenanya, momen keterbukaan ini menjadikan Mega sebagai seorang figur yang sangat dibutuhkan oleh banyak pihak, termasuk kalangan PNS. Konsistensi dan kredibilitas seorang figur, sangat tampak pada diri Megawati.

Karena itu, kata Wisnumurti, pilihan PNS dalam *polling* tersebut tidak sekadar euphoria dan ikut-ikutan. Sebab dalam menentukan pilihan terhadap figur, faktor ikut-ikutan sangat kecil pengaruhnya. Justru yang sangat menentukan adalah sejauh mana hati nurani senapas dengan figur tersebut.

Pemilihan Mega ini pun, katanya, bukan karena ia masih ada darah Balinya. Kendali faktor kedekatan emosional itu ada pengaruhnya, tetapi tidak banyak. Mega justru dipilih karena beberapa variabel lain seperti sikap konsistensinya, keberpihakan kepada rakyat dan dianggap simbol yang bisa mewakili banyak orang.

Sementara itu Tjok Atmaja, S.H. mengatakan dipilihnya Mega karena PNS menghendaki nuansa baru. Sebab selama ini mereka diberi pengarahan untuk menentukan figurnya. Jadi PNS memilih Mega karena kesederhanaannya, ketahanannya menghadapi tekanan-tekanan.

Baik Tjok Atmaja maupun Wisnumurti mengatakan, pemilihan figur tidak sekadar trend. Justru Mega dipilih karena ada rasa simpatik dari PNS. Ada semacam rasa sepenanggungan, rasa senasib dan rasa kasihan – karena Mega selalu menjadi korban politik.

Awalnya, kata Wisnumurti, PNS terjebak pada pola monoloyalitas. Namun sesungguhnya monoloyalitas ini menafikan hak-hak politik PNS sebagai warga negara. Ketika keluar PP No.12/199 – PNS netral, seolah-olah mereka baru terlibat dalam berpolitik. Sesungguhnya apa yang dilakukan PNS terdahulu itu merupakan suatu bentuk tekanan. Buktinya dengan dibukanya keran kebebasan, mereka ternyata menyurakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Hal itu terbukti dari hasil *polling*. Sebagian besar PNS menjatuhkan hatinya kepada istri Taufik Kiemas itu. “Ketika berada di bawah tekanan, mereka tampak loyal karena dibuat, sekarang tidak lagi. Jadi, semasa era Orba ketertekanan itu tidak hanya dialami orang-orang kecil, tetapi juga kalangan birokrasi,” katanya.

Diunggulkannya kembali mantan wakil presiden Try Sutrisno, sebagai capres pasca – Habibie, kata Tjok Atmaja dan Wisnumurti, tidak lepas dari variabel tadi. Sama halnya dengan Mega, Try Sutrisno juga sangat konsisten dan tidak memihak salah satu golongan. Sebagai seorang figur yang nasionalis, Try sangat diharapkan sebagai pemimpin bangsa ini. Di samping itu penampilan Try dianggap bisa memberikan kesejukan dan pengayoman terhadap rakyat. Nah, ketika banyak PNS memilih Try, menurut Wisnumurti, hal itu sesuatu yang wajar.

Di sisi lain, masih banyak PNS yang belum menentukan pilihannya, menurut Wisnumurti, karena mereka masih mencari figur yang tepat. Selain itu mungkin mereka masih dibayangi rasa ketakutan. Bagaimana pun sejarah telah memberikan pelajaran buat PNS. Dan ini masih tetap menjadi trauma yang menakutkan untuk melakukan pilihan berbeda. Mestinya tekanan-tekanan politik semacam ini sudah saatnya dihapus.

Wisnumurti tetap berkeyakinan hasil polling ini akan menjadi kenyataan. Sebab tanda-tanda ke arah itu sangat jelas. “Dari sejak awal saya melihat figur Megawati ini tetap prospektif,” katanya.

DenPos,

DAFTAR BACAAN

- Agung-Putra, Anak Agung Gde dkk. 1999. *Puputan Badung 20 September 1906: Perjuangan Raja dan Rakyat Badung Melawan Kolonisme Belanda*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- _____. 2001, *Perubahan Sosial dan Pertentangan Kasta di Bali Utara*, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Agung, Ide Anak Agung Gde. 1989. *Bali pada Abad XIX*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Alfian (ed). 1988, *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*, Jakarta: PT. Pustaka Grafika Kita.
- Almon, Gabriel A. dan Verba. 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Apter-David, E. 1987. *Politik Modernisasi*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Arikunto, Suharsini. 1989. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara.
- Bagus-Ngurah, I Gusti. 1981. *Kebudayaan Bali*, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Koentjaraningrat, ed), Jakarta: Jambatan.
- _____, *Pembangunan Bali Berwawasan Budaya*, Majalah Ilmiah Universitas Udayana, I (1), hal.1-8.
- _____, Nengah (tt), *Pelampiasan Syahwat Kekusasaan dan Ngutang Gae, Ngalih Gae, Pemaknaan Elite Parpol dan Akar Rumput Terhadap Pesta Demokrasi (Pilkada, Pilgub) di Bali (Dari Denotasi ke Ideologi)*.
- Berger-L., Peter. 1982. *Piramida Korban Manusia*, Jakarta: LP3ES.

- Bernnet, David (ed). *Culture Studies: Pluralism and Theory*, Melbourne, Melbourne University, Literary and Culture Studies. Volume 2.
- Budihardjo, Miriam. 1994. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Burke, Peter. 2001. *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Castles, Lance. 1994. *Pemilu 2004: Dalam Konteks Komparatif dan Historis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Chandoke, Neera. 1995. *State and Civil Society, Exploration in Political Theory*, New Delhi: Sage Publications.
- Culla, Adi Suryadi. 1999. *Masyarakat Madani*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahl-A., Robert. 1992. *Demokrasi dan Peta Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Derrida, Jacques. 2002. *Dekontruksi Spiritual: Merayakan Ragam Wajah Spiritual*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Dhakidae, Daniel. 1985. "Partai Politik Dalam Sistem Kepartaian di Indonesia:", dalam Farchan Bulkin (ed), *Analisis Kekuatan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Eko, Sutoro. 2002. *Transisi Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: APMD Press.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta.
- Escobar, Arturo. 1999. *Mengkonstruksi Alam, Menegakkan Ekologi Politik Pascastruktural* (terjemahan), Wacana Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 1, Vol 1, hal. 59-85.
- Fakih, Mansur. 1996. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- _____. 2003. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faturohman, Dede dan Sobari, Wawan. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fay, Brian. 2002. *Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela.
- Foucault, Michael. 2002. *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Gandhi, Leela. 2001. *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*, Yogyakarta: Qalam.
- Geertz Clifford. 1959. "Form and Variation in Balinese Village Structure" dalam *American Antropologist*, Vol. 61.
- _____. 1972. *Afterword: The Politics of Meaning* dalam Holt, Claire (ed), *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca and London, Cornell University Press.
- _____. 1981. *Abangan, Santri, Prayayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- _____. 1992. *Penjaja dan Raja*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 2000, *Negara Teater*, Yogyakarta, Bentang Budaya.
- Geertz, Hildred (ed), 1991. *State and Society in Bali*, Leiden: KITLV Press.
- Gibbons-T, Michael (ed). 2002. *Tafsir Politik, Telaah Hermeneutis Wacana Sosial-Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Qalam.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selection from Prison Notebooks*, New York: International Publisher.
- Grenz-J., Stanly. 1996. *A Primer on Postmodern, Pengantar untuk Memahami Postmodern* (terjemahan), Yogyakarta: Penerbit Yayasan Andi.

- Hardiman-F, Budi. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Haryatmoko. 2002. *Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan*, Basis, Nomor 01-02, Januari-Februari.
- Hikam-A.S., Muhammad. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES.
- Huntington-Samuel, P. 2003. *Tertib Politik, Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hoogerwerf. A. 1985. *Politikologi*, Jakarta: PT. Erlangga.
- Hendarto, Heru. 1993. *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci, dalam Diskursus Kemasyarakatan*, Tim Redaksi Driyarkara, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Johnson, Doyle, Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid 1 dan 2* di Indonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kaplan, David, dan Albert A., Manar. 2001. *Teori Budaya*, Terjemahan Landung Simakipang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kantaprawira, Rusadi. 1983. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru.
- Kartodirdjo, Sartono (ed). 1992. *Pesta Demokrasi di Pedesaan, Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan DIY*, Yogyakarta: Aditya Media.
- _____. 1990. *Kepemimpinan dan Pilkades Dalam Proses Demokratisasi, Prospek Pedesaan 1990*, Yogyakarta: P3PK-UGM.
- Kavanagh, Dennis. 1982. *Kebudayaan Politik*, diterjemahkan oleh Lalilahanoum Hasyim, Jakarta: Bina Aksara.
- Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia.

- Korn-E, V. 1960. *The Village Republic of Tenganan Pegringsingan, Bali Studies in Life, Thought and Ritual* (W.F. Wertheim, ed), W.Van Hoeve Ltd. , The Hague and Bandung.
- Kuntowijoyo, 1990. *Perubahan Sosial dan Budaya Politik: Prospek Demokrasi di Pedesaan*, Majalah Prospek Pedesaan 1990, Yogyakarta: P3PK-UGM.
- Lawson, Stephanie. 1991. *Some Conceptual and Empirical Issues in the Study of Regime Change*, Canberra: Departement of Political and Social Change, The Australian National University.
- Mahfud-MD., Moh. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Martin, Roderick. 1993. *Sosiologi Kekuasaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki (ed). 1987. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE.
- Mas'ood, Mohtar dan Andrews, Colin, Mac. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mas'ood, Mochtar, Nasikun. 1987. *Sosiologi Politik*, Yogyakarta: PAU.
- Moeljarto, T. 1993. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Konsep, Arah, dan Strategi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Moleong-J., Lexy. 1991. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles-B., Matthew. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press.
- Muhhamad, Fadel. 1992. *Peran Sumber Daya Manusia Dalam Dunia Usaha: Membangun Masyarakat Industri Indonesia "Belah Ketupat"*, dalam Sofian Effendi, dkk, (ed), *Membangun Martabat Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muis. A., 2000. *Titian Jalan Demokrasi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- _____. 2003. *Benturan Peradaban, Multikulturalisme dan Fungsi Rasio*, Harian Kompas, Jumat 4 April 2003.

- Nawawi-Handari, H. 1992. *Instrumen Penelitian dalam Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 1995. *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nashir, Haedar. 1999. *Pragmatisme Politik Kaum Elit*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahendra-Oka, A.A. 2001. *Ajaran Hindu tentang Kepemimpinan, Konsep Negara dan Wiweka*, Denpasar: PT. Pustaka Manik Geni.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 2003. *Mewirusahaakan Birokrasi: Reinventing Government*, Jakarta: PPM
- Pabotinggi, Mochtar. 2002. "Memburuknya Krisis Konstitusi Kita: Mengapa UUD 1945 dan Proses Serta Hasil Amendemen Atasnya Tanpa Konstitusionalitas dan Batal demi Nation", dalam Riza Sahbudi dan Nurhasim (eds), *Amendemen Konstitusi dan Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia*, Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Partnership For Governance Reform in Indonesia (PGRI).
- Parimarta, I. Gde. 2002. *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915*, Jakarta: Jambatan.
- Pasek, Ketut, dkk. 1982. *Niti Sastra*, Proyek Pembinaan Mutu Pendidikan Agama Bindu dan Buddha Departemen Agama Republik Indonesia.
- Perlas, Nicolas. 2000. *Shapping Globalization Civil Society, Culture Power and Treefolding*, New York: CADI and Global Network for Social Treefolding.
- Philpott, Simon. 2003. *Meruntuhkan Indonesia, Politik Poskolonial dan Otoriterian*, LKis, Yogyakarta.
- Poloma, Margaret, M. 1992. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press.

- Rao-Krisna, M.V. 2003, *Studies in Kautilya*, Program Megister Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia bekerjasama dengan penerbit Widya Dharma, Denpasar: PT. Mabhakti.
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rivai, Abu, (ed), 1998. *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali*, Jakarta: Depdikbud-Proyek linverntarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Bali.
- Sardar, Ziauddin dan Van Loon, Borin. 2001. Penerjemah Alfadri Aldin, *Mengenal Culture Studies For Beginners*, Bandung, Penerbit Mizan.
- Sim, Stuart. 2002. *Derrida dan Akhir Sejarah*, Yogyakarta: Jendela.
- Sinetar, Marsha dalam Timpa-Dale.A. (ed). 1991. *Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Gramedia Asri Media.
- Sorensen, George. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subangun, Emmanuel. 1999. *Politik Anti Kekerasan Pasca Pemilu 1999*, Yogyakarta, Yayasan Alocita.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widayasarana.
- Suryaningati, Abdi (ed). 2002. *Menilai Tingkat Kesehatan Masyarakat Sipil*, Jakarta: YAPPIKA.
- Susanto-SJ., Budi. (ed). 2003. *Politik dan Poskolonialitas di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno-Magnis, Fran. 1998. *Etika Politik – Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia.
- Sorensen, George. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi, Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Swellengrebel, J.L.1969. "Nonconformity in The Balinese Family", dalam Ball, J.Van (ed), *Further Studies in Life, Trough and Ritual*, The Hague, W. Van Hoeven Publishers, Ltd.
- Time-Dale, A. 1991. *Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Gramedia Asri Media.
- Triguna-Yudha, Ida Bagus Gde. 1990. *Munculnya Kelas Baru dan Dewangsanisasi: Transformasi Ekonomi dan Perubahan Sosial di Bali*, Fakultas Panca Sarjana, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ufford-Philip Quarles, Van. 1998. *Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Wanandi, Sofjan. 1992. *Arti Martabat Manusia dan Masyarakat Bagi Dunia Usaha Kini dan Masa Depan*, dalam Sofian Effendi, dkk, (ed), *dalam Membangun Martabat Manusia*, Yogyakarta: Gajah Mada Univesity Press.
- Wertheim-F.W. 1979. *Gelombang Pasang Emansipasi*, (terjemahan Ira Iramanto), Jakarta: Garba Budaya & ISAI (Institut Studi Arus Informasi) didukung oleh KITLV.
- Winanti, Poppy, S. dan Titek, H (ed), tt, *Demokrasi dan Civil Society*, Yogyakarta: IRE Press.
- Wiratmadja-Adia, G.K. 1995. *Kepemimpinan Hindu*, Denpasar: Yayasan Darma Naradha.
- Wisnumuti-Oka, A.A.G. 1996. *Elit Lokal dan Pembangunan di Pedesaan Bali Age dan Bali Dataran*, Yogyakarta: Tesis S2.
- Anonim. 2002. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
- _____. 2003. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.
- Basis. Februari. 2002. *Konfrontasi Foucoult dan Marx*. Majalah Dua Bulanan, Nomor 01-02, Tahun ke 51, Januari-Februari, 2002.

Kompas, Sabtu 15 Maret 2003

Denpasar Post, Selasa 8 Juli 1999

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden

<http://id.wikipedia.org/>

<http://www.wikipedia.indonesia>

<http://www.badungkab.go.id/>

[http://bayuajipramono.blogspot.com/2008/09/konfigurasi-politik-dalam Pemberantasan.html/](http://bayuajipramono.blogspot.com/2008/09/konfigurasi-politik-dalam-Pemberantasan.html/)

INDEKS

A

- A.A. Ngurah Wirawan 193
 AA Alit Putra 178, 179
 AAG Oka Wisnumurti 130, 134, 139,
 142, 145, 148, 151, 156, 159, 161,
 166, 170, 175, 179, 183, 185, 187,
 188, 189, 191, 193, 196, 199, 202,
 204, 207, 211, 213, 215, 219, 221,
 234, 263
 AAI 250
 AAN Made Arwata 195, 185
 AAN Oka Ratmadi 221
 AA Oka Mahendra 195
 Abangan 269
 Abdurrahman Wahid 122
 ABRI 137
 ABS 68
 absurd 14, 19, 26, 76, 81
 Abu Bakar Ba'asyir 39
a buse of power 7
accountable 18, 34
 Aceh 10, 107, 109, 110, 111
actor 72
 adat 43, 49, 117, 119, 132, 164, 177,
 210, 211, 212, 227, 261
 adat dan budaya 43
 ada udang di balik batu 250
ad hoc 7
 Adi Dachrowi 215
 administrasi 53, 56, 87, 203, 221, 222,
 244, 245
 Administrasi Negara 159
 advisor 120
 Advokat 230
 AFP 59
 AFP (Australian Federal Police) 59
 AFTA 124
 agama 21, 40, 41, 60, 84, 105, 107, 108,
 116, 117, 118, 119, 132, 162, 164,
 177, 214, 260
 agenda politik 20, 259
 agregasi 64, 76
 agresi 83
 agresivitas partisipatoris 57
 Agung, Ide Anak Agung Gde 267
 Agung-Putra, Anak Agung Gde dkk. 267
 Agus Indra Udayana 193
 Ajaran Hindu 272
 Akbar 5, 103, 208, 231, 232
 Akbar Tandjung 103, 208, 231, 232
 Akhir Sejarah 273
 Akselerasi politik 2
 aksi terorisme 43, 59, 61
 aktifitas modern 210
 aktivitas politik 71, 135
 aktor politik 25
 aktualisasi diri 11
 akulturasi 99
 akumulasi ketidakpuasan 208
 akumulasi permasalahan 219
 akuntabilitas 4, 41, 56, 57, 58
 akuntabilitas publik 4, 56, 57
 akuntan publik 202
 Al. Subagyo 200
 alat manipulasi 200
 Alfadri Aldin 273
 Alfian (ed) 267
 Alit. K. Kelakan 185
 Alit Kelakan 187, 188
 Almon, Gabriel A. dan Verba 267
 alternatif 103, 104, 124, 136, 153, 225,
 230, 260
 Aman 9, 47, 234
 amanat GBHN 5
 amanat rakyat 3
 amanat reformasi 2, 6, 73
 aman dan *demen* 9
 amandemen 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 24,
 33, 90, 96, 120
 Amandemen Konstitusi 272
 amandemen UUD 1945 20, 21, 24, 90
 Ambon 213
 Amien Rais 20, 21, 122, 125, 127, 214
Amies in the Process of Political Develop-
ment 31

- amoeba 18
an-sich 13
Analisis Data Kualitatif 271
analisis evaluasi 69
analisis kebijakan 52, 53, 69
analisis kebijakan komprehensif 69
Analisis Kekuatan Politik 268
Analisis Teks Media 268
anarkis 42
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 82
Ani Sucipto Kuncorojati 202
antagonistis 83, 93
anti-kemanusiaan 12
anti kekerasan 84
antiperang 82, 85
antithesis 12
aparap keamanan 39, 208, 214, 220, 240, 243, 244
APBD 55, 56, 58
APBN 17, 56
apel bersama 228
A Primer on Postmodern 269
Apter-David, E 267
Arif 183
Arikunto, Suharsini 267
arisan politik 24, 25
arogansi 72, 205
arogansi kekuasaan 72
Arya Suharja 193
AS 32, 33, 34, 39, 78, 82, 83, 84
asal bapak senang 68
aset nasional 72, 126
aset negara 127
Ashram Bali Gandhi Vidyapith 193
Asia 230
asimilasi 99
aspiratif 22, 33, 101, 153
Asramagate 18
Asrama Militer 112
asumsi 19, 25, 40, 97, 259
Atmaja 189, 215, 231, 241, 246, 247, 248, 259, 264, 265
atraktif 250
atribut parpol 209, 215, 216
autokritik 117
awig-awig 212
- B**
Ba'asyir 39, 40, 41
Badan Pekerja 33, 121, 122
Badung 112, 115, 253, 255, 256, 257, 258
badut politik 182
Baghdad 82
Bagian Humas 253, 258
Bagus-Ngurah, I Gusti 267
Bahan Bakar Minyak 125
balas dendam 171, 219
Bali 5, 9, 12, 16, 19, 23, 27, 31, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 78, 81, 84, 85, 89, 98, 106, 111, 115, 118, 119, 123, 128, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 159, 160, 164, 166, 168, 169, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 249, 250, 252, 255, 257, 258, 259, 260
Bali Age 274
Bali aman 39
Bali Dataran 274
Balinese Village Structure 269
Bali pada Abad XIX 267
Bali Utara 267
Bangkitkan Jati Diri 43
bangsa 6, 8, 10, 11, 12, 16, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 33, 36, 40, 60, 72, 85, 90, 93, 94, 106, 107, 108, 110, 162, 183, 185, 187, 200, 213, 214, 219, 230, 259, 263, 265
bangsa Indonesia 22, 90, 108, 110, 183, 185, 230, 259
bangsa majemuk 11
Banjar 215, 216
Banjar Jawa 215
banpres 25
Bantuan Pemerintah 63
Banyuwangi 213
Bappenas 232
barang bukti 60
bargaining 18, 27, 63, 66, 68, 106, 137, 154

bargaining politik 66, 154
bargaining position 18, 27, 68, 154
bargaining power 106, 154
basic bisnis 126
basic needs 47
 basis ekonomi 124
 basis ideologi 24, 135
 batas wilayah 244
 BBM 72, 125
bebotoh 117, 118, 119
 Bedugul 232
 Belah Ketupat 271
 bendera 10, 80, 136, 148, 150, 154, 206, 207, 208, 209, 228, 245
 Benturan Peradaban 271
 beraktivitas 47
 berdikari 187, 188
 berekspresi 11, 47
 bergengsi 30, 60
 Berger-L 267
 berkolaborasi 77
 bermetamorfosis 61
 Bernnet, David (ed) 268
 bersikap netral 202
 bersinergi 93
 Bhinneka Tunggal Ika 107, 108
 birokrasi 67, 68, 69, 70, 132, 136, 137, 211, 217, 257, 264
 birokrasi jenggot 68
 BJ Habibie 137, 232
 blunder 15, 38
 Boedi Oetomo 108
 bom waktu 244
 boomerang 18, 236
 BP 121, 122, 180, 189, 215, 248
 BPPN 125
 Br. Jawa 216
 Br. Pemingin 175
 Br. Pengastian 175
 brande image 48
brand image 48
brand name 43
 brutal dan biadab 36, 37
 BTDC 175
 budaya parokial 183
 Budaya penegakan etika 4
 Budaya Politik 199, 267, 271, 310
 budaya terabas 118
 Budi Adnyana 217
 Budihardjo, Miriam 268

buffer-zone 45
 built up 35
 Buleleng 14, 215, 216
Buloggate II 2, 4, 5, 14
 Bulog 3,5
 bumerang 153
 bumi Indonesia 61
 BUMN 125, 127, 174, 232
 Bung Karno 187, 188
 bunglon politik 183
 bupati 14, 68, 70, 88, 100, 105, 132, 247, 254, 257, 258
 Bupati Gianyar 246, 247, 248
 Burke, Peter 268

C

calon jadi 100, 131
 calon presiden 97, 103, 105, 137
 Castles, Lance 268
 Chandoke, Neera 268
character and nation building 108
 chauvinistik 107
check and balances 8
 Chusmeru 201, 253, 254, 256, 257
 citra legislatif 143
 citra partai 80, 206
Civil Society 268, 270, 272, 274
clean and good governance 3
clean governance 56
coffee morning 148, 149, 222, 223
 Cok Sri Narendra 197
 kolektive-concociusness 12
 collective consciousness 108
 competable 34
Conceptual and Empirical Issues 271
concern 2, 15, 57
contestable 23
counter-produktive 42
credible 199
 Culla, Adi Suryadi 268
cultur bound 34
Culture and Politics in Indonesia 269
Culture Power 272
Culture Power and Treefalding 272
Culture Studies For Beginners 273

D

Dachrowi 215
 daerah Tk II 247
 daftar caleg 131, 234

- daftar calon sementara 221, 234
daftar pemilih 87
Dahl-A., Robert 268
DAK 55
Dana Alokasi Khusus (DAK) 55
Dana Alokasi Umum (DAU) 55
DAU 55
Dewangsanisasi 274
DCS 221, 222, 234
deadline 110
debat cagub 190, 191
debat kusir 57
debat publik 56, 57, 58, 127
defisit 56, 180
defisit anggaran 56
degradasi 5, 53
dekonstruksi 8
Dekonstruksi Spiritual 268
demen 9, 76
demokrasi 9, 14, 15, 16, 22, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 57, 63, 73, 74, 76, 79, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 104, 105, 106, 130, 132, 142, 149, 151, 153, 171, 172, 183, 200, 207, 210, 213, 215, 216, 218, 220, 261, 267, 268, 270, 271, 273, 274, 312, 323, 325, 326
Demokrasi dan *Civil Society* 270, 274
Demokrasi dan Demokratisasi 273
Demokrasi dan Peta Pengkritiknya 268
demokratisasi 15, 22, 25, 63, 64, 65, 90, 113, 137, 161
demokratisasi politik 65
demokrat pejuang 74
Denpasar 60, 130, 138, 142, 143, 165, 175, 177, 178, 180, 185, 187, 189, 191, 193, 197, 200, 206, 207, 214, 218, 223, 232, 239, 241
Departemen Kehakiman dan HAM 87, 92
Deppen 254, 257
Derrida, Jacques 268
desa adat 49, 177, 210, 211, 212, 261
desentralisasi 12
desiminasi 57, 92
destruktif 52, 148
developmentalism 43, 109
devergensi 63
Dewa Atmaja 231, 259
Dewa Gede Atmaja 215, 231
Dewa Ketut Maardiana 211
Dewa Made Beratha 195
Dewa Ngurah Swasta 200
Dewan keblinger 257
Dewan Perwakilan Daerah 86
Dhakidae, Daniel 268
dharma 259, 260
Dharma Setiawan 175
diciduk 59
dikotomis 83
dilikuidasi 254, 256, 257, 258
Dimiyati Hartono 80
Dinamika 13, 63
Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga 253
Dinas PU 253
diplomasi 26, 83
direinterpretasi dan direkontekstualisasi-kan 211
Direktur Eksekutif KIPP Daerah Bali 217
Dirjen Anggaran 92
dirkriminatif 97
disharmoni 12
disharmonisasi 14
disiplin 50, 80
dislokasi politik 34
disparitas 7, 43
disparitas ekonomi 43
distorsi sosial- budaya 43
distribusi 84, 124
distribution of function 12
distribution of power 12, 70
distrik 28, 34, 86, 131
Div. Adat dan Budaya FIP2B 211
divestasi 126
divestasi saham 126
dominasi eksekutif 7
DPD 86, 90, 95, 137, 138, 180, 196, 232
DPR 2, 3, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 64, 75, 76, 86, 90, 95, 96, 103, 104, 125, 139, 140, 197, 260, 261
DPRD 53, 56, 64, 67, 76, 86, 95, 112, 115, 189, 191, 192, 197, 198, 222, 234, 246, 248, 253, 255, 256, 257, 258
DPRD Badung 112, 253, 255, 256, 258
DPRD Bali 189, 191, 192
DPRD I 86, 198, 222, 234
DPRD II 86
DPR RI 75, 139, 140
Dr. Nasikun 58

dukungan moral 2, 61
 Dunia Usaha 271, 274
 Dunia yang Sedang Berubah 273
 duri dalam daging 110
 Dusta 116
 dwi partai 34

E

Edi Sudrajat 153
 efektif 18
 efektivitas 32, 66, 67, 69, 149, 220
 efisien 18
 Eko, Sutoro 268
 ekologi 113
 eksekutif 7, 17, 18, 74, 120, 184, 197,
 198, 247, 248
 ekskalasi 89
 eksklusivisme 205
 eksodus massa 227
 eksploitasi 11, 45, 177
 Eksponen 183
 ekstensi 36, 66, 253
 ekstra parlementer 197, 198
electoral treshold 28, 29, 77
 elitis 25, 106, 130
 Elit Lokal 274
 embargo 82
emergency 37, 44, 224, 226
emergency action 37
emergency rescue 44
 enabler 91, 115
 energi ekstra 78
entry point 7
 era informasi 126
 era kompetisi 124
 era multi partai 219
 era reformasi 200, 207
 Eriyanto 268
 Eros Djarot 80
 Escobar, Arturo 268
 esensi otonomi 257
 etika 4, 34, 58, 88, 93, 101, 137, 142,
 156, 157, 158, 163, 199, 200, 205
 etika politik 34, 93, 156, 157, 158, 163,
 199, 205, 273, 328
 etno-nasionalisme 14
 euphoria 210, 254, 264
 euphoria reformasi dan demokrasi 210
 evaluasi 45, 67, 69, 79, 240
 evaluasi kampanye 240

F

F-PP DPRD Bali 191
fair 21, 132, 136
fair play 132
fait accompli 15
 Fakhri, Mansur 268
 Faksas Unud 182
 fakta sosial 11, 37, 83
 fakta sosiologis 108
 faktor ideologis 77
 faktor struktural 11
 Fakultas 159, 182, 193
 Fakultas Hukum Unud 182
 Fakultas Sastra Unud 182, 193
 Farchan Bulkin (ed) 268
 fasilitator 91
 fasilitas negara 28, 156
 fasilitator 28, 66, 211
 fasilitator dan *service provider* 211
 fatalistik 52
 Faturohman, Dede dan Sobari, Wawan
 269
 Fay, Brian 269
 fenomena historis 109
 fenomena konflik 11
 Figur 137, 195, 213, 263
 figur calon 137, 153
 figure 101
 film India 117
 filosofi 97
 Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer 269
 FIP2B 205, 211
fit and profer test 88
 Fluktuasi 84
folecy formulation 53
 fondasi konstitusional 122
 Forkom Antarpol 205, 214, 215, 222
 formal 26, 38, 48, 53, 76, 130, 132, 143,
 204, 260
 formalisme politik 76
 Forum Independen Pemantau Pemba-
 ngunan Bali 241
 forum komunikasi antar umat beragama
 220
 Forum Pemerhati Hindu Dharma Indo-
 nesia 200
 Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu
 Dharma (FPMHD) 240
 Foucault, Michael 269
founding fathers 6, 79, 108

FPHDI 200
FPMHD 240
fragmentasi 20
fragmentasi politik 20
fraksi 2, 8, 17, 121, 260
frame work 93
frustasi politik 172
fungsi kontrol 197, 198
Fungsi Rasio 271
Futurolog 124

G

GAM 10, 107, 109, 110, 111
Gandhi, Leela 269
ganjaran hukum 60
gap politik 154
gastarlih 224
gaya berpolitik 131
gaya Orde Baru 207
Gede Marhaendra Wija Atmaja 189, 241
Gede Nurjaya 257
Gede T. Bhaktiyasa 232
Geertz, Hildred (ed) 269
Geertz Clifford 269
Gelombang Pasang Emansipasi 274
generasi muda 169, 183
George Bush 83
George W. Bush 82, 83
Gerakan Aceh Merdeka 109, 110, 111
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 185, 187
gerakan massa 2, 243
Gerakan Nurani Parlemen 8
gerakan reformasi 73, 147, 183, 184
gerakan terorisme 36, 61
gerilya politik 105
Gianyar 246, 247, 248
Gibbons-T, Michael (ed) 269
globalisasi 106, 211
GMNI 185, 187
Golkar 17, 100, 103, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 148, 149, 152, 153, 159, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 204, 206, 207, 208, 222, 230, 231, 232, 236, 240, 243, 245, 260
golput 175
Gong perdamaian 84
good governance 3, 56
Gramsci, Antonio 269

grass root 171
Grenz-J., Stanly 269
Gubernur 67, 68, 69, 70, 88, 100, 105, 132, 189, 190, 191, 195, 222
Gubernur Bali 222
gugatan politik 161, 163
Gus Dur 19, 26, 33, 206, 214, 232

H

H. Effendi Jusuf 134
H. Sarijanto 244
Habibie 33, 137, 186, 232, 265
Habibie Economic 186
hakim 62
hak keadilan 61
hak politik 105, 131, 264
HAM 7, 37, 72, 87, 92, 220
Hamzah Haz 122
Hardiman-F, Budi 270
hari kelahiran Bung Karno 187
harta 183, 184
Haryanto Taslam 214
Haryatmoko 270
Hassan Wirajuda 59
hati nurati 3
hedonisme 118
Hendarto, Heru 270
Hermeneutis 269
hibah 56
Hidayat Nurwahid 21
high politics 15, 92
Hikam-A.S., Muhammad 270
Hindu 177, 178, 179, 180, 181, 193, 200, 240
hirarchial 68
Hitler 231
HMJ 182
homofili 172
homogenitas 98
Hoogerwerf. A 270
horizontal 32, 68, 73, 149
HS Abdul Wahab 227
Hubungan Sosial 267
hukum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 28, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 50, 60, 61, 72, 73, 75, 80, 81, 87, 88, 98, 104, 114, 117, 119, 126, 161, 182, 189, 193, 200, 205, 208, 215, 216, 219, 220, 231, 233, 241, 242, 243, 244, 249, 250, 251, 260

human development indeks 67
 humanis 41
 Humas BTDC 175
 Huntington-Samuel, P 270

I

IB Adnyana Manuaba 195
 IB Ardana 195
 IBGA Ladip 195
 IBG Wiyana 244
 IB Indugosa 195
 IB Pangjaya 212
 IBP Sarga 195
 IBP Wesnawa 196
 IB Yudha Triguna 179, 180, 193
 Ida Bagus Yudha Triguna 178, 196
 Ida Tjokorda Pemecutan 207
 idealisme profesional 64
 Ideologi 28
 ideologi politik 21, 63, 74, 125
 ideologis 21, 23, 74, 77, 80, 101
 I Dewa Gede Atmaja 231
 IDG Oka 195
 IDG Palguna 193
 IDG Windhu Sancaya 179
 IGB Alit Putra 195
 I Gde Pitana 210
 I Gede Koyan Eka Putra 180
 I Gede Marhaendra Wija Atmaja 189
 I Gede Parimartha 182
 I Gede Sumantara Adipranata 237
 IGM Mantera 195
 IGM Putera Astaman 195
 IGM Sudiarta 195
 I Gusti Ngurah Oka 212
 linverntarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Bali 273
 ijazah 235
 I Ketut Ngastawa 196
 I Ketut Nurja 185
 IKG Dharmaputra 179
 IK Ngastawa 193
 Ilmu Politik 268, 269, 272, 273
 I Made Suwindha 195
 I Made Widnyana 212
image 44, 48, 60, 89, 101, 253, 254, 257
image positif 253, 254
 imajinasi 61
 imitasi 99
 imperior 44

Implementasi Program 274
 implementatif 45
 implisit 21, 36, 81, 137, 207
 indikasi 135, 245, 246
 indikator 3, 91, 136, 137
 individual 47, 210
 individualis 115
 Indonesia 5, 6, 9, 11, 12, 22, 33, 34, 37, 39, 43, 59, 60, 61, 64, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 84, 90, 95, 96, 103, 107, 108, 110, 152, 159, 162, 164, 167, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 193, 200, 202, 227, 230, 233, 242, 259, 263
 Indosat 126, 127
 I Nengah Dasi Astawa 241
 I Nengah Sudarma 181
 infrastruktur 22, 34, 78, 144
 infrastruktur politik 22, 144
 injury time 24, 26
 inkogruensi 53
 inkonsistensi 21, 96, 119, 225
 inovatif 184
 insani 53
 inspirasi 30
 instabilitas 40
 institusi 47, 48, 49, 56, 64, 86, 87, 93, 101, 114, 115, 120, 143, 261
 institusi adat 261
 institusional 88, 91
 institusional *reform* 91
 instrinsik 47
 instruksional 254, 257
 Instrumen Penelitian 272
 instusi hukum 60
 integrasi 68, 109
 integritas 12, 13, 16, 87, 202
 Intensitas 46, 47
 interaksi 47, 115, 117, 124
 internal partai 71, 79, 93
 internasional 10, 43, 49, 50, 59, 60, 84, 124
 internasionalisasi 211
 internet 256
 interpelasi 17, 18, 20, 25
 interpretasi 7, 14, 28, 65, 70
 intervensi 82, 212
 intervensi pemerintah 212
 intervensi politik 82
 intimidasi 88, 93, 208

intimidatif 254, 257
introspeksi 16, 43, 74, 81, 206
intruksi 14
investasi politik 18, 71
investigasi Tim Yudistira 245
I Nyoman Erawan 212
I Nyoman Partha 198
I Nyoman Sirtha 212
I Nyoman Suwandha 195
I Nyoman Wiraatmaja 212
iptek 253, 256
I Putu Alit Bagiasna 193
I Putu Gede Ary Sutha 195
I Putu Gede Suwitha 207
I Putu Gelgel 178
Ira Iramanto 274
Irak 82, 84
Islam 20, 21, 22, 25, 84, 213
Islam garis keras 84
I Wayan Bawa 193
I Wayan Nuada 255

J

J. Roberth Khuana 250
Jajak Pendapat Peradah 193, 195
Jalur Gaza 84
jalur hukum 208
jaminan politik 122
Jaringan Perguruan Tinggi Pemantau
Pemilu 202
Jaring Pengaman Sosial 232
jastifikasi 5, 14, 109
Jati Diri 43, 79
Jawa 61, 102, 134, 139, 215, 216
Jaya Sabha 222
Jaya Warsa Wardana 227
Jean Jaques Rousseau 13
Jember 179
jengah 61
Jepang 26, 78
Johanes Usfunan 244, 245
John Naisbitt 124
Johnson, Doyle, Paul 270
JPS 232
JPTPP 202, 203
Jujur dan Adil 199
Juklak 88, 215
Juklak MA 215
Juknis 88
Jurgen Habernas 270

jujur bicara bupati 254

K

kabupaten 53, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 88,
95, 115, 227, 236, 237, 239, 243,
257
kabupaten/kota 67, 68, 69, 70, 75, 76,
88, 95
kader 16, 73, 74, 79, 80, 88, 97, 102,
135, 138, 152, 168, 178, 205, 208,
245, 247
kadis Kebudayaan Bali 212
Kaditsospol 200, 223
kalangan jurnalis 253
kalkulasi politik 4
kambing hitam 12, 39, 40
kampanye dialogis di TVRI 222
kampanye pemilu 92, 236, 239, 240,
241, 242, 260
Kampanye Simpatik 228
kampong internasional 49
kampung dunia 124
kandidat alternatif 104
Kantaprawira, Rusadi 270
Kantor Pengolahan Data Elektronik 258
kapabel 32
kapitalisme global 124, 128
Kaplan, David, dan Albert A., Manar 270
Kapolda 118
karakteristik 6, 11, 108, 109
Karangasem 236, 237, 238, 240, 245
Karo Humas dan Protokol 257
Kartodirdjo, Sartono (ed) 270
Kartosuwiryo 108
kartu kuning 240, 244, 245
kartu kuning plus 244, 245
kartu merah 245
kasus Pupuan 245
kasus Purbalingga 204, 205, 206
kasus Sesetan dan Yeh Malet 240
Kasus Sukasada 216
kata mutiara 54
katup solidaritas 125
kaukus 20, 21, 22, 24, 25
kaukus politik 20, 24, 25
kaum intelektual Bali 233
Kavanagh, Dennis 270
kawah candradimuka 35
keabsahan 75
keadilan 6, 11, 13, 15, 22, 38, 42, 60, 61,

- 65, 72, 126, 140, 200
 keadilan demokrasi 200
 kearifan sosial masyarakat Bali 211
 kebebasan pers 200
 Kebudayaan Bali 212, 267, 273, 307
 Kebudayaan Politik 270
 kebutuhan primer 45
 kedaulatan 7, 8, 9, 33, 89, 105, 120, 187, 200
 kedaulatan rakyat 7, 8, 9, 33, 120
 kedekatan emosional 264
 kehidupan berbangsa dan bernegara 6, 7
 kehidupan pers 200
 kehidupan pers nasional 200
 kehilangan figur 263
 kejam 231
 kekuatan militer 82, 83, 84, 109
 kekuatan pro-reformasi 3
 Kelas Baru 274
 Kelompok Elit 267
 kelompok idealis 144
 kelompok kritikal 37
 kelompok penekan 144, 198
 Kelurahan Banjar Jawa 215
 kemacetan demokrasi 261
 kemajemukan 22
 kemaslahatan 16
 kemelaratan 22, 83
 kemerdekaan 25, 47, 77, 79, 108
 kemiskinan 22, 83
 Kenegaraan Modern 273
 kepastian hukum 6, 9, 39, 75, 205
 kepatuhan 30, 50, 80, 101, 117
 Kepemimpinan 270, 272, 273, 274
 Kepemimpinan dan Pilkadaes 270
 Kepemimpinan Hindu 274
 Kepemimpinan Lokal 274
 kependudukan 53
 kepentingan masyarakat 126, 151, 152, 251, 259
 kepentingan pragmatis 56, 91, 104
 kepentingan publik 16, 66, 79, 104, 152
 kepercayaan 38, 73, 96, 133, 164, 166, 168, 169, 190, 202, 219
 kepolisian 41, 49, 59, 60, 61, 62, 119, 203, 237, 240, 245
 kerja tim 69
 kerusuhan 148, 149, 209, 214, 261
 kesadaran 26, 29, 34, 50, 57, 58, 64, 66, 89, 91, 93, 94, 98, 105, 106, 107, 108, 113, 117, 118, 154, 171, 204, 214, 220, 249
 kesadaran kolektif 93, 94, 105, 106, 107, 108
 kesadaran rasional 34
 Kesatuan Hidup Setempat 273
 Kesehatan Masyarakat Sipil 273
 kesenjangan sosial 188
 kesepakatan tokoh masyarakat 215, 216
 keterbukaan politik 220
 Ketua DPW PPP Bali 228
 Ketua Panwaslu Bali 240, 244
 ketua PPD I Bali 221
 Ketua PPD II Karangasem 237
 Ketut Dwija 187, 188
 Ketut Karya 134, 151
 Ketut Sukardika 195
 Ketut Sundria 195
 Ketut Wirdhana 195
 kinerja pemerintahan 24
 KIPP 203, 217, 230
 KKNK 7, 71, 73, 126, 187
 Klungkung 237, 260
 KNPI 192, 193, 210, 212
 KNPI Bali 192, 193, 210, 212
 Kodam Udayana 112
 Kodya 138, 143, 178, 232, 239, 241
 Koentjaraningrat 267, 270
 kohesi sosial 52
 kolonial 61
 Kolonisme Belanda 267
 kolusi 145, 146, 147, 172, 183, 187, 219
 kolusi politik 172
 Komisi Pemilihan Umum 75, 86
 Komisi PFKKNB-PWI Bali 191
 komitmen 3, 4, 7, 11, 12, 14, 16, 22, 36, 45, 49, 71, 77, 79, 80, 87, 93, 98, 102, 108, 111, 118, 119, 145, 146, 260, 261
 komitmen partai politik 3
 komitmen politik 3, 77
 komparasi 170
 kompartabel 8
 kompleksitas 8, 47, 70, 72, 73, 92, 257
 komprehensif 8, 9, 30, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 69, 70, 119
 komunikasi dan informasi 254
 Komunikasi Integratif 219
 komunikasi politik yang demokratis 201

- komunikasi satu arah 254
kondisi geografis 98
Konflik di Desa Adat 210
konflik internasional 10
konflik laten 74
konflik manifest 108
konflik SARA 200
Konfrontasi Foucoult dan Marx 274
konfrontasi pemikiran 125
konglomerat 126, 183
Kongres I 72
Kongres PDI 261
konsekuensi 28, 29, 68, 86, 117, 124, 125
Konsep Hegemoni Gramsci 270
Konsep Negara 272
konservatif 72
konsistensi 30, 87, 98, 117, 153, 228, 263
konsistensi berpikir, berkata dan berbuat 263
konsolidasi 20, 71, 76, 81, 125, 140, 166, 167, 168
konspiratif 25, 96
konstelasi politik 18, 166
konsistensi 87
konstituen 3, 5, 29, 63, 65, 66, 71, 78, 80, 81
konstitusi modern 22
konstitusional 33, 88, 91, 122, 231
Konstitusionalitas 272
konstitusional *reform* 91
konsumsi 20, 39, 71, 72, 124
konsumsi politik 20, 39, 71
konter-produktif 12, 22, 57, 104
kontrak sosial 80
kontrol sosial 183
kontroversi 28, 199
konvoi 239, 240, 243
kooptasi 138
Koordinator JPTPP Daerah Bali 202
koreksi diri 168
koridor demokrasi 15
Korn-E, V 271
korupsi 4, 5, 80, 145, 146, 183, 187, 219
kota 67, 68, 69, 70, 75, 76, 82, 88, 95, 202
KPDE 253, 258
KPPPS 87
KPU 28, 75, 86, 87, 88, 92, 156, 157, 158, 217, 224, 225, 229, 239, 240, 244, 245
KPU Daerah 87, 88
KPU pusat 87
kredibilitas 3, 5, 41, 66, 103, 157, 158, 217, 235, 263
kredibilitas KPU 217
Kresnadhana 185
kridibel 29
Krisis Konstitusi 272
krisis moneter 84
kristalisasi kekuatan faksi 26
kritisi 193, 197, 198
kroni kapitalisme 186
kualifikasi 57, 70, 87, 88
kualifikasi concern 57
kualitatif 34, 43
kuantitatif 34
kucing dalam karung 29, 33
kultural 48, 80
kultur politik paternalis 106
kunjungan kerja 67, 68, 69
Kunker 67
Kuntowijoyo 271
kuota suara 30, 93, 97, 104
Kupang 213
kuratif 49
kursi presiden 14
Kusuma Wardana 191, 192, 193
Kuwait 82
Kwik Kian Gie 80, 81
- L**
- La Contract Social* 13
Laksamana Sukardi 125
land 53
langkah mundur 253
Lapangan Puputan Renon 228
laten 8, 11, 21, 74, 108
law enforcement 3
Lawson, Stephanie 271
LBH KRI 197
leading sector 49
learning by doing 81
legal drafting 104
legalitas sistem 159
legislasi 53
legislatif 17, 31, 53, 64, 66, 73, 74, 93, 99, 100, 101, 122, 131, 132, 140, 143, 145, 198, 230, 247

- legislative heavy* 64
legitimate 48, 90, 94
legowo 33, 168
lembaga adat 164
lembaga independen pemantau pemilu 203
lembaga pengadilan 59, 60, 61
lembaga swadaya masyarakat 249
lembaga tinggi negara 120, 121
letak geografis 32
Lima M 155
lima perangkat komposit 10
linggih manut sesana 211
lingkungan internal 98
lintas kabupaten 53
logo 135
lokasabha 177, 178, 180, 181
lost paradise 43
low politics 93
LPU 156
LSM 166, 197, 198, 249, 250, 251, 252
luberjurdil 64
Luciyan W Pye 30
lugas 60
Luh Ketut Suryani 195
- M**
- M, Ali Sahib* 228
M. Saudi 227
macan kertas 117
macecingak 69
Machiavelli 14
Made Bandem 195
Made Nariana 200
Made Subrata 130, 139, 161
Made Suwendha 195
mahasiswa 182, 183, 197, 198, 231, 232, 233
Mahendra-Oka, A.A. 272
Mahfud 208
Mahfud-MD 271
Majelis Permusyawaratan Rakyat 120
malancaran 69
Malaysia 78
man 53, 155
manage 46
mandat rakyat 120
Manggis 240, 245
Mangku Pastika 118
manifes 11
manipulasi 16, 131, 200, 232
Marhaenisme 185, 186, 187, 188
marhenis 73
martabat bangsa 60
Martabat Manusia 271, 274
Martabat Manusia dan Masyarakat 274
Martin, Roderick 271
Marzuki (ed) 271
Mas'oeed, Mochtar, Nasikun 271
Mas'oeed, Mohtar dan Andrews, Colin, Mac 271
Masa Depan 159, 185, 210
masa lalu 6, 11, 20, 37, 68, 109, 111, 113, 115, 118, 126, 137, 143, 147, 168, 170, 171, 204
masa transisi 38, 41
Masjid Istiqlal 213
massa 2, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 143, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 163, 175, 199, 205, 206, 208, 219, 220, 227, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 260, 261
masyarakat 9, 11, 16, 21, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 78, 83, 84, 91, 93, 99, 102, 105, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 124, 125, 126, 127, 135, 137, 138, 143, 145, 147, 149, 151, 152, 154, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 178, 188, 190, 191, 199, 200, 203, 205, 207, 209, 211, 214, 215, 216, 219, 220, 230, 231, 232, 234, 235, 240, 242, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 259, 261
Masyarakat Jawa 269
Masyarakat Madani 268
masyarakat religius 60
Masyarakat Sipil 268, 273
material 48, 155, 239
Mayjen TNI IGK Manila 195
mayoritas 18, 19, 64, 97, 102, 107, 121, 126, 132
mayoritas saham 126
mayoritas tunggal 132
media cetak 256
Mega 19, 160, 175, 263, 264, 265

- Megawati 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 33, 39, 72, 80, 81, 103, 122, 160, 175, 176, 206, 214, 263, 265
Megawati Soekarnoputri 103, 122
Memahami *Postmodern* 269
Membangun Budaya Politik Demokratis 199
Membangun Martabat Manusia 271, 274
Membangun Masyarakat Industri 271
memiliki integritas kuat 202
memobilisasi kekuatan rakyat 200
mempolitikkan agama 260
mempolitisasi agama 162, 164
mencuri *start* kampanye 220
Menegakkan Ekologi Politik 268
menegakkan hukum 2, 38
Meneg BUMN 125
mengadili kasus 60
mengagamakan politik 260
menghilangkan keragaman 212
menghipnotis 72
Mengkonstruksi Alam 268
Mengwi 72
menindaklanjuti persengketaan 216
Menko Polkam 37
Menlu 59
Menteri Kehakiman dan HAM 37
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 125
Menuju Masyarakat Komunikatif 270
Meruntuhkan Hegemoni Barat 269
Meruntuhkan Indonesia 272
mesin suara 132
metamorfosis 65, 72
Mewirauahakan Birokrasi 272
Miles-B., Matthew 271
militan 74, 80
militan-ideologis 80
militer 82, 83, 84, 105, 109, 110, 112
minoritas 107
mis-informasi 113
mis-interpretasi 70
mis-komunikasi 113
mismacth 32
mobilisasi pegawai BUMN 232
mobilisasi politik 2
mobil plat merah 232
modern 22, 24, 26, 32, 63, 65, 80, 115, 159, 210, 250
modernitas politik 24
Moeljarto, T 271
Moleong-J., Lexy 271
Momentum 43, 81
momotoh 118
mondial 70
monev 67
money politics 15, 34, 165, 232
monitoring 45, 67, 69
monokultur 109
monoloyalitas 132, 264
monster perang 85
moralitas politik 259
MPLA/BPPLA 211
MPR 6, 7, 21, 33, 64, 95, 120, 121, 122, 127, 200, 218
Muhaji 191
Muhammad, Fadel 271
Muis. A 271
multifaset 40
Multikultur 108
Multikulturalisme dan Fungsi Rasio 271
multipartai 34, 63, 64, 219, 261
multiple identity 211
- N**
NAD 107
naionalis 21
Nanggroe Aceh Darussalam 107
Nasasos 21
Nashir, Haedar 272
nasionalisme 11, 14, 73, 107, 109, 128, 135
nation state 12, 107
Nawawi-Handari, H 272
need accessement 106
need of achievement 90
negara 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 25, 28, 29, 32, 34, 39, 48, 57, 59, 63, 77, 82, 84, 91, 94, 107, 109, 120, 121, 124, 126, 127, 137, 156, 161, 188, 189, 230, 256, 264
negara adidaya 82
Negara Papua 10
Negara Teater 269
nelongso 78
Nengah (tt) 267
Nengah Dasi Astawa 205, 241
neo-nasionalism 107
neo-nasionalisme 11

nepotisme 145, 146, 147, 183, 187, 219, 235
 netralitas 132
new comers 74
Ngalih Gae 267
ngelawang 69
 Ngurah 175, 177, 178, 182, 193, 200, 212, 237, 246
 Ngurah Bagus 177, 178, 182
Ngutang Gae 267
 Nilai-nilai Pancasila 182
 nilai kebersamaan 6, 12, 43, 107, 108
niskala 44
Niti Sastra 272
 NK Mardani Ratta 195
 NKRI 10, 12, 108, 109, 110, 111
 non-partisan 28
non contability 136
Nonconformity in The Balinese Family 274
 nonformal 38
 norma 137
 Nuadha 256, 258
 nurani rakyat 72
 Nusa Dua 175
 Nyoman Mudiayasa 233
 Nyoman Prastika 179
 Nyoman Sutawan 195, 199

O

obat mujarab 127
 objektif 30, 37, 41, 53, 56, 61, 69, 72, 80, 89
 Oka Ratmadi 221, 234, 237
 Oka Wiratma 227, 235
 Oka Wisnumurti 130, 139, 142, 145, 148, 151, 156, 161, 170, 179, 185, 191, 193, 196, 202, 204, 207, 211, 213, 217, 219, 221, 234, 236, 239, 243, 246, 249, 263
 operasi militer 110
 opini 36, 61, 101, 105, 109, 198, 256
 oposisi 81, 172
opportunity 114
 optimal 49, 65, 126, 225, 241, 242
 Orba 132, 197, 198, 207, 208, 263, 264
 Orde Baru 109, 145, 161, 169, 187, 188, 207, 219, 254, 263
 orde baru 100, 170, 249, 257
 Orde Reformasi 145, 219

orde reformasi 100, 183, 231
 Organisasi Papua Merdeka 109
 orientasi politik 25, 76
 Osborne, David dan Ted Gaebler 272
 otokritik 80
 otonomi 11, 12, 14, 15, 53, 70, 73, 109, 156, 254, 256, 257
 otonomi daerah 12, 14, 15, 53, 70, 73, 109, 256
 otoriter 109, 171, 200, 231
out come 67
out put 67
overlapping 53

P

pemasungan hak demokrasi 215
 P3K 212
 Pabotinggi, Mochtar 272
 PAD 55
 PAH MPR 7
 Pakar komunikasi 253, 256
pakembar 117
 pakem per-*tajen-an* 118
 paket unggulan 14
 Pancasila 22, 182, 187, 188, 200, 262
 Pande Made Latra 195
 Pande Maliana 192
 Pande Malihana 193
 pangkalan militer 82
 Panitia Ad Hoc 33
 Pansus 2, 4, 5, 14, 103, 255, 258
 Pansus Kepegawaian 255, 258
 Pansus Kepegawaian DPRD Badung 255, 258
 Panwaslu 215, 240, 243, 244, 245
 Panwaslu II Buleleng 215
 Paradigma 68, 200
 paradigma baru 68, 69, 135, 136, 137, 168
 paradoksial 54
 Pariasta Westra 195
 Parimartha, I. Gde 272
 pariwisata 43, 44, 45, 51, 53, 84, 164
 pariwisata Bali 43, 51
 Parpol 28, 31, 64, 65, 76, 93, 145, 209, 215, 222, 225, 226, 241, 243
 parpol 19, 24, 28, 29, 30, 34, 63, 64, 65, 66, 71, 76, 77, 78, 88, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 105, 122, 130, 131, 135, 137, 142, 144, 145, 146, 147, 149,

- 150, 151, 155, 161, 162, 163, 164,
199, 202, 204, 205, 207, 208, 209,
214, 215, 216, 219, 220, 221, 222,
224, 225, 228, 235, 237, 239, 240,
241, 243, 244, 245, 253, 260
- parsial 52, 53, 69
- Partai Daulat Rakyat 232
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
79
- Partai Fiktif 233
- Partai Indonesia Baru 227
- partai Islam 21, 22
- Partai Keadilan 21
- Partai Murba 221, 222
- Partai Politik 268, 274, 275
- partai politik 2, 3, 5, 19, 21, 22, 24, 28,
64, 75, 76, 77, 78, 81, 87, 88, 89,
91, 96, 97, 99, 101, 104, 122, 136,
152, 156, 162, 163, 167, 170, 199,
204, 220, 240
- partisipasi politik 34, 64
- partisipasi simpatisan 209
- partisipatif 16, 65, 69
- Pasca Pemilu 1999 273
- Pasek, Ketut, dkk 272
- Pasek Diantha 182, 184
- paternalistik 130
- patologi sosial 51, 118
- patriotisme 260
- PAY 222
- PBNU 26
- PDI-P 8, 19, 26, 72, 73, 74, 79, 80, 81,
101, 103, 166, 243, 246, 247, 248
- PDRB 51
- pecalang* 47, 261
- Pecatu 112, 113, 115
- Pedesaan 212, 267, 270, 271, 274, 316
- Pedungan 175
- pejuang demokrasi 73, 74
- pelayanan publik 56
- pelimpahan kewenangan 69
- Pemanasan Politik 120
- pemanasan politik 121
- pembakaran mobil 245
- Pembangunan Bali 45, 52, 53, 241, 267,
304
- Pembangunan di Pedesaan 274
- pembangunan opini 105
- pemberantasan KKN 2, 3, 4
- Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
36
- pembina politik 64, 65
- pembuktian hukum 4, 60
- pemda 115, 258
- pemerintah 3, 4, 11, 12, 20, 28, 29, 36,
37, 38, 39, 46, 49, 55, 56, 57, 59,
61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 109, 115,
116, 117, 118, 119, 125, 126, 127,
132, 155, 158, 162, 171, 178, 179,
184, 199, 200, 201, 205, 211, 212,
221, 224, 227, 231, 233, 250, 251,
254, 257, 260
- pemerintahan 3, 7, 9, 13, 15, 18, 19, 20,
21, 24, 57, 67, 68, 69, 70, 73, 94,
100, 109, 161, 170, 171, 204, 213,
230, 232, 250, 254, 261
- Pemerintahan Daerah 68
- Pemilihan Langsung 32, 189
- Pemilihan Umum 75, 86, 95, 103, 224
- pemilih tradisional 136
- Pemilu 7, 18, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 64, 65, 71, 72, 75, 76, 77,
78, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 100, 103, 104,
121, 122, 130, 131, 133, 134, 135,
139, 140, 149, 152, 154, 156, 159,
160, 166, 167, 168, 172, 174, 175,
197, 199, 200, 202, 203, 204, 205,
210, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
222, 224, 225, 226, 229, 230, 231,
232, 233, 236, 239, 240, 241, 242,
248, 259, 260, 261
- Pemilu Berkualitas 86
- Pemilu Legislatif 95
- Pemilu Multi Partai 210
- Pemkab Badung 112, 115, 253
- Pemkab Gianyar 246, 247
- pemodal asing 126
- Pemuda 177, 180, 181, 189, 193, 210,
254
- pencitraan 101
- pendaftaran pemilih 92, 217, 221, 224
- pendakian *dharma* 260
- Pendapatan Asli Daerah 55
- Pendapatan Daerah Regional Bruto 51
- penegakan hukum 2, 4, 5, 38, 39, 41, 61,
73, 98, 205
- Penelitian Kualitatif 271
- Penelitian Sosial 272
- Pengadilan Negeri 60, 215
- Pengadilan Negeri Denpasar 60
- pengakuan kesalahan 4

- pengamat politik 130, 134, 139, 142,
 145, 148, 156, 166, 170, 185, 197,
 199, 204, 207, 208, 211, 215, 217,
 246, 254, 259
 pengaturan urusan 53, 69
 pengembangan lembaga 246, 247, 248
 pengerahan massa 148, 239, 261
 pengesahan partai politik pemenang 87
 pengesahan suara 87
 Pengetahuan Berparadigma Ganda 273
 pengetahuan politik 98, 165
 penghitungan suara 87, 93, 174, 175
 peningkatan pelayanan 56, 257
 penipuan politik 131, 132
 Penjaja dan Raja 269
 penjajah 108, 111
 penyimpangan aturan kampanye 243
 Peradah 177, 178, 179, 180, 181, 193,
 195, 196
 Perampangan struktur 256
 peran ganda 250
 perang dingin 10
 Perang Teluk 84
 peraturan 31, 65, 184, 217, 220
 Peraturan Pemerintah 36, 57
 Peraturan Pemerintah Pengganti Un-
 dang-Undang 36
 Perbandingan Sistem Politik 271
 percaturan politik 14, 18
 Perdagangan dan Politik di Nusa Teng-
 gara 272
 Perda No 6 / 1986 212
 perdata 38
 performance 14, 63
 Pergeseran Kepentingan Massa 270
 Pergolakan Ideologi 268
 Perhimpunan Pemuda Hindu 180, 193
 perikemanusiaan 60
 perilaku negatif 169
 Perjuangan 10, 74, 79, 95, 134, 135,
 139, 140, 141, 143, 148, 149, 166,
 167, 168, 170, 171, 185, 204, 205,
 206, 208, 214, 222, 236, 239, 240,
 243, 245, 253, 257
 Perjuangan Raja dan Rakyat Badung 267
 Perlas, Nicolas 272
 permainan politik 5, 88, 136
 permisif 53
 perobekan bendera 245
 Perpu 36, 37, 40, 61
 Perpu Antiterorisme 36, 61
 persatuan dan kesatuan 108, 109, 213,
 216, 262
 persoalan publik 104, 113
 perspektif partisipasi 57
 persuasif 119, 149, 150
 Pertentangan Kasta 267
 pertikaian politik 23
 pertimbangan etika 156
 pertobatan 4
 pertumbuhan ekonomi 170
 Perubahan Sosial 267, 271, 274, 326
 Perubahan Sosial dan Budaya Politik 271
 Perubahan Sosial di Bali 274
 perubahan yang signifikan 197
 perumusan kebijakan 53
 perusahaan multinasional 257
 pesawat tempur AS 82
 peserta pemilu 30, 75, 76, 77, 87, 91,
 92, 93, 224, 240
 persoalan laten 108
 Pesta Demokrasi 267, 270
 Pesta Demokrasi di Pedesaan 270
 pesta pora politik 220
 petani 44, 61, 188
 petugas pendaftaran pemilih 224
 PHDI 178
 Philpott, Simon 272
 pidana 38, 61
 pidato laporan presiden 120, 121
 pihak asing 126, 127
 Pilgub 267
 Pilkada 267
 pilot proyek 261
 pimpinan nasional 29, 33
 pionir 33
 Piramida Korban Manusia 267
 PKB 95
 PKM Akademika 159
platform 135, 136, 137, 152, 154, 222
 PLN 253, 256
 PLTP 232
Pluralism and Theory 268
 pluralistis 6, 22, 63
 PN 60, 215
 PNI Supeni 242
 PNS 29, 132, 217, 260, 263, 264, 265
policy evaluation 52
policy formulation 52
policy implementation 52

- polecy introspective* 52, 69
polecy retrospective 52, 53, 69
polemik 112, 114
political coalition 63
political destructive 93
political interest 104
political will 5, 30, 36, 61
politicking 104
politik 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 53, 56, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 114, 115, 121, 122, 125, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 182, 183, 185, 187, 188, 189, 191, 197, 199, 200, 201, 204, 205, 207, 208, 211, 213, 214, 215, 217, 219, 220, 226, 236, 239, 240, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 254, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 265
politik aji mumpung 101
Politik Aliran 20
Politik Anti Kekerasan 273
Politik balas dendam 219
politik dagang sapi 14, 27, 96
Politik dan Poskolonialitas 273
politik diplomasi 83
Politik Hukum di Indonesia 271
politik lokal 13, 14
politik modern 24, 26
Politik Modernisasi 267
Politikologi 270
politik parsitipatif 25
Politik Pembangunan 271
Politik Poskolonial dan Otoriterian 272
politisi 3, 4, 26, 105, 125, 197
polling 159, 170, 264, 265
polling pemilu 159
Poloma, Margaret, M 272
Polri 17, 18, 19, 28, 29, 59
poros tengah 20
posisi tawar 137, 161, 210
positioning 115
Poskolonial 269, 272
postulat 7
potensi daerah 55
potologi 44
potong kompas 118
PP 88, 132, 187, 191, 264
PPD 148, 150, 216, 221, 222, 227, 228, 229, 233, 234, 235, 236, 237, 239
PPD I 148, 150, 221, 227, 229, 233, 234, 235, 236, 237, 239
PPD II 216, 222, 227, 228, 229, 236, 237
PPD II Karangasem 236, 237
PPK 217
PP No.12/199 – PNS netral 264
PPP 19, 159, 228, 260
PPS 217
PR 253
pragmatis 8, 13, 16, 22, 49, 56, 74, 81, 91, 102, 104, 114, 118, 170, 171
pragmatis-materialistik 118
Pragmatisme Politik Kaum Elit 272
pragmentasi ideologis 21
prahara 14, 259
prahara atau *chaos* 259
prajurit 113
prajuru 210
praktisi hukum 250
prasarana 50
Prayayi 269
PRD 222
preambule 7
prediksi politik 136
premanisme 204
Presidium 185
Presiden 6, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 39, 86, 87, 90, 95, 96, 97, 100, 103, 105, 106, 120, 121, 122, 137, 157, 158, 265
prespority approach 49
Pressure group 198
preventif 49
Prinsip-prinsip Moral 273
Privatisasi 127
pro 2, 3, 36, 142, 143, 160, 175
problematika 43, 93
problem makro 6, 7
problem solving 53
produksi 124

- produktif 12, 18, 58, 104
 profesional 39, 41, 48, 49, 60, 61, 64,
 127, 202, 257
 progresif-revolusioner 71
 program pembangunan 56, 67, 68
 Program Studi D-4 Pariwisata Unud 201
 proklamasi 22
 Proklamasi 17 Agustus 1945 108
 proklamator RI 263
 proporsional 17, 41, 64, 86, 88, 90, 131,
 158
 proporsional plus 64
 proporsional terbuka 90
 proporsional tertutup 86
 prosedural 49
 proses hukum 60, 61, 126
 proses kontinuitas 69
 proses sejarah 108
 Prospek Demokrasi di Pedesaan 271
 pro status quo 142, 143, 232
 provokator 200, 205, 208, 209
 proyek PLTP Bedugul 232
 psikologi sosial 113
public 2, 57, 64, 104, 253
public affair 104
public concern 2
public interest 104
public relation 253
 Pulau Serangan 232
 Pupuan 245
 Puputan Badung 20 September 1906
 267
 Purbalingga 204, 205, 206
 Pusat Pengkajian Pedesaan dan Kawasan
 212
 Puspayoga 185, 186
 Putu Suasta 177, 248
- R**
- R & D 126
 Ragam Wajah Spiritual 268
 Rahardi Ramelan 5
 Rakernas 79
 ramah tamah 60
rame ing gawe sepi ing pamrih 74
 Rancangan Undang-Undang 75, 95
 Rao-Krisna, M.V. 273
 Rapat Kerja Nasional 79
 rapat konsultasi 121, 122
 RAPBD 56
 Rasa Aman 47
 rasa nasionalisme 128
 rasional pragmatis 80
 Ratu Adil 61
 reaktif emosional 80
 Realita politik 16, 95, 102
 realita sosiologis 117, 118
recovery 44, 46, 52
 Refleksi 125
 reformasi 2, 3, 4, 6, 15, 73, 81, 100, 113,
 143, 146, 147, 169, 170, 182, 183,
 184, 185, 187, 200, 207, 210, 230,
 231, 232
 Reformis 142
Regime Change 271
 regulasi 104, 125
 regulator 124
reinventing governance 68, 73
reinventing government 46, 272
 Rejuvenasi 20, 23
 rekayasa 15, 68, 160, 185, 189, 190
 reklaması Pulau Serangan 232
 rekonstruksi 12
 release and discharge 126
 Relevan 185
 relevansi 66
 Relokasi 112
 Rencana Tata Ruang Wilayah 114
 reorientasi 45
 replikatif 73
 representatif 32, 190
representative 29, 34
 represif 12, 48, 49, 119
 Republik Indonesia 9, 12, 22, 108
 Republik Maluku Selatan 10
 reputasi 39, 60
 resentralisasi 12
 residu politik 122
 resistensi 19
 Resolusi 114
Respons 49, 52
 tanggungjawab 58
 restrukturisasi 253
 retorika 261
 retribusi 55
 retrospeksi 45, 81
 retrospektif 8, 51, 54
review 52, 53
 Revitalisasi Pemikiran Bung Karno 187
 revolusi sosial 232, 261

rezeki 66
rezim 82, 100, 169, 182, 197, 198
RI 75, 110, 139, 140, 263
Ritzer, George 273
Rivai, Abu, (ed) 273
rivalitas 19, 122
Riza Sahbudi dan Nurhasim (eds) 272
RMS 108
Roberth 250, 251
roh institusi 53
RTRW Bali 45, 53
ruang partisipatoris 105
rudal 82
Rudini 156
rule of the game 104
RUTR 114, 115
RUU 28, 29, 75, 95, 97, 103, 104, 260, 261
RUU Politik dan Pemilu 261
rwa bhineda 83

S

Saddam Hussein 82
Sahib 228
sajam 244
Salah Paham 247
Sambas 213
Sangkuni 118
santiaji 174, 224
santiaji pemilu 174
Santri 269
Sanur 175
sapatisme 107
SARA 10, 11, 200
sarana 13, 37, 50, 112, 115, 224, 225, 261
sarana publik 112
Sardar, Ziauddin dan Van Loon, Borin 273
Sari Club 48
Sarijanto 240, 244, 245
Sari Warta Boga 193
saru gremeng 257
savety needs 47
saye 117
SBSI 197
SDM 50, 54, 247
sebaran penduduk 32, 98
security approach 49
segmentasi politik 77

Sejarah 182, 268, 273
sekaa demen 76
Sekjen Forkom Parpol Plus 241
Sekretaris Jurusan 159
sektor bantuan 56
sektor pariwisata 44, 51, 84
sektor strategis 126
sektor usaha 46
sekutu 82
Sekwilda 195
Selection from Prison Notebooks 269
self confident 64
semangat rivalitas 122
semidistrik 34
Senat Mahasiswa UNHI 193
Senat Mahasiswa Warmadewa 193
senjata canggih 83
senjata makan tuan 207
senjata tajam 239, 240, 243, 244
sense of crisis 125
sensitivitas 53, 128
sensitivitas emosional 128
sentimen ideologis 21
sentralisasi 12
sentralistik 11, 68, 109
sentrifugal 10, 317
separatisme 10, 11, 12, 14, 109, 111, 317
Sepi Ing Pamrih 71
Serambi Mekah 111
seremonial 72
service provider 211
Sesetan 240, 245
Shapping Globalization 272
shareholder 91, 115
sharing komunikasi 214
show force 2, 72
Sidang Istimewa 122
sidang pleno DPR 2
sidang tahunan 20, 24, 33, 120, 122
Sidang Tahunan MPR 33
Sidang Umum MPR 95
signifikan 3, 22, 43, 47, 51, 56, 79, 92, 99, 101, 114, 127, 197
Sikap bertobat 4
Sikap permisif 53
silaturahmi 20
siluman politik 182
Sim, Stuart 273
simbiosis mutualistik 46

- simbol Hindu 178
 simbolis-interaksionis 3
 simbolis mutualistik 115
 similar 77
 simpati konstituen 71
 sinergis 50
 sinergisme 22, 63
 sinergitas konstituen 80
 Sinetar, Marsha 273
 Singaraja 215
Singer 10
 Sirkulasi politik 106
 sistem 7, 16, 21, 28, 29, 32, 33, 34, 39,
 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55,
 56, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 78,
 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 98, 100,
 131, 144, 153, 159, 167, 168, 172,
 175, 182, 188, 189, 200, 204, 207,
 210, 217, 242, 259, 260
 sistem administrasi 53, 56
 sistem distrik 28, 86
 sistem kampanye 87
 Sistem Kepartaian 34, 268
 sistem pemilu 34, 86, 90, 131, 260
 sistem perpajakan 61
 Sistem Politik Indonesia 270
 skala 7, 44
 skala prioritas 7
 skenario 20, 40, 84, 122, 125, 127
 skenario global 40, 125
 SMPBR 189
social order 42
 Soeharto 33, 166, 182, 198, 201
 Soekarno 21, 160, 185, 186
 Soempah Pemoeda 108
 Soerjadi 160
sofisticated 3
 solidaritas 12, 30, 52, 72, 79, 108, 119,
 125
 soliditas 71, 79, 81
 Sorensen, George 273
 sosial 3, 7, 8, 11, 13, 37, 40, 43, 44, 45,
 47, 48, 49, 51, 52, 53, 65, 80, 82,
 83, 99, 107, 109, 113, 114, 115,
 116, 118, 119, 125, 162, 177, 178,
 179, 183, 185, 186, 188, 211, 232,
 242, 261
 sosialisasi 35, 71, 92, 114, 135, 136, 137,
 237
 sosialisme 21
 Sosiologi Kekuasaan 271
 Sosiologi Kontemporer 272
 Sosiologi Politik 114, 115, 175, 271, 318
 sosiologis 47, 108, 116, 117, 118
 spektakuler 59, 72
 spekulasi 40, 136
 spontanitas 52
 sportivitas 30
srada 177, 178
 ST 21, 120, 121, 122
 stabilitas nasional 109
 stabilitas politik 170
 stakeholder 91, 46, 57, 115, 117
 standardisasi 49
State and Civil Society 268
State and Society in Bali 269
 status quo 142, 143, 182, 200, 213, 231,
 232
 stelsel aktif 217
 ST MPR 21, 121
 strategi fusi 74
 Strategi Pemberdayaan dan Model Desas
 Adat 210
 Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indo-
 nesia 272
 strategis 22, 28, 44, 45, 46, 52, 53, 55,
 79, 81, 82, 86, 90, 100, 126, 197,
 204, 232, 234, 240
strength 114
 struktural 11, 48, 67, 68, 202
 studi banding 257
Studies in Kautilya 273
 Suana 148
 suara DPR 3
 suara rakyat 95, 99
 suara tidak sah 174, 175
 suara Tuhan 99
 Subangun, Emmanuel 273
 subsidi 125
 substansi 7, 37, 40, 52, 64, 97, 103, 104,
 127, 154
 substansial 28, 72, 81, 120, 247
 subvensif 38
 suhu politik 71
 Sukarma 178, 179
 Sukasada 216
 suksesi 7, 14, 16, 100, 125
 suksesi kepemimpinan 7, 14, 16, 125
 Sumber Daya Manusia 271
 sumber kekayaan 55

- suprastruktur 34, 78, 210, 211
supremasi 3, 7, 8, 38, 152, 200, 219, 243
supremasi hukum 3, 7, 8, 38, 200, 219, 243
Surabaya 204
surat peringatan 244
Surbakti, Ramlan 273
Suryaningati, Abdi (ed) 273
Suryawan 195, 246, 247, 248
Susanto-SJ., Budi. (ed) 273
Suseno-Magnis, Fran 273
Suwatha 207, 208, 209
swakarsa 47
Swellengrebel, J.L 274
Syahwat Kekusasaan 267
- T**
- tabuh rah* 117
Tafsir Politik 269
tahapan Pemilu 215
tahta 184
tajen 117
taktis 53, 259
tambal sulam 53
Tanjung Priok 232
tanpa berpihak 202
Tantangan Reformasi 182
Tap MPR 120, 121, 200, 218
Tap MPR No. 16/98 218
Tarif Dasar Listrik 125
tata ruang 45, 114
tattwa 177, 179
Taufik Kiemas 25, 26, 264
TDL 125
technical skill 70, 87
teknologi 48, 82, 186, 188, 203
teknologi canggih 188
telekomunikasi 126
telepon 72, 125, 240, 241, 256
Telkom 253, 256
tembok kekuasaan 38
tempat beribadah 213
temporer 80
teoretikal 70
Teori Budaya 270
Teori Pembangunan 269
Teori Sosial 268
Teori Sosiologi Klasik dan Modern 270
terkontaminasi 16, 169
terkooptasi 155, 257
terompet politik 71, 72
Terorisme 36, 37
teoretical skill 87
Tertib Politik 270
teruji di lapangan 37
testable 23
the end of ideology 78
The Grand Bali Beach 175
the last paradise 43
the morning of the world 43
The Politics of Meaning 269
the world village 124
Thought and Ritual 271
tim akreditasi 229
Time-Dale, A 274
tim independen 88
Tim Investigasi 59
Timor Timur 25
Timpa-Dale.A. (ed) 273
tim sukses 105
tindakan biadab 60
Tingkah Laku Politik 267
tingkat heterogenitas 32
Titian Jalan Demokrasi 271
titik-titik rawan 92
Tjoet Nja Dien 111
Tjok. Pemecutan 207, 208, 209
Tjok Atmaja 264, 265
Tjok Gde Budi Suryawan 246
Tjok Gede Atmaja 246
Tjok Gede Budi Suryawan 195
Tjokorda Swatika 196
TNI 17, 18, 19, 28, 29, 110, 195, 196
TNI/Polri 17, 18, 19, 28, 29
tokoh panutan 263
tokoh reformasi 182, 183
toleransi 60, 218, 225
Toyota 257
TPS 174, 175, 176, 202, 203
track record 146, 147, 153
trade mark 51
tradisi 24, 32, 49, 67, 100, 117, 120, 121, 130
Tragedi Banjar 216
Tragedi Kuta 39, 51
tragedi Kuta 44
Transformasi 53, 74
transformasi 92, 106
Transformasi Ekonomi 274
transformasi politik 92

Transformasi Sosial 268
 Transformasi sosial 53
 Transisi Demokrasi 268
 transparan 14, 25, 41, 56, 58, 87, 180, 182
 transparansi 18, 56, 113, 131
transitional justice 5, 38
 trauma dan dendam politik 16
 trauma politik 37
 trauma psikis 44
 traumatik 48
treatment 114
treck record 87
Treefalding 272
 Triguna-Yudha, Ida Bagus Gde 274
tri hita karana 45
tri mandala 45
 Trisakti 187
 Try Sutrisno 265
 tugas pokok 47, 125
tukang taji 117
 tuntas 2, 5, 8, 59, 60, 61, 109, 118, 178

U

uberman 11
 Udi Prayudi 193
 Ufford-Philip Quarles, Van 274
 UGM 58, 175, 208, 256
 uji kelayakan dan kecakapan 88
 uji publik 57, 58, 87
 uji sahah 71
 ultimatum 82
 Undang-Undang Politik 64
 Undiknas 206
 UNDP 202
 UNFREL 202
 UNHI 193
uniform 10
 Unilever 257
 Uni Soviet. 10
 universalitas 34
 Universalitas nilai demokrasi 99
 Universitas Mahasaraswati 230
 Universitas Ngurah Rai 246
 Universitas Warmadewa 130, 159, 175, 183, 185, 187, 190, 208, 231, 246, 260
 University Network For Free and Fair Election 202
 unjuk kebolehan 68

unpredictable 20
 Unud 182, 193, 201, 240, 241, 245, 256, 259
 Unwar 139, 142, 161, 197, 199, 204, 213, 217, 220, 239, 243, 249, 257
 urgen 37, 73, 74, 164, 178
 UU 28, 30, 31, 37, 64, 68, 75, 77, 86, 88, 90, 96, 97, 120, 184, 189, 212, 215, 246, 247
 UUD 1945 6, 8, 9, 20, 21, 22, 24, 33, 77, 90, 96, 120
 UU No. 12 Tahun 2003 90
 UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah 246
 UU No. 22 Tahun 1999 68, 247
 UU No.3 tahun 1999 tentang Pemilu 215
 UU No. 5 / 1979 212
 UU Otonomi Daerah 68
 UU Pemilu 31, 75, 90
 UU Subversif 37
 UU Susduk 120

V

verifikasi 87, 88, 225
 verifikasi parpol 92
 vertical 32, 73
 vertikal 68, 149
 visioner 12, 16, 53
visous sircle 46
vote getter 130, 131, 132
voting 225
 VOX populi vox Dei 103
 vulgar 48, 142

W

Wacana Sosial-Politik Kontemporer 269
 Wahab 227, 228
 wahana demokrasi 57, 89
 Waisak 227
wait and see 101
 Wapakolda Bali 227, 228
 wakil pemerintah 227
 wakil presiden 28, 29, 33, 86, 90, 95, 96, 97, 100, 103, 105, 106, 122, 265
 wakil rakyat 14, 187
 wali kota 68, 70, 88
 Wanandi, Sofjan 274
 Wapemred Bali Post 182
 warga Negara 101, 104
warning 8, 157

Wayan Kayun 175
Wayan Lasia 229
Wayan Loka 242
Wayan Subawa 258
Wayan Sudirta 230
Wayan Suja 179
Wayan Sukarma 178
weakness 114
Wertheim-F.W 274
wewenang mengurus dan mengelola daerahnya 247
Widminarko 182, 183, 184
William Dunn 52
win-win solution 115
Winanti, Poppy, S. dan Titek, H (ed) 274
Wiratmadja-Adia, G.K 274
Wisnumurti 130, 139, 142, 145, 148, 151, 156, 161, 170, 175, 176, 179, 183, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 198, 200, 202, 204, 205, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 217, 219, 220, 221, 222, 227, 228, 231, 233, 234, 235, 236, 239, 243, 244, 246, 247, 249, 254, 257, 260, 261, 263, 264, 265
Wisnumuti-Oka, A.A.G 274
Wiswa Sabha 227
Wiweka 272
Wiyana 244, 245
Word Cup 30

Y

Yayasan Manikaya Kauci 240
Yeh Malet, Manggis, Karangasem 245
Yonif 741 112, 113
Yunani 99
yuridis formal 130
Yuri Saiful Bahri 227
yurisdiksi 60

Z

zamrud khatulistiwa 107